

SEJARAH NASIONAL INDONESIA IV

Editor Umum

Marwati Djoened Poesponegoro

Nugroho Notosusanto

Direktorat
Kebudayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1982/1983

W

MILIK DEP. P DAN K TIDAK DIPERDAGANGKAN
--

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

IV

Editor :

RZ. LERISSA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1982/1983

TEAM REDAKSI

Ketua : RZ. Lerissa

Anggota : Nana Nurliana

Anhar Gonggong

Wardiningsih

Suharto

KATA PENGANTAR

Sejarah Indonesia pada abad ke XVIII dan XIX ditandai oleh hubungan yang makin intensif antara kekuasaan-kekuasaan tradisional dan kekuasaan asing, dalam hal ini kekuasaan Belanda. Dalam hubungan ini nampak pula, bahwa intensitas hubungan tersebut di tiap-tiap daerah di Indonesia tidak sama. Hal ini terutama disebabkan karena proses historis masuknya pengaruh dan meluasnya kekuasaan Belanda di daerah satu dan lainnya tidak paralel. Dapat pula dikatakan, bahwa tiap-tiap daerah mempunyai sejarahnya sendiri, yang kadang-kadang tidak nampak sama sekali hubungannya dengan daerah lain. Namun dengan menggunakan datangnya pengaruh kekuasaan Barat sebagai aliran pokok (mainstream), dapat dicari hubungan yang terdapat antara daerah-daerah tersebut.

Kekuasaan-kekuasaan tradisional (kerajaan-kerajaan) di Indonesia mempunyai sistem politik dan susunan masyarakat yang berbeda. Sifat kerajaan agraria agak berbeda dengan kerajaan pantai. Ekspansi kekuasaan Belanda di kerajaan pantai nampak agak berbeda dengan di kerajaan pedalaman, meskipun di sana-sini terdapat juga persamaan, seperti taktik Belanda dalam mengadakan campur tangan urusan intern kerajaan. Di daerah Jawa sistem eksploitasi produksi agraris oleh Belanda nampak lebih kompleks daripada di daerah lain.

Kesamaan yang nampak menonjol dari pelbagai daerah kerajaan di Indonesia ialah, bahwa usaha ekspansi kekuasaan Belanda sebagian besar menimbulkan reaksi baik dari penguasa setempat ataupun sekelompok elite dalam kerajaan, seperti para bangsawan atau orang-orang dari golongan agama. Hal ini menunjukkan, bahwa penguasa-penguasa dan rakyat kerajaan berusaha untuk tetap dapat hidup (survive), meskipun harus menghadapi tekanan-tekanan dari kekuasaan Belanda yang adakalanya cukup kuat.

Pokok-pokok pikiran tersebut diharapkan dapat tertuang dalam bab-bab pada penerbitan ini. Sistem politik kerajaan tradisional yang menyangkut aspek-aspek seperti: kedudukan dan kekuasaan raja, susunan birokrasi, sumber penghasilan kerajaan, dan susunan masyarakatnya, diuraikan dengan maksud untuk memberi gambaran tentang struktur kerajaan-kerajaan tersebut. Uraian tentang perkembangan politik kolonial Belanda beserta perubahan-perubahan yang terjadi dikaitkan dengan fikiran-fikiran yang men-

dasari politik tersebut, seperti paham konservatif, liberal, etnis dan seterusnya. Pengetrapan politik kolonial tersebut di dalam masyarakat Indonesia menyangkut pelbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, ketatanegaraan, birokrasi dan lainnya.

Mengingat bahwa tujuan yang paling utama dari politik kolonial Belanda adalah keuntungan ekonomis, maka dalam buku ini disediakan bab khusus untuk menguraikan perkembangan ekonomi Indonesia dalam abad ke XIX. Perkembangan ekonomi ini menyangkut macam-macam sistem yang digunakan oleh pemerintah asing, ialah Inggris dan Belanda, untuk menguasai faktor-faktor produksi agraris, seperti sistem Sewa Tanah (*Land-rente*) dan Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*). Akan diuraikan pula perkembangannya setelah Belanda menganut politik kolonial liberal.

Adalah jelas pula, bahwa penguasa-penguasa tradisional dan rakyat mereka tidak selalu menerima perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, lebih-lebih segi-segi yang memberatkannya, seperti pajak, pengerahan tenaga kerja, pemakaian tanah rakyat dan sebagainya. Di daerah-daerah lain yang merupakan kerajaan pantai, seperti Banjar, Aceh dan Makasar, penguasaan urusan perdagangan bandar lebih diutamakan oleh Belanda daripada langsung mengurus penanaman hasil bumi, seperti yang dilakukan di Jawa. Di daerah-daerah reaksi terhadap usaha ekspansi kekuasaan Belanda seringkali muncul. Berhubung terjadinya ekspansi tersebut tidak sama untuk masing-masing daerah, maka timbulnya reaksi baik berupa perlawanan-perlawanan bersenjata ataupun gerakan-gerakan sosial tidak bersamaan pula waktunya.

Mengenai penentangan pihak bumiputra terhadap Belanda ini kecuali proses perkembangannya, juga diuraikan strukturnya seperti: kepemimpinan, golongan pengikut, sistem perbentengan, persenjataan dan taktik perlawanan. Dalam uraian tentang gerakan sosial juga dikemukakan tipe-tipe dari gerakan, seperti: gerakan melawan pemerasan, gerakan Ratu Adil dan lainnya. Dalam hubungan dengan penentang terhadap kolonialisme sudah barang tentu tidak semua yang terjadi di tanah air kita dapat tercakup dalam uraian. Pemilihan sebagai contoh dari beberapa kejadian tersebut terpaksa dilakukan, meskipun perlu di sini ditandaskan bahwa baik perlawanan besar ataupun gerakan sosial, kapan dan di manapun terjadinya, mempunyai nilai yang sama dalam turut berusaha menentang setiap usaha kolonialisme asing.

Perlu pula diakui, bahwa sebagian besar sumber yang digunakan dalam tulisan-tulisan ini adalah sumber sekunder, meskipun di sana-sini juga digunakan sumber primer. Kemungkinan tidak adanya keseimbangan dalam penggunaan sumber lokal tertulis, disebabkan antara lain oleh terbatasnya kemampuan untuk memperoleh atau menggunakan sumber-sumber tersebut. Dalam batas tertentu diharapkan, bahwa tulisan-tulisan dalam penerbitan ini dapat memberikan gambaran yang agak bulat mengenai Sejarah Indonesia dalam abad ke XVIII dan XIX, baik yang menyangkut segi perkembangannya maupun strukturnya.

Yogyakarta, akhir 1974

F.A. SUTJIPTO

PENGANTAR PADA EDISI YANG DISEMPURNAKAN

Konsep dasar yang dipakai oleh para penulis dan Editor Jilid IV dari edisi pertama pada dasarnya dipertahankan dalam edisi ini. Dengan demikian pembagian thema pokok menjadi empat sub-thema juga dipertahankan sekalipun urutannya mengalami perubahan. Bab I pada pokoknya juga tidak diubah kecuali judulnya yang kini menjadi "Sistem Negara". Pada setiap sistem negara diberi pula kata pendahuluan yang mengandung uraian tentang batas-batas wilayah negara yang dibahas dan nama-nama dari negara-negara lainnya yang terdapat di sekitarnya. Judul jilid ini juga mengalami perubahan menjadi "Indonesia dalam abad 19".

Bab II merupakan Bab III pada edisi lama. Selain judulnya yang diubah menjadi "Perang Melawan Kolonialisme" juga ditambahkan Perang Si Singa Mangaraja ("Tanah Batak") yang tidak dimuat dalam edisi pertama. Bagian-bagian yang mengalami perubahan total adalah Perang Pattimura ("Maluku Tengah"), dan Perang Bone ("Sulawesi Selatan"). Selain itu "struktur kerajaan" dari edisi lama, dimasukkan ke dalam masing-masing perang tersebut. Selanjutnya diusahakan agar di dalam kisah perang, pihak penduduk menonjol sebagai subyek dan pihak lawan nampak sebagai obyek, kecuali dalam bagian "Akhir Perang". Istilah kerajaan yang dipakai dalam edisi lama juga diganti di sini menjadi negara.

Bab III merupakan Bab IV dalam edisi lama. Selain menambahkan beberapa data juga ditambahkan di sini "Gerakan Samin" dan Gerakan Parisihudamdam". "Gerakan Gerakan Sarekat Islam yang merupakan suatu bagian dalam bab ini pada edisi lama ditiadakan dan berdasarkan pertimbangan Editor Jilid V akan dimasukkan dalam Jilid V.

Bab IV yang merupakan Bab II dalam edisi yang lama sama sekali tidak mengalami perubahan kecuali pembagian-pembagiannya dalam seksi-seksi dan struktur kalimatnya.

Di dalam edisi yang disempurnakan ini beberapa gambar dan peta diganti. Bibliografi juga diperluas dengan judul-judul buku ataupun artikel yang tidak dipakai dalam uraian. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar pemakai buku ini bisa mendapat gambaran mengenai banyaknya karangan-karangan dan jenis lainnya yang sudah ada. Pada umumnya judul-judul yang

disebut di sini dapat ditemukan dalam Perpustakaan-perpustakaan di Indonesia seperti Perpustakaan Museum Nasional di Jakarta.

Anggota-anggota team yang diberi tanggungjawab untuk mengerjakan penyempurnaan Jilid IV ini terdiri dari lima orang yaitu Drs. R.Z. Leirissa, M.A., Dra. Nana Nurliana, M.A., Drs. Anhar Gonggong, Dra. Wardiningsih Soerjohardjo, dan Drs. Soeharto.

Ucapan terimakasih terutama ditujukan pada Team Redaksi Edisi Lama yang terdiri atas Drs. F.A. Soetjipto (Ketua), Dr. Thee Kian Wie (Anggota), Prof. Dr. A. Sartono Kartodirdjo (Anggota) dan Drs. Djokosurjo (Anggota).

Jakarta, Maret 1980.

R.Z. Leirissa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
PENGANTAR PADA EDISI YANG DISEMPURNAKAN
DAFTAR SINGKATAN
DAFTAR FOTO DAN GAMBAR
DAFTAR PETA

- BAB I SISTEM NEGARA**
- A. JAWA (TENGAH)**
 - 1. Wilayah**
 - 2. Raja dan Bangsawan**
 - 3. Birokrasi**
 - 4. Masyarakat**
 - B. BALI**
 - 1. Wilayah**
 - 2. Raja dan Bangsawan**
 - 3. Birokrasi**
 - 4. Masyarakat**
 - C. SULAWESI (SELATAN)**
 - 1. Wilayah**
 - 2. Raja dan Bangsawan**
 - 3. Birokrasi**
 - 4. Masyarakat**
 - D. KALIMANTAN (SELATAN)**
 - 1. Wilayah**
 - 2. Raja dan Bangsawan**
 - 3. Birokrasi**
 - 4. Masyarakat**
 - E. SUMATRA (UTARA)**
 - 1. Wilayah**
 - 2. Raja dan Bangsawan**
 - 3. Birokrasi**
 - 4. Masyarakat**

BAB II

PERANG MELAWAN KOLONIALISME

A. MALUKU TENGAH

- 1. Pendahuluan**
- 2. Jalannya Perang**
- 3. Akhir Perang**

B. SUMATRA BARAT

- 1. Pendahuluan**
- 2. Jalannya Perang**
- 3. Akhir Perang**

C. JAWA TENGAH DAN TIMUR

- 1. Pendahuluan**
- 2. Jalannya Perang**
- 3. Akhir Perang**

D. SULAWESI SELATAN

- 1. Pendahuluan**
- 2. Jalannya Perang**
- 3. Akhir Perang**

E. BANJAR

- 1. Pendahuluan**
- 2. Jalannya Perang**
- 3. Akhir Perang**

F. BALI

- 1. Pendahuluan**
- 2. Jalannya Perang**
- 3. Akhir Perang**

G. ACEH

- 1. Pendahuluan**
- 2. Jalannya Perang**
- 3. Akhir Perang**

H. TANAH BATAK

- 1. Pendahuluan**
- 2. Jalannya Perang**
- 3. Akhir Perang**

- BAB III GERAKAN SOSIAL**
- A. GERAKAN MELAWAN PEMERASAN**
 - 1. Pendahuluan
 - 2. Gerakan di Jawa
 - B. GERAKAN RATU ADIL**
 - 1. Pendahuluan
 - 2. Gerakan di Jawa
 - C. GERAKAN SAMIN**
 - 1. Pendahuluan
 - 2. Gerakan di Jawa
 - D. GERAKAN SEKTE KEAGAMAAN**
 - 1. Pendahuluan
 - 2. Gerakan di Jawa
 - 3. Gerakan di Tanah Batak

- BAB IV PERKEMBANGAN EKONOMI**
- A. SISTEM SEWA TANAH**
 - 1. Pendahuluan
 - 2. Pelaksanaan
 - 3. Penilaian
 - B. SISTEM TANAM PAKSA**
 - 1. Pendahuluan
 - 2. Pelaksanaan
 - 3. Pengaruh
 - 4. Penilaian
 - C. SISTEM LIBERAL**
 - 1. Pendahuluan
 - 2. Azas-Azas Liberalisme
 - 3. Jawa Tengah dan Timur
 - 4. Pembangunan Prasarana
 - 5. Sumatra Timur

BIBLIOGRAFI
INDEKS

BAB I

SISTEM NEGARA

1. Wilayah

Dalam abad ke-16 di Jawa terdapat beberapa negara yang berbentuk kerajaan, antara lain Majapahit, Demak, Pajang, Banten, Cirebon, dan Mataram-Islam. Agama Islam berkembang secara berangsur-angsur, mulai dari kalangan rakyat biasa di daerah pesisir pantai Jawa, kemudian ke pedalaman di kalangan raja dan para bangsawan.

Pada masa kekuasaan Indonesia-Hindu, negara Majapahit memegang peranan yang penting di Jawa. Pusat negara Majapahit terletak di daerah Jawa Timur. Kemudian pada masa transisi kekuasaan Indonesia-Hindu ke kekuasaan Indonesia-Islam, pusat kekuasaan beralih dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, mula-mula di pesisir utara, yaitu Demak, tetapi kemudian bergeser lebih jauh lagi ke pedalaman, yaitu Pajang dan akhirnya di Pasar Gede, Mataram.

Bagian ini akan menguraikan perkembangan negara Mataram Islam. Mataram Islam mengalami puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung, raja ketiga, memerintah pada tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Pada waktu itu wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian dari Jawa Barat.

Sebelum VOC menganeksasi wilayah negara Mataram sampai akhir abad ke-17, seluruh wilayah kekuasaan negara Mataram dibagi menjadi beberapa kesatuan wilayah besar yang berkedudukan di kraton sebagai pusatnya. Urutan pembagian wilayah dari pusat ke daerah adalah sebagai berikut : istana atau kraton raja merupakan pusat negara dan terletak di ibukota negara, yang biasa disebut wilayah *Kutanegara* atau sering disingkat menjadi *Kutagara*. Selanjutnya wilayah yang mengitari Kutagara ini disebut wilayah *Negara Agung*. Menurut *Serat Pustaka Raja Purwa* wilayah Negara Agung ini semula dibagi menjadi empat bagian, yang meliputi daerah-daerah Kedu, Siti Ageng atau Bumi Gede, Bagelen, dan Pajang. Pada zaman Sultan Agung, masing-masing daerah tersebut dibagi lagi menjadi dua bagian. Daerah Kedu dibagi menjadi daerah Siti Bumi dan Bumijo, masing-masing terletak di sebelah barat dan sebelah timur sungai Progo, daerah Siti Ageng yang terletak di antara Pajang dan Demak dibagi menjadi daerah Siti Ageng Kiwa dan Siti Ageng Tenggara; daerah Bagelen dibagi menjadi daerah Sewu, terletak di antara sungai Bogowonto dan sungai Donandi Cilacap, dan daerah Numbak Anyar yang terletak di antara sungai Bogowonto dan sungai Progo; adapun daerah Pajang juga di-

bagi menjadi dua bagian, yalah daerah Panumping, meliputi daerah Sukowati, dan daerah Panekar, yalah daerah Pajang sendiri.

Wilayah yang berada di luar Negara Agung, tetapi tidak termasuk daerah pantai, disebut wilayah *Mancanegara*. Karena wilayah ini meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur maka dibagi dalam dua bagian, yalah *Mancanegara Wetan* untuk yang sebelah Timur, sedang yang sebelah Barat disebut *Mancanegara Kilen*.¹ Wilayah kerajaan yang terletak di sepanjang pantai utara disebut wilayah *Pasisiran*. Sebagaimana halnya wilayah *Mancanegara*, wilayah *Pasisiran* juga dibagi menjadi dua bagian, yalah daerah *Pasisiran Wetan* dan *Pasisiran Kilen*.² Batas antara kedua daerah ini adalah sungai Tedunan atau sungai Serang yang mengalir di antara Demak dan Jepara.³

Penggunaan batas alam seperti sungai, gunung, hutan dan lainnya untuk memisahkan antara kesatuan-kesatuan wilayah adalah lazim pada waktu itu. Bahkan untuk kesatuan wilayah desa, pohon besar yang dapat terlihat dari jauh seperti pohon kapas hutan (*randu alas*) banyak digunakan sebagai batas. Untuk mengurus wilayah yang luas tersebut disusunlah jabatan-jabatan pemerintahan, yang secara hierarkis menyilang dari atas ke bawah dan menyebar dari pusat ke daerah. Dalam hubungan ini raja memegang kekuasaan sentral dan berkedudukan di atas pejabat-pejabat birokrasi tersebut.

Sistem pembagian wilayah dalam awal abad ke-18 mengalami perubahan dengan adanya pengaruh kekuasaan VOC. Dalam masa pemerintahan raja-raja yang kemudian menggantikan Sultan Agung nampak kemunduran-kemunduran terjadi. Berangsur-angsur wilayah kekuasaan negara makin menyempit akibat aneksasi yang dilakukan oleh VOC, sebagai imbalan intervensinya dalam pertentangan-pertentangan intern negara Mataram. Setelah Perang Trunojoyo berakhir pada tahun 1678, Mataram harus melepaskan daerah Krawang, sebagian dari daerah Priangan dan Semarang, demikian pula setelah perlawanan Untung Surapati dapat dipadamkan sekitar tahun 1705, daerah Cirebon yang juga mengakui kekuasaan Mataram, juga sisa dari Priangan dan separoh bagian timur pulau Madura dianeksasi oleh Belanda. Selanjut-

-
1. Perincian baik dari daerah *Negara Agung* maupun dari *Mancanegara* dapat dibaca pada *Serat Pustoko Rodjo Pucoro*, dalam J. Brandes, "Register op de proza-omzetting van de Babad Tanah Djawi (uitgave van 1874)", dalam VBG, 51, bagian Empat, 1900 (lampiran II), hal. 151-152, 164-168, 181-182. Juga periksa B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies, II. (Ruler and Realm in Early Java)*, s'Gravenhage, 1959, hal. 179-185.
 2. Perincian daerah *Pasisiran* terdapat dalam *Serat Pocstoko Rodjo Pocworo*, dalam *Ibid.*, hal. 164 -168.
 3. B. Schrieke, *Op. Cit.*, hal. 203.

nya, setelah Perang Cina berakhir pada tahun 1743, seluruh daerah pantai utara Jawa dan seluruh pulau Madura sudah dikuasai Belanda. Wilayah negara makin menyempit dengan berakhirnya Perang Gianti pada tahun 1755, di mana negara Mataram dipecah menjadi dua bagian, yakni Surakarta dan Yogyakarta.⁴ Dalam tahun 1757 dan 1813 wilayah terpecah lagi dengan munculnya kekuasaan Mangkunegara dan Pakualam.

Sementara itu perobahan kekuasaan pada negara-negara di Jawa untuk pertama kali terjadi pada masa Gubernur Jenderal Daendels (1808–1811), yaitu dengan adanya peraturan baru mengenai upacara penerimaan Residen di Istana Surakarta dan Yogyakarta. Menurut peraturan baru ini Residen di negara-negara itu harus diberi penghormatan sebagai wakil dari suatu kekuasaan yang tertinggi dan menempatkannya sejajar dengan raja.⁵ Berarti raja-raja itu diturunkan martabatnya, dari raja merdeka menjadi raja bawahan.

Di Istana Surakarta, peraturan Daendels tersebut diterima, tetapi tidak demikian halnya dengan di Yogyakarta. Sultan Hamengku Buwono II atau Sultan Sepuh yang menentang peraturan ini pada tahun 1810 dipaksa turun dari tahtanya dengan ekspedisi militer yang dipimpin oleh Daendels sendiri.⁶ Sebagai penggantinya, diangkat putra mahkotanya menjadi raja dengan gelar Hamengku Buwono III atau Sultan Rojo. Peristiwa ini memberi kesempatan pada Daendels untuk memaksa Yogyakarta dan Surakarta menerima perjanjian baru pada tahun 1811 yang menyebabkan kedua negara itu kehilangan sebagian dari wilayahnya.

Ketika Inggris merebut Jawa dari tangan Pemerintah Belanda pada tahun 1812, Surakarta dan Yogyakarta ingin memulihkan kekuasaannya kembali seperti semula. Tetapi kenyataannya wilayah kedua negara tersebut makin berkurang. Di Yogyakarta, Sultan Sepuh naik tahta lagi dan berhasil mengerakkan Sunan Surakarta untuk bersama-sama menentang Inggris. Oleh karena itu Inggris mengambil tindakan kekerasan dengan menyerbu Yogyakarta dan memaksa Sultan Sepuh turun tahta. Peristiwa ini berhasil memakan Sunan dan Sultan menandatangani perjanjian baru pada tanggal 1 Agustus 1812,⁷ yang antara lain berisi bahwa Kedu, sebagian dari Semarang, Rembang dan Surabaya diserahkan pada Pemerintah Inggris. Selain itu Sultan harus me-

4. Soekanto, *Sekitar Jogyakarta 1755–1825 (Perjanjian Gianti – Perang Diponegoro)*, Jakarta, 1952, hal. 8–18.
5. *Laporan Politik Tahun 1837 (Staatkundig Overzicht van Nederlandsche Indië, 1837)*, Penerbitan Sumber-sumber Sejarah Arsip Nasional Republik Indonesia, No. 4, Jakarta, 1971, hal. 51
6. *Ibid.* hal. 52-53
7. *Laporan Politik Tahun 1837, Ibid.*, hal. 53-54

nyerahkan sebagian dari wilayah dan kekuasaannya pada Pangeran Notokusumo. Pangeran ini pada tahun 1813 diangkat oleh Pemerintah Inggris menjadi Pangeran Mangkunegara, dengan gelar Pangeran Pakualam.

Ketika pulau Jawa dikembalikan lagi pada Pemerintah Belanda, raja-raja di Jawa berharap dapat memulihkan kekuasaannya, tetapi gagal karena ternyata Pemerintah Belanda memperbaharui semua keputusan Pemerintah Inggris. Berhubung dengan itu timbullah kekecewaan di Istana Yogyakarta dan Surakarta, yang kemudian tumbuh menjadi benih permusuhan menentang pemerintah Belanda. Terutama di Yogyakarta, benih permusuhan makin menjadi besar dan meluas, karena pengurangan wilayah dan kekuasaan yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda makin bertambah, sehingga akhirnya meletus menjadi perang pada tahun 1825, yaitu Perang Diponegoro atau disebut juga Perang Jawa, karena perang meletus di hampir seluruh daerah-daerah di Jawa.⁸

Setelah Perang Diponegoro selesai dalam tahun 1830, baik Yogyakarta maupun Surakarta wilayah kekuasaannya menjadi makin sempit dan makin tergantung pada Pemerintah Hindia Belanda. Kedua negara ini kehilangan kekuasaannya atas daerah Mancanegara, sehingga wilayah kekuasaannya hanya tinggal terbatas pada daerah-daerah Pajang, Mataram, Sukowati dan Gunung Kidul.⁹ Dalam semua soal pemerintahan, baik Sultan maupun Sunan, tidak boleh bertindak sendiri lagi tetapi harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Hindia Belanda. Penghasilan mereka tidak lagi diperoleh dari pemungutan pajak, melainkan digaji oleh Pemerintah Hindia Belanda yang jumlahnya ditentukan dengan perjanjian. Demikian pula dengan penghasilan para bangsawan dan para pembesar lainnya. Keadaan di Yogyakarta baru tenang kembali setelah Pangeran Mangkudiningrat dan Pangeran Prabuningrat pada tahun 1831 ditangkap dan dibuang, karena Pangeran ini dicurigai akan berusaha mengadakan perlawanan terhadap Pemerintah Hindia Belanda.

Di Surakarta, Sunan Paku Buwono IV diam-diam meninggalkan Istana pada bulan Juni 1830, tetapi segera dikejar dan berhasil ditawan di Mancingan. Karenanya Sunan ini dibuang oleh Pemerintah Hindia Belanda ke Ambon. Sebagai gantinya diangkat Pangeran Purboyo dengan gelar Sunan Paku Buwono VII.

Selanjutnya untuk mempertegas batas-batas negara Yogyakarta dan Surakarta, pada tanggal 27 September 1830 diadakan persetujuan dengan Belanda yang isinya menentukan bahwa Sunan Surakarta menguasai Pajang

8. Lihat selanjutnya dalam BAB II.

9. Laporan Politik Tahun 1837. Op. Cit., hal. 56-57

dan Sukowati, sedangkan Sultan Yogyakarta memerintah daerah Mataram dan gunung Kidul.¹⁰

Jelas di sini bahwa dengan tindakan-tindakan Belanda tersebut, maka kekuasaan dan wilayah negara Yogyakarta dan Surakarta di Jawa berkurang dan selanjutnya banyak tergantung pada Pemerintah Hindia Belanda.

2. Raja dan Bangsawan

Raja mempunyai kekuasaan sentral di dalam wilayah negaranya. Kesah-an (*legitimacy*) kedudukan dan kekuasaan raja didapat karena warisan menurut tradisi. Apabila pada masa didirikannya negara oleh Panembahan Senopati pada tahun 1575, otoritas raja lebih banyak didasarkan pada kharisma dan kelebihan kemampuan pribadinya, maka pada masa-masa kemudian otoritas raja telah dilembagakan menjadi tradisi.¹¹ Dengan demikian pengangkatan raja baru, lebih didasarkan pada keturunan atau hak waris menurut tradisi. Hal ini sudah tentu tidak menghilangkan kenyataan, bahwa ada juga di antara raja-raja tersebut yang mempunyai kecakapan memerintah, keberanian dan kepribadian maupun sifat-sifat yang baik.

Menurut tradisi istana, sebagai pengganti raja ditetapkan putra laki-laki tertua atau satu-satunya putra laki-laki dari raja dengan permaisuri (*garwa padmi*). Apabila permaisuri tidak mempunyai putra laki-laki, maka putra laki-laki tertua dari selir (*garwa ampeyan*) dapat diangkat sebagai pengganti raja. Apabila kedua-duanya tidak ada, dapat diangkat saudara laki-laki dari raja, paman atau saudara tua dari ayah raja sebagai pengganti. Penyimpangan dapat terjadi apabila calon yang berhak, tidak memenuhi syarat sebagai raja, seperti mempunyai sakit ingatan atau cacat badan. Penyimpangan dari tradisi, baik disengaja ataupun tidak disengaja dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para bangsawan dan bahkan dapat menjurus ke arah intrik dalam istana dan pertentangan intern para bangsawan.

Dalam hubungan ini kepribadian dan sifat yang baik maupun kecakapan dalam memerintah mempunyai pengaruh besar atas otoritas raja. Dalam keadaan demikian loyalitas baik dari kalangan istana, para pejabat birokrasi dan rakyat pada umumnya dapat terjaga. Sebaliknya, sifat dan tindakan yang tidak baik dari raja dapat menimbulkan ketegangan dalam istana ataupun rasa ketidakpuasan. Tindakan dari raja yang menyinggung golongan ter-

10. Ibid., hal. 60

11. Mengenai ciri-ciri kepemimpinan kharismatis dan otoritas tradisional, periksa R. Bendix, *Max Weber : An Intellectual Portrait*, New York, 1962, hal. 298 dan seterusnya.

tentu dalam masyarakat kerajaan, dapat pula menimbulkan kebencian dan penentangan. Tindakan Amangkurat I dalam tahun 1667 dengan mengasingkan pegawai-pegawai tinggi istana ke suatu desa di luar kota di antaranya adalah Wirojoyo yang menjabat sebagai Tumenggung Kutagara dan Wiromeng-golo seorang adik dari Pangeran Purboyo,¹² membawa akibat timbulnya ke-kecewaan di antara para bangsawan. Kekeruhan ini ditambah dengan pembunuhan terhadap sejumlah ulama yang dituduh menghasut Adipati Anom menentang raja, merupakan salah satu sebab pemihakan Raden Kajoran atau Panembahan Romo pada Trunojoyo untuk meruntuhkan kekuasaan raja.

Raja-raja Mataram memakai gelar *Panembahan*, *Susuhunan*, (*Sunan*) atau *Sultan*. Agama Islam diangkat menjadi agama negara. Pemakaian gelar *Sayidin Panatagama* seperti nampak pada rentetan gelar yang dipakai oleh Susuhunan, raja-raja Surakarta, demikian pula oleh Sultan, raja-raja Yogyakarta, menunjukkan bahwa raja-raja tersebut dianggap sebagai pemuka agama. Penggunaan gelar *Khalifatullah* seperti terlihat pada rentetan gelar Sultan Yogyakarta menunjukkan pula unsur keagamaan dari kedudukan raja.¹³ Dengan tidak mengurangi peranan agama Islam yang kuat dalam kehidupan istana, nampak pula bahwa pandangan terhadap kedudukan raja Mataram masih dilekati oleh unsur-unsur kepercayaan pra-Islam. Sinkretisme ini nampak misalnya pada penarikan garis genealogi raja-raja Mataram ke atas sampai pada dua cabang nenekmoyang, ialah cabang kanan (*panengen*) sampai pada nabi-nabi dalam agama Islam dan cabang kiri (*pangiwo*) yang berakhir pada figur dewa-dewa agama Hindu.¹⁴

Raja dipandang sebagai pusat Kosmos dan dari raja terpancar kekuatan yang berpengaruh pada alam maupun masyarakat. Penempatan raja sebagai keturunan nabi-nabi dan dewa-dewa dimaksudkan untuk memperkokoh kesahan (*legitimacy*) sebagai raja. Anggapan ini dikaitkan dengan kepercayaan magis dari rakyat wahyu raja (*pulung ratu*) dan konsep tentang pewaris keturunan darah raja (*trahing kusuma rembesing madu*). Di kalangan masyarakat Jawa terdapat anggapan, bahwa hanya orang yang masih mempunyai darah rajalah yang dapat menjadi raja. Meskipun seorang *homo novus* sebagai

12. *Dagh Register, gehouden int Casteel Batavia vant passerende door terplaetse als over geheel Nederlandts Indie*, (untuk selanjutnya *Dagh Register*), tanggal 14 April 1667.

13. Mengenai gelar raja-raja Mataram, khususnya raja-raja Surakarta dan Yogyakarta, dalam hubungannya dengan Islam, periksa L.W.C. van den Berg, "De Moham-medaansch-Indie", *BKI*, 53, 1901, hal. 21-25.

14. Periksa *Poeniko Serat Babad Tanah Djawi, wijit saking Nabi Adam doemoegi ing Tahoen 1647*, 's Gravenhage, 1941.

pendiri suatu kerajaan secara lahiriah hanya anak orang tingkat bawahan, namun orang tersebut dianggap tentulah masih keturunan darah dari raja-raja masa lampau. Dalam hubungan ini perlu disebut pola anggapan tentang lahirnya seorang putra raja dengan wanita dari kalangan rakyat biasa, seperti ditemukan dalam cerita *Babad* ataupun dalam cerita pewayangan.

Pandangan rakyat terhadap raja seperti tersebut di atas lebih memperkuat otoritas raja dan sebaliknya memungkinkan raja untuk menuntut loyalitas sepenuhnya dari rakyat. Di dalam kitab *Wulang Reh*, yang menurut anggapan umum dikarang oleh Sunan Paku Buwono IV, tercantum ajaran yang menekankan agar rakyat mengabdikan dengan sepenuh hati pada raja; raja dianggap sebagai Tuhan dan mengabaikan perintah raja sama dengan mengabaikan perintah Tuhan; rakyat digambarkan sebagai sampah terapung di lautan, yang menurut gelombang akan dibawa ke manapun.¹⁵

Ideal mengenai raja yang baik, disarankan untuk menjadi pegangan bagi raja yang memerintah. Ajaran mengenai hal ini terutama tercantum dalam kitab *Asta Brata* yang diambil dari wejangan-wejangan dalam cerita pewayangan.¹⁶ Namun dalam sejarah raja-raja Mataram, nampak bahwa tidak semua dari mereka mematuhi tuntunan itu, dan pula tidak mempraktekkan pedoman cara memerintah yang baik seperti tercantum dalam kitab *Niti Praja*.¹⁷ Sifat personal dari raja sangat menentukan baik dan buruknya pelaksanaan pemerintahan kerajaan. Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kerajaan tercermin dalam kata *ingsun* (aku) di dalam *angger-angger* (peraturan) kerajaan, seperti "*ora ingsun lilani*" (tidak kuperkenankan), "*bakal ingsun patrapi paukuman*" (akan kujatuhkan hukuman) dan sebagainya.¹⁸

Kewibawaan raja diperbesar dengan adanya benda-benda pusaka kraton yang dianggap keramat. Anggapan tentang adanya hubungan mistis antara raja-raja Mataram dengan Ratu Kidul (Dewi Lautan Selatan) menempatkan diri raja tidak hanya sebagai manusia biasa, tetapi manusia yang mempunyai kemampuan dan kekuatan di atas kodrat. Menara (panggung) Sanggabuwana di dalam kompleks istana Surakarta menurut kalangan istana dahulu dipergunakan sebagai tempat pertemuan Sunan dan Ratu Kidul. Tradisi upacara *Labuhan* disertai saji-sajian di pantai laut Selatan, seperti dilakukan oleh Kesultanan

15. *Serat Wulang Reh, Jasan Dalem Sri Susuhunan Pakubuwana IV*, Sala, 1963, hal. 10-11.

16. Soemodirdjo, *Serat Asta Brata Winedar atau Serat Asta Lokapala*, Jogjakarta, 1938.

17. Periksa kitab "Paniti Praja", MS Reksapustaka, No. 20.

18. Periksa kumpulan *Angger-angger* dalam tulisan T. Roorda, *Javaansche Wetten*, Amsterdam, 1944, *passim*.

Yogyakarta, menunjukkan masih dipeliharanya hubungan antara kerajaan manusia dengan kerajaan roh halus (lelembut) tersebut. Anggapan adanya hubungan akrab tersebut diperkuat dengan penciptaan tarian *Bedaya Keta-wang* yang menggambarkan pertemuan antara raja-raja Mataram dengan tokoh mitis tersebut.

Adanya synkretisme antara agama Islam dengan kepercayaan pra-Islam, seperti Hinduisme, Animisme dan Dinamisme di lingkungan kraton, juga nampak pada upacara-upacara lain dari kerajaan, seperti upacara *Grebeg*¹⁹ yang diatuhkan pada hari-hari besar Islam. Penggelaran benda-benda keramat dengan sebutan *Kyai* seperti Kyai Plered (tombak), Kyai Sengkelat (keris), Kyai Tunggul Wulung (bendera), Kyai Gunturmadu dan Nagawilaga (gamelan perayaan Sekaten di Yogyakarta) menunjukkan unsur dinamisme yang mempersonifikasikan kekuatan dalam benda. Bagaimanapun juga semua tradisi dalam istana dimaksud untuk memperkokoh kedudukan raja.

Sudah disinggung di muka bahwa dalam melaksanakan kekuasaannya di wilayah negaranya, raja dibantu oleh pejabat-pejabat birokrasi. Kepala-kepala Daerah sebagai wakil dari raja mendapat sebagian kekuasaan dari raja untuk mengurus dan mengatur wilayah yang ada di bawah yurisdiksinya. Sebagian dari mereka diambil dari lingkungan keluarga terdekat raja, dari para bangsawan lainnya ataupun orang-orang yang berjasa dan mendapat kepercayaan dari raja. Pengangkatan orang-orang yang dekat pada raja dimaksudkan untuk menghindarkan kemungkinan timbulnya sikap penentangan. Nampak jelas bahwa kekuasaan besar dari raja memungkinkannya untuk memilih pejabat-pejabat yang sesuai dengan keinginannya. Dengan kekuasaannya, raja dapat mengangkat, menindak ataupun memecat pejabat-pejabat dalam kerajaan.

Meskipun disamping raja terdapat semacam dewan penasehat yang anggotanya antara lain terdiri dari para pangeran yang telah berpengalaman, namun kekuasaan raja sangat menentukan dalam mengambil keputusan-keputusan penting, seperti dalam pengangkatan dan pemecatan pejabat-pejabat tinggi kerajaan, dalam mengadili kejahatan-kejahatan, dalam mengumumkan perang dan sebagainya. Syarat-syarat pengangkatan dan kenaikan tingkat para pejabat yang terutama adalah kesetiaannya terhadap raja dan jasanya terhadap kerajaan. Dalam "Babad Pacina" disebutkan, bahwa pada waktu Kraton Kartasura diduduki oleh laskar Cina yang dibantu oleh prajurit-prajurit pengikut Raden Mas Gareng pada tahun 1742, Raja Paku Buwono II terpaksa menungsi menuju Ponorogo. Ketika tiba di Magetan, Sunan memerintahkan pa-

19. Mengenai perayaan *Grebeg* antara lain periksa tulisan J. Groneman, *De Garebeg is te Ngoyogyakarta*, Den Haag, 1895.

da Bupati Magetan Citrodiwiryono untuk memanggil Raden Suputro dan Raden Mertoloyo yang waktu itu berada di Madiun. Kedua orang ini oleh Sunan akan diutus ke Surabaya untuk bertemu dengan penguasa di Surabaya, Ki Sawunggaling dan Ki Wirosroyo dan memberitahukan, bahwa Sunan telah meninggalkan Kraton Kartasura. Di dalam surat yang dibawa oleh kedua orang utusan itu juga disebut, bahwa Sultan telah menaikkan pangkat disertai gelar dan nama baru kedua penguasa di Surabaya tersebut. Ki Sawunggaling menjadi Tumenggung Seconegoro, sedang Ki Wirosroyo menjadi Tumenggung Sastronegoro.²⁰ Kenaikkan tingkat tersebut diberikan karena kedua pejabat tersebut selalu menunjukkan kesetiaan pada raja. Fakta lain mengenai pengangkatan orang yang berjasa pada raja dengan pemberian gelar dan nama tertentu terdapat juga pada masa perang melawan Inggris (*Geger Sepel*) di Yogyakarta pada tahun 1812. Karena jasa seorang Kapten Cina bernama Tan Jin Sing pada Sultan cukup pada masa itu, maka pada tahun 1813, Sultan telah mengangkat menjadi Raden Tumenggung Secodiningrat.²¹ Fakta-fakta demikian banyak dapat dijumpai baik dalam sumber Babad maupun dalam sumber Kompeni Belanda. Dalam hal-hal tertentu karena raja tertarik hatinya, maka orang dapat juga mendapat belas kasihan raja untuk diangkat dalam kedudukan yang tinggi (*angsul sihing narpati sinengkakaken ing ngaluhur*). Sebaliknya raja juga dapat menjatuhkan hukuman mati terhadap orang ataupun pejabat yang melakukan kesalahan besar terhadap raja, seperti usaha melakukan pembunuhan terhadap raja atau melakukan pemberontakan.

3. Birokrasi

Dengan melihat kedudukan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang terpisah dari pejabat-pejabat birokrasi di bawahnya, maka secara berturut-turut akan dikemukakan hierarki jabatan-jabatan dengan mengikuti sistem pembagian wilayah. Dalam pemerintahan perlu dibedakan pemerintahan dalam istana (*pepintahan lebet*) dan pemerintahan luar istana (*pepintahan jawi*).

20. "Babad Pacina", milik Wiradipraja (M S Sonobudoyo, Nomor A/2, 11).

21. C. Poensen, "Amengkoe Boewono II (Sepuh), Ngayogyakarta, 's's Tweede Soetan", *BKI*, 43, 1905, hal. 279 dan seterusnya; juga periksa A. van Marle, "De Groep der Europeanen in Nederlands Indie, iets over ontstaan en Groei", *Indonesië*, Thun ke V, Nomor 2, September 1951, hal. 102

Untuk pemerintahan dalam istana pengurusannya dibebankan pada empat orang Wedana Dalam (*Wedana Lebet*), ialah *Wedana Gedong Kiwa*, *Wedana Gedong Tengen*, *Wedana Keparak Kiwa*, dan *Wedana Keparak Tengen*. Sebelum tahun 1744, di atas keempat jabatan Wedana ini, terdapat jabatan Patih Dalam (*Patih Lebet*) yang bertugas mengkoordinasi tugas Wedana-wedana tersebut. Pada masa pemerintahan Sultan Agung pernah Adipati Mandaraka menjabat sebagai Patih Lebet, sedang pada masa pemerintahan Amangkurat I pernah Tumenggung Singaranu diangkat menjadi Patih Lebet.²² Sejak tahun 1755, jabatan Patih Lebet tersebut dihapuskan.²³ Para Wedana Gedong ditugaskan untuk mengurus keuangan dan perbendaharaan istana, sedangkan para Wedana Keparak bertugas mengurus keprajuritan dan pengadilan. Pembagian tugas antara kiwa dan lengan dari kawedanan-kewedanaan tersebut kurang jelas. Para Wedana Lebet ini biasanya memakai gelar Tumenggung atau Pangeran, bila pejabat tersebut masih keturunan raja. Masing masing Wedana Lebet tersebut dibantu oleh seorang Kliwon,²⁴ sering juga disebut *Papatih* atau *Lurah Carik* yang biasanya memakai gelar *Ngabehi*, kemudian seorang *Kebayan*, yang memakai gelar *Ngabehi*, *Rangga* atau *Raden*, dan 40 orang *Mantri Jajar*.

Untuk mengurus pemerintahan di Kutagara raja mengangkat 2 orang Tumenggung. Kedua Tumenggung ini langsung di bawah perintah raja. Rouffaer menyebut jabatan ini sebagai *Administrateur van het kroondomein* (yang mengurus tanah milik raja).²⁵ Kedudukan kedua Tumenggung Kutagara ini cukup penting dan bersama-sama dengan keempat Wedana Lebet mereka merupakan anggota Dewan Tertinggi Kerajaan. Pada jaman Kartasura sekitar tahun 1744 pengurusan daerah Kutagara ditugaskan pada 4 orang pejabat, seorang di antaranya diangkat menjadi kepala (Wedana) mereka.

Wilayah Negara Agung masih termasuk daerah pusat kerajaan. Sudah disebut di muka bahwa wilayah ini dipecah menjadi 8 bagian. Tiap-tiap daerah bagian ini dikepalai oleh seorang Wedana Luar (*Wedana Jawi*). Sesuai dengan

22. *Dagh Register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-Indie*, 31 jilid, Batavia dan Den Haag, 1888 - 1931. Untuk selanjutnya disingkat *Dagh-Register* tahun 1656-1657, hal. 34

23. G.P. Rouffaer, "Vorstenlanden", *Adatrechtbundel*, 34, 1931, hal. 279

24. Kliwon menurut Rouffaer berasal dari kata *liu* = veel = banyak; *Kliwon* = *Hoofd over Velen* (periksa ibid, hal. 291-292). *Serat Wadu Aji* menyebutkan : "Kliwon, tegesipun kapjji, dene winenang anampeni parentah saking Bupati, utawi tegesipun malih kalih ewon, puniko Kabekta saking lenggahipun kala ing kina siti dusun karya kalih ewu; periksa *Serat Wadu Aji* dalam lampiran IV tulisan Brandes, *Op. Cit.*, hal. 192

25. G.P. Rouffaer, *Op.Cit.*, hal. 283

nama daerah-daerah bagian tersebut, maka terdapat sebutan *Wedana Bumi*, *Wedana Bumija*, *Wedana Sewu*, *Wedana Numbak Anyar*, *Wedana Siti Ageng Kiwa*, *Wedana Siti Ageng Tengen*, *Wedana Panumping* dan *Wedana Panekar*. Umumnya *Wedana-wedana* Negara Agung ini mempunyai tempat kediaman di Kutagara. Seperti halnya *Wedana-wedana* Lebet. *Wedana-wedana* Jawi ini masing-masing juga dibantu oleh seorang Kliwon, seorang Kebayan dan 40 orang Mantri Jajar.²⁶ Sebagai koordinator para *Wedana* ini adalah seorang *Patih Jawi*, yang tugasnya tidak hanya mengangkat wilayah Negara Agung, tetapi juga wilayah-wilayah kerajaan yang ada di luarnya. Di tanah-tanah lungguh ini bangsawan yang bersangkutan mengangkat seorang *Demang* atau *Kyai Lurah* sebagai wakilnya.

Daerah-daerah di wilayah Mancanegara, baik Mancanegara Wetan maupun Mancanegara Kilen masing-masing dikepalai oleh seorang atau lebih dari seorang Bupati. Bupati Kepala Daerah ini biasanya memakai gelar Tumenggung atau Raden Arya. Jumlah Bupati yang mengepalai tiap daerah tidak sama, tergantung dari luas atau tidaknya daerah yang diurusnya. Pada masa Pemerintahan Paku Buwono II dari tahun 1726 sampai dengan 1749, daerah Kediri yang meliputi tanah cacah seluas 4.000 *karya* atau bau cukup dikepalai oleh seorang Bupati, antara lain pernah dijabat oleh Tumenggung Katawengan. Sebaliknya daerah Madiun karena lebih luas, yalah meliputi tanah cacah seluas 16.000 *karya*, maka dikepalai oleh dua orang Bupati, yalah Raden Tumenggung Martalaya dan Raden Arya Saputra.²⁷ Daerah yang tidak begitu luas cukup dikepalai oleh seorang Kliwon atau Mantri.

Wilayah Mancanegara Wetan maupun Mancanegara Kilen masing-masing dikepalai oleh seorang *Wedana* Bupati kedudukannya di atas semua Bupati Kepala Daerah yang termasuk dalam wilayah wewenangnyanya. Tugas *Wedana* Bupati yalah mengawasi dan mengkoordinasi semua Bupati bawahannya. Ia bertanggungjawab pada raja atas keberhasilan pemerintahan daerah dan kelancaran pengumpulan penghasilan daerah yang harus diserahkan ke pusat. Fakta sejarah menyebutkan bahwa pada tahun 1677 Mas Tumapel, saudara sepupu Panembahan Mas Giri, menjadi *Wedana* Bupati Mancanegara Wetan, berkedudukan di Jipang.²⁸ Tetapi sekitar tahun 1709 untuk wilayah Mancanegara Wetan telah diangkat Tumenggung Surowijoyo. Setelah Perjanjian Gianti pada tahun 1755 untuk wilayah Mancanegara Wetan bagian dari Kesultanan Yogyakarta, pengurusannya diserahkan kepada *Wedana* Bupati yang berke-

26. *Serat Pustaka Raja Purwara*, dalam J. Brandes, *Op.Cit.*, hal. 156-159.

27. *Ibid.*, hal. 166

28. B. Schrieke, *Op.Cit.*, hal. 161

dudukan di Maospati, Madiun. Raden Ranga Prawirodirjo III, ayah Sentot Alibasah tokoh dalam Perang Diponegoro, adalah salah seorang dari pejabat Wedana Bupati tersebut. Sistem pemerintahan tersebut juga berlaku untuk wilayah Mancanegara Kilen.²⁹

Baik wilayah Pasisiran Wetan atau pun Pasisiran Kilen masing-masing dikepalai oleh Wedana Bupati. Untuk wilayah Pasisiran Wetan, Wedana Bupati berkedudukan di Japara, sedang untuk Pasisiran Kilen berkedudukan di Tegal. Pada masa Perang Trunojoyo sekitar tahun 1677 Adipati Martoloyo menjabat Wedana Bupati Pasisiran Kilen, sedang sekitar tahun 1664 sebagai Wedana Bupati Pasisiran Wetan adalah Tumenggung Martonoto.³⁰ Seperti halnya Wedana Bupati di wilayah Mancanegara, Wedana Bupati Pasisiran bertugas mengawasi dan mengkoordinasi Bupati-Bupati Kepala Daerah yang ada di bawah jurisdiksinya.

Selain memakai gelar Adipati atau Tumenggung penguasa-penguasa daerah Pasisiran juga ada yang memakai gelar Kyai Demang atau Kyai Ngabehi, terutama mereka yang menjabat sebagai Bupati. Sebagai contoh ialah Kyai Ngabehi Wongsorojo, yang menjabat Bupati Semarang sekitar tahun 1657, dan Tumenggung Suronoto yang menjabat sebagai Bupati Demak. Untuk pemerintahan kota di Pasisiran biasanya dipercayakan pada seorang Kepala yang bergelar Kyai Lurah. Pada zaman Sultan Agung di daerah Pasisiran juga terdapat tanah *Lungguh* dari beberapa bangsawan istana. Sebagai contoh daerah Pemalang sekitar tahun 1623 berada di bawah jurisdiksi Pangeran Purboyo, yang pemerintahannya diwakilkan kepada seorang Kyai Lurah,³¹ sedang Pekalongan di bawah jurisdiksi Pangeran Uposonto.³²

Selain jabatan-jabatan Kepala Daerah tersebut di atas, masih terdapat jabatan-jabatan lainnya baik tingkat tinggi, menengah maupun tingkat bawah, yang diserahi tugas-tugas tersendiri dalam birokrasi kerajaan. Pada zaman Mataram Kartasura pada sekitar tahun 1744 terdapat jabatan-jabatan yang diberi tugas khusus untuk mengepalai golongan-golongan rakyat tertentu. Jabatan ini dipegang oleh empat orang Tumenggung,³³ ialah Tumenggung yang me-

29. Mengingat *Serat Pustaka Raja Prawara* menyebut Banyumas meliputi daerah seluas 500 karya, terluas dari daerah-daerah lainnya, maka kemungkinan besar Banyumas menjadi tempat kedudukan *Wedana Bupati Mancanegara Kilen*.

30. B. Schrieke, Op. Cit., hal. 199

31. Ibid., hal. 191

32. Periksa catatan Perjalanan de Haan dalam J.K.J. de Jonge, *De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië*, V. 1870, hal. 30.

33. Orang *Kalang* diberi tugas sebagai tukang kayu, pengangkut barang, kusir pedati dan sebagainya. Mengenai asal-usul, periksa T. Altona, "Over den corsprong der Kalang", *TBC*, 42, 1923, hal. 521 dan seterusnya.

ngepalai 6.000 orang *Kalang*, Tumenggung yang membawahkan 1.000 orang *Gowong*, Tumenggung dari 1.200 orang *Tuwaburu*,³⁴ kemudian Tumenggung yang mengepalai 1.400 orang Kadipaten.

Sebagaimana halnya pejabat-pejabat kepala daerah yang mempunyai staf pegawai yang mengurus tugas-tugas tertentu, para Tumenggung tersebut juga dibantu oleh pejabat-pejabat bawahan. *Serat Wadu Aji* dan *Serat Raja Kapa-kapa* memberikan uraian terperinci nama-nama pegawai (punggawa) raja dalam kraton yang mempunyai tugas tertentu di pelbagai bidang pekerjaan.³⁵ Di bidang keagamaan terdapat jabatan-jabatan *Pengulu*, *Katib*, *Modin*, *Naib* dan *Suranata*. Pejabat-pejabat keagamaan tersebut di dalam kerajaan Mataram disebut *abdi dalem Pametakan* atau *Mutihan*.

Pengulu istana merupakan jabatan tertinggi dalam keagamaan. Di dalam istana, Pengulu diberi tugas untuk memimpin upacara-upacara keagamaan, berdoa untuk keselamatan negara dan keluarga raja, menguatkan dalam upacara pelantikan raja baru, memberikan pengajaran agama pada kerabat raja, dan sebagainya. Meskipun dalam menjalankan tugas seringkali berada di dalam kraton, namun tempat kediaman Pengulu ini biasanya di dekat Mesjid Besar Negara yang berada di dekat alun-alun. Di dalam kraton terdapat mesjid khusus untuk para punggawa dan keluarga raja.

Jabatan keagamaan ini juga terdapat di unit administrasi tingkat bawahannya, seperti Kawedanaan-Bupati, Kabupaten dan di Kelurahan atau *Patinggen*. Dibandingkan dengan Pengulu yang ada di daerah-daerah, Pengulu istana dipandang sebagai *Pengulu Ageng* (Pengulu Besar). Dalam pandangan orang Jawa, ulama-ulama kraton ini kecuali mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai soal-soal agama, juga dianggap orang yang mempunyai magis, orang yang keramat. Ulama-ulama istana juga dianggap mahir dalam ilmu nujum, ilmu mantera, ilmu gaib dan sebagainya.³⁶ Di dalam Perang Cina di Kartasura, peranan Haji Mahbud dan Haji Mataram sebagai penafsir mimpi disebut-sebut, yaitu waktu pasukan Kartasura akan menyerang benteng Kompeni di Semarang.³⁷

34. Tugas orang Gowong antara lain adalah membuat kerangka rumah dan bangunan lain. Orang *Tuwaburu* adalah punggawa raja yang ditugaskan menangkap binatang buas, termasuk harimau.

35. Periksa *Serat Wadu Aji*, dalam J. Brandes, *Op. Cit.*, hal. 190-201; juga *Raja Kapa-kapa*, dalam *Ibid.*, hal. 186-189.

36. "Buku Isi Tetedakan Pranatan Dalem tuwin Serat Warni-warni tumrap Nagari Surakarta", MS Radyapustaka No. 165, hal. 23.

37. "Babad Pacina", MS Sanabudaya Nomor A/2, 75a.

Pengaruh para ulama istana ada kalanya begitu kuat sehingga dapat mempengaruhi juga politik pemerintahan raja. "Babad Pakepung" menyebutkan betapa kuatnya pengaruh 4 orang ulama kraton yang bernama Bahman, Nursaleh, Wirodigjo dan Panengah pada diri Sunan Paku Buwono IV.³⁸ Pengaruh kuat para ulama juga nampak pada bidang kemiliteran. Nasehat para ulama sangat diperlukan untuk menentukan hari atau saat penyerangan terhadap musuh, karena ulama-ulama istana juga dianggap mahir dalam ilmu menghitung saat (*ngelmu petungan*).

Dalam membicarakan ulama-ulama dalam birokrasi negara ini masih perlu disinggung ulama-ulama yang mengepalai daerah *Perdikan*. Mereka ini diberi tugas oleh raja untuk mengurus pekerjaan tertentu. Ulama yang mengepalai desa *Perdikan Mutihan* ditugaskan untuk memelihara tempat ibadat seperti masjid, langgar dan untuk memberi pelajaran agama di daerahnya. Ulama yang mengepalai desa *Perdikan Pakuncen* mendapat tugas dari raja sebagai juru kunci, untuk memelihara kuburan keluarga raja. Di samping itu masih terdapat bentuk perdikan lain yang mempunyai kewajiban non-religius.³⁹ Pengangkatan seorang ulama menjadi kepala desa perdikan berdasarkan pelbagai motif. Ada yang karena jasa ulama tersebut pada raja, seperti dapat menyembuhkan penyakit raja atau keluarganya; karena kemahirannya dalam bidang agama sehingga raja tertarik padanya atau ada kalanya karena hubungan perkawinan antara raja dengan anak atau keluarga ulama tersebut. Meskipun tidak seperti ulama-ulama birokrasi tingkat Kelurahan, ulama-ulama kepala desa *Perdikan* tergolong juga abdi dalam raja. Penghasilan mereka berupa gaji, tetapi hasil bumi atau pun penghasilan lain dari daerah *Perdikan*.

Jabatan penting lainnya di dalam kraton ialah jabatan *Pujangga*. Pujangga ini adalah pejabat yang mempunyai keahlian dalam pelbagai bidang pengetahuan, seperti dalam sastra, adat tradisional, seni, sejarah, ngelmu Jawa, bahkan juga mempunyai pengetahuan cukup tentang agama. Oleh raja ia diberi tugas menulis seluk-beluk yang berhubungan dengan raja, kraton, maupun negara, seperti misalnya menulis genealogi raja, menyusun syair (*tembang*) mengenai peristiwa-peristiwa dalam kraton, menulis cerita sejarah (*Babad*), juga menulis ramalan, filsafat, petuah-petuah cerita pewayangan dan lain sebagainya. Di antara pujangga-pujangga terkenal dapat disebut antara lain Yosodipuro dan Ronggowarsito dalam kraton Surakarta.

38. "Babad Pakepung", MS Sanabudaya Nomor 127, 7a; juga periksa C. Poensen, "Mangkoeboemi, Ngayogyakarta's eerste Soeltan", *BKI*, 3, 1901, hal. 333

39. F. Fokkens Jr., "Vrije Dessas op Java en Madoera", *TBC*, 31, 1886, hal. 486 dan seterusnya.

Di bidang pengadilan dalam istana terdapat jabatan *Jeksa*. Jabatan ini termasuk di bawah wewenang Wedana-wedana Keparak. Di dalam sidang pengadilan istana Jaksa mengemukakan bukti-bukti kesalahan-kesalahan dari terdakwa (pesakitan) dan mengajukan tuntutan-tuntutan. Sidang pengadilan diadakan di ruang (bangsal) khusus yang disebut *Bangsal Pancaniti* dan dihadiri oleh raja dan para pangeran yang telah berpengalaman sebagai penasihat raja. Setelah mendengar pembelaan dari pihak terdakwa dan kemudian pendapat-pendapat dari para pangeran, akhirnya raja setelah melakukan *semadi* (mengheningkan cipta sebentar), lalu menjatuhkan vonis.⁴⁰ Sebagai pelaksana hukuman mati terdapat jabatan *Mertalulut* dan *Singanegara*. Mertalulut mempunyai tugas melaksanakan hukuman mati dengan jerat tali, seperti hukuman gantung. Singanegara bertugas menghukum mati dengan senjata tajam, seperti menusuk dengan keris, tombak atau memenggal dengan pedang.

Untuk mengurus penghasilan raja dilakukan antara lain oleh pejabat *Pemaosan* dan *Melandang*. Jabatan-jabatan ini termasuk di bawah wewenang Wedana-wedana Gedong. Pemaosan mempunyai tugas mengumpulkan pajak tanah, sedang Melandang bertugas mengurus pungutan hasil bumi yang diserahkan ke kraton. Sebagian pejabat-pejabat lainnya, Pemaosan dan Melandang juga mempunyai bawahan yang membantunya.

Selain itu masih ada kelompok pekerja yang ditugaskan untuk membuat barang-barang tertentu atau pun perlengkapan lain untuk keperluan istana. Mereka adalah *abdi dalem Gending*, yang bertugas untuk membuat gamelan, *Kemas* untuk membuat barang-barang perhiasan dari emas, *Genjang* sebagai pekerja yang membuat barang-barang dari selaka, *Gemblak* sebagai pekerja yang membuat barang-barang dari kuningan, *Sarawedi* sebagai pengasah intan dan berlian. Kemudian, perlu juga disebut *Abdi Dalem Pande* yang ditugaskan membuat barang-barang dari besi, *Palingga* sebagai pembuat batu bata, *Jlagra* sebagai tukang pembuat barang dari batu, *Undagi* sebagai pembuat dan pengukir barang-barang dari kayu dan *Gerji* sebagai tukang jahit istana.

Di samping itu terdapat juga kelompok pekerja yang diberi tugas untuk membersihkan komplek dalam istana inti (*lebet cepuri*) ialah *abdi dalem Kemit-Bumi*, sedang pekerja yang membersihkan komplek di luar istana ditambah lagi dengan tugas sebagai pengangkut barang adalah pekerja *Gladag*. Ke-

40. Gambaran mengenai jalannya pengadilan secara mendetail pada zaman Sultan Agung, yang merupakan model dari cara pengadilan kerajaan-kerajaan sesudahnya periksa Catatan Perjalanan R.V. van Goens dalam J.K.J. de Jonge, Op. Cit., V, 1870.

lompok-kelompok pekerja tersebut masing-masing dikepalai oleh pejabat yang biasanya berpangkat Lurah dan pembantunya yang berpangkat *Bekel*.

Susunan pejabat-pejabat dalam rumah tangga istana, dalam ukuran yang kecil juga ditiru oleh Kepala-kepala Daerah, seperti Wedana-Bupati, juga oleh bangsawan-bangsawan di daerah. Demikian pula susunan birokrasi dalam unit administrasi tingkat atas terdapat miniaturinya dalam unit-unit administrasi tingkat di bawahnya. Pada tingkat Kelurahan atau Petinggen juga terdapat pejabat-pejabat yang mengurus pekerjaan-pekerjaan khusus, seperti soal pengairan, keamanan dan lainnya. Yang bertindak sebagai sekretaris Lurah adalah Carik, yang sekaligus menjabat sebagai wakilnya apabila Lurah tidak ada di kelurahan. Sebagaimana halnya pada unit administrasi tingkat atasan, di Kelurahan selain pejabat-pejabat yang mengurus soal-soal sekuler, juga terdapat pejabat-pejabat dalam bidang keagamaan, seperti Kaum, Modin, atau pun Naib.

Dalam menguraikan jabatan-jabatan birokrasi masih perlu disinggung jabatan-jabatan kemiliteran. Sebelum pengaruh kekuasaan Belanda merembes di lingkungan istana, susunan jabatan kemiliteran Mataram masih menggunakan sistem tradisional. Gelar kepangkatan dalam kemiliteran (keprajuritan) disusun menurut hierarki dari atas ke bawah, sambil terdapat pangkat Senapati, Panji, Lurah dan *Bekel* prajurit. Tetapi setelah pengaruh Belanda masuk dalam lingkungan istana, gelar-gelar kepangkatan dalam sistem kemiliteran Belanda juga dipergunakan, seperti Kolonel, Letnan Kolonel, Mayor, Kapten, Letnan dan seterusnya. Keadaan demikian nampak jelas terutama pada susunan *legiun* Mangkunggoro dan Pakualam, juga pada beberapa gelar kepangkatan keprajuritan di istana Surakarta dan Yogyakarta.

Sebelum terdapat pengaruh Belanda dalam susunan kemiliteran kerajaan, raja mempunyai prajurit tetap yang terutama bertugas sebagai penjaga istana. Prajurit ini merupakan prajurit profesional yang mendapat gaji dan jaminan untuk hidup dari istana. Di antara prajurit tersebut ada yang dipilih jadi prajurit pengawal pribadi raja. Di samping itu bila diperlukan, raja dapat mengerahkan laskar secara *militie* di seluruh wilayah kekuasaannya. Adanya pengerahan laskar-laskar daerah tersebut diuraikan dengan jelas dalam kitab-kitab Babad. Pada masa Sultan Agung pernah terjadi pengerahan laskar dari desa-desa, seperti desa-desa antara Trayem (sebelah barat daya Muntilan) dan Pingit untuk diberangkatkan menyerang daerah Jawa Timur (*Bang Wetan*).

Menurut persaksian dr. de Haan, yang pada tahun 1622 sebagai duta VOC mengunjungi istana raja di Kerta, dikatakan bahwa pada waktu ia sampai di daerah antara Trayem dan Pingit, ia tidak menjumpai orang laki-laki kecuali yang lanjut usianya. Ia mendapat keterangan bahwa orang laki-laki

yang masih kuat diharuskan berkumpul di alun-alun Kerta, untuk selanjutnya diberangkatkan perang.⁴¹ Pada masa Amangkurat I, untuk menghadapi pasukan KraengGalesong dalam masa Perang Trunojoyo, pernah raja memerintahkan laskar Mancanegara untuk berangkat. Ketika ternyata pasukan Mancanegara di bawah Raden Panji Kartosulo ini tidak berhasil,⁴² raja kemudian memberangkatkan pasukan Pasisiran dipimpin oleh Prawirotaruno.⁴³ Waktu Paku Buwono II akan menyerang benteng kompeni Kartasura, ia telah mengerahkan pasukan-pasukan daerah. Dalam *Babad Pacina* disebut terhimpunnya laskar daerah Sewu, Numbakanyar dan pasukan Mancanegara.⁴⁴

Pasukan-pasukan daerah tersebut dipimpin oleh Kepala-kepala Daerah setempat atau orang lain yang ditunjuk. Dalam hubungan ini dapat dijelaskan bahwa Kepala-kepala Daerah kecuali bertugas dalam bidang pemerintahan adakalanya juga diberi tugas kemiliteran. Senapati perang sering diangkat secara mendadak oleh raja, berhubung ada serangan musuh atau pengiriman ekspedisi militer. Dalam Perang Diponegoro (1825-1830) perlawanan-perlawanan yang berkobar di daerah-daerah, seperti perlawanan di daerah Semarang yang dipimpin oleh Pangeran Serang, perlawanan rakyat di daerah Kertasono oleh Bupati Kertosono dan perlawanan yang berkobar di daerah Madiun dipimpin oleh Bupati Kertodirdjo. Sultan Agung waktu akan menyerang Kompeni Batavia pada tahun 1628, ia telah mengangkat Tumenggung Baurakso, Bupati Kendal, sebagai Senapati Perang. Pemilihan Senapati Perang dapat juga jatuh pada bangsawan keluarga dekat dari raja, seperti Pangeran Sujonopuro, Pangeran Uposonto dalam perang terhadap Kompeni Batavia pada tahun 1629. Demikian pula penunjukkan pangeran-pangeran dari kraton Yogyakarta seperti Pangeran Mudaningrat dan Pangeran Panular menjadi pemimpin pasukan untuk melawan Diponegoro.

Di samping prajurit profesional, raja juga mempunyai petugas mata-mata (*telik sandi*) untuk mengawasi tindakan para pejabat dalam kerajaan. Mata-mata ini tidak hanya terdapat di daerah pusat, tetapi juga disebar ke daerah-daerah. Khusus untuk menjaga keamanan umum di dalam kerajaan

-
41. Periksa "Verbaal, gehouden door Dr. de Haan, als afgezant van den Gouverneur-Generaal Jan Pieterz. Coen, namens de Vereenigde Oost-Ind. Comp. aan den Panembahan van Mataram, in 1622", dalam J.K.J. de Jonge, *Op. Cit.*, IV, 1869, hal. 299, dan seterusnya.
 42. J.J. Meinsma, ed., *Babad Tanah Djawi* (prosa), I, 1903, hal. 292-294; juga periksa H.J. de Graaf, "De opkomst van Raden Troenodjojo", dalam *Djawa*, 20, 1940, hal. 74
 43. J.J. Meinsma, ed., *Op. Cit.*, hal. 294-299; H.J. de Graaf, *Loc. Cit.*
 44. *Periksa Babad Pacina*, milik Djajadiputra. M S Sunabudaya No. A/2, 45a.

juga terdapat petugas kepolisian, yang di dalam kerajaan Surakarta dan Yogyakarta dalam abad ke-18 dan 19 dikenal dengan nama *Abdi Dalem Gunung*. "Serat Angger Gunung" yang dikeluarkan pada masa itu dimaksud untuk mengatur keamanan dalam wilayah kerajaan, dan mengurus soal-soal mengenai kejahatan yang berupa pembegalan, pencurian, pembunuhan, pelanggaran perjanjian hutang piutang dan lain sebagainya.⁴⁵ Petugas *Gununglah* yang diharuskan mengurus dan menyerahkan fihak-fihak yang tersangkut kepada dinas yang bertugas memeriksa dan mengadili.

Pejabat-pejabat birokrasi tidak mendapat imbalan jasa berupa gaji, tetapi sebagai pengganti jerih payah dari raja mereka mendapat *gaduhan* atau peminjaman tanah, sebagai tanah lungguh. Dari hasil bumi tanah tersebut para pejabat dapat membiayai keperluan hidupnya. Sudah barang tentu tidak semua hasil tanah lungguh tersebut menjadi bagian dari pejabat tersebut. Sebagian dari hasil harus diserahkan kepada kas kerajaan. Tidak hanya para pejabat birokrasi yang mendapat imbalan jasa berupa tanah lungguh, tetapi para bangsawan keluarga raja juga mendapatnya. Dalam *Serat Pustaka Raja Purwa* disebutkan, bahwa nenek raja (Ratu Eyang) mendapat tanah lungguh sama dengan tanah lungguh ibu dari raja (Ratu Ibu) dan dari isteri raja (Ratu Kenca) ialah masing-masing 1.000 karya, sedang tanah lungguh Adipati Anom adalah seluas 8.000 karya.⁴⁶ Masing-masing Wedana Lebet mendapat tanah lungguh seluas 5.000 karya. Tanah lungguh wedana-wedana Jawi tidak sama luasnya, tetapi tergantung dari luas daerah yang diperintahnya. Sebagai contoh misalnya Wedana Bumi dan Wedana Bumija masing-masing mendapat 6.000 karya, sedang Wedana Siti Ageng Kiwa dan Wedana Siti Ageng Tengen masing-masing mendapat 10.000 karya.⁴⁷ Baik Patih Lebet maupun Patih Jawi masing-masing mendapat 20.000 karya.

Bahwa jabatan lain yang lebih rendah juga mendapat tanah lungguh sebagai imbalan jasa, termuat dengan terperinci dalam *Serat Pustaka Raja Purwa*. Antara lain dapat disebut seperti jabatan *Pecat Tanda* yang mendapat tanah lungguh 475 karya; Tanda Mantri mendapat 475 karya; Rangka mendapat 350 karya; Demang mendapat 200 karya, sedang Pangalasan mendapat

45. Mengenai "Serat Angger Gunung", di samping "Serat Angger" lainnya, seperti "Serat Angger Nawala Pradata Dalem" dan "Serat Angger Sedasa", tercantum dalam buku T. Roorda, *Javansche Wetten*, Amsterdam, 1844. Mengenai pembunuhan dalam pasar misalnya, periksa "Serat Angger Gunung", fasal 83 dalam T. Roorda, *Op.Cit.*, hal. 211

46. Periksa *Serat Pustaka Raja Purwa* dalam J. Brandes, *Op. Cit.*, hal. 147, juga Serat Wadu Aji dalam *Ibid.*, hal. 192

47. *Pustaka Raja Purwa*, *Loc. Cit.*; Serat Wadu Aji, *Loc. Cit.*

112 karya.⁴⁸ Mungkin sekali tenaga-tenaga yang belum merupakan pejabat tetap, dalam pengertian masih dalam status belajar (*magang*), mendapat sekedar imbalan jasa dengan hasil bumi atau dalam bentuk uang, terutama sewaktu peredaran mata uang mulai meluas dalam abad ke-19.

Sementara itu hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah selalu diusahakan agar dapat berjalan dengan baik. Salah satu syarat yang penting untuk menciptakan hubungan baik antara pemerintah pusat kerajaan dan pemerintah di daerah-daerah adalah tetap adanya kewibawaan raja di satu pihak dan tetap terpeliharanya loyalitas penguasa-penguasa daerah di lain pihak. Dalam hubungan ini, raja mengadakan seleksi terhadap orang-orang yang akan diangkat sebagai Kepala Daerah, Loyalitas terhadap raja menjadi syarat mutlak setiap pengangkatan. Dalam sejarah kerajaan Mataram nampak sekali, bahwa hubungan antara pusat dan daerah tidak selalu berjalan baik. Hal seperti ini terjadi terutama apabila raja yang sedang memerintah melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari syarat-syarat yang diharapkan untuk pemerintahan dan penggunaan kekuasaan dengan baik. Di lain pihak dapat pula terjadi bahwa ketegangan antara pusat dan daerah disebabkan adanya keinginan penguasa daerah untuk melepaskan diri dari kekuasaan pusat. Keadaan seperti itu dapat diketahui misalnya dalam jaman pemerintahan Sultan Agung, pada waktu Adipati Pragola dari Pati berusaha untuk melepaskan diri dari pusat dengan mengadakan penentangan terhadap raja.

Oleh karena adanya kemungkinan-kemungkinan timbulnya penentangan dari penguasa daerah, maka raja mengadakan sistem pengawasan yang teliti. Keharusan bupati-bupati daerah untuk menghadap raja pada hari-hari upacara *Grebeg* adalah salah satu cara untuk mengetahui loyalitas mereka. Tidak hadir dalam upacara tersebut tanpa alasan yang jelas, akan menimbulkan kecurigaan pada diri raja. Apalagi bilamana ketidak hadiran itu terjadi sampai berkali-kali tanpa keterangan. Dalam menghadapi keadaan seperti itu raja biasanya mengurus seorang pesuruh (*gandek*) untuk menanyakan sikap sebenarnya dari penguasa daerah tersebut. Di samping *gandek* adakalanya raja mengirimkan *telik sandi*, khusus untuk menyelidiki tingkah laku dari pejabat yang dicurigai. Apabila ternyata bupati daerah tersebut melakukan persiapan-persiapan untuk mengadakan perlawanan terhadap raja, raja mengirimkan seorang utusan yang sekaligus menjadi kepala (*senapati*) dari pasukan bersenjata yang menyertainya. Utusan ini diberi tugas oleh raja untuk menginsaf-

48. Pustaka Raja Puwara, Op.Cit., hal. 147-148

kan bupati yang akan memberontak tersebut, tetapi apabila usaha itu gagal ia diberi kuasa oleh raja untuk menundukkannya dengan kekuatan senjata. Type utusan seperti ini, juga disebut *duta ngrampung* (duta yang bila perlu menundukkan dengan perang), banyak dapat dijumpai dalam sejarah kerajaan Mataram. Bagaimana pun juga tindakan tersebut merupakan salah satu cara untuk mengadakan pengawasan terhadap penguasa-penguasa daerah dan menghancurkan kekuatan-kekuatan yang akan menentang kekuasaan raja.

Di samping keharusan penguasa-penguasa daerah untuk menghadap raja sebagai bukti loyalitas pada waktu-waktu yang ditentukan, keharusan memberi upeti kepada raja juga merupakan cara untuk mengadakan pengawasan. Penyerahan upeti (*glondong pengareng-areng*) kepada raja merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

Cara lain yang dilakukan untuk mengecilkan kemungkinan timbulnya sikap penentangan terhadap raja adalah perwakilan politik. Penguasa daerah yang cukup kuat dan mencoba untuk melepaskan diri, oleh raja didekati dan diminta untuk datang ke kraton. Penguasa daerah tersebut disuruh tinggal lebih lama di kraton dan diizinkan untuk kawin (*mendapat triman*) dengan seorang putri kraton. Ketika Madura ditaklukkan oleh Sultan Agung pada tahun 1624 seorang pangeran Madura bernama Prasena, yang dikhawatirkan pada waktu kemudian akan memperkuat diri lagi untuk mengadakan penentangan, oleh raja diharuskan tinggal di kraton Mataram. Di kraton, Prasena mendapat perlakuan baik dan dikawinkan dengan putri kraton Ratu Ibu. Baru setelah terbukti menunjukkan loyalitas pada raja, Prasena diperbolehkan memerintah Madura, bahkan diberi nama baru Pangeran Cakraningrat (I).⁴⁹

Untuk menghindarkan kemungkinan timbulnya kekuasaan yang kuat dari bupati-bupati daerah, pemindahan tugas seringkali dilakukan. Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa kemungkinan timbulnya penentangan di daerah-daerah yang lebih jauh dari kraton adalah lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah yang ada di dekat kraton. Oleh karenanya pengawasan terhadap penguasa daerah yang jauh dari pusat dilakukan lebih ketat. Dapat dibayangkan bahwa kekuasaan raja terasa makin menipis di daerah-daerah yang lebih jauh letaknya. Penguasa-penguasa daerah mempunyai kekuasaan dan pengaruhnya cukup besar di daerah yurisdiksinya. Kehidupan penguasa daerah adalah mirip dengan kehidupan raja dalam ukuran lebih kecil. Mereka

49 Kesetiaan Pangeran Cakraningrat I terhadap raja Mataram terbukti, bahwa ia gugur dalam menjalankan perintah raja untuk bertempur melawan pemberontakan Pangeran Alit di Alun-alun Pleret pada tahun 1647; periksa R. Maurenbrecher "Tjakra (adi) ningrat, Vorstenhuis van Madoera", *TBG*, 2, 1889, hal. 294

juga mempunyai lambang-lambang kebesaran dan mempunyai pengikut bersenjata. Sering diadakannya pemindahan tugas adalah cara yang efektif untuk menghalangi makin besarnya kekuasaan bupati daerah.

Fakta-fakta historis dalam abad ke 17 sangat jelas memberikan bukti, justru karena pada masa itu pengaruh VOC terhadap kebijaksanaan politik raja belum terasa. Antara lain dapat disebut pemindahan-pemindahan tugas yang kerap kali dilakukan bagi penguasa daerah di Jepara. Pada tahun 1647 Bupati Wedana Pasisiran Tumenggung Wirosetyo telah menggantikan penguasa yang lama Tumenggung Mertonoto, tetapi pada tahun 1653 Wirosetyo telah dipindahkan lagi untuk memegang jabatan lain ialah menjadi penguasa di Tegal. Setelah untuk beberapa waktu berkuasa di Tegal Wirosetyo dipindahkan lagi ke Jepara. Tetapi kemudian ternyata bahwa ia dipindahkan lagi untuk memangku jabatan baru di kraton, sedang sebagai penguasa baru di Jepara diangkat Reksomenggolo, Namun baru menduduki jabatan itu beberapa waktu lamanya Reksomenggolo telah dipindahkan untuk diganti oleh Wirodikoro. Pada waktu kemudian Wirodikoro tidak mendapat perhatian raja dan pada tahun 1677 diganti oleh Wongsodipo.⁵⁰

Sudah disebutkan, bahwa raja mempunyai orang-orang yang ditugaskan sebagai *telik sandi* di daerah-daerah. Di samping itu pengiriman pejabat-pejabat istana ke daerah-daerah dimaksud pula untuk mengetahui dari dekat keadaan pemerintahan daerah. Pejabat-pejabat tersebut diberi tugas juga meneliti cara kerja penguasa daerah dan memperingatkan apabila mereka mengabaikan tugas-tugas yang harus dilakukan, seperti tugas pengumpulan pajak-pajak yang sudah ditentukan diserahkan ke pusat. Sebagai ilustrasi ialah apa yang dilakukan oleh dua pejabat pusat Nitinegoro dan Wirojoyo pada tahun 1664, yang telah diperintahkan oleh raja Amangkurat I untuk melawat ke daerah-daerah pesisiran mulai dari Gresik sampai Jepara, dengan tugas untuk memaksa semua bupati pesisiran agar menyerahkan bea-cukai yang didapatnya ke kas kerajaan.⁵¹

Teranglah bahwa pelbagai cara telah dilakukan oleh raja sebagai penguasa pusat kerajaan untuk menjaga hubungan yang stabil antara pusat dan daerah. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa daerah yang dapat menggoyahkan hubungan pusat dan daerah akan mendapat hukuman dari raja. Pembiayaan hidup raja beserta keluarganya, demikian pula pejabat-pejabat dalam istana tergantung pada penghasilan yang dikumpulkan dari daerah-

50 B. Schrieke, *Op.Cit.*, hal. 198

51 *Dagh-Register*, 1664, hal. 520

daerah, dalam bentuk penyerahan hasil bumi atau pajak ke kas kraton. Namun sebagai balas jasa raja, maka ia dengan kekuasaannya memberi perlindungan, memelihara keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah kekuasaannya. Di samping itu pemerintah pusat mengambil-alih kesukaran-kesukaran yang tidak dapat dihadapi sendiri oleh pemerintah daerah, seperti misalnya tertimpa bahaya alam, timbul percekocokan antara penguasa daerah satu dengan yang lain, kedatangan gerombolan penjahat yang mengganggu keamanan rakyat suatu daerah dan lain sebagainya. Pemerintah pusat memberi fasilitas berupa pembuatan bangunan-bangunan umum yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah seperti pembuatan jembatan-jembatan besar, jalan-jalan besar, gudang-gudang bandar dan lainnya.

Untuk memelihara tata-tertib di seluruh wilayah kerajaan, diciptakan peraturan-peraturan (*angger-angger*) yang harus ditaati oleh seluruh penduduk. Ketentuan dalam *Serat Angger* yang menyebutkan, bahwa orang yang bepergian harus membawa surat keterangan (layang padang),⁵² tidak lain adalah untuk menertibkan dan memudahkan pengawasan penduduk yang melawat dari daerah satu ke daerah lainnya. Sudah disinggung pula di muka bahwa *Abdi Dalem Gunung* yang disertai tugas kepolisian akan menangani dan mengurus kejadian-kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan penduduk. Dengan demikian nampak bahwa terdapatlah pertukaran jasa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meskipun sering kali nampak pula bahwa dalam pemerintahan seorang raja tuntutan pada arus jasa ke pusat lebih besar daripada apa yang diberikan oleh raja kepada daerah.

4. Masyarakat

Secara garis besar masyarakat dalam kerajaan Mataram, termasuk juga setelah menjadi kerajaan-kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, dapat dibagi menjadi dua bagian : Pertama ialah lapisan atas atau disebut lapisan orang besar (*wong gede, priyayi luhur*) yang sebagian besar termasuk golongan yang memerintah. Lapisan yang kedua adalah lapisan bawah, ialah rakyat biasa (*wong cilik, kawula alit*) yang jumlahnya jauh lebih besar dari lapisan atas dan merupakan golongan yang diperintah. Lapisan atas meliputi raja beserta para bangsawan keturunan raja dan pejabat-pejabat tinggi kerajaan. Pejabat-pejabat birokrasi di unit pemerintahan tingkat terbawah seperti di Kelurahan termasuk lapisan wong cilik. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat pejabat-pejabat birokrasi tingkat menengah yang mempunyai status sebagai priyayi juga, meskipun lebih rendah dari lapisan atas yang disebut di muka. Termasuk

52 Periksa T. Roorda, *Op.Cit.*, *passim*.

dalam kategori ini adalah pejabat-pejabat birokrasi tingkat menengah pada dinas-dinas dalam pemerintahan pusat kerajaan ataupun pada unit pemerintahan daerah kabupaten.

Nampaklah bahwa lapisan atas terdiri dari golongan bangsawan keturunan raja, bangsawan karena pengangkatan, juga pejabat-pejabat birokrasi tingkat atas. Dari golongan keturunan darah raja masih dibagi-bagi menurut derajat keturunan, yang masing-masing mempunyai status dan prestise sendiri dalam masyarakat.⁵³ Dapat dimengerti bahwa dalam masyarakat kerajaan, status priyayi menjadi idaman setiap orang, justru karena status priyayi dianggap lebih tinggi dan terhormat daripada status golongan lainnya. Kecuali bangsawan keturunan dari raja-raja Mataram, di daerah-daerah terutama di daerah Pesisiran terdapat bangsawan keturunan dari dinasti sebelumnya.

Di samping itu dalam masyarakat juga terdapat golongan-golongan seperti golongan pedagang, petani, pekerja kerajinan, buruh dan budak. Pada masa kerajaan Mataram golongan petani merupakan jumlah yang terbesar, mengingat sifat agraris dari kerajaan tersebut. Merekalah sebenarnya yang menghasilkan produksi untuk kebutuhan bahan makan seluruh penduduk. Namun dalam sistim status yang berlaku pada waktu itu mereka termasuk golongan bawah. Kedudukan pedagang dalam masyarakat kerajaan masih di bawah kedudukan pejabat-pejabat atau *abdi dalem raja*. Kedudukan sebagai priyayi atau *abdi dalem* merupakan hal yang ideal bagi anggauta masyarakat. Adanya anggapan ini, maka kadang kala pedagang kaya berusaha mempunyai hubungan lebih erat dengan priyayi, terutama melalui tali perkawinan. Dengan demikian diharapkan bahwa status pedagang tersebut turut terangkat.

Golongan pekerja kerajinan meliputi mereka yang berusaha dalam pembuatan barang-barang kesenian seperti ukir-ukiran, perhiasan, pertenunan dan lainnya. Masih dapat juga disebut adanya pengusaha-pengusaha tradisional yang membuat alat-alat rumah tangga, genteng, batu-bata, alat-alat dari besi dan lainnya. Produksi mereka merupakan barang dagangan baik melalui pemesanan ataupun dengan menjajakannya di pasar-pasar. Perusahaan-perusahaan tradisional ini mempunyai buruh-buruh sesuai dengan keahliannya, baik berasal dari lingkungan desa sendiri ataupun dari luar. Termasuk golongan buruh adalah mereka yang bekerja demi mendapatkan upah, seperti buruh pengangkut di pasar-pasar, di bandar-bandar sungai, demikian pula buruh penggarap sawah.

53 *Adatrechtbundel*, 14, (Java en Madocra), 's Gravenhage, 1917, 137 dan seterusnya. Juga "Javaansche Titels", *TNZ*, 4, 1846, hal. 254, dan seterusnya.

Meskipun jumlahnya terbatas, terdapat pula dalam masyarakat apa yang digolongkan sebagai budak. Hidup mereka tergantung pada tuannya, baik karena akibat hutang-piutang, ataupun karena hal lain, seperti bekas tawanan perang. Perlu juga disebut golongan yang dicela oleh masyarakat seperti pembegal, pencuri, brandal dan sebagainya. Mereka kebanyakan hidup tidak menetap dalam suatu desa, tetapi berpindah-pindah. Adakalanya menetap secara ilegal dalam desa atau menetap dalam hutan-hutan atau gua-gua yang tidak jauh letaknya dari desa.

B. B A L I

1. Wilayah.

Menjelang pertengahan abad ke-19 di Bali terdapat sejumlah negara, masing-masing mempunyai raja dan pemerintahan sendiri. Di pantai utara, memanjang dari Tanjung Pasir di sebelah barat sampai ke Tanyar (sebuah kota di sebelah timur laut gunung Batur) terdapat negara Buleleng. Di ujung timur pulau ini terdapat negara Karangasem, dan di pantai tenggara terdapat negara-negara Klungkung dan Gianyar. Sebelah selatan, negara **Badung**, sedangkan di daerah pantai barat daya terdapat negara Jembrana, Tabanan, dan Mengwi. Satu negara lagi yaitu Bangli, terdapat di tengah pulau ini.

Di antara raja-raja dari negara-negara tersebut di atas, raja Dewa Agung dari Klungkung diakui sebagai raja tertinggi oleh hampir seluruh negara di Bali, karena ia selain sebagai raja, juga menurut adat diakui sebagai pimpinan agama di seluruh Bali.

Wilayah kekuasaan raja-raja Bali pernah tidak terbatas pada daerah Bali saja, tetapi sampai di pulau Lombok. Seluruh pulau yang disebutkan terakhir ini yang terdapat 4 negara yaitu : Karangasem (Singasari), Mataram, Pagesangan, dan negara Pagutan, sejak tahun 1740 sampai tahun 1838 menjadi negara vasal dari kerajaan di Bali. Akan tetapi seluruh Wilayah Lombok lepas dari tangan raja Bali setelah salah satu raja di Bali dapat dikalahkan oleh raja Mataram tahun 1838.

Daerah kekuasaan tiap-tiap negara dibagi dalam bagian-bagian wilayah yang masing-masing dikepalai oleh seorang raja bawahan, *Pamade* yaitu bangsawan keluarga dekat dari raja. Sebagai contoh ialah negara Buleleng, dibagi dalam wilayah-wilayah : Singaraja, Tejakula, dan Banjar; negara Badung dibagi menjadi tiga wilayah, ialah : Den Pasar, Pamecutan, dan Kesiman.

Pembagian suatu negara atas wilayah-wilayah itu di dasarkan atas batas alam. Sebagai contoh, negara Klungkung dibagi dalam 2 bagian, yaitu wilayah yang berada di sebelah timur dan sebelah barat Tukad Unda. Negara Karang-

asem dibagi dalam 2 bagian, yaitu wilayah sebelah timur dan sebelah barat bukit Penyu. Untuk mengurus wilayah-wilayah ini, raja bawahan atau *Pamade* dibantu oleh pejabat-pejabat tertentu. Nama jabatan-jabatan tersebut dibeda-bedakan antara negara yang satu dengan lainnya. Mengenai nama jabatan-jabatan ini akan diuraikan di belakang.

2. Raja dan Bangsawan.

Raja-raja di Bali memakai gelar *Anak Agung, Cokorda, Ida Cokorda* atau lainnya. Di Wilayah negaranya, raja dihormati sebagai penguasa tertinggi. Kekuasaan raja diperoleh karena keturunan.

Kekuasaan raja cukup besar untuk dapat mengumpulkan pasukan rakyat bersenjata di dalam keadaan perang. Dalam keadaan damai, untuk memelihara loyalitas rakyat terdapat raja, ada suatu tradisi yang disebut *ngarebeg*. Di dalam upacara *ngarebeg* penduduk laki-laki di wilayah negara datang berkumpul dengan membawa senjata mereka masing-masing dan mengadakan parade pasukan bersenjata di hadapan raja dan para pembesar. Tradisi ini selain untuk menunjukkan kekuasaan raja juga dimaksudkan untuk memelihara perasaan tanggungjawab rakyat terhadap keselamatan negara.

Kekuasaan raja juga nampak di bidang lain, seperti pada pengerahan tenaga rakyat untuk memperbaiki bendungan. Di Bali masalah pengairan merupakan masalah penting bagi kerajaan. Pengaturan pengairan untuk tanah persawahan dengan sistem *subak* menyangkut segi kehidupan pokok dari rakyat Bali. Di Badung, pengaliran air untuk sawah-sawah di seluruh wilayah tergantung dari 5 buah bendungan besar, yaitu bendungan Kadewatan, Mambal, Praupan, Ongan, yang semuanya di Tukad Ayung, dan bendungan Pegat di Tukad Yeh Pegat. Tiga di antara bendungan-bendungan tersebut terletak di luar batas negara Badung, sebaliknya dua bendungan lainnya yang terletak di wilayah negara, tidaklah hanya mengairi sawah-sawah di wilayah negara Badung saja, tetapi juga mengairi sawah-sawah di wilayah negara Gianyar dan Mengwi. Jelaslah bahwa dalam urusan pengairan diperlukan kerja sama antara negara satu dengan negara lainnya.

Apabila ada bendungan yang rusak, maka raja-raja yang berkepentingan mengumumkan *gebug gumiyan* kepada seluruh rakyat mereka. Meskipun pengertian *gebug gumiyan* adalah semacam "dalam keadaan perang", namun dalam hubungan ini dapat diartikan bahwa negara dalam keadaan bahaya. Setelah ada pengumuman tersebut, seluruh rakyat laki-laki diwajibkan berkumpul untuk segera *gugur gunung* memperbaiki bendungan tersebut. Meskipun bekerja dalam *gebug gumiyan* ini merupakan tugas untuk kepentingan umum dengan pengerahan penduduk *banjar-banjar* desa (*kerja sasaradan*), namun

karena tugas tersebut menyangkut pula keselamatan negara, maka dari sudut ini *ayahan gebug gumiyan* juga bersifat tugas wajib negara. Di negara Karang-
asem, *ayahan* tersebut disebut *ayahan laku sembah*, dan di negara Badung di-
sebut juga *ayahan gebug gumiyan* atau *ayahan babanjaran*.

Kekuasaan raja juga nampak dalam situasi perang. Apa bila raja meng-
umumkan perang, penduduk laki-laki di seluruh wilayah negara yang masih
kuat diwajibkan datang dengan membawa senjata mereka masing-masing. Me-
reka dimasukkan dalam kelompok-kelompok pasukan di bawah pimpinan
kepala-kepala pasukan yang ditunjuk oleh raja. Pengerahan tenaga dari rakyat
juga sering dilakukan untuk keperluan upacara-upacara kebesaran yang diada-
kan oleh raja atau keluarga raja. Ada kalanya juga diadakan pengerahan te-
naga untuk membantu kelancaran upacara keagamaan seperti *pitra-yadnya*.
Dengan melihat hal-hal tersebut di atas teranglah bahwa kekuasaan raja ter-
hadap rakyatnya, cukup besar. Dalam bidang politik raja berkuasa untuk me-
ngambil keputusan-keputusan seperti mengadakan perjanjian dengan keraja-
an lain ataupun kekuasaan luar, mengumumkan perang dan damai, di samping
kekuasaannya untuk mengangkat, memindah ataupun memecat penjabat-pen-
jabat birokrasi kerajaan.

Raja-raja bertempat tinggal di dalam puri (istana) bersama-sama dengan
keluarga dekat dari raja (bangsawan). Di dalam puri raja mempunyai *abdi-abdi*
yang diberi tugas tertentu. Pada saat-saat diadakan upacara di dalam istana,
raja dihadap oleh para *punggawa* kerajaan, baik yang berasal dari dalam kota
kerajaan maupun dari daerah-daerah.

Di dalam puri terdapat *abdi* yang mempunyai keahlian di dalam bidang
seni,⁵⁴ seperti *sangging* yang ahli dalam ukiran-ukiran dan membuat patung.
Ia ditugaskan menghias puri dan rumah-rumah bangsawan keluarga raja. Para
Undagi druwa mendapat tugas membuat bangunan-bangunan dan barang-ba-
rang dari kayu, seperti yang terdapat di puri Kerajaan Klungkung. Di puri Gi-
anyar terdapat kelompok *abdi pangentengan* yang diberi tugas membuat gen-
teng untuk keperluan puri. Kelompok-kelompok petugas tersebut masing-ma-
sing dikepalai oleh *prebekel*. Di dalam puri terdapat pula kelompok *prebekel-
en gong* yang disertai tugas mengurus gamelan istana. Kelompok *prebekel pa-
ngobatan* bertugas mengurus obat senjata api. Kelompok *prebekel pangawin*
dengan tugas membawa tombak waktu mengiringkan raja. Kelompok *pre-
bekel luput senapan* ditugaskan sebagai pengiring raja bersenjatakan senapan.

54. Di dalam *Babad Buleleng* disebutkan adanya pertunjukan wayang yang dilakukan
oleh dalang Ki Pun Gulyang, bertempat di puri Ki Gusti Agung Pahang. Periksa
P.J. Worsley, *Babad Buleleng*, The Hague, 1972, hal. 191.

Selain itu masih terdapat kelompok-kelompok petugas lain.

Para abdi yang bekerja untuk kepentingan puri biasanya disebut *pangayah saironing ancak saji*. Di samping itu terdapat para *abdi* yang bekerja di luar puri yang disebut *truna manca jabaning ancak saji*. Di puri Krambitan kelompok abdi yang disebut belakangan ini selain ditugaskan bekerja di luar puri, juga diberi tugas bekerja di puri raja atasannya di Tabanan. Kelompok pekerja dalam puri yang di beberapa kerajaan juga disebut *panjeron* mempunyai tempat tinggal di sekitar puri dan mendapat kebutuhan hidup sehari-hari (*pecatu*) dari puri. Masih perlu disebut abdi raja yang menjadi *pengayah kadalem* yang diberi tugas untuk menjaga pesanggrahan raja. Sebagai penghasilan, mereka juga mendapat sebidang tanah sebagai pecatu. Pangayah kedalem diberi tugas juga untuk menjaga rumah-rumah raja dan para pembesar kerajaan.

Sebagaimana di singgung di muka, sistem penggantian raja di Bali didasarkan atas keturunan. Biasanya pengganti raja yang meninggal adalah putra laki-laki tertua atau satu-satunya putra laki-laki yang lahir dari permaisuri yang berasal dari golongan bangsawan (ksatria). Ada kalanya apabila putra laki-laki lebih dari seorang, raja memilih putra yang dicintai dan dianggap cakap sebagai calon penggantinya. Adalah menjadi adat kebiasaan di Bali, bahwa putra mahkota baru aktif menjadi raja setelah upacara pembakaran jenazah dari raja yang meninggal, selesai. Apabila putra mahkota yang menggantikan masih di bawah umur, biasanya diwakili oleh ibunya atau salah seorang bangsawan yang dipilih oleh para *punggawa pedanda*.

Dapat pula terjadi berhubung putra mahkota belum dewasa, dibentuk suatu dewan perwakilan yang terdiri dari para bangsawan dan *punggawa* istana. Di Kerajaan Bangli pernah terjadi bahwa yang menggantikan raja adalah saudara dari raja yang meninggal. Di samping itu, pernah pula terjadi, berhubung putra mahkota masih kecil kekuasaan kerajaan untuk sementara dipegang oleh suatu dewan perwakilan yang anggotanya terdiri dari 5 orang paman dari raja yang meninggal. Teranglah bahwa meskipun penggantian raja yang meninggal dapat dilakukan dengan pelbagai cara, namun pemegang kekuasaan baik yang tetap maupun yang sementara selalu terdiri dari bangsawan keluarga dekat dari raja.

3. Birokrasi

Untuk menjalankan pemerintahan di seluruh wilayah suatu kerajaan, raja dibantu oleh para pejabat pemerintahan yang secara hirarkis menduduki fungsi tertentu dalam birokrasi kerajaan. Sebagai pusat pemegang kekuasaan

adalah raja, yang di dalam mengambil kebijaksanaan dalam pemerintahan didampingi oleh sebuah Dewan Kerajaan yang bernama *Pasamuán Agung*. Tugas pokok Pasamuán Agung adalah memberi nasehat dan pertimbangan pada raja dalam memecahkan persoalan-persoalan sulit yang dihadapi oleh pemerintah dan ikut membantu dalam penyusunan undang-undang kerajaan. Di samping itu Pasamuán Agung juga disertai tugas untuk mengurus hubungan dengan penguasa-penguasa di luar kerajaan. Di Kerajaan Bangli Pasamuán Agung sekaligus berfungsi sebagai Dewan Keluarga Raja. Di kerajaan lain di samping raja, terdapat juga penguasa pembantu raja yang mengurus pemerintah di daerah tertentu di wilayah kerajaan dan mempunyai punggawa serta penjabat *manca* sendiri. Di beberapa kerajaan penguasa pembantu raja tersebut disebut *made* atau *pamade*. Kerajaan Tanan pernah mempunyai seorang penguasa pembantu seperti itu ialah I Gusti Ngurah Made Kaleran.

Di dalam melakukan pekerjaan sehari-hari raja dibantu oleh seorang *Bagawanta*. Di bawah raja terdapat jabatan *patih*, *prebekel*, atau *pembekel kota* dan punggawa-punggawa daerah. Di negara Badung, di bawah raja terdapat jabatan *patih* yang merangkap sebagai jaksa atau *sedahan gede*. Jabatan yang terakhir ini juga sering disebut *penyarikan gede*. Ada kalanya juga merangkap sebagai *pangulun subak*. Sesuai dengan pembagian wilayah kerajaan, punggawa-punggawa diberi kekuasaan oleh raja untuk memerintah di daerah-daerah dan membawahi penjabat-penjabat pemerintahan sampai di tingkat desa. Punggawa-punggawa ini kedudukannya setingkat dengan Kepala Distrik. Di Buleleng punggawa disebut *pembekel gede*, sedangkan di Buleleng dahulu hanya cukup disebut pambekel. Mereka kebanyakan mempunyai darah keturunan raja dan juga mendiami rumah tempat tinggal yang disebut puri. Di Buleleng dan Jembrana, jabatan pambekel adalah sebagai kepala antara tingkat distrik dan desa, sedangkan wakil-wakil punggawa yang bertugas di desa disebut *klian manca*.

Penjabat yang menghubungkan raja dan masyarakat pengairan adalah kepala pengairan yang disebut *sedahan gede* atau *sedahan agung*, juga sering disebut *panyarikan gede*. Di bawah jabatan ini terdapat jabatan *sedahan tembuku* yang bertugas mengawasi pengaliran air ke sawah-sawah dan menerima pajak pemakaian air. Di bawahnya terdapat jabatan *klian subak* yang ditugaskan langsung mengatur pengaliran air ke sawah-sawah dan mengurus administrasi pemasukan uang dari pemakai. Karena masalah pengairan ini menyangkut kebutuhan masyarakat desa, maka pada hari-hari tertentu diadakan rapat untuk memecahkan kesulitan-kesulitan yang timbul. Biasanya rapat semacam itu diadakan pada tiap 35 hari sekali yang dijatuhkan pada hari *Anggara*

Kasih atau *Buda Kliwon*. Apabila ada warga desa yang tidak datang pada rapat tersebut, ia dikenakan denda.

Di beberapa daerah, kepala desa disebut prebekel. Di dalam menjalankan pemerintahan desa, prebekel didampingi oleh dewan orang-orang tua yang disebut *duhuan desa*. Di beberapa desa yang bertindak sebagai pengurus desa adalah sejumlah warga desa yang cukup tua. Dua orang di antaranya yang usianya lebih lanjut dari lainnya dipilih sebagai *rama* atau *prewayah*. Dalam menjalankan tugas, *rama* desa dibantu oleh antara lain : *kubayan*, *bau*, *singgukan*, *pangabin* dan *pangenem*. Beberapa desa merupakan suatu *banjar* yang dikepalai oleh seorang *klian banjar*, sering juga disebut *penyarikan*. Klian banjar ini dipilih dari dan oleh anggota masyarakat *banjar*. Dalam mengurus kepentingan masyarakat banjar, klian banjar dibantu oleh beberapa *juru arah* atau *saya* yang terutama bertugas sebagai pesuruh untuk menyampaikan perintah-perintah atau pemberitahuan dari klian kepada anggota masyarakat banjar. Di desa sering ada pertemuan yang disebut *pasangkepan desa*, sedangkan di wilayah banjar pada waktu-waktu tertentu diadakan pertemuan yang disebut *pasangkepan banjar*. Pasangkepan banjar juga diadakan tiap 35 hari sekali dan biasanya dijatuhkan pada hari *Anggara Kasih* (Selasa Kliwon), dan Sabtu *Kliwon*.

Pejabat-pejabat kerajaan seperti telah disebut di atas secara hirarkis melintas dari atas ke bawah dan masing-masing mengurus tugas-tugas yang sesuai dengan wewenangnya. Terlihatlah adanya 2 jalur hirarkis dari atas ke bawah, yaitu di satu arah menuju ke masyarakat desa dan di lain arah menuju ke masyarakat pengairan. Masing-masing arah dilengkapi dengan susunan birokrasi yang sesuai dengan wewenangnya. Pejabat-pejabat tersebut diangkat oleh raja atau wakilnya yang diberi wewenang untuk melakukannya atas nama raja. Kecuali tugas-tugas administratif para punggawa, prebekel, dan sedahan bertanggungjawab atas penjagaan keamanan di wilayah mereka. Di dalam hal keamanan sebenarnya para kepala tersebut hanya mengawasi dan mengatur saja, karena pada dasarnya penjagaan umum adalah langsung menjadi tanggungjawab dari seluruh rakyat.

Di batas-batas desa terdapat rumah-rumah penjagaan (*pagebagan*) guna menertibkan dan mengawasi orang-orang yang ke luar masuk dari desa satu ke desa yang lain. Dalam peraturan mengenai banjar tercantum juga ketentuan mengenai penjagaan terhadap tahanan atau tawanan (*magebagan beban-dan*). Di tiap-tiap desa terdapat kantong desa (*kulkul*) yang dipukul pada waktu akan mengumpulkan penduduk desa. Dari jenis pukulan tersebut dapat diketahui oleh penduduk desa peristiwa apa yang sedang terjadi, seperti ada pembunuhan, pencurian, kebakaran atau peristiwa kawin lari. Apabila men-

dengar kulkul berbunyi, penduduk desa terutama orang laki-laki diwajibkan ke luar rumah dan bersama-sama mengatasi bahaya tersebut. Barangsiapa tidak mau datang berkumpul, oleh desa dijatuhi hukuman. Akan lebih berat apabila di antara penduduk desa ada yang menjadi kurban waktu mengatasi bahaya tersebut.

Penjagaan keamanan juga diadakan di daerah pengairan. Untuk keamanan tersebut maka pengawasan dan penjagaan (*tilikan*) pada subak merupakan keharusan, terutama guna mencegah adanya pencurian air. Di desa-desa daerah Jembrana terdapat penjaga keamanan (*pacalang*) khusus untuk ternak, sedangkan di Karangasem terdapat kelompok penjaga keamanan hutan yang disebut *langlang alas*. *Sekaha gulungan* yang terdapat di daerah Nusa Penida adalah semacam polisi ternak yang berhak mengadili bila terjadi pencurian ternak dari penduduk ddesa.

Tugas kepolisian untuk keamanan untuk seluruh wilayah kerajaan tidak hanya menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan, tetapi juga yang menyangkut politik. Dalam hubungan ini raja-raja dan para pembesar dalam kerajaan-kerajaan Bali mempunyai petugas mata-mata yang disebut *dolop* atau *pacalang*. Petugas-petugas ini disebar ke daerah-daerah untuk mengawasi kemungkinan timbulnya penentangan terhadap raja ataupun hal-hal yang membahayakan kerajaan. Petugas khusus semacam ini di kerajaan Tabanan disebut *pangruruh* atau *jejeneng*.

Sifat religius dari penduduk Bali sangat tebal. Oleh karenanya kedudukan para pendeta agama baik Siwa atau Buda sangat terhormat. Di dalam kerajaan-kerajaan tugas-tugas yang bersifat keagamaan menduduki tempat yang penting pula. Di puri-puri terdapat pedanda-pedanda yang ditugaskan memimpin upacara-upacara keagamaan seperti pelantikan raja baru, pembakaran jenazah raja dan keluarganya, upacara pada hari-hari besar keagamaan dan pemujaan pada dewa-dewa. Raja mempunyai tempat-tempat pemujaan dengan pendeta-pendeta khusus yang mengurusinya. Pendeta-pendeta tidak hanya terdapat di pusat-pusat kerajaan tetapi juga di daerah-daerah sampai pada kesatuan wilayah kecil tingkat desa. Dapat dikatakan bahwa tiap-tiap desa di Bali mempunyai tempat pujaan yang diurus oleh pendeta beserta pembantu-pembantunya.

4. Masyarakat

Meskipun tidak setajam pembagian kasta di India di Bali terdapat juga penggolongan penduduk menjadi 4 kasta (*catur warna*, *catur wangsa*, atau *catur janma*), ialah kasta-kasta brahmana, ksatria, weisya, dan sudra. Termasuk golongan brahmana adalah para resi baik dari agama Siwa atau Buda:

golongan ksatria, meliputi raja, para bangsawan dan keturunannya; golongan weisya, mencakup para petani terhormat yang masih keturunan kebayan dan para seniman; golongan sudra termasuk di dalamnya para petani kecil, pedagang, rentenir, nelayan dan lainnya.

Golongan brahmana adalah golongan yang terhormat dalam masyarakat Bali. Golongan ini dapat dibagi 2, yaitu para Brahmana Siwa dan brahmana Buda. Dari segi silsilah, golongan brahmana Siwa dianggap masih keturunan dari pendeta Mirarta, seorang anak dari dangi yang Asmaranata dalam jaman Bali kuna. Adapun para brahmana Buda dianggap masih keturunan dari Dangiyang Asmaranata juga melalui garis keturunan Dangiyang Astapaka. Dibanding dengan yang menurunkan brahmana Siwa dan yang menurunkan brahmana Buda lebih muda satu derajat keturunan. Dangiyang Astapaka dikatakan bertempat tinggal di Budakling di daerah Karangasem. Adapun Dangiyang Asmaranata dianggap masih keturunan Empu Barada.

Pendeta Nirarta yang juga disebut Bagawan Dwijendra atau Padanda Sakti Wau Rawuh mengadakan perkawinan dengan putri-putri dari beberapa dangiyang dan menurunkan cabang-cabang keturunan yang mempunyai sebutan sesuai dengan nama tempat tinggalnya. Oleh karenanya golongan brahmana Siwa di Bali dibedakan menurut cabang nenek moyang menurunkan, seperti *Brahmana Kamenuh*, *Brahmana Kamiten*, *Brahmana Manuala*, *Brahmana Mas*, dan *Brahmana Antapan*. Brahmana yang belum menjalani pelantikan (*madiksa*, *mapadgala*, *mawinten*) disebut *Brahmana Welaka*, sedangkan setelah dilantik menjadi pendeta ataupun pedanda mendapat sebutan *Brahmana Sulinggih* atau *Sang Gede*. Keturunan dari brahmana menggunakan sebutan *Ida*. Apabila anak itu lahir dari istri yang berasal dari golongan brahmana, ia mendapat sebutan *ida bagus* dan apabila putri menggunakan sebutan *Ida Ayu* atau (*dayu*). Menurut urutan kelahiran, anak-anak laki-laki tersebut mendapat sebutan panggilan : *Ida Wayan*, *Ida Nyoman*, *Ida Made*, dan *Ida Ketut*. Sebutan *Ida Made*, *Ida Nyoman*, dan *Ida Ketut* juga digunakan untuk anak-anak brahmana yang lahir dari istri kasta yang lebih rendah.

Golongan ksatria dapat dibedakan dalam 3 tingkatan, yaitu golongan *ksatria dalem*, golongan *predewa*, dan golongan *pangkalan*, *prebagus* atau *presangiang*. Anak laki-laki dari *ksatria dalem* yang lahir dari istri dari kasta atas apabila menjadi raja ia mendapat gelar Cokorda. Anak-anak lainnya yang tidak dipilih menjadi raja termasuk golongan *predewa*. Apabila anak itu laki-laki memperoleh sebutan *I Dewa* dan apabila wanita mendapat sebutan *I Dewa Ayu*. Anak-anak dari Cokorda yang lahir dari istri padmi juga memakai gelar Cokorda, sedangkan anak-anak yang lahir dari istri selir (*panawing*) me-

makai gelar I Dewa atau *Anak Agung*. Selanjutnya anak dari I Dewa yang lahir dari istri padmi juga bergelar I Dewa, sedangkan yang lahir dari istri *panawing* memakai gelar *Anak Agung*. Golongan ksatria dalem yang kawin dengan wanita dari kasta rendah apabila mempunyai anak termasuk golongan *pangkakan*, *prebagus*, atau *presangiang*. Anak-anak dari golongan ini apabila laki-laki mendapat sebutan, *Dewa Bagus*, Bagus atau *Kagus*, *Pangkalan*, atau *Ngakan*, dan *sang*, tetapi apabila wanita mendapat sebutan *Dewa Ayu*, *Desak*, Ayu atau *Yayu* dan *Sang Ayu*.

Apa yang diuraikan di atas adalah keturunan dari ksatria dalem yang masih mempunyai asal keturunan dari Sri Kresna Kepakisan, seorang Bupati yang diangkat oleh Maha Patih Gajah Mada untuk memerintah di Bali. Di samping itu masih ada golongan ksatria berasal dari Jawa, yang disebut para *arya*. Mereka ini datang setelah Bali ditaklukkan oleh *arya*. Mereka ini datang setelah Bali ditaklukkan oleh Gajah Mada pada tahun 1343. Mereka seterusnya bertempat tinggal menyebar di pelbagai daerah di Bali. Keturunan para *arya* ini memakai gelar *Gusti*, *I Gusti* atau Ki Gusti. Kedudukan *arya* sebagai ksatria di Bali tidak begitu mantap, bahkan keturunan mereka ada yang termasuk golongan *weisia*.

Golongan *Weisia* dapat dibedakan dalam 3 tingkatan, ialah golongan *pregusti*, golongan dari keturunan *arya Jawa*, dan keturunan tiga orang *weisia* dari Jawa yang datang di Bali bersama-sama para *arya Jawa*. Para *pregusti* ini dikatakan masih keturunan *Arya Damar*, *Arya Gajah Para*, dan *Arya Wangbang*. Golongan *pregusti* yang laki-laki memakai sebutan I Gusti, sedangkan yang wanita menggunakan sebutan Ni Gusti Ayu. Golongan *weisia* keturunan *arya* dari yang laki-laki memakai sebutan *gusti*, sedangkan yang wanita dengan sebutan *Gusti Ayu* atau *Ayu*. Keturunan dari *Weisia Jawa* memakai sebutan *Gusti* atau *Si* untuk laki-laki dan *Ni luh* untuk wanita. Para *weisia Jawa* yang dahulu datang di Bali tersebut bernama *Tan Kuwur*, *Tan Mundur*, dan *Tan Kober*.

Golongan *sudra* terdiri dari rakyat bawahan. Golongan ini juga dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu : mereka yang mendapat anugerah dari raja, mereka yang diangkat oleh raja menjadi *prebekel*, *sudra* tingkat bawah yang juga disebut *sudra jati*, *tani kelega* atau *paneger*. Golongan *sudra* yang sering disebut *Wong jaba* atau *wong kesamen*, sedang mereka yang mendapat anugerah dari raja sering disebut *kulawisuda*. Di daerah Klungkung terdapat orang-orang *sudra* tingkat atas yang mendapat sebutan *prebali*. Mereka adalah masih keturunan dari pengawal-pengawal pribadi Sri Kresna Kepakisan. Golongan *sudra* yang mendapat anugerah raja (*kula wisuda*) memakai sebutan

Gusti, Si, Putu, Gede, Jro, Nengah, Wargi di depan namanya. Kedudukan mereka sederajat dengan para keturunan weisya Jawa.

Di bawah golongan-golongan *catur warna* atau *catur wangsa* terdapat juga para budak yang disebut *sepangan* untuk yang laki-laki dan *sepangan luh* untuk wanita. Masih perlu juga disebut adanya para *tetunggon (pandeling)*, yaitu orang yang kehilangan kebebasannya karena terikat oleh tuannya akibat tidak dapat membayar hutang.

Untuk membedakan golongan satu dengan yang lain, kecuali gelar atau sebutan yang dipakai, juga antara lain dapat diketahui dari bentuk kompleks tempat tinggal, penggunaan bahasa dan tingkah laku.⁵⁵ Mengenai tempat tinggal dapat dibedakan misalnya antara rumah ksatria dengan rumah weisya. Di *Tabanan* rumah-rumah ksatria biasanya mempunyai halaman yang dikelilingi dengan benteng berpintu gapura, yang diberi hiasan bingkai mahkota (*kroonlijst*). Gapura dari tempat tinggal orang weisya hanya diberi ornamen biasa di bagian atasnya. Terhadap golongan ksatria, golongan kasta bawah biasa melakukan sembah, sedang bahasa yang digunakan oleh golongan bawahan terhadap atasan adalah bahasa hormat. Di dalam upacara atau pertemuan-pertemuan, golongan sudra tidak diperkenankan duduk lebih tinggi dari golongan brahmana, ksatria, dan wesya. (golongan *triwangsa*).

Dalam membicarakan masyarakat Bali kiranya belum lengkap jika belum juga dibicarakan kedudukan dan kehidupan dari masing-masing golongan. Sebagaimana telah disinggung di muka, urutan pembagian penduduk yang bertingkat dari atas ke bawah menunjukkan tingkat kedudukannya di dalam masyarakat. Mengingat sifat religius dari penduduk Bali, sudah semestinya bahwa golongan brahmana menduduki tempat yang penting di dalam masyarakat. Upacara-upacara keagamaan diadakan baik di tingkat istana, di daerah-daerah, bahkan sampai di tingkat desa. Pedana-pedana baik dari agama Siwa maupun Buda memegang peranan penting dalam upacara *pancayadnya*, yaitu : *dewayadnya*, upacara yang dipersembahkan kepada para dewa; *pitrayadnya*, upacara untuk arwah nenek-moyang; *manusayadnya*, upacara-upacara yang diadakan pada tingkat-tingkat hidup manusia (inisiasi); *bhutayadnya*, upacara untuk mahluk-mahluk halus penjaga alam.

Di dalam upacara kematian, baik pedanda Siwa maupun Buda bertugas untuk menyelamatkan jiwa almarhum. Masing-masing pedanda berdiri di se-

55. Berburu di hutan merupakan kegemaran para bangsawan Bali. Dalam *Babad Bu-léleng* disebutkan bahwa di sebelah timur Angon Liman atau Bangunan Liman terdapat hutan, tempat Sri Panji biasa berburu (*abuburu*). Periksa P.J. Worsley, *Op. Cit.*, hal. 167

belah kanan dan kiri jenazah, pedanda Siwa berada di sebelah kanan dan pedanda Buda di sebelah kiri. Pedanda Siwa mengucapkan *mantraweda* dengan memercikkan *tirta pangentas* dan *tirta pabresihan*. Setelah bertukar tempat, berganti pedanda Buda mengucapkan *mantraweda* sambil memercikkan *tirta panglukatan*. Dengan upacara tersebut arwah almarhum diharapkan telah dilepaskan dari segala dosa. Pada kesempatan kemudian, pedanda tersebut memberikan bisikan (*pawisikan*) kepada arwah almarhum agar dengan mudah dapat naik ke sorga.

Tiap-tiap pendeta mempunyai wilayah keagamaan sendiri-sendiri. Pendeta Siwa mempunyai wilayah penganut yang disebut *masiwa-kasiwa*, sedang pendeta Buda mempunyai wilayah *masiwa-kaboda*. Tiap orang diwajibkan mengambil air suci dari *masiwanya* sendiri. Mengingat bahwa sebagian besar penduduk Bali hidup dari pertanian, maka upacara keagamaan juga diadakan untuk menghormati dewa-dewa yang ada hubungannya dengan pertanian, seperti Dewa Tanah, Dewa Air, dan Dewa Padi. Dalam upacara-upacara semacam itu pendeta disertai tugas untuk memimpinnya. Tempat-tempat pemujaan (pura) tersebar di daerah-daerah dan dalam upacara-upacara pimpinan dipegang oleh pendeta-pendeta daerah setempat. Mengingat pentingnya kedudukan para pendeta dalam masyarakat Bali, adalah wajar bahwa mereka diberi pengecualian-kecualian dari pemerintahan kerajaan. Pengecualian itu antara lain berupa pembebasan pajak bagi tanah-tanah milik mereka. Tanah dari kompleks pura (*labapura*) juga dibebaskan dari pajak. Hasil dari tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk biaya pemeliharaan pura dan sebagian dipakai untuk biaya hidup pengurus pura, seperti *pemangku* dan para pembantunya. Ada kalanya *pemangku* mendapat tanah jabatan dari pemerintah kerajaan. Para pendeta juga dibebaskan dari kerja wajib kerajaan atau pun kerja wajib wilayah. Di dalam soal perkawinan masih dipegang teguh perkawinan secara *endogami*. Orang-orang dari golongan brahmana diwajibkan kawin dengan orang di lingkungan kasta mereka. Perkawinan dengan orang dari kasta yang lebih rendah dapat berakibat penurunan orang brahmana tersebut dari kastanya. Kemurnian kasta brahmana dijaga antara lain dengan adanya larangan perkawinan yang disebut *asupundung*, yaitu larangan bagi orang laki-laki dari kasta ksatria, weisya, dan sudra kawin dengan wanita atau gadis dari kasta brahmana.⁵⁶

56 Pengaruh para brahmana cukup kuat di daerah tingkat distrik, seperti apa yang dapat dilihat di Distrik Banjar yang terletak di sebelah barat ibukota Kerajaan Singaraja. Adanya brahmana-brahmana yang tinggal di distrik tersebut membawa akibat besarnya pengaruh distrik-distrik sekitarnya. Periksa "De Expeditie naar Bali in 1868", 1873, hal. 125.

Golongan ksatria juga mempunyai kedudukan terhormat di dalam masyarakat. Kerabat raja dan para bangsawan lainnya mendapat fasilitas-fasilitas dari pemerintah kerajaan, seperti pemberian tanah-tanah *apanage*. Hubungan antara golongan ksatria dengan golongan brahmana sangat erat. Eratnya hubungan tersebut dikarenakan selain tingkat kasta mereka langsung berdekatan, juga karena kedudukan mereka sebagai penguasa di bidang keduniawian sangat erat hubungannya dengan kekuasaan para brahmana di bidang keagamaan. Dalam pelantikan raja baru, pentahbisannya dilakukan oleh pedanda-pedanda istana. Meskipun dalam sistem kasta tersebut brahmana lebih tingkatananya daripada golongan ksatria, namun dalam beberapa hal kekuasaan melebihi brahmana. Para pedanda istana baik dari agama Siwa maupun Buddha berada dalam lingkup birokrasi kerajaan yang tunduk pada peraturan kerajaan. Pelantikan *brahmana welaka* menjadi pendeta atau *brahmana sulinggih* harus mendapat ijin dari raja. Dapat dikatakan bahwa golongan ksatria sebagian besar mempunyai kegiatan dalam bidang politik kerajaan. Di dalam masa perang biasanya merekalah yang diangkat menjadi panglima-panglima perang. Di dalam soal perkawinan umumnya orang-orang dari kasta ksatria kawin dengan orang se-kasta. Dengan adanya larangan perkawinan *alangkah* karang ulu, maka tidak mungkin golongan weisya dan sudra kawin dengan golongan ksatria.

Meskipun dari segi kasta, golongan-golongan tersebut seakan-akan tertutup satu sama lain, namun dalam masyarakat seringkali batas tersebut tidak selalu nampak. Misalnya dalam matapencarian ada kalanya golongan weisya melakukan bidang usaha yang sama dengan yang dilakukan oleh orang dari golongan ksatria. Hal ini disebabkan karena tidak seluruhnya orang dari golongan ksatria dapat menduduki fungsi yang penting dalam birokrasi kerajaan. Banyaknya orang-orang dari golongan ksatria dari derajat kelahiran agak bawah, maka kehidupan mereka hampir tidak berbeda dengan orang dari kasta bawahnya. Demikian pula halnya orang dari golongan weisya dengan golongan sudra. Orang dari golongan weisya tingkat bawah hampir tidak berbeda dalam masyarakat dengan orang dari golongan sudra derajat atas. Bahkan petani-petani dari golongan sudra yang kemudian beruntung dalam usaha pertaniannya, kehidupannya dapat lebih baik daripada orang-orang keturunan arya Jawa yang menurut kastanya dalam desa memang lebih terhormat.

Hal yang demikian itu menunjukkan, bahwa sampai derajat tertentu kekayaan juga mempengaruhi status orang dalam masyarakat Bali. Orang dari kasta atas yang kurang mampu sedikit banyak menurunkan derajat prestisenya dalam masyarakat. Agak berbeda halnya dengan orang-orang dari kasta brahmana. Penghormatan masyarakat pada mereka lebih didasarkan pada

pandangan religius. Kesucian dan kebaikan sifat dan tingkah laku, di samping kemampuannya dalam soal agamalah yang menyebabkan mereka terpandang di dalam masyarakat. Dengan demikian kekayaannya tidak banyak mempengaruhi besar-kecilnya penghormatan masyarakat pada seorang dari golongan brahmana.

Dalam hubungan dengan kekayaan masih perlu disebut golongan minoritas asing yang tinggal di Bali, terutama golongan Cina. Kebanyakan di antara mereka mempunyai mata-pencarian sebagai pedagang, baik pedagang besar maupun kecil. Di samping adanya pedagang-pedagang golongan Cina yang kaya berkat keuntungan yang mereka dapat dari perdagangan dalam partai besar, seperti perdagangan hasil bumi, ikan dan sebagainya, terdapat pula orang-orang Cina yang membuka toko atau warung-warung. Oleh karenanya di beberapa daerah di Bali ada sebutan *wong toko* untuk orang Cina. Sering di beberapa daerah di Bali ada sebutan *wong toko* untuk orang Cina. Seringkali mereka juga disebut *babah*, *singkeh* atau *wong Cina*. Golongan minoritas Cina ini mempunyai daerah tempat tinggal tersendiri dan melakukan adatnya sendiri.

Seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia, di dalam kota-kota bandar terdapat perkampungan pedagang-pedagang, seperti pedagang Makassar, Bugis, dan lainnya. Pedagang-pedagang tersebut disamping membeli hasil bumi dan hasil kerajinan Bali untuk dieksport ke luar dengan menggunakan perahu-perahu pedagang langganan dari kepulauan lain, juga bertindak sebagai penerima barang-barang impor dari pedagang-pedagang yang datang. Dalam abad ke-17 perdagangan budak cukup ramai. Perahu-perahu Belanda datang ke bandar-bandar untuk mengangkut budak-budak dan dijual di lain pulau. Pedagang pedagang Jawa di abad tersebut biasanya singgah di Bali dalam perjalanan ke Maluku untuk menjual beras. Di Bali mereka membeli barang-barang kerajinan, kain batik, dan lainnya untuk selanjutnya dijual ke lain pulau yang dilaluinya.

Gambaran di atas menunjukkan ramainya perdagangan laut di Bali. Sudah tentu hal tersebut berakibat adanya macam-macam sukubangsa di kota-kota bandar, baik sebagai penghuni tetap maupun sebagai penghuni musiman. Hubungan antara penguasa kerajaan dengan golongan pedagang suku bangsa lain, tidak mengalami kesukaran. Demikian pula perbedaan agama tidak merupakan rintangan dalam mengadakan hubungan. Di samping budak, golongan orang-orang yang kehilangan kebebasannya karena tidak dapat membayar hutang (*pandeling*) masih banyak terdapat di Bali. Dipandang dari segi kasta, mereka termasuk golongan bawahan. Dalam hubungan dengan perbudakan di Bali, perlu dikemukakan bahwa tidak semua budak adalah dari golongan

rendah. Tawanan-tawanan perang atau hasil *tawan karang* ada kalanya terdiri dari orang-orang kasta atas. Budak-budak yang memang berasal dari kelas rendah dalam pandangan masyarakat berbeda dengan budak-budak karena tawanan perang. Umumnya mereka yang belakangan ini lebih dihargai. Budak-budak, baik yang laki-laki (*sepanggan*) maupun perempuan (*sepangan lu*) hidup di rumah tuannya dengan dijamin makannya. Para *pendeling* yang di Bali sering disebut tetunggon bekerja di rumah tuannya sebagai angsuran hutang sampai mereka dibebaskan kembali.

C. SULAWESI (SELATAN)

1. Wilayah.

Di wilayah Sulawesi (Selatan) sejak beberapa abad yang lalu telah terdapat sekian banyak negara yang berbentuk kerajaan. Sebagai negara-negara kerajaan tentu saja setiap kerajaan itu telah mempunyai peralatan perlengkapan **negara yang bertugas** untuk menjalankan tugas-tugas negara sehari-harinya. Sistem kehidupan negara-negara yang terdapat di Sulawesi (Selatan) itu tentu mempunyai variasi-variasi yang menampakkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya. Variasi-variasi yang dimaksud menyangkut tidak hanya pada istilah-istilah yang digunakannya, tetapi juga pada bentuk dan tata pengaturan kerja dari peralatan perlengkapan kenegaraan tersebut.

Terdapatnya persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan itu tentu-lah disebabkan oleh karena adanya sekian banyak suku-suku bangsa yang mendiami wilayah itu, dan yang kemudian mendirikan negaranya masing-masing. Suku-suku bangsa yang dimaksud ialah Bugis, Makasar, Mandar dan Toraja. Di samping ke empat suku terbesar itu, terdapat juga suku *Duri Dori* yang merasa juga sebagai suatu suku tersendiri. Mereka yang bersuku bugis mempunyai negara Bone, Wajo, Sawitto, Suppa, Soppeng, Luwu dan banyak lagi negara-negara kecil lainnya. Orang Makasar mempunyai negara kembar Tallo-Gowa. Suku Mandar mempunyai pula negara-negara seperti Balannipa, Cenrana, Majenne, dan lain-lain. Demikian pula orang-orang Toraja dan *Dori*.

Selanjutnya perlu dijelaskan di sini bahwa bagian yang membicarakan tentang "birokrasi" telah diambil tiga buah negara sebagai contoh, yaitu masing-masing negara Bone, Wajo⁵⁷ dan Gowa; kedua negara yang disebut terdahulu merupakan negara-negara yang didiami oleh orang-orang Bugis, sedang yang disebut kemudian merupakan negara yang didiami oleh orang-orang Makasar. Ketiga negara ini memang merupakan negara-negara yang besar dan luas wilayah pengaruhnya.

57 Juga dikenal dengan nama Sengkang.

Demikian pula setelah Perjanjian Bongaya ketiga negara ini mengalami beberapa perubahan sebagai akibat dari perjanjian tersebut. Negara Bone setelah perjanjian itu makin kokoh kedudukannya dan makin luas dan besar pengaruhnya. Selanjutnya, menurut kontrak tertanggal 23 Desember 1670 yang ditandatangani antara Wjo dengan Belanda yang dilakukan melalui perantara-an kerajaan Bone, maka Wajo mengakui kedaulatan Belanda atas Wajo. Namun demikian, sampai tahun 1848, pemerintah Belanda belum pernah mena-namkan kekuasaannya di negeri ini.⁵⁸

Negara Gowa, setelah perjanjian Bongaya telah kehilangan "dominasi" kekuasaan politiknya di Sulawesi Selatan dan telah berubah haluan menjadi di "sahabat" Belanda. Sampai pada akhir abad ke-19 memang telah beberapa kali terjadi usaha untuk mengembalikan kebesaran kekuasaan negara Gowa, akan tetapi usaha semacam itu tidak pernah berhasil.

2. Raja dan Bangsawan.

Sesuai dengan bahasa-bahasa yang mereka gunakan, maka di Sulawesi (Selatan) telah pula dikenal beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut raja dan kerabatnya. Istilah-istilah sebutan raja-raja di kerajaan. Bugis seperti di Bone ialah *Arung MangkauE ri Bone*⁵⁹ di Wajo digunakan istilah *Arung MatowaE ri Wajo*⁶⁰ di Sawitto digunakan istilah *Addatuwang Sawitto*⁶¹, di kerajaan Luwu digunakan istilah *Payungnge ri Luwu*, dan di kerajaan Suppa dan Soppeng digunakan istilah *Datu Suppa* dan *Datu Soppeng*. Dari keterangan di atas nampak bahwa istilah *Arung*, yang memang berarti raja itu, tidak selalu digunakan untuk menyebut seorang raja yang memerintah di kerajaan-kerajaan Bugis. Sedang untuk kerajaan orang Makassar digunakan istilah *Sombayya ri Gowa*⁶², dan di kerajaan orang Mandar digunakan istilah *Maraddia*.

⁵⁸ Juga dapat digunakan istilah-istilah *Petta Mangku Eri Bone* dan *Arumponc*.

⁵⁹ Juga dapat digunakan istilah *Petta Matowa Wajo*.

⁶⁰ Digunakan juga istilah *Addituwang Sawitto*.

⁶¹ Digunakan juga istilah *Karaengta ri Gowa*.

⁶² Mattulada, "Latoa Satu Lukisan Analistis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (A Descriptive Analysis of The Political-Anthropology of the Buginese)", *Disertasi Untuk Gelar Doctor Dalam Ilmu Antropologi*, Jakarta, 1975, hal.378.

Untuk keturunan mereka digunakan istilah-istilah *ana arung*, dan *ana-kareeng*. Juga dikenal istilah khusus, untuk keturunan baik oleh orang Bugis maupun untuk orang Makassar. Demikian pula terdapat istilah *opu* (terutama di kerajaan Luwu), *petta* dan *daeng*. Sedang istilah *Andi* digunakan untuk semua keturunan orang yang berdarah bangsawan.

3. Birokrasi.

Di dalam menjalankan pemerintahan negara seorang raja dibantu oleh sekian banyak pembantu dekat yang mempunyai bidang tugasnya masing-masing. Dengan demikian di Sulawesi Selatan terdapat juga suatu sistem birokrasi yang digunakan sebagai alat pengatur kehidupan kerajaan yang bersangkutan.

Di bawah ini akan diuraikan secara singkat sistem birokrasi kerajaan-kerajaan Bone, Wajo dan Gowa. Ketiganya merupakan contoh birokrasi kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yang mempunyai persamaan dan perbedaannya.

Di Bone sejak abad ke-14 dikenal istilah *kawerrang* yang berarti ikatan, yaitu ikatan dari tujuh *wanua* (negeri) yang membentuk suatu uni, yang kemudian dikenal dengan nama *Tana Bone*. Ketujuh *wanua* yang membentuk uni Tana Bone itu ialah: 1) Wanua Ujung, 2) Wanua Tibojong, 3) Wanua Ta' 4) Wanua Tanete ri Attang, 5) Wanua Tanete ri Awang, 6) Wanua Ponceng, dan 7) Wanua Macege. Di dalam pertumbuhan selanjutnya *kawerrang Tana Bone* berubah menjadi *Watampone*, yaitu istilah yang berasal dari kata *watam* dan *Bone* yang berarti "pusat Bone". Sejalan dengan pertumbuhan dan perubahan itu, maka diperlukan pulalah pelbagai aparat untuk menjalankan negara kerajaan Bone. Pada dasarnya semua pejabat yang menjalankan pemerintahan Bone itu masih mempunyai hubungan keturunan dengan *Arung MangkauE ri Bone*, dan semua pejabat itu disebut dengan istilah *pakkatenni ade* akan tetapi jenjang dan pelapisan mereka itu telah ditentukan di dalam *wari* (pelapisan masyarakat). Matoa PituE kemudian berubah fungsinya sebagai pejabat negara secara penuh, karena kedudukannya sebagai kepala-kepala *wanua* mereka dilepaskannya. Selanjutnya Matoa PituE diubah lagi menjadi sebuah dewan yang disebut dengan istilah *Ade' PituE*. Dan lembaga inilah yang merupakan dewan menteri Tana Bone, dan ini pulalah sepe-nuhnya yang disebut dengan *pakkatenni ade*; karena itu lembaga ini merupakan pula lembaga eksekutif, tetapi juga sekaligus penyambung lidah rakyat terhadap raja. Di dalam pembagian pekerjaan pemerintahan pengaruh dari

ke tujuh wanua yang melahirkan Tana Bone masih nampak dengan jelas. Pembagian itu adalah sebagai berikut:

1. Arung Macege memegang urusan pemerintahan umum;
2. Arung Ponceng memegang urusan Keamanan dan Pertahanan;
3. Arung Tibojong memegang urusan kehakiman/peradilan;
4. Arung Tanete ri Attang memegang urusan Pembangunan dan Pekerjaan Umum;
5. Arung Tanete ri Awang memegang urusan Keuangan dan Ekonomi;
6. Arung Ta' memegang urusan pengajaran dan Pendidikan;
7. Arung Ujung memegang urusan Penerangan dan kerohanian.⁶³

Kemudian dikenal lagi istilah *To-Marilaleng* yaitu orang yang terdekat dengan raja, dan orang atau pejabat inilah yang kemudian ditetapkan sebagai "ketua" dari Ade PituE. *Tomarilaleng* adalah saluran penyampaian kehendak raja kepada rakyat, karena itu ia juga disebut dengan istilah *To-Mabbicara* atau *PabbicaraE*, dan karena ia berasal dari keluarga raja maka disebut juga dengan istilah *Petta PabbicaraE*.

Kedudukan dari *To-Marilaleng* (*Petta PabbicaraE*) merupakan kedudukan yang penting karena ternyata kemudian dia diberikan kedudukan sebagai pimpinan dewan pemerintahan negara kerajaan Bone; dialah yang mengetahui dan/atau mengkoordinir anggota-anggota *ade-pituE* di dalam menjalankan pemerintahan negara kerajaan Bone.

Selain pejabat-pejabat yang disebut di atas terdapat pula pejabat-pejabat yang lebih rendah tingkatannya tetapi sangat penting artinya dalam pemerintahan kerajaan Tana Bone. Mereka itu dikenal dengan istilah *Ponggawa* yaitu Panglima Angkatan Perang Negara Kerajaan. Penjabat inilah yang bertugas untuk mengatur hal-hal keamanan dan pertahanan, dan dia berada di bawah langsung oleh raja Bone. Penjabat ini disebut juga dengan istilah *Petta PonggawaE*, dan membawahi tiga orang panglima yang disebut *dulung* yaitu a) *dulung awang tangka* yakni panglima yang menguasai daerah-daerah perairan; b) *dulung ajang ale'* yakni yang menguasai daratan dan hutan, dan c) *dulung lamuru* yakni yang menguasai daerah-daerah perbatasan. Selanjutnya di bawah ke tiga *dulung* ini terdapat penjabat-penjabat *Panggulu Jowa* atau *anre-guru Jowa* sebagai pemimpin-pemimpin pasukan atau lasykar. Se-

63. *Ibid.*, hal. 380

lanjutnya dikenal pula jabatan Kadhi (*kali*) yang disebut juga dengan Petta Kali, yakni jabatan keagamaan Islam; jauh sebelum kedatangan Islam jabatan keagamaan dipegang Panggulu-bissu.⁶⁴

Menurut keterangan yang terdapat di dalam *lontara* kerajaan Gowa sebelum kedatangan To-Manurung di Gowa, terdapatlah 9 kelompok golongan penduduk yang disebut mereka dengan *anang*. Ke 9 orang ini mendiami wilayahnya masing-masing, dan dipimpin oleh seorang kepala yang oleh mereka disebut dengan *karaEng*, *anrongguru* dan/atau gallarang. Di dalam perkembangannya kemudian kesembilan orang ini merasa membutuhkan seorang pimpinan di antara mereka, dan dipilihlah seorang ketua yang mereka sebut dengan *paccalla* yang merupakan orang menjadi penasehat di antara ke 9 anang itu. Akan tetapi nampaknya kedudukan seorang *paccalla* yang hanya berfungsi sebagai penasehat untuk menjaga perdamaian di antara mereka, kurang memuaskan para penguasa tersebut. Mereka membutuhkan seorang pemimpin yang berkedudukan "lebih" dari seorang penasehat belaka.

Kebutuhan untuk memperoleh seorang pemimpin yang lebih berkuasa itu pada akhirnya mendorong mereka untuk mencari *seorang* tokoh untuk kedudukan tersebut. Akhirnya, menurut *lontara*, ditemukanlah pada diri seorang wanita yang oleh mereka disebut *To-Manurung* di atas bukit Tamalate. Tomanurung ini kemudian kawin dengan seorang yang bernama *karaEng* Bayo, yang menurunkan raja-raja Gowa selanjutnya. Namun demikian kedudukan dari ke 9 anang masih tetap kuat karena kekuasaannya masih tetap ada di tangannya; bahkan kemudian ke 9 kepala kaum ini menjadi anggota dewan kerajaan Gowa yang disebut dengan *Bate Salapanga ri Gowa*.

Jika kita memperhatikan susunan para pembantu *Sombayya ri Gowa* sebagai raja negara kerajaan Gowa, maka dijumpailah kedudukan-kedudukan yang disebut dengan istilah-istilah berikut: *Tu-Mabbirara Butta* merupakan Perdana Menteri negara kerajaan; dialah yang mengatur dan memimpin penyelenggaraan kekuasaan negara, melakukan pembagian kekuasaan/pekerjaan di antara para pembesar kerajaan lainnya. *Tu-Mailalang Toa* adalah Menteri Kerajaan yang mengatur hubungan kekuasaan antara Raja Gowa dengan raja-raja bawahannya, dan dialah yang menyampaikan kehendak raja kepada rakyat melalui para raja-raja bawahannya. *Tu-Mailalang Lolo* adalah Menteri Kerajaan yang menyalurkan kehendak rakyat kepada raja Gowa. Penjabat

64 Abdurrazak Daeng Patunru, *Sedjarah Wadjo*, Jajasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, 1964, hal. 16

inilah yang berbicara untuk kepentingan rakyat, dan bertugas untuk mengatur kesejahteraan rakyat. Sebelum diadakannya kedudukan Syahbandar (*Sabannaraka ri Gowa*) di Gowa untuk menarik pajak, maka pejabat inilah yang memegang kedudukan tersebut. *Tu-Makkajannangang* adalah Menteri Kerajaan mengurus masalah-masalah keamanan dalam negeri, dan mengatur tata-tertib dalam lingkungan pejabat-pejabat istana. *Pati-Matarang* adalah menteri Kerajaan yang mengatur urusan pertahanan dan peperangan; dialah yang menyusun lasykar-lasykar yang akan dibawa ke medan perang.

Semua jabatan teras yang disebutkan di atas dipegang oleh lingkungan ana-karaEng ri Gowa, dan para penjabat itu digelar dengan *KaraEngta*, yang berarti pertuanan kita; karena itu di dalam lingkungan aparat pemerintahan dikenal istilah-istilah *Karaengta Tumabbicara Butta*, sebutan untuk Perdana Menteri. *KaraEngta Tuimailalang Toa*, atau untuk pejabat yang memerintah di sebuah daerah kerajaan di dalam wilayah kerajaan Gowa disebut sesuai dengan nama daerah tempatnya memerintah; misalnya yang memerintah di daerah Kuruisi digelar dengan *KaraEngta Kuruisi*, dan lain-lain. Sedangkan pejabat-pejabat atau raja-raja bawahan yang berasal dari *Bate Salapanga*, digelar dengan *DaEngta*. Karena itu dikenal istilah *Daengta Gallarang Tombolo*, demikian pula pejabat bidang keagamaan (Islam) dikenal dengan *DaEngta Kalia ri Gowa*.

Kerajaan Wajo juga telah mempunyai sistim pemerintahan yang cukup mampu mengatur dirinya sebagai suatu negara, sebagaimana halnya dengan negara kerajaan Tana Bone, dan Gowa. Adapun struktur pemerintahan mereka, adalah sebagai berikut.

Kerajaan Wajo tadinya terdiri dari tiga buah kelompok kaum yaitu *Battempola*, *Talo'tenreng* dan *Tua'*. Ketiga kelompok kaum ini merasa memerlukan seorang pimpinan yang dapat mengikat mereka dalam satu ikatan kerajaan Wajo. Untuk itulah mereka sepakat untuk mencari seorang pimpinan untuk mereka. Raja yang pertama diangkat mereka untuk maksud itu ialah yang digelar dengan *Batara Wajo*.^{6 5} *Batara Wajo* yang kemudian disebut juga dengan *Arung Matoa Wajo* di dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh tiga orang raja dari tiga kelompok yang bersepakat untuk mendirikan kerajaan Wajo, yaitu *Paddanreng (Ranreng) Battempola*, *Talo' tenreng*, dan *Tau'*. Di samping ketiga jabatan tersebut di atas terdapat juga tiga jabatan

65 Pitirim A.Sorokin, "Social Stratification", di dalam Selo Sumarjan & Sulaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Djakarta, 1964, hal. 276

lainnya, yaitu masing-masing *Pa'bate (Bate) Lompo* yang pada mulanya hanya bertugas untuk mengurus masalah-masalah perang, akan tetapi kemudian berkembang, dan kemudian mencampuri urusan-urusan kerajaan secara lebih luas. Ketiga *Pandanreng (ranreng)* itu jika digabungkan dengan ketiga *Batelompo* maka menjelmalah sebuah lembaga pemerintahan lainnya yang disebut *Arung Ennengge* (raja yang enam). Jika *Batara (Arung Matoa)*, Wajo turut hadir di dalam pemerintahan itu disebut *Petta Wajo* atau pertuanan di Tana Wajo. Di bawah lembaga ini terdapat lagi sebuah lembaga yang disebut dengan *Arung Mabbicara* (pertuanan yang menetapkan hukum) yang beranggotakan 30 orang; jumlah 30 orang diperoleh dari wakil 10 orang dari ke tiga negeri asal pendiri kerajaan Wajo, yang bertugas mendampingi ketiga orang *paddanreng* yang disebut di atas. Tugas mereka ialah *ma'dette bicara* yaitu menetapkan hukum/undang-undang, *mattetta'*, *mappano-pate' bicara*, yaitu mengesahkan, mengumpulkan dan menyampaikan pelbagai hal peraturan perundang-undangan untuk ditangani oleh *Petta Wajo*. Selanjutnya terdapat lagi sebutan lembaga yang beranggotakan tiga orang yang berasal dari ketiga negeri pendiri Tana Wajo yang disebut dengan *Suro ri Bateng*. Lembaga ini bertugas untuk menyampaikan kepada rakyat perintah-perintah dari *paddanreng* dan *Bate Lompo*, dan menyampaikan kepada rakyat hasil-hasil permufakatan dan perintah dari *petta Wajo*. Dari gabungan keseluruhan anggota-anggota lembaga yang disebut di atas maka lahirlah sebuah lembaga pemerintahan yang disebut dengan *Arung PatappuloE* (Pertuanan yang empat puluh) atau disebut juga dengan *Puang ri Wajo*, yaitu penguasa Tana Wajo. Lembaga inilah yang merupakan penguasa tertinggi dari kerajaan Wajo. Menurut orang Wajo lembaga inilah yang menentukan mati hidupnya negara kerajaan Wajo atau dalam kata-kata mereka: *paoppangngi, palengengngi Tana Wajo*.

Perlengkapan kenegaraan lainnya disebut dengan istilah *Punggawa* (Matoa), dan dialah yang mengepalai perkampungan-perkampungan Majauleng, Sabbangparu, dan Takkalalla'. Para ponggawa ini bertugas untuk menjalankan pemerintahan secara langsung kepada rakyat di daerah kekuasaannya; demikian pula dialah yang menjadi penghubung antara para *Arung Lili'* (raja-raja bawahan) dengan *Petta Wajo*. Karena itu para Punggawa ini digambarkan sebagai *inanna tau maegaE* yaitu "induk dari orang banyak".

Dari keterangan tersebut di atas nampaklah bahwa sistim pemerintahan di antara ketiga kerajaan: Bone, Gowa, dan Wajo terdapat persamaan dan perbedaannya. Dari asal raja yang memerintah antara Bone dan Gowa

terdapat persamaan yaitu berasal dari apa yang disebut dengan *To (Tu) Manurung*; tokoh ini digambarkan sebagai orang yang berasal dari langit, dan ditemukan ketika kelompok kaum di kerajaan itu menjadi seorang person (pribadi) untuk diangkat sebagai raja yang mempersatukan kelompok-kelompok tersebut. Lain halnya dengan kerajaan Wajo, para pemimpin kelompok pendiri kerajaan itu hendaknya mencari pemersatu mereka dari hal-hal yang bersifat legendaris, akan tetapi dicari di kalangan mereka sendiri.

Di dalam perkembangan selanjutnya Gowa dan Bone mengembangkan pengaruhnya, sehingga model-model sistim pemerintahannya banyak "ditiru" oleh kerajaan-kerajaan "kecil" lainnya. Demikian pula percampuran darah di antara para keluarga raja-raja banyak terjadi melalui perkawinan. Kerajaan-kerajaan Suppa, dan Sawitto, Mandar mempunyai ikatan kekeluargaan yang erat dengan kerajaan Bone dan Gowa.

4. Masyarakat

Sulawesi Selatan yang didiami oleh suku-suku Bugis yang disebut dengan *Ogi'* atau *Ugi'*, Makasar yang disebut dengan *Mangkasa* atau *Mangkasa*, Mandar yang disebut dengan *Menre'* atau *Manra'*, dan Toraja mempunyai tata kehidupan yang lahir dari kalangan mereka sendiri sebagai usaha untuk mempertahankan hidupnya. Tentu saja tata kehidupan itu telah berkembang sedemikian rupa sejalan dengan pertumbuhan masyarakat mereka; juga sedikit banyak oleh karena adanya kontak-kontak dengan dunia luar.

Kampung mereka

Kampung mereka yang biasanya didiami oleh sekian banyak keluarga mendiami sekian banyak rumah, dikepalai oleh seorang kepala kampung yang disebut dengan *Macoa*, atau *Matoa*, atau *Jennang*, atau *Lompo* atau *To'do*, yang dibantu oleh sedikitnya dua orang pembantu yang disebut *Sariang* dan *Perennung*. Gabungan dari sekian banyak kampung yang disepakati untuk dibangun secara bersama disebut dengan *Wanua* yang dipimpin oleh seorang kepala *wanua* yang disebut dengan *Arung*, atau *Gallarang*, atau *Sullewatang*. Mereka ini adalah merupakan raja-raja bawahan dari raja yang memerintah di kerajaan pusat. Semua pejabat itu, dari yang terendah sampai yang tertinggi disebut sebagai *pakkatenni ade'*.

Rumah-rumah kediaman orang-orang yang mendiami wilayah Sulawesi (Selatan) didirikan di atas tiang-tiang yang cukup tinggi, dan terdiri atas tiga bagian, yaitu yang disebut dengan *rakkeang*, bagian atas rumah yang persis berada di bawah atap. Biasanya digunakan untuk menyimpan bahan makanan seperti padi, pisang dan lain-lain. Di bagian ini juga disediakan

kan tempat untuk menyimpan benda-benda keramat, seperti benda-benda pusaka milik keluarga; bagian lainnya disebut *alebola* yaitu bagian yang ditempati oleh penghuni (manusia) yang terdiri atas bagian-bagian yang ditempati oleh yang empunya rumah, ruang tamu, ruangan makan dan dapur. Bagian-bagian ini disebut dengan *lonttang*; bagian lainnya ialah *awasao* yaitu, bagian yang terletak di bawah lantai panggung. Biasanya dipergunakan untuk menyimpan alat-alat untuk pekerjaan mereka seperti cangkul, jala, dan lain-lain. Juga digunakan sebagai tempat ternak-ternak peliharaan mereka seperti kerbau, kambing, dan ayam.

Jenis rumah dapat dibagi berdasarkan atas kedudukan yang ada di dalam masyarakat. *Saoraja* yaitu kediaman dari raja atau kaum bangsawan dan cirinya adalah berpetak 5 atau 7, bubungannya yang disebut dengan *timpa'laja'* bersusun 5 bagi raja yang sedang memerintah, sedang untuk bangsawan bersusun 3. Tangganya diberi atap, dan tangga demikian ini disebut dengan *sapa'na*. Terdapat juga *saoraja* yang berpetak lebih dari 7, dan ini didiami oleh raja-raja kerajaan besar seperti Bone, Luwu, Wajo, dan Soppeng, disebut dengan *salassa*. Bentuk rumah lainnya disebut *saoraja* berpetak (lontang) tidak lebih dari 4, dan ber-*timpa'laja'* satu atau tiga, dan tidak mempunyai *sapana'*. Rumah yang demikian ini biasanya didiami oleh orang-orang terpendang dalam masyarakat, seperti orang kaya. Rumah kediaman lainnya ialah *Bola to-sama* atau *barum-parung*, didiami orang kebanyakan. Pada umumnya berpetak 3, berhubungan 2, dan tidak mempunyai *sapana'*. Untuk orang Toraja, terdapat dua jenis rumah sesuai dengan fungsinya, yaitu yang disebut *Tongkonan*, dan *Banua Barung-barung*; jenis *Tongkonan* adalah rumah adat keluarga, dan *Banua barung-barung* adalah rumah kediaman pribadi. Dalam kehidupan orang Toraja rumah jenis *Tongkonan* sangat penting artinya karena mempunyai fungsi sakral, sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.

Masyarakat di Sulawesi Selatan mempunyai pelapisan masyarakat, sebagaimana halnya masyarakat-masyarakat lainnya, karena memang pelapisan masyarakat merupakan lembaga masyarakat yang ada di dalam masyarakat yang teratur.

Pelapisan sosial ini merupakan suatu karakteristik yang permanen di dalam setiap masyarakat yang teratur.⁶⁶

66 H.Th. Chabot, *Verwantschap, Stand En Sexe In Zuid Celebes*, Bij J.B.Wolters' Uitgevermaatschappij NV., Groningen Djakarta, 1950, hal.95

Orang-orang Bugis-Makassar, dan Mandar mengenal tiga pelapisan masyarakat, yaitu *ana-karung* (*ana-karaEng*) yakni lapisan tertinggi di mana terdapat raja, dan kerabat keluarganya; *to-maradeka* yang terdiri atas rakyat jelata, dan *ata'* yaitu hamba sahaya. Berbeda dengan suku-suku lainnya di Sulawesi (Selatan), orang Toraja mengenal 4 pelapisan masyarakat yaitu *tana'bulaan* yang terdiri atas raja, bangsawan tertinggi dan kerabatnya; *tana' bassi*, golongan yang masih dianggap mempunyai darah bangsawan akan tetapi sudah tidak sama dengan pelapisan yang disebut pertama; *tana' karurung* yaitu lapisan orang-orang merdeka (orang-orang kebanyakan), dan lapisan terbawah disebut *tana' kua-kua*.

Dalam sistem pelapisan masyarakat dikenal dua sifat yaitu terbuka, dan tertutup. Jika dihubungkan dengan sifat pelapisan masyarakat Sulawesi (Selatan) maka dapat dikatakan bahwa sifatnya adalah *tertutup*, sekaligus terbuka. Maksudnya jika menyangkut pada hal-hal yang bersifat ekonomi, dan pendidikan maka dapat disebut terbuka. Artinya baik lapisan teratas maupun lapisan terbawah dapat memperoleh status yang tinggi sekiranya mampu untuk mencapai jenjang itu. Akan tetapi jika hal itu berkaitan dengan status darah-keningratan, maka kita menjumpai sifat tertutup dari pelapisan masyarakat di Sulawesi (Selatan). Baik orang Bugis Makassar, Mandar, maupun Toraja tidak bersedia untuk "membaurkan" darah-keningratannya. Artinya golongan *ana-karung*, dan *tana' bulaan* tidak akan membuka kemungkinan untuk mengawinkan anak-anak perempuannya dengan golongan yang lebih rendah tingkatannya. Perkawinan semacam itu sangat terlarang.^{6 7}

Walaupun demikian terdapat perkecualian pada hal-hal yang sangat khusus. Di kalangan orang Bugis-Makassar, dan Mandar terdapat perkecualian pada dua jenis golongan dalam masyarakat, yaitu untuk orang-orang *To-Sugi'* (orang kaya, dan Towarani (orang berani). Jika perkawinan sederhana terpaksa juga dilakukan, maka ditempuhlah jalan yang disebut *mangngelli dara* (bugis), atau *ammalli cera'* (Makasar), artinya "membeli darah". Yang dimaksudkan dengan itu ialah bahwa laki-laki yang akan mengawini wanita yang lebih tinggi derajat darahnya, harus membayarnya dengan sekian banyak barang-barang yang bersifat kebendaan, seperti sejumlah uang, dan emas.

67 L.T. Tandilintin, *Toraja dan Kebudayaanannya*, Kantor Cabang II Lembaga Sejarah Dan Antropologi, Ujung Pandang, 1974, hal. 130.

Di dalam masyarakat Toraja, jika perkawinan terpaksa terjadi maka pihak laki-laki harus menjalani persyaratan yang disebut *unteka palandua* atau *unteka bua layuk*.⁶⁸

Sebelum kedatangan agama Islam, dan Kristen di wilayah Sulawesi (Selatan) terdapat kepercayaan animistik, seperti *PatotoE* yang berarti Dia yang menentukan nasib, *To-PalanroE*, Dia yang menciptakan, *Dewataseu-waE* yang berarti dewa yang tunggal, *Puang Matua* yang berarti Tuhan yang tertinggi.

Setelah masuknya agama Islam maka agama ini meluas ke seluruh wilayah yang didiami oleh orang-orang Bugis-Makassar, dan Mandar. Selanjutnya agama Kristen diterima oleh sebagian penduduk suku Toraja, namun mereka juga tetap mempertahankan kepercayaan mereka yang animistik.

D. KALIMANTAN

1. Wilayah

Negara-kerajaan yang terpenting di Kalimantan adalah Sambas, Pontianak, dan Banjar. Di antara ketiganya, Banjarlah yang masih mempunyai kekuasaan atas suatu wilayah tertentu dan wilayahnya yang ada sebelumnya. Sambas dan Pontianak pada tahun 1819 telah menyerahkan seluruh wilayah kekuasaannya kepada Hindia Belanda dan sultan-sultannya hanya memerintah sebagai "vasal" dari Hindia Belanda. Selain itu di Kalimantan Utara terdapat pula kerajaan Brunai yang kini termasuk wilayah Malaysia. Banjar akan diuraikan di sini sebagai contoh dari negara-kerajaan abad ke 19 di Kalimantan.

Pada masa jayanya wilayah negara-kerajaan Banjar meliputi seluruh daerah Kalimantan Selatan dan Kotawaringin sampai ke Pulau Laut. Dalam wilayah itu terdapat beberapa kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Sultan Banjar. Kerajaan itu adalah Berau, Kutai, Pasir, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tatar, Dusun Hulu, Dusun Ilir, Bekompai, Dayak Besar (Kebayan), Dayak Kecil (Kapuas), Mendawai, Sampit, Pemuang, dan Kotawaringin.⁶⁹

68 *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839 -- 1848*, Arsip Nasional Republik Indonesia Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah, No.5, Jakarta, 1973, hal. C VII

69 *Arsip Nasional R.I., Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839 - 1948*, Jakarta: 1973, hal. 166 - 199

Di antara daerah-daerah ini kekuasaan sultan paling terasa di Pasir, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Bekumpai, dan Dusun. Inilah yang disebut "kerajaan Banjar" dalam abad ke-19⁷⁰ Wilayah kekuasaan itu dipersempit lagi oleh Sultan Adam dalam perjanjian tambahannya dengan pihak Hindia Belanda pada tahun 1854.⁷¹ Menurut ketentuan ini wilayah kerajaan dibatasi oleh Sungai Banjar (anak Sungai Barito) di sebelah Barat, sebelah Timur oleh pegunungan Meratus dan sebelah selatan, oleh Gunung Pamatun.

Sejak tahun 1826 kekuasaan sultan dibatasi oleh pihak Hindia Belanda. Menurut ketetapan itu⁷² pengangkatan sultan dan Mangkubumi harus disetujui pihak Hindia Belanda dan perkara-perkara yustisi di daerah yang dikuasai Belanda diputuskan oleh pihak Belanda. Dewan yang memutuskan perkara-perkara dalam wilayah sultan pun beranggotakan seorang wakil Hindia Belanda. Dalam daerah-daerah yang telah diserahkan pada pihak Belanda dibentuk suatu pemerintahan yang pada pertengahan abad ke-19 digabung menjadi "Gouvernement van Bornoe".⁷³ Sekalipun demikian dalam wilayah yang dikuasai sultan-sultan sistem pemerintahan tradisional masih tetap berlaku dan merupakan patokan terpenting dalam negara Banjar.⁷⁴

2. Raja dan bangsawan

Seperti halnya dalam masyarakat abad ke-19 lainnya masyarakat dalam negara Banjar terbagi tiga bagian, yaitu golongan yang memerintah, dan golongan yang diperintah berupa mayoritasnya, dan golongan budak. Kelas yang memerintah terdiri atas sultan dan keluarganya, kemudian menyusul para birokrat. Meskipun dalam struktur pemerintahan kerajaan, raja menduduki posisi pusat, namun dalam pelaksanaan kekuasaan ia dibatasi oleh sebuah dewan mahkota yang beranggotakan sementara bangsawan keluarga terdekat raja dan pejabat birokrasi tingkat atas seperti *mengkubumi*, para *mantri* dan

70 *Ibid.*, 184/5

71 Arsip Nasional R.I. *Surat-surat Perjanjian antara Kesultanan Banjarmasin dengan pemerintah VOC. Batafse Republiek, Inggris dan Hindia Belanda, 1635 – 1860, Jakarta: 1965, hal. 249 – 252*

72 *Ibid.*, hal. 228 – 247

73 *Gouvernement* ini semata-mata dibentuk untuk memberi kesan pada Inggris yang mulai berekspansi di Brunai, bahwa Belanda berkuasa di Kalimantan.

74 Suri Suroto, "Pergerakan Sosial dan Perang Banjarmasin", *Seminar Sejarah Nasional II*, Yogyakarta: 26 – 29 Agustus 1970.

kyai. Dewan mahkota berfungsi sebagai penasihat rakyat dalam memecahkan persoalan-persoalan penting seperti soal pemerintah, penggantian tahta, pengumuman perang dan damai, hubungan dengan kekuasaan luar dan sebagainya. Pengaruh dewan mahkota terhadap sikap dan tindakan raja sangat besar, sedang peranan Mangkubumi dalam dewan ini pun cukup penting. Pengaruh yang besar dari dewan mahkota seringkali disalahgunakan oleh sementara bangsawan untuk menonjolkan kepentingan mereka atau untuk melemahkan kedudukan raja. Perlu dikemukakan bahwa pengaruh para bangsawan dalam pemerintahan kerajaan sangat besar.

Raja mempunyai kekuasaan untuk mengangkat, memindahkan atau pun memecat pejabat-pejabat birokrasi, namun untuk pejabat birokrasi tingkat atas, raja meminta nasehat pada dewan mahkota. Pengangkatan didasarkan pada jasa atau kecakapan seseorang. Pengangkatan seseorang pada jabatan birokrasi yang penting biasanya disertai dengan pemberian gelar. Seperti halnya di Jawa, raja adakalanya mengangkat orang yang berjasa menjadi seorang bangsawan. Pemecatan dilakukan terhadap pejabat-pejabat yang melalaikan tugas atau menunjukkan sikap penentangan terhadap raja. Dalam pertengahan abad ke-19 pengaruh Belanda terhadap kerajaan Banjar telah begitu kuat, sehingga dalam pengangkatan maupun pemecatan pejabat-pejabat birokrasi tingkat atas Belanda ikut menentukan. Bahkan dalam penggantian tahta, pengaruh Belanda pun cukup besar.

Menurut adat kebiasaan dalam negara Banjar, pengganti raja adalah putra mahkota yang diangkat dari putra sulung raja yang meninggal dengan permaisuri dari golongan bangsawan. Dengan demikian putra dari istri yang bukan dari golongan tersebut, tidak berhak mengganti raja. Keruwetan timbul dalam istana, apabila di antara bangsawan keluarga raja ada yang mempunyai pendirian yang berbeda mengenai penunjukkan pengganti raja. Keruwetan tersebut dapat berakibat tertundanya keberangkatan jenazah raja, karena menurut tradisi, jenazah baru dapat diberangkatkan ke makam apabila sudah ada kepastian mengenai penunjukkan penggantinya. Timbulnya kericuhan dalam istana mengenai penggantian raja kerap kali terjadi dalam sejarah Banjar. Penunjukkan putra mahkota oleh raja almarhum belum tentu diterima oleh seluruh bangsawan. Sebagai ilustrasi mengenai keruwetan dalam penggantian raja dapat ditunjuk misalnya peristiwa meninggalnya Sultan Adam (1857). Istri raja yang bukan berasal dari golongan bangsawan (Ratu Komala Sari) menginginkan agar putranya yang bernama Pangeran Tamjidillah dijadikan Sultan. Keinginan ini mendapat dukungan dari Belanda, yang karena pertimbangan politik

menganggap Tamjidillah lebih menguntungkan. Berdasarkan perjanjian yang dibuat sebelumnya keinginan Belanda dapat dipaksakan sehingga Tamjidillah dijadikan raja sedang putra Sultan Adam yang lebih berhak, ialah Pangeran Hidayatullah diabaikan. Keputusan yang menyimpang dari tradisi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan sementara bangsawan dan rakyat. Dalam hubungan ini nampak pula bahwa intervensi Belanda dalam pengangkatan raja seperti ini kecuali bertentangan dengan tradisi juga berakibat timbulnya kericuhan di dalam istana. Apabila raja yang menggantikan itu masih belum dewasa, maka biasanya dibentuk suatu perwalian yang anggotanya terdiri dari saudara-saudara raja yang meninggal. Perwalian dihapuskan apabila raja yang baru telah cukup dewasa untuk memerintah sendiri. Sistem perwalian seringkali juga disalahgunakan oleh sementara bangsawan untuk kepentingan mereka sendiri.

Mengingat bahwa di Banjar terdapat pula sistem *selir*, terutama pada raja dan para bangsawan, maka dapat dimengerti bahwa jumlah keluarga raja bertambah banyak.⁷⁵ Tambah banyaknya kerabat raja tersebut merupakan salah satu sebab pula timbulnya keruwetan dalam soal pergantian raja maupun dalam pengisian jabatan-jabatan penting tingkat atas, seperti jabatan Mengkubumi.

Meskipun pada dasarnya penggantian raja didasarkan pada keturunan, tetapi keturunan raja yang dapat dicalonkan harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Di samping garis keturunan yang dibenarkan oleh adat, tabiat dan perilaku calon raja juga merupakan faktor penting dalam pemilihan. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa kepentingan politik dan pribadi seringkali mengabaikan syarat-syarat tersebut, sehingga mengakibatkan timbulnya kericuhan dalam istana dan kekecewaan di kalangan rakyat.

75 Dalam *Hikayat Banjar* disebutkan bahwa putra Sultan Rahmatullah (1620-1642) yang bernama Sultan Hidayatullah (1642-1650) mempunyai tiga orang istri yang berasal dari golongan berbeda, ialah golongan bangsawan dan ulama. Istri Sultan yang diambil dari golongan bangsawan ialah Putri Nur Alam, seorang putri dari Pangeran di Laut, sedang yang diambil dari golongan birokrasi dan ulama ialah putri dari seorang Kyai di Pondok dan seorang putri dari Tuan Khatib Banun; periksa J. Ras, *Op.cit.*, 145, 147. Disebutkan pula bahwa selain itu Sultan masih mempunyai banyak *selir*. Putra seluruhnya berjumlah 40 orang. Pada waktu Sultan Sulaiman meninggal pada tahun 1825, dan digantikan oleh Sultan Adam, terdapat 25 orang pangeran keluarga dekat dari raja; periksa Anonym, "Eenige reizen in de binnenlanden van Borneo, door eenen Ambtenaar van het Gouvernement, in het jaar 1824", *TNI*, 2, 1838, hal. 88

Untuk membedakan golongan bangsawan dengan rakyat bawahan, digunakan pelbagai macam lambang status, di antaranya yang paling menonjol adalah gelar, baik gelar keturunan maupun gelar jabatan. Gelar *pangeran*, *ratu*, *gusti*, dan *nanang* menunjukkan bahwa yang memakainya masih keturunan bangsawan dengan derajat-derajat yang berbeda-beda. Demikian pula gelar *adipati*, *tumenggung*, *kyai ngabehi*, *rangga*, *demang*, *lurah*, *pembekal*, menunjukkan jabatan apa yang dipangku oleh si pemakai. Karena pemegang jabatan birokrasi kerajaan tidak hanya terdiri dari golongan bangsawan, tetapi juga dari rakyat biasa, maka pemakaian gelar jabatan tingkat atas tidak menjadi monopoli golongan bangsawan. Sudah barang tentu jabatan-jabatan tingkat bawah dipangku oleh orang-orang dari golongan rakyat biasa.

Di samping lambang status berupa gelar, terdapat macam-macam lambang status yang lain guna mempertajam perbedaan yang dapat terlihat antara golongan atas dan golongan bawah, seperti rumah, payong, pengiring, pakaian. Kekayaan bangsawan pemegang tanah apanage dari hasil bumi tanah mereka, ditambah dengan hasil yang besar dari usaha perdagangan, memungkinkan mereka hidup mewah dalam rumah-rumah yang bagus. Bentuk bangunan rumah menunjukkan status penghuninya. Bentuk rumah seperti *bubungan tinggi*, *palimasan*, *balai laki* dan *gajah menyusu* menunjukkan rumah orang-orang besar.⁷⁷ Demikian pula susunan kompleks tempat kediaman dan hiasan dalam rumah, menunjukkan status penghuninya. Istana raja dibagi-bagi dalam beberapa kompleks dengan bangunan-bangunan tertentu. Bangsal untuk menerima tamu terletak di kompleks ketiga dari depan. Seluruh kompleks dibatasi dengan dinding yang kuat.

Sebagai ilustrasi dapat ditunjukkan misalnya istana raja Banjar yang ada di Martapura. Istana Martapura dibagi-bagi dalam bagian-bagian tertentu. Seluruh bangunan yang terdapat di dalam bagian-bagian istana berjumlah enam buah.

Bangunan pokok dari seluruh kompleks adalah balairung, tempat duduk raja bila sedang dihadap. Bangsal ini dibangun dalam tahun 1786 oleh Panembahan Batu atau Sultan Tahmidillah yang memerintah antara tahun 1785 dan 1808. Panjang bangunan ini kira-kira 120 kaki, lebar 50 kaki dan tinggi 25 kaki, terbuat dari kayu besi dengan diberi papan dengan

77 A.H.K. Bondan, *Op Cit.*, hal. 139 dst.

hiasan-hiasan ukiran. Bagian Timur dari istana Martapura diberi batas dinding dari tanah setinggi 20 kaki, sedang sisi-sisi lainnya dibatasi dengan pagar kayu besi yang kuat setinggi 20 kaki juga.⁷⁸ Hiasan-hiasan dalam istana raja sementara ada yang dibuat dari emas dan diisi berlian. Di samping itu terdapat pula peralatan dalam rumah yang berukiran juga.

Kekayaan yang diperoleh dari perdagangan laut maupun perdagangan sungai juga sangat menentukan status para bangsawan. Golongan bangsawan yang mempunyai status tinggi karena darah keturunan, sementara ada yang gagal dalam bidang usaha, sehingga hidup mereka tidak jauh berbeda dengan rakyat biasa. Seorang pegawai Belanda yang pernah mengadakan perjalanan di pedalaman Kalimantan Selatan dalam tahun 1824 mengatakan, bahwa beberapa bangsawan kerabat raja yang bertempat tinggal di Martapura, Karang Intan dan Matraman mendiami rumah yang tidak begitu bagus, bahkan ada yang dibuat dari bambu.⁷⁹

Pengiring-pengiring merupakan lambang kebesaran dari golongan bangsawan. Para bangsawan pemegang tanah apanage dapat mengangkat pengiring-pengiring sendiri. Makin kuat dan besar kekuasaan, ditambah dengan kekayaan yang melimpah, makin besar pula jumlah pengiringnya. Pengiring tersebut tidak hanya nampak pada upacara-upacara resmi negara, tetapi juga pada saat-saat bangsawan tersebut pergi berburu. Berburu merupakan kegemaran umum bagi raja maupun golongan bangsawan.⁸⁰ Dalam hubungan ini berburu, terutama berburu kijang merupakan lambang status juga, yang membedakan kegemaran golongan bangsawan dengan rakyat biasa.

Di dalam istana terdapat lambang-lambang kebesaran raja seperti *payong bawat* dan benda-benda upacara dalam bentuk *kendaga*, tikar tempat rokok dan lainnya. Benda-benda pusaka yang dianggap bertuah seperti keris Si Masagirang, tombak Si Panatus, bende Si Macan dan lainnya tersimpan pula dalam istana.⁸¹ Untuk memeriahkan suasana apabila raja menerima

78 A. Van der Ven, *Op.Cit.*, hal. 105

79 Anonym, *Op.Cit.*, hal. 88

80 Anonym, *Ibid.*, hal. 90

81 A.A. Cense, *Kroniek van Bandjarmasin*. Zantpoort, 1928, hal. 147 dst.

tamu seorang pembesar, para petugas seni mempergelarkan tari-tarian. Dalam upacara penobatan raja baru, sering pula dipertunjukkan *tari radap*. Dalam kesempatan seperti ini para bangsawan hadir dengan diikuti oleh para pengiring mereka dengan lambang-lambang kebesaran bangsawan, seperti payung, pakaian kebangsawanan dan perlengkapan lain.

Nampak jelas dengan menggunakan pelbagai macam lambang status, raja dan para bangsawan membedakan golongannya dengan rakyat biasa. Hak-hak dan wewenang yang dimilikinya karena tradisi memungkinkan mereka pendapat fasilitas dalam masyarakat. Karena kegiatan para bangsawan di dalam usaha perdagangan sangat menonjol, maka fasilitas yang mereka peroleh dari usaha perdagangan, mengakibatkan juga makin tingginya kedudukan mereka di dalam masyarakat.

Kekayaan negara sebagian di dapat dari pengaturan pajak yang dibebankan para rakyat di wilayah negara, dan selain itu didapat dari usaha perdagangan. Pada dasarnya pungutan pajak dikenakan pada seluruh penduduk, baik pada para bangsawan yang memiliki tanah-tanah apanage maupun rakyat biasa. Hasil dari tanah apanage para bangsawan sebagian wajib diserahkan kepada kas kerajaan. Pelbagai macam pajak dikenakan pada penduduk lainnya, baik petani, pedagang ataupun lainnya. Beberapa macam pajak yang perlu disebut misalnya pajak kepala, pajak tanah, pajak padi persepuluhan, pajak pendulungan emas dan berlian, pajak barang dagangan dan pajak bandar.

Raja sebagai penguasa tertinggi negara mempunyai wewenang untuk menarik sebagian dari pajak negara. *Pajak kepala* ditarik dari tiap keluarga, yang besar kecilnya disesuaikan dengan jumlah anggauta. *Pajak tanah* atau juga disebut *jawian* dikenakan pada tanah yang ditanami. Untuk tanah yang tidak ditanami dikenakan juga pajak yang disebut-sebut pajak *tajak turus*. Di samping itu ada juga uang pungutan sebagai biaya untuk setiap permintaan izin menanam kembali tanah penduduk. Uang pungutan ini disebut *tubus surat*.⁸² Pungutan pelbagai macam pajak tersebut dilakukan oleh petugas-petugas pajak yang mendatangi daerah-daerah. Ada juga pungutan pajak yang disebut hasil, yang sebenarnya tidak berbeda dengan pajak kepala hasil, yang sebenarnya tidak berbeda dengan pajak kepala bagi tiap-tiap anggota keluarga (*lawang*). Penarikannya dilakukan pada tiap tahun dan bertepatan dengan hasil musim panen, dalam bentuk uang atau

pun hasil bumi.⁸³ Pajak padi persepuluhan dikenakan pada hasil dari tanah sawah, sejumlah sepersepuluh hasil panen padi.

Kekayaan alam di daerah kerajaan Banjar dalam bentuk emas dan berlian merupakan sumber penghidupan yang menguntungkan bagi pemerintah maupun penduduk Banjar. Pendulungan emas dan berlian diusahakan baik oleh para bangsawan yang memiliki tanah daerah pendulungan, maupun oleh para pedagang dan penduduk setempat. Pajak yang dipungut dari usaha dan hasil pendulungan cukup dapat menambah pemasukkan penghasilan pemerintah kerajaan. Demikian pula apabila barang-barang tersebut diperdagangkan, tidak luput pula dari pajak barang dagangan. Pajak barang dagangan tersebut juga dikenakan pada hasil bumi dan hasil hutan yang diperdagangkan dari daerah pedalaman ke daerah pantai.

Letak kerajaan Banjar yang cukup strategis, karena berada di tepi jalan perdagangan laut di bagian Timur dan bagian barat Indonesia, menyebabkan kuatnya tradisi perdagangan laut dan pelayaran pada penduduk Banjar. Kecuali sebagai bandar transito, bandar dari negara Banjar juga mengeksport produksi hasil bumi dan hasil hutan yang cukup melimpah di daerah pedalaman. Demikian pula pemasukan barang-barang dagangan dari lain daerah atau dari negara asing untuk mencukupi kebutuhan hidup penduduk, ramai dilakukan. Bagi pemerintah cukai atau pajak bandar bagi perahu-perahu yang singgah di bandar dengan memuat barang dagangan merupakan hasil pendapatan yang cukup banyak. Dari hasil-hasil pajak dan cukai itulah sebagian besar dipakai untuk pembeayaan aparaturnya pemerintahan kerajaan dapat dicukupi.

Biograsi

Dalam urusan pemerintah kerajaan, Sultan dibantu oleh seorang *Mengkubumi* atau *Patih* yang bertindak sebagai kepala pelaksana pemerintahan. Jabatan ini biasanya dipegang oleh seorang bangsawan keluarga dekat dari raja, seperti putra atau saudara dari raja. Susunan jabatan di bawah Mangkubumi mengingatkan kita pada jabatan-jabatan di dalam kerajaan Jawa. Pengaruh Jawa terutama pada abad-abad ke 16 dan 17 cukup terasa dalam kerajaan Banjar. Pengaruh ini nampak sekali pada gelar-gelar para bangsawan, gelar jabatan dalam birokrasi kerajaan, organisasi pemerintahan, tatacara maupun

83 De Hollander, *I, land en volkenkunde*, 11, 1898 hal. 49

pada cabang-cabang seni istana.

Di bawah jabatan Mangkubumi terdapat jabatan-jabatan *mantri panganan*, *mantri pengiwa*, *mantri bumi* dan sejumlah 40 orang *mantri sikap*. Tiap-tiap mantri sikap ini mempunyai petugas bawahan sebanyak 100 orang.⁸⁴ Mantri panganan dan *mantri pangiwa* bertugas mengurus bidang kemiliteran. *Mantri Bumi* dan *mantri sikap* bertugas untuk mengurus perbendaharaan istana dan pemasukan pajak sebagai penghasilan negara. Para mantri tersebut adakalanya berasal dari rakyat biasa yang karena kecakapannya oleh raja diangkat sebagai pejabat dalam istana. Umumnya mereka memakai gelar *kyai* atau *tumenggung*.⁸⁵ Selain itu Mangkubumi masih didampingi oleh para *panggapit* yang terdiri dari *penghulu* yang bertugas sebagai pemuka agama, *patih balit*, *patih kuwin* dan *patih muhur*, yang masing-masing bertugas sebagai hakim dalam istana.⁸⁶

Hikayat *Carita Raja Banjar* dan *Raja Kota Waringin*.⁸⁷ memberi uraian terperinci mengenai jabatan-jabatan dalam negara Banjar sebelum abad ke 19. Di samping jabatan-jabatan terutama bersifat birokrasi dalam pemerintahan tersebut di atas, raja mempunyai kelompok-kelompok pejabat khusus untuk mengurus rumah tangga istana. Raja dengan keluarga terdekat (*kadang haji*) seperti *ratu ibu* dan putra mahkota bertempat tinggal dalam istana. Untuk menjaga keamanan istana raja mempunyai kelompok petugas yang disebut kelompok *sarawisa*. Kelompok ini mempunyai anggota sebanyak 50 orang dan dikepalai oleh seorang pejabat yang disebut *surabaja*. Karena kelompok ini bertugas dalam bidang keamanan, secara hierarkis mungkin mereka berada di bawah wewenang mantri *panganan* dan *pangiwa*. Kelompok *sarawisa* tersebut menempatkan markasnya di *pagungan*, sebuah bangunan tinggi dalam kompleks istana. Alun-alun dapat dilihat dengan jelas dari pagungan tersebut.

Tugas mengurus dan membersihkan *balairungsari* dan *sitiluhur* diserahkan pada para petugas *mandung* yang beranggotakan 50 orang dan dikepalai oleh pejabat *raksayuda*. Pada saat-saat raja dihadap oleh para pembesar kerajaan, raja dikawal oleh kelompok pasukan pengawal yang bernama kelom-

84 Amir Hassan Kiai Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, Banjarmasin, 1953, hal. 149

85 J. Ras, *Hikajat Bandjar*, Diss. Leiden 1968, hal. 196
glossary, hal. 568

86 Ibid., hal. 440 441

87 Ibid., hal. 228 dst.

pok *mamagarsari* yang berjumlah 40 orang akan dikepalai oleh pejabat *sara-yuda*. Kelompok yang disertai tugas memelihara alat-alat senjata adalah *saragani*. Tugas mereka kecuali memelihara alat-alat senjata api seperti senapan dan meriam, juga alat-alat senjata lain seperti tombak, keris, parang, panah, perisai dan lainnya. Kelompok *saragani* berada di bawah seorang kepala yang disebut *saradipa* atau juga disebut *wangsanala*.⁸⁸

Tugas mengurus upacara-upacara kerajaan dipercayakan pada kelompok petugas khusus di bawah pimpinan seorang pejabat *mengumbara*. Dalam upacara-upacara kerajaan raja didampingi oleh para rokhaniawan yang disebut *mawarga*, sedang yang disertai membawa benda-benda upacara lambang kebesaran raja seperti *payong bawat*, tombak, tikar, tempat yang dikepalai oleh pejabat *rasajiwa*. Karena kelompok *pamarakan* yang beranggotakan 50 orang itu dapat dikatakan selalu dekat dengan raja, maka mereka sering pula bertugas sebagai pesuruh untuk menyampaikan perintah raja atau bahkan melayani apabila raja sedang bersantap. Masih perlu disebut kelompok *pergamelan* yang ditugaskan menyempurnakan, mengembangkan, dan mempergelarkan seni tari, gamelan dan pertunjukan lain di dalam istana. Kelompok seniman ini dikepalai oleh pejabat *astaprana*.⁸⁹ Karena istana raja Banjar diperlengkapi dengan peralatan yang berukiran indah, dan banyaknya hiasan di antaranya berlapis emas dan bertabur berlian, maka dapat dipastikan bahwa seniman-seniman ukir dan kerajinan tangan terdapat pula di istana raja. Berhubungan dengan kegemaran berburu dari raja-raja Banjar maka ada pula kelompok petugas yang khusus mengiring raja selama berburu di samping tugas menangkap binatang hutan lainnya. Kelompok petugas ini disebut *tuha-buru*, sedang kepalanya disebut *puspawarna*. Para petugas yang mengurus pekerjaan-pekerjaan untuk keperluan istana bertempat tinggal di perkampungan di sekitar istana.

Mengawasi dan menjaga keamanan pasar menjadi tugas dari kelompok *pariwal* atau *singhana*. Sebagai kepalanya adalah pejabat *singtaka* dan *singapati*. Dalam hubungannya dengan bidang ekonomi disebut adanya jabatan *wargasari* yang mengepalai kelompok petugas *juru gaduh gedong* dan *jurung*, yang mempunyai tugas mengurus bahan makan, terutama persediaan padi. Karena perdagangan laut sangat penting bagi negara Banjar, maka masalah

88 J. Ras, *Op. Cit.*, hal. 285

89 Ibid., 331: untuk jabatan-jabatan di atas periksa juga A.H. Bondan, *Op.Cit.*, hal. 149 -- 150

perbandaran merupakan urusan yang cukup penting. Pengurusan dalam bidang ini termasuk antaranya penarikan cukai bandar untuk barang-barang dagangan yang diimpor dan yang diekspor dan cukai berlabuh bagi perahu-perahu yang singgah di bandar, diurus oleh pejabat *anggamarta* sebagai kepala dari para petugas *juru bandar*. Kepala urusan perbandaran adakalanya dijabat oleh orang asing yang diangkat oleh kerajaan. Pengurusan perdagangan yang diusahakan oleh negara diserahkan pada pejabat *wiramartas*.

Apa yang diuraikan di atas adalah susunan jabatan dalam birokrasi kerajaan sekitar abad ke 17 yang sedikit-banyak sebagian masih terus digunakan dalam abad-abad berikutnya. Beberapa perubahan terjadi misalnya pada pemerintah Sultan Adam (1825 – 1857) seperti adanya jabatan *mufti* yang berfungsi sebagai hakim tertinggi kerajaan yang secara hierarkis mengepalai hakim-hakim tingkat bawahan. *Penghulu* istana selain sebagai pemuka agama sekaligus juga menjadi kepala mesjid besar di kota kerajaan. Semua pejabat dalam birokrasi kerajaan diangkat oleh raja atau wakilnya yang dikuasakan dengan surat piagam.

Untuk mengurus pemerintahan di daerah-daerah, disusun jabatan-jabatan tertentu dengan wewenang dengan kewajiban yang sesuai dengan besar-kecilnya kesatuan wilayah yang diperintahnya. Dalam hubungan ini perlu disebut adanya daerah-daerah apanage para bangsawan yang merupakan semacam daerah *enclave* di daerah-daerah yang pengurusannya dilakukan oleh kepala-kepala yang ditunjuk oleh bangsawan pemegang tanah apanage. Kesatuan wilayah setingkat dengan distrik pada masa kekuasaan Belanda dikepalai oleh pejabat yang disebut *lalawang*. Lalawang membawakan sejumlah kesatuan wilayah lebih kecil, setingkat dengan onderdistrik, yang masing-masing dikepalai oleh seorang *lurah*. Seperti halnya dengan kesatuan wilayah tingkat atasan, dalam wilayah-wilayah ini selain terdapat jabatan-jabatan yang mengurus soal-soal sekuler, juga terdapat jabatan-jabatan urusan keagamaan. Di kelurahan terdapat jabatan-jabatan keagamaan seperti *kaliba*, *katip*, *lebai*, *bilal*.⁹⁰ Tiap-tiap lurah membawakan sejumlah desa yang masing-masing dikepalai oleh pembekal. Desa terdiri dari sejumlah kampung yang masing-masing diketuai oleh *tetuha kampung*. Tetuha kampung dipilih di antara dan oleh penduduk dengan syarat: ia adalah penduduk asli kampung, berpengaruh, mempunyai kecakapan dan pengalaman. Di dalam kampung kedudukan tetuha kampung cukup dihormati.

90 A. Van der Ven, "aantekeningen omtrent het rijk Bandjarmasin", *TBG*, IX, 1860, hal. 115

4. Masyarakat

Dari seluruh uraian di atas sebenarnya sudah agak tampak bagaimana susunan masyarakat dalam negara Banjar. Golongan bangsawan kerajaan merupakan golongan yang dihormati dalam masyarakat. Mereka sebagian memangku jabatan birokrasi kerajaan, sebagian mengadakan usaha pribadi, seperti sebagai pedagang atau sebagai pemilik usaha pendulangan emas dan berlian. Sudah pasti bahwa di kalangan bangsawan sendiri terdapat juga lapisan-lapisan, menurut derajat kebangsawanannya. Hal ini juga berpengaruh terhadap tingkatan penghormatan orang kepada mereka. Selain golongan bangsawan, golongan pedagang mempunyai kedudukan yang cukup dihargai masyarakat. Pedagang-pedagang kaya mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat, bahkan juga pada pemerintah kerajaan. Penghormatan pada seorang pedagang kaya akan makin bertambah, apabila pedagang tersebut sekaligus juga masih keturunan bangsawan. Sudah terang bahwa penghargaan pada golongan pedagang juga bertingkat-tingkat, menurut besar-kecilnya usaha ataupun kaya dan tidaknya pedagang tersebut. Mengingat bahwa tradisi usaha berdagang cukup tebal dalam masyarakat Banjar, maka dapat difahami mengapa usaha tersebut dipandang terhormat. Usaha perdagangan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang kecil dapat dilihat misalnya di pasar-pasar di tepi-tepi sungai, demikian pula ramainya lalu lintas perahu-perahu kecil membawa barang-barang dagangan hasil bumi atau hasil hutan di sungai-sungai yang banyak terdapat di daerah kerajaan Banjar.

Golongan pemimpin-pemimpin agama termasuk lapisan atas pula. Sekalipun tidak berkuasaan politik golongan ini sangat berpengaruh dalam masyarakat. Ada pula yang ini sangat berpengaruh dalam masyarakat. Ada pula yang menduduki jabatan-jabatan birokrasi sekalipun jumlahnya tidak besar. Tetapi sebagian besar golongan ini terdapat di daerah pedesaan di antara rakyat biasa. Selain menjadi guru agama banyak pula yang menjadi pedagang sehingga kekayaan yang diperoleh meningkatkan status sosialnya.

Golongan petani penanam hasil bumi merupakan golongan yang cukup besar jumlahnya. Mereka merupakan golongan yang memproduksi bahan makan kecuali untuk kebutuhan hidup sendiri, juga sebagian diperdagangkan. Penjualannya dilakukan sendiri atau disalurkan melalui tengkulak-tengkulak yang mendatangi desa-desa daerah pedalaman. Selain itu terdapat pula golongan pekerja yang membuat barang-barang kerajinan, seperti anyam-anyaman, alat-alat perkakas rumah tangga

dan lainnya. Mengingat bahwa perdagangan laut sangat ramai di bandar-bandar kerajaan Banjar, maka tidak mengherankan bahwa golongan buruh tenaga kasar cukup banyak juga jumlahnya.

E. SUMATRA (UTARA)

1. Wilayah.

Pada abad 19 di Sumatera terdapat sejumlah negara yang berbentuk kerajaan seperti Aceh, Siak, Kampar, Palembang dan Jambi.⁹¹ Tetapi di samping itu ada juga wilayah-wilayah yang tidak mempunyai satu pemerintahan pusat, seperti Lampung misalnya. Di situ tampak pemerintahan dipegang oleh kepala suku atau kepala distrik. Sehingga dengan demikian, ketika Belanda mulai memperluas kekuasaannya ke Sumatera pada awal abad 19, sikap dan tindakannya terhadap negara-negara di Sumatra itu berbeda-beda.

Belanda sedikit demi sedikit mulai memasukkan dan menanamkan kekuasaannya di beberapa wilayah, baik secara langsung maupun tak langsung. Di daerah-daerah yang secara tidak langsung dikuasainya, pemerintah Hindia Belanda hanya menempatkan pos-pos pemerintahan dan pos-pos militer di tempat-tempat yang dianggapnya penting. Di wilayah ini kekuasaan raja-raja boleh dikatakan masih penuh, misalnya seperti di Jambi, Siak, Kampar dan Inderagiri. Di samping itu di beberapa tempat lainnya, seperti di Bengkulu, Lampung dan Palembang, Belanda berhasil berkuasa secara langsung dan menempatkan pegawainya seperti Residen atau Kontrolleur. Pejabat Belanda di daerah-daerah itu bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat di Batavia (Jakarta). Misalnya untuk Palembang telah diangkat seorang Residen pada tahun 1839.

Walaupun demikian Pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk tidak terlalu mencampuri urusan-urusan penduduk setempat. Pungutan pajak secara langsung, seperti pajak tanah, pajak kepala, pajak jalan dan lain-lainnya tidak dilakukan. Keuangan yang diperlukan untuk membiayai aktifitasnya diperoleh dari perdagangan seperti monopoli penjualan candu, dan garam, pen-

91 Sumber yang dipakai untuk bagian Pendahuluan ini terutama adalah buku *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia - Belanda, Tahun 1839 - '48*. Arsip Nasional RI, Penerbitan sumber-sumber sejarah No.5, Jakarta, 1973 dan *Laporan Politik Tahun 1837*. Arsip Nasional RI., Penerbitan sumber-sumber sejarah, Djakarta, 1971, khususnya tentang Sumatra.

jualan hasil-hasil setempat dan cukai atas barang-barang yang keluar dan masuk wilayah itu.

Bila dilihat secara menyeluruh negara di Sumatera itu ada yang telah tumbuh beberapa abad sebelum Belanda tiba di Indonesia. Misalnya Palembang telah terkenal sebagai pusat kerajaan Sriwijaya. Yang penting adalah, ketika Belanda datang, pada umumnya para penguasa di wilayah di Sumatra itu beragama Islam dan memegang peranan dalam perniagaan di wilayahnya. Tapal batas antara kerajaan-kerajaan itu sangat sukar untuk ditentukan karena tidak pernah diadakan perjanjian atau persetujuan tentang tapal batas wilayah masing-masing. Bahkan sering terjadi bahwa karena satu dan lain sebab sebagian dari wilayah sebuah kerajaan dikuasai oleh negara tetangganya. Misalnya para kepala suku di Lampung selalu bersaing memperebutkan kekuasaan, sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya suatu pemerintah pusat yang kuat, Sultan Palembang berhasil menguasai daerah sepanjang Sungai Komering.

Salah satu negara yang penting di Sumatera pada abad 19 ini adalah Aceh yang terletak di ujung utara pulau Sumatera. Pada waktu itu Aceh mempunyai peranan yang besar terletak di jalur lalu lintas perdagangan laut dan juga karena Aceh adalah satu-satunya negara yang masih berdaulat penuh. Dalam Traktat London 1824 kedaulatan Aceh dijamin baik oleh Belanda maupun oleh Inggris, sebagai penandatanganan persetujuan itu. Oleh karena itu sistem negara Aceh perlu dikaji lebih lanjut dan akan dibahas lebih luas agar memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan sejarah di Sumatera pada abad 19.

Sudah sejak lama pantai Utara dan Timur laut pulau Sumatera menjadi tempat persinggahan kaum pedagang yang mengadakan perdagangan antara Cina dan India.⁹² Misalnya Samudra Pasai dengan pelabuhannya pada akhir abad ke 13 telah menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam ke Indonesia. Kemudian ketika pada tahun 1511 Portugis berhasil menguasai bandar Malaka, para pedagang Aceh khususnya mampu bertahan dan bersaing, bahkan mengembangkan kekuasaannya. Selain Samudra-Pasai masih terdapat beberapa negara lain di Sumatra Utara pada waktu itu, di antaranya ialah Tamiang, Perlak, Daya, dan negara Aceh Da-

92 Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra. Atjeh, the Netherlands, and Britain, 1858 - 1898*, Kuala Lumpur, 1969, hal. 1-5

russalam yang berpusat di lembah Sungai Aceh.

Pusat negara Aceh meliputi wilayah yang disebut Aceh Besar dengan ibukota yang dinamakan Banda Aceh Darussalam. Sultan Aceh berhasil memperluas dan memperkuat kekuasaannya berkat majunya perdagangan. Tanpa kesukaran penguasa-penguasa daerah lainnya dapat ditundukkan. Sehingga mulai abad ke-16 semakin luaslah daerah kekuasaan Aceh Darussalam. Namun walaupun daerah-daerah dan negara-negara yang ada di Sumatra Utara ini menyatakan tunduk kepada Aceh, mereka tetap bebas dan mempunyai otonomi yang sebesar-besarnya.

Kekuasaan Aceh semakin memuncak di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda (1607 – 1836).

Ia menguasai jalur pantai baik sebelah Barat maupun sebelah Timur dan para pedagang dipaksa singgah di pelabuhan-pelabuhan Aceh, sehingga kekayaan Sultan dari cukai barang dagangan semakin bertambah. Menurut catatan seorang pedagang bangsa Perancis yang datang di Aceh pada tahun 1621 daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Aceh adalah Labo, Singkil, Barus, Batanghari, Pasaman, Tiku, Pariaman, Padang dan Sileda.⁹³

Setelah Sultan Iskandar Muda meninggal, kekuasaan kesultanan merosot dan hanya menjadi lambang saja. Daerah kekuasaan sultan-sultan pengganti Iskandar Muda hanya berkuasa di ibukota dan daerah pelabuhan saja. Pada saat itu kekuasaan yang sebenarnya jatuh ke tangan para *uleebalang*, Imam dan kepala-kepala pemerintahan yang lain, yang kekuasaannya di wilayah masing-masing semakin besar. Misalnya dengan majunya perdagangan lada maka di daerah pantai muncul penguasa-penguasa baru yang sering disebut "raja". Karena sekarang perdagangan dikuasai oleh para penguasa baru itu, penghasilan Sultan semakin berkurang.

Sultan kehilangan haknya memungut bea masuk dan ke luar dari pelabuhan-pelabuhan yang semula dikuasainya. Sebagai gantinya ia mendapat upeti tahunan yang disebut *hasil* atau *wasee* dari para penguasa baru itu. Sehingga pada abad ke 19 ini walaupun perdagangan Aceh semakin meningkat, hubungan Sultan dengan para penguasa baru yang muncul sebagai akibat berkembangnya perdagangan itu justru menjadi lemah.

Pada tahun 1802 yang bertahta adalah Sultan Alauddin Jauhar Alam Syah yang memerintah sampai tahun 1823. Tugasnya yang terutama adalah

93 *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh, 1977/1978, hal. 74

mengembalikan kekuasaan dan kewibawaan pemerintah pusat. Ia menyadari bahwa daerah-daerah yang semakin besar kekuasaannya dan semakin luas otonominya akan sangat membahayakan kedudukan Pemerintah Pusat. Lebih-lebih bila kekuasaan asing yaitu Inggris dan Belanda berhasil campur tangan. Sebelum tugasnya selesai ia sudah meninggal pada tahun 1823. Penggantinya ialah Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah (1823 – 1838). Seharusnya yang menggantikan adalah putranya dari permaisuri yaitu Tuanku Ibrahim. Akan tetapi para panglima Sagi telah menentukan bahwa Tuanku Ibrahim kehilangan haknya. Untuk mencegah agar Tuanku Ibrahim tidak memberontak, maka Sultan Muhammad Daud mengangkat dia menjadi penasihatnya.

Ada suatu peristiwa penting yang terjadi di awal pemerintahan Sultan Muhammad Daud yaitu ditandatanganinya Traktat London pada tanggal 17 Maret 1824 antara Inggris dan Belanda. Pokok dari persetujuan ini adalah tentang pembagian daerah kekuasaan Inggris dan Belanda di Indonesia dan Malaya. Walaupun tidak tercantum dalam naskah persetujuan itu, namun dalam nota dari Belanda maupun dari Inggris jelas terungkap keduanya akan menghormati kemerdekaan Aceh.

Akan tetapi Aceh sendiri tidak diikuti sertakan dalam perundingan itu. Dari sini dapat diduga bahwa masalah Aceh akan dipertahankan di antara kedua kekuasaan asing itu.

Kenyataan membenarkan dugaan ini. Pada tahun 1871 Pemerintah Hindia Belanda dan Inggris mengadakan persetujuan baru yang disebut Traktat Sumatra. Di antara isinya yang penting, yaitu menyangkut Kerajaan Aceh, adalah kebebasan yang diberikan kepada orang Belanda oleh Inggris untuk bertindak di pulau Sumatra. Dengan demikian terbukalah jalan bagi orang-Belanda untuk melaksanakan cita-citanya menguasai seluruh pulau Sumatra termasuk Kesultanan Aceh. Sejarah kemudian mencatat timbulnya perang kolonial yang telama yang pernah terjadi di Indonesia.

2. Raja dan Bangsawan

Susunan masyarakat Aceh tidak jauh berbeda dari susunan masyarakat tradisional yang lain di Indonesia. Pada pokoknya terdapat tiga kelompok besar dalam masyarakat yang bertingkat strukturnya ini: Tingkatan yang paling atas diduduki oleh raja yang bergelar Sultan dengan keluarganya dan gelar mereka adalah *Tuanku*. Di bawahnya terdapat kaum bangsawan dan para pejabat tinggi pemerintah baik di pusat kerajaan, yaitu ibu-

kota, maupun di daerah-daerah. Pada umumnya gelar yang dipakai adalah *Teuku*, kecuali para bangsawan di daerah-daerah di pantai Timur yang bergelar *Tengku* karena mendapat pengaruh dari Melayu. Tingkatan yang paling bawah, yang jumlahnya paling besar adalah rakyat umum yang terbagi dalam berbagai tingkatan, kelompok atau golongan.

Sultan yang berada di tingkat teratas menduduki pusat-pusat dalam pemerintahan. Ia dibantu oleh sejumlah besar pejabat-pejabat birokratis baik sipil maupun keagamaan. Mereka mempunyai kedudukan tinggi dalam pemerintahan, misalnya jabatan sebagai Perdana Menteri, *Wasir* (mentri), *Qadhi* (jaksa), *Laksamana*, *Syahbandar*, dan lain-lainnya.

Para bangsawan di daerah juga mempunyai kedudukan yang tinggi di daerah kekuasaannya masing-masing. Bahkan sering terjadi bahwa seorang bangsawan daerah mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari pada raja. Misalnya Panglima Polem dari Sagi XXII Mukim berhak menentukan siapa raja yang akan bertahta.

Menurut hukum raja berkewajiban melindungi rakyat dari tindakan sewenang-wenang para pejabat kerajaan. Ia juga mempunyai kekuasaan untuk mengangkat orang-orang yang ahli dalam lapangan masing-masing untuk mengurus kerajaan. Para alim ulama, baik yang belajar di lembaga-lembaga pendidikan agama seperti Dayah Teungku Chiek,⁹⁴ yang banyak didirikan di kesultanan Aceh maupun yang menambah pengetahuannya di Tanah Suci mempunyai kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan. Hal ini dapatlah dimengerti bila diingat bahwa dasar utama masyarakat Aceh adalah agama Islam.

Sultan dan keluarganya hidup di istana, yang terletak di ibukota Bandar Aceh Darussalam. Istana itu dikelilingi oleh lapangan yang berbentuk bulat telur dan diperkuat oleh empat lapis tembok pertahanan di sebelah luarnya. Bahkan menurut laporan seorang pengamat Perancis pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607 – 1636) sebelum sampai ke bangunan istana yang sebenarnya harus melalui empat buah pintu gerbang dan yang terakhir dinding batunya sengaja diperkuat sampai 50 langkah tebalnya.⁹⁵ Di keempat penjuru dinding pertahanan didirikan empat buah menara yang tinggi sebagai tempat pengintai menjaga kemungkinan

94 Lembaga Pendidikan agama tinggi yang mendidik para calon alim ulama.

95 A.Hasjmy, *Iskandar Muda Meukuta Alam*, Jakarta, 1975.

datangnya bahaya.

Istana Sultan Aceh sebagaimana layaknya istana raja-raja Indonesia pada masa itu, juga dihias dengan indah. Taman-taman dibangun di sekitar dan di dalam kompleks istana. Salah satu contohnya seperti yang digambarkan oleh Nuruddin ar Raniri salah seorang pujangga Aceh yang hidup pada masa Sultan Iskandar Thani (1637 – 1641) dalam karyanya *Bustanus Selatin*. Diceritakan bahwa Sultan membuat suatu taman yang indah yang diberi nama Taman Ghairah di mana mengalir sungai yang jernih dan penuh ditumbuhi tanam-tanaman dan bunga-bunga. Di dalamnya juga dibangun bermacam-macam balai seperti balai keemasan dan balai gading.⁹⁶ Terdapat juga sebuah bangunan yang disebut *Gegunongan Menara Permata* tempat keluarga raja bersuka ria.⁹⁷ Lebih lanjut Nuruddin ar-Raniri menceritakan tentang keindahan istana yang dihias emas, permata dan batu-batu berharga lainnya. Payung-payung kebesaran yang bertingkat tujuh, bertingkat lima atau bertingkat tiga merupakan kelengkapan kebesaran raja.⁹⁸

Gambaran yang diberikan dalam Bustanus Salatin tentang kehidupan istana dan keindahan bangunannya rupanya masih bisa dipakai untuk menggambarkan keadaan istana dan kehidupan raja dan kaum bangsawan abad 18 dan 19. Karena agaknya tidak banyak perubahan yang terjadi. Buktinya sisa-sisa Genongan dan pintu gerbang istana sampai masa kini masih bisa dilihat di Banda Aceh.

Negara-negara Aceh diperintah oleh raja yang turun temurun. Penggantian Sultan biasanya dilakukan bila Sultan yang memerintah sudah meninggal dunia. Bila Sultan yang sedang memerintah sebelum meninggal sudah menentukan siapa yang akan menggantikannya, maka tidak akan timbul kesulitan lagi walaupun yang ditunjuk sebagai penggantinya itu mungkin bukan anak

96 Dr. T. Iskandar *Nuru'd-din ar-Ranizi Bustanu's-Selatin*, Kuala Lumpur, 1966, hal. 25

97 Tentang "Gunongan" sudah dibahas oleh Prof. Dr. R. Hoesein Djajadiningrat yang berjudul "De stichting van het "Gunongan" Geheeten Monument Ze Koeta-raja", dalam *TBG*, 57, 1961, hal. 561-575

98 Dr. T. Iskandar, *Ibid*, hal. 37-38

kandungnya.⁹⁹ Akan tetapi bila belum ada yang ditentukan siapa yang akan menggantikannya, maka biasanya Panglima Sagi XXII Mukimlah yang menjadi wakil raja. Ia juga bertugas menerima hasil yang didapat oleh Aceh dan daerah takluknya. Bila sudah ada yang diangkat menjadi sultan, maka perbendaharaan yang dikumpulkan itu pun dengan sendirinya dikembalikan kepada Sultan baru yang berhak atasnya.

Pada dasarnya pengganti raja meninggal adalah putra laki-laki raja lahir dari istri pertama. Umumnya yang mengganti adalah putra yang sulung, namun apabila hal itu tidak mungkin, maka dapat diangkat putra laki-laki yang lain. Bila tidak ada seorang pun pengganti laki-laki yang dianggap pantas, seorang putri atau kemenakan adakalanya ditunjuk sebagai pengganti raja. Sedang apabila putra yang naik tahta itu masih di bawah umur dan dianggap belum mampu memerintah sendiri, dapat dibentuk dewan perwali-an yang akan memegang pemerintahan sementara sampai saat anak tersebut menjadi dewasa untuk memerintah sendiri. Biasanya ibunya dan pamannya yang diangkat menjadi wali. Misalnya pada waktu Sultan Ali Ri'ayat Syah meninggal pada tahun 1607 kemenakannya yang bernama Maharaja Darma Wangsa Tun Pangkat diangkat sebagai penggantinya dengan nama Sultan Iskandar Muda.¹⁰⁰ Sultan Iskandar Muda yang meninggal pada tahun 1636 diganti oleh putra angkatnya, yaitu yang kemudian bergelar Sultan Iskandar Thani Alauddin Mughayat Syah.¹⁰¹ Pada hal Sultan Iskandar Thani adalah putra Sultan Pahang yang dibawa ke Aceh ketika kerajaan Pahang ditaklukkan oleh Aceh pada tahun 1618.¹⁰²

Waktu Sultan Thani meninggal pada tahun 1641 yang mengganti-

-
- 99 Sebuah contoh terdapat dalam kitab *Bustanul Salatin* yang menceritakan bahwa Iskandar Muda ketika menyerbu Pahang di Semenanjung Melayu telah tertarik pada putra mahkota Pahang yang waktu itu baru berumur 7 tahun. Kemudian anak itu dibawa ke Aceh dan dari tanda-tanda yang dilihatnya Sultan Iskandar Muda merasa yakin bahwa putra mahkota Pahang tersebut akan menjadi raja besar. Itulah sebabnya maka ketika putra mahkota Pahang yang bergelar Hussain Syah berusia 10 tahun dikawinkan dengan putrinya yang bernama Tuan Putri Serialam Permaisuri.
- 100 Hoescin Djajadiningrat, "Critische overricht van der Malaische weken vervatte gegevens, over de geschiedenis van het Speltanaat van Atjeh", *BKI* LXV, 1911, hal. 175
- 101 *Ibid.*, hal. 183
- 102 Lihat catatan no. 84 di atas.

kan sebagai raja adalah istrinya sendiri yang bernama Putri Sri Alam Permaisuri, yaitu putri Sultan Iskandar Muda. Setelah menjadi raja putri ini bergelar Sultan Tajul' alam Safiatuddin Syah. Ketika Sultan Tajul' alam meninggal pada tahun 1675 ia diganti oleh seorang wanita lain yang tidak jelas asalnya. Raja baru ini bernama Nurul' alam Nakiatuddin Syah.¹⁰³ Pada tahun 1678 ia diganti oleh putrinya yang bernama Putri Raja Setia dan bergelar Sultan Inayat Zakiatuddin Syah (1678 – 1688) dan kemudian digantikan oleh seorang puteri lagi dan bergelar Sultan Kamalat Syah sehingga pada waktu itu kesultanan Aceh diperintah oleh empat orang Sultan wanita secara berturut-turut. Kemudian ketika pada tahun 1795 Sultan Alauddin Muhammad Syah meninggal ia digantikan oleh putranya Husein yang masih kecil. Sebelum ia menjadi dewasa, pemerintahan kerajaan dipegang oleh ibunya, dan pamannya.¹⁰⁴

Fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa sistim penggantian raja di Kesultanan Aceh tidaklah terlampau ketat. Pengganti raja tidaklah harus selalu putra laki-laki, tetapi dapat juga wanita, kemenakan atau pun istri dari raja yang meninggal.

Dalam pengangkatan raja baru, peranan para panglima Sagi sangat besar, terutama Panglima Polem dari Sagi XXII Mukim. Sebagai contoh misalnya pada waktu Sultan Jauharul'alam meninggal pada tahun 1823 menurut surat wasiat yang ditunjuk sebagai penggantinya adalah putranya yang baru kira-kira berumur tujuh tahun. Panglima Polem dari Sagi XXII Mukim tidak menyetujui dan tidak mau mengakui raja baru yang ditunjuk sesuai dengan surat wasiat itu. Kemudian dipilihnya putra yang lain dari Sultan almarhum bernama Tuanku Darid.¹⁰⁵ Dari fakta ini tampak jelas bahwa kadang-kadang seorang bangsawan mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari raja atau kalangan istana. Pelantikan raja baru biasanya disaksikan oleh para ulama istana dan ulama kerajaan terkemuka, para panglima sagi dan para pembesar kerajaan lainnya. Nyatalah bahwa hubungan raja dengan kaum bangsawan, baik yang berada dekat dengan ibu kota maupun yang di wilayah-wilayah di luar ibu kota, cukup kuat.

103 Hoesein Djajadiningrat, *Op.Cit.*, hal. 189

104 Ibid., hal. 211

105 *Loc. Cit.*

Dalam garis besarnya terdapat dua macam kaum bangsawan di Aceh. Pertama adalah mereka yang merupakan keturunan sultan-sultan Aceh dan bergelar *tuanku* dan kedua adalah mereka yang berasal dari keturunan Uleebalang dan memakai gelar *teuku*.¹⁰⁶ Pada umumnya uleebalang (hulubalang) menguasai sebuah *Nangroe* (negeri) yaitu gabungan beberapa mukim. Asalnya mungkin dari pembantu raja yang terkemuka yang karena jasanya kemudian diberi hadiah sejumlah mukim untuk penghidupannya. Sistem ini terutama mulai berkembang di masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda.¹⁰⁷

Selain sebagai penguasa nangroe uleebalang juga bertugas mempersiapkan tenaga tempur bila terjadi peperangan. Ia juga melaksanakan segala perintah Sultan, menyediakan perbekalan perang bila diperlukan oleh pemerintah Pusat dan memberi upeti kepada Sultan. Mereka mempunyai kekuasaan yang besar di daerahnya masing-masing dan sampai batas-batas tertentu mereka itu adalah pemimpin yang merdeka.¹⁰⁸

Para Uleebalang menerima kekuasaannya langsung dari Sultan Aceh. Mereka memerintah secara turun temurun dan setiap penggantian pimpinan harus disahkan oleh Sultan. Pengesahan Sultan itu tercantum dalam suatu surat pengangkatan yang dinamakan *sorkata* (*sarakata*) yang dibubuhi cap stempel kerajaan Aceh yang disebut *Cap Sikureung* (cap sembilang) dan sering juga disebut cap halilintar.¹⁰⁹

Cap Sikureung ini dipakai oleh sultan-sultan Aceh sejak Sultan Iskandar Muda sampai Sultan Aceh yang terakhir. Dalam stempel ini dicantumkan nama-nama Sultan yang pernah memerintah di kesultanan Aceh sebanyak 9 orang termasuk sultan yang sedang memerintah yang ditempatkan di tengah-tengah. Sedang nama-nama sultan yang delapan lainnya di tempatkan di sekelilingnya. Pemilihan nama-nama Sultan untuk di tempatkan dalam cap itu didasarkan pada kemasyarakatannya atau karena hendak dijadikan

106 Zakaria Ahmad, *Op. Cit.*, hal. 95

107 Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra. Aceh, The Netherlands, and Britain*, 1858 - 1898, hal. 2

108 *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, hal. 78

109 Loc. cit., Zakaria Ahmad, *Op.Cit.*, hal. 89

kenang-kenangan.

Di samping para uleebalang para *Panglima Sagi* pun tidak kecil kekuasaannya. Seperti telah tersebut di atas Panglima Polem dari Sagi XXII mukim adalah yang paling terkemuka. Ia sebenarnya adalah putra Sultan Iskandar Muda dari istri yang bukan permaisuri dan bernama Teuku Itam. Ia mengambil gelar Polem yang berarti "saudara tua" karena ia lebih tua dari putri Tujul' alam, permaisuri Sultan Iskandar Thani. Mula-mula ia menjadi Imam di Gle Yeueng di hulu Sungai Aceh. Kemudian putranya yang terkenal sebagai pahlawan dan menggantikan kedudukan diangkat menjadi pemimpin mukim-mukim yang ada di wilayah itu yang berjumlah 22 buah. Untuk membela kepentingannya mukim-mukim itu menyatukan diri dalam suatu federasi dan terbentuklah Sagi XXII mukim. Sebagai imbalan dan reaksi dari pembentukan Sagi XXII mukim ini, maka di sisi Barat dan sisi Timur Sungai Aceh juga terbentuk federasi dari mukim-mukim yang ada di situ, yaitu Sagi XXV mukim dan Sagi XXVI mukim karena masing-masing jumlahnya 25 mukim dan 26 mukim.¹¹⁰ Ketiga buah federasi mukim ini hanya dibentuk di wilayah Aceh Besar saja.

Para Panglima Sagi yang juga disebut uleebalang pada mulanya dipilih untuk mempertahankan saginya. Akan tetapi lama-kelamaan kekuasaannya menjadi turun temurun dan menyatakan diri sebagai pengawal kesultanan. Demikian pula halnya dengan para uleebalang, kekuasaannya pun semakin besar. Betapa besarnya kekuasaan para uleebalang itu sampai timbul pepatah pada abad 19 bahwa 12 uleebalang dari ketiga sagi itu mempunyai kekuasaan untuk menurunkan dan mengangkat sultan. Walaupun demikian mereka itu masih tetap menyatakan hormatnya kepada Sultan.¹¹¹

Di antara panglima-panglima sagi, Panglima Sagi XXII Mukim adalah yang terkemuka. Ia berkedudukan juga sebagai Patih (*Mantri yang terutama besar*) yang memangku pemerintahan sebelum seorang raja baru dilantik, dan sultan yang lama sudah meninggal. Para pejabat tinggi kerajaan sering diberi sebutan orang kaya atau orang besar.¹¹²

110 Anthony Reid, *Pre-Colonial State Systems in Southeast Asia*, hal. 53

111 Anthony Reid, *Context for North Sumatra. Atjeh the Netherlands, and Britain*, 1858 – 1898, hal. 4

112 L.W.C. Van den Berg. "De Mohammedaansche Vorsten in Nederlandsch Indie", *BKI*, 1901, hal. 48 – 49

Dari uraian tersebut di atas nampaklah bahwa Sultan sebagai penguasa pusat dihormati oleh para Panglima Sagi. Namun dalam menjalankan pemerintahan daerah para Panglima Sagi mempunyai kekuasaan yang besar. Demikian pula para hulubalang yang mengepalai distrik-distrik di dalam sagi tidak kecil pengaruhnya di wilayah mereka masing-masing. Kecuali rasa hormat mereka terhadap Sultan, hubungan antara uleebalang daerah dengan Sultan di pusat diwujudkan dengan pengiriman sebagian dari hasil bumi dan hasil pajak sebagai upeti ke istana.

Sebenarnya sumber penghasilan yang utama bagi kerajaan adalah hasil perniagaan yang dilakukan di pelabuhan-pelabuhan kesultanan Aceh dan di daerah-daerah takluknya. Barang dagangan yang terpenting yang dihasilkan Aceh pada waktu itu ialah lada serta pinang dan kapur barus. Barang dagangan itu banyak dibeli oleh para pedagang asing seperti Cina, Belanda, Inggris, Perancis, dan Amerika. Semua kegiatan perdagangan di kesultanan Aceh dipusatkan di ibukota sehingga kota Bandar Aceh Darussalam menjadi sangat ramai. Perdagangan lada diawasi oleh Sultan dengan dibantu oleh pejabat-pejabat negara yang bertugas dalam bidang masing-masing dan harus mendapat izin dari Sultan. Sedangkan aktifitas perdagangan di daerah-daerah diawasi oleh pejabat tinggi pusat yaitu Syahbandar yang bertindak sebagai wakil Sultan.

Akan tetapi bila kekuasaan Sultan mulai susut, daerah-daerah biasanya mempunyai kebebasan yang semakin besar. Para uleebalang yang menguasai daerah-daerah itu mempunyai keleluasan berdagang dan memungut cukai dari barang yang dimasukkan atau dikeluarkan dari wilayah kekuasaannya.

Tambahan lagi karena paksaan untuk berniaga di pusat tidak kuat, maka para pedagang asing pun semakin banyak yang langsung mencari barang dagangan atau menjual barang-barangnya di pelabuhan-pelabuhan baik di pantai Barat maupun di pantai Timur Aceh. Oleh karena itu Sultan hanya menerima apa yang disebut *wasee*, ialah pajak daerah pada pemerintah pusat.

Selain itu, menurut sebuah buku undang-undang yang berasal dari abad 17 yaitu *Kitab Adat Meukuta Alam* Sultan mendapat hadiah dari orang-orang asing yang berkunjung ke Aceh. Sebelum mulai berdagang mereka menghadap Sultan untuk mendapat izin berniaga dan biasanya mereka membawa hadiah yang berharga. Selain dari itu kapak-kapal asing yang berlabuh di pelabuhan Aceh juga dikenakan biaya dan hasilnya masuk

ke kas Pemerintah Pusat.¹¹³

Sultan Aceh juga mendapat penghasilan dari beberapa hak istimewa yang dipunyai. Menurut kitab *Adat Meukuta Alam* bila ada orang asing yang meninggal, maka segala harta yang ditinggalkannya akan menjadi milik Sultan. Demikian juga bila ada warga kesultanan yang meninggal tanpa mempunyai ahli waris, maka harta "hamba"-nya itu pun akan jatuh ke tangannya. Lebih lanjut kitab itu menyatakan bahwa bila ada kapal yang kandas di pantai kerajaan, maka Sultan berhak menyita segala-galanya.¹¹⁴ Sehingga dari apa yang telah dibicarakan di atas tampak jelas betapa Sultan Aceh menjadi kaya raya dan mampu memperluas kekuasaannya bila dia merupakan seorang raja yang kuat. Bila dia lemah, maka kekuasaan beralih ke tangan para Panglima Sagi dan para uleebalang dan Sultan hanya sekedar menjadi lambang pemersatu.

3. Birokrasi

Dalam garis besarnya wilayah negara Aceh terbagi atas tiga macam wilayah, yaitu daerah Inti, daerah Pokok dan daerah Takluk.¹¹⁵ Yang dimaksud daerah Inti adalah wilayah yang sudah dikuasai oleh Aceh sejak mula berdirinya. Wilayah tersebut sekarang dikenal dengan nama Aceh Besar atau dalam bahasa Aceh disebut Aceh *Rayeuk*.

Kadang-kadang dinamakan juga Aceh *Lhee Sagoe* (Aceh Segitiga) karena bentuknya yang memang mirip segitiga dengan dasar di pantai laut. Di daerah tersebut mengalir Sungai Aceh (*Krueng Aceh*) yang menghubungkan ibu kota Banda Aceh Dar as-salam dengan pelabuhannya yang agak jauh di muara.

Daerah Pokok ialah wilayah yang dikuasai kemudian setelah Kesultanan Aceh berdiri dan digabungkan ke bawah kedaulatan Sultan Aceh. Daerah-daerah pokok itu meliputi Pidie, Samudra, Pase, Perlak, Gayo, Alas, Barat, Singkel, Teureumen dan Barus. Sedang daerah Takluk ialah negara-negara yang menyatakan diri takluk kepada Sultan Aceh atau yang dianggap oleh Aceh sebagai daerah takluknya.

113 *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, hl. 85

114 *Ibid.*, hal. 86

115 Zakaria Ahmad, *Op. Cit.*, hal. 83

Negara-negara itu terletak di sebelah Barat maupun di sebelah Timur pulau Sumatra, bahkan juga di Semenanjung Malaya, di antaranya Aru, Deli, Siak Asahan, Tanjung Balai, Panai, Rokan, Kampar, Inderagiri, Palembang, Jambi, Johor, Kedah, Patani, Pahang, Perak, Pasaman, Tiku, Pariaman, Padang, Indrapura dan Nias. Daerah yang dikuasai atau ditaklukkan oleh kesultanan Aceh pada umumnya adalah kota-kota pelabuhan dan yang menghasilkan barang-barang yang penting bagi perdagangan. Misalnya daerah Pidie terkenal sebagai lumbung kerajaan Aceh karena tanahnya yang subur sesuai untuk persawahan. Lain lagi dengan Pasaman dan Tiku yang penting dari segi ekonomi karena hasil ladanya sedang Barus dan Singkil banyak menghasilkan kapur barus dan kedua macam hasil bumi itu termasuk barang dagangan yang banyak dicari oleh para pedagang asing. Dari fakta ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa motif yang mendorong Sultan Aceh mengadakan ekspansi adalah terutama faktor ekonomi. Buktinya bila suatu daerah telah ditundukkannya maka Sultan hanya akan menempatkan wakilnya yang biasanya disebut Syahbandar untuk mengawasi perdagangan saja. Jalannya pemerintahan di tempat-tempat tersebut menurut apa adanya dan penguasa-penguasa wilayah itu praktis merdeka tanpa campur tangan Sultan. Mereka masing-masing mempunyai corak pemerintahan sendiri-sendiri. Yang akan dibicarakan di sini terutama adalah sistem pemerintahan di daerah inti, yaitu Aceh Besar, yang menjadi pusat kerajaan.

Bentuk kesatuan wilayah yang terkecil di kesultanan Aceh adalah apa yang disebut *gampong* (kampung).¹¹⁶ Agaknya struktur organisasinya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita temukan pada masa sekarang. Sebuah gampong terdiri dari beberapa rumah yang didiami oleh sejumlah keluarga dan dikepalai oleh seorang yang disebut *Keucik*. Biasanya dalam mengatur gampongnya, Keucik dibantu oleh seorang atau lebih pembantu yang disebut *waki* (wakil). Sedang jabatan khusus sekretaris desa tidak ada.¹¹⁷ Gampong-gampong yang letaknya dekat istana raja diwajibkan untuk menyediakan tenaga guna secara bergilir menjaga istana dan memberiskannya. Juga diwajibkan memberikan sumbangan kepada istana untuk menyambut tamu pembesar. Di daerah perkebunan lada dan daerah-daerah dekat hutan bertindak sebagai kepalanya adalah para *peutuha*. Di tiap gam-

116 Sumber-sumber yang dipakai di sini terutama adalah buku Zakaria Ahmad, *ibid.*, Bab V.

117 Anonym, "Medecdelingen betreffende Atjehsch onder horigdoden", *BKI*, 67, 1813, hal. 412 - 413

pong biasanya terdapat sebuah atau lebih *meunasah* yang selain sebagai tempat beribadat, juga digunakan untuk tempat pertemuan dan permufakatan warga gampong, tempat anak-anak belajar ilmu keagamaan seperti mengaji atau membaca Al'Quran dan juga sebagai tempat tidur anak-anak muda di waktu malam.¹¹⁸ Tugas memelihara meunasah dijalankan oleh *Teungku Meunasah* yang juga merangkap tugas sebagai pembantu Keucik di bidang keagamaan seperti nikah, talak, rujuk, zakat, kematian dan lain-lain. Ada juga yang menyebut *Tengku Mandarsah* berdasarkan adanya tempat pengajaran agama Islam (madrasah) di wilayah itu.¹¹⁹ Agaknya lembaga meunasah ini baru muncul setelah agama Islam masuk dan berkembang di Aceh.¹²⁰ Jadi dapat dikatakan asalnya lebih muda daripada lembaga gampong. Selain Teungku Meunasah dalam mengatur kehidupan gampong. Keucik juga dibantu oleh tokoh-tokoh di kampung itu atau orang-orang tua yang dianggap arif bijaksana dan disebut dalam bahasa Aceh *Ureungtuha*. Dalam memutuskan sesuatu keucik juga mengadakan *mupakat* dengan penduduk laki-laki dewasa dalam *gampong*. Di samping teungku meunasah di dalam gampong juga terdapat ulama-ulama dan *leube* yang ahli dalam hukum Islam, demikian juga pejabat-pejabat keagamaan lainnya seperti *kadi*, *imeum masjid*, *hatib* dan *bileue*. Di beberapa daerah kesatuan beberapa gampong dikepalai oleh seorang *datu*. Sebagai contoh misalnya Datu Basa yang memerintah daerah di tepi kanan Sungai Samadua beserta beberapa gampong ialah Jeuret, Ladang, Ladang Kaseh Putih, Pan dan Balai. Adapun yang memerintah daerah di tepi kiri Sungai Sama Dua adalah Datu Mauda Nua'Radin. Di samping itu beberapa gampong di dekatnya juga termasuk dalam kekuasaannya, ialah gampong-gampong Sus Ulu, Paja, Alue Sialang Ulu, Ujung Gampang, Tangga Pantan Laut, Dalam, Gunung Ketek dan Kuta Baru.

Beberapa buah gampong yang berdekatan letaknya dan jumlah warga laki-lakinya ada 40 orang atau lebih wajib bersembahyang Jum'at bersama di Mesjid. Seperti diajarkan oleh Mazhab Syafi'i Gampong-gampong itu kemudian membentuk kesatuan yang disebut *mukim* (dari bahasa Arab

118 Zakaria Ahmad, *op.cit.*, hal. 86

119 *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, hal. 53

120 's.B. Kielstra, *Beschrijving van den Atjeh Dorlog*, I, 's Gravenhage, 1885, hal. 6-7
C. van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie* I Leiden, 1931, hal. 151; C. Snouck Hurgronje, *De Atjehers*, I, Leiden, hal. 63

muqim yang berarti tempat tinggal). Dari sini tampak bahwa kesatuan wilayah mukim bukanlah suatu lembaga yang asli, tapi terbentuk setelah agama Islam berkembang. Kepala mukim disebut *Imeum Mukim* yang biasanya seorang ulama dan tugas utamanya adalah memimpin sembahyang Jum'at. Namun lama kelamaan tugasnya juga mencakup soal-soal pemerintahan sehingga kedudukannya seolah-olah ada di atas keucik-keucik dalam mukimnya. Urusan mesjid dan keagamaan kemudian diserahkan kepada para petugas khusus. Dengan perubahan fungsi ini maka kaum cerdik pandai juga menjadi *imeum* dan kedudukannya jadi turun temurun. Kesatuan wilayah mukim ini hanya dikenal di Aceh Besar saja dan tidak di Aceh Utara atau pun di Aceh Timur.¹²¹

Wilayah inti kesultanan Aceh (Aceh Raya) dibagi dalam tiga wilayah *sagi* (sagoe) dan wilayah pusat kerajaan. Daerah pusat kerajaan ini meliputi:

- a. Istana Sultan, Peukan Aceh dan gampong-gampong Merdowati, Jawa, Pandai dan Kedah.
- b. Mukim-mukim Longbatan, Pager Ayer dan Lamsayun.
- c. Distrik III Mukim dari Sagi XXVI Mukim.
- d. Masjid Raya dan sekitarnya.

Dari keempat wilayah tersebut hanya Masjid Raya dan sekitarnya yang tidak diperintah langsung oleh Sultan, tetapi pemerintahannya diserahkan kepada dua orang pejabat keagamaan, ialah hakim tertinggi kerajaan Teuku Kadli Malik'ul Adil dan Panglima Masjid Raya.¹²² Karena wilayah-wilayah tersebut berada dalam pusat kerajaan, maka kegiatan wilayah banyak dihubungkan dengan keperluan istana. Misalnya gampong-gampong di wilayah tersebut diberi beban untuk memelihara istana. Di samping itu masih terdapat juga tanah-tanah *enelave* milik raja-raja di daerah-daerah. Pengelolaan tanah-tanah *enelave* itu diserahkan pada *panglulee peururuc* (*beunarue*, bendahara).

121 Perincian mengenai nama-nama *mukim* di wilayah kesultanan Aceh antara lain periksa "Medeelingen ketroffende de Atjehsche onderhoorighedern", *BKI, I.V.*, 's Gravenhage, 1905, hal. 53 dst.

122 E.B. Kielstra, *Op. Cit.*, hal. 7

Wilayah sagi juga terbagi atas beberapa daerah. Tiap sagi terdiri dari sejumlah mukim. Berdasarkan jumlah mukim yang disatukan menjadi wilayah sagi, maka ketiga sagi di kerajaan Aceh disebut sagi XXV Mukim yang meliputi daerah Aceh bagian Barat, Sagi XXII Mukim berada di daerah bagian tengah sebelah, dan Sagi XXVI Mukim terletak di daerah bagian Timur. Sedang wilayah pusat kerajaan berada di daerah bagian tengah sebelah Utara sampai ke pantai Utara. Tiap-tiap sagi dibagi dalam kesatuan-kesatuan wilayah lebih kecil setingkat distrik. Dalam bahasa Aceh wilayah distrik ini disebut *Nanggroe* (negeri) dan tiap *nanggroe* meliputi beberapa mukim. Sebagai contoh misalnya di wilayah Sagi XXV terdapat distrik IV Mukim, distrik VI Mukim, distrik IX Mukim dan lain-lain.

Tiap-tiap sagi dikepalai oleh *panglima sagi* atau juga sering disebut *hulubalang besar*, sedang tiap distrik (*nanggroe*) dikepalai oleh seseorang *hulubalang* (*uleebalang*). Pada hakekatnya para *hulubalang* di wilayah sagi mempunyai kekuasaan yang otonom di wilayah kekuasaannya. Raja atau Sultan lebih berfungsi sebagai lambang pemersatu yang diakui oleh para *hulubalang*. Kedudukan para *hulubalang* ini tidak tergantung pada Sultan karena jabatan atau kedudukan mereka itu turun temurun. Namun hal seperti itu tidak berlaku bagi *hulubalang* di wilayah pusat yang berada langsung di bawah kekuasaan Sultan. *Hulubalang-hulubalang* ini diangkat oleh raja dengan surat ketetapan (*serkata*) yang dibubuhi materi kerajaan (*cap halili-lintar*)^{1 2 3} seperti yang disinggung di atas.

Bentuk kesatuan wilayah Sagi (*sagoe*) ini sebenarnya baru muncul pada abad ke 17. Sebelum waktu itu belum dikenal. Kata Sagi sendiri artinya sudut, sebab daerah Aceh Besar digambarkan bentuknya bagai sebuah segitiga dengan dasarnya di pantai.

Menurut sejarahnya pada tahun 1675 di bawah Sultan Narul Alam Nakiatudin (1675 – 1677) yang menggantikan Sultan Tajul Alam di daerah pedalaman muncul kekuasaan baru yang mengubah susunan kesultanan di Aceh Besar (pusat kerajaan). Seperti telah dibicarakan di atas, Teuku Itam saudara tua Sultan Tajul Alam menggabungkan 22 mukim yang terletak di daerah sekitar hulu sungai dalam satu kesatuan yang sifatnya federatif. Tindakannya ini kemudian ditiru oleh mukim-mukim lain di wilayah sebelah Barat dan sebelah Timur, terbentuklah dua sagi lainnya.^{1 2 4} Tujuan sebenarnya dari pem-

123 L.W.C. van Beng, *op.cit.*, hal. 18

124 A.Reid, *Pre-Colonial State System in Southeast Asia*, hal. 53

bentukan sagi ini adalah untuk melindungi kepentingan masing-masing.

Di daerah pantai Timur terdapat juga wilayah yang diperintah oleh empat orang kepala (*tuha peuet*). Masing-masing kepala tersebut mempunyai wilayah yurisdiksi sendiri. Mereka juga sering disebut hulubalang kecil (*ulee-balang cut*). Gelar yang dipakai oleh kepala-kepala daerah itu berbeda-beda, seperti *keujruen*, *meuntroe*, *ci'pakeh* atau *ken*. Di Lo'Seumawe kepala tersebut diberi gelar *mbah raja*, sedang di Teunom bergelar *imeum*. Ada juga wilayah yang diperintah oleh lima orang hulubalang (*uleebalang limong*) dan masing-masing kepala mempunyai batas wilayah kekuasaan sendiri-sendiri. Di daerah pantai Barat kepala tersebut disebut *rigaih keuci*, sedang wilayah yang diperintahnya disebut *sagoe* (sagi).¹²⁵

Di dalam pemerintahan, Sultan dibantu oleh seorang Mangkubumi. Pada waktu Perang Aceh jabatan mangkubumi dipegang oleh seorang Arab bernama Habib Abdurrahman. Di bawah mangkubumi terdapat empat orang pejabat tinggi yang disebut *mantri hari-hari*. Fungsi mantri hari-hari terutama adalah sebagai penasihat raja. Pangkat mantri hari-hari lebih rendah dari para panglima sagi. Untuk mengurus soal keuangan istana baik pemasukan maupun pengeluaran raja menyerahkannya kepada *syahbandar* yang sebenarnya tugas pokoknya adalah mengurus soal bandar. Adakalanya syahbandar juga disertai tugas untuk mengurus usaha dagang milik Sultan pribadi. Di samping itu masih terdapat pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk mengawasi lalu lintas di muara sungai, ialah *kepala kreung* yang dibantu oleh *pawang kreung*. Sedang tugas untuk memungut cukai barang-barang impor dan ekspor dijalankan oleh *panglima lasot*.¹²⁶ Di masa damai adakalanya *panglima perang* juga ditugaskan sebagai penarik pajak. Pejabat yang berfungsi sebagai penulis dan mengurus pembukuan dan surat menyurat adalah *krani*.

Dalam abad-abad ke 17 dan ke 18 terdapat jabatan-jabatan yang lebih lengkap di dalam istana Sultan. Antara lain dapat disebut *hulubalang rama setia* sebagai kepala pengawal pribadi raja, *raja udah na laila* ialah kepala perbendaharaan istana dan perpajakan, *kerkun katib al-muluk* sebagai sekretaris kerajaan. Selain itu di kerajaan juga masih terdapat pejabat-pejabat tinggi lain seperti *sri maharaja laila* sebagai kepala kepolisian, *laksamana*, *panglima*, *paduka sinara* sebagai kepala yang mengurus tanah wakaf¹²⁷ di samping para

125 C. Van Vollenhoven, *Op.Cit.*, hal. 162

126 *Ibid.*, hal. 163

127 L.W.C. van Berg, *Op.Cit.* hal. 48

pejabat tinggi kepala daerah seperti panglima sagi dan hulubalang. Jabatan-jabatan tinggi tersebut dalam abad ke 19 tidak seluruhnya masih terdapat, karena untuk jabatan yang bersifat turun temurun belum tentu ada pengganti yang akan menjabatnya.

Sebenarnya bila kita membicarakan soal jalannya pemerintahan kesultanan Aceh pada abad 18 dan 19 tidaklah dapat melepaskan diri dari pemerintahan yang sudah diletakkan dan dijalankan pada masa-masa sebelumnya. Sebagai sebuah kesultanan yang berlandaskan ajaran Islam, maka yang menjadi sumber hukum kerajaan Aceh adalah keempat dasar hukum Islam, yaitu Al Qur'an, al Hadis, Ijma' ulama dan Qiyas. Namun sebagai suatu kerajaan yang sudah tumbuh sejak masa pra-Islam, maka adat dan kebiasaan yang sudah berkembang pada zaman itu tidak mungkin hilang begitu saja. Oleh karena itu di samping ke empat dasar hukum Islam tersebut di atas, maka hukum adat juga sering masih dijadikan sumber hukum.

Menurut ceritanya undang-undang dasar kesultanan Aceh yang disebut *Kanun Al Asyi* disusun oleh Sultan Alauddin Riayat Syah Al Kahari (1537 – 1568) yang kemudian disempurnakan oleh Sultan Iskandar Muda.¹²⁸ Kitab Kanun ini kemudian juga sering disebut *Adat meukuta Alam* atau *Kanun Meukuta Alam*. Dalam Kanun ini ditetapkan beberapa lembaga pemerintahan di pusat dengan para pejabatnya dan tugasnya masing-masing. Lembaga-lembaga yang dimaksud itu ialah:

1. *Balai Rong Sari* yaitu lembaga tertinggi negara tempat mufakat empat orang uleebalang dan 7 orang alim ulama serta Sultan.
2. *Balai Majelis Mahkamah Rakyat* yang merupakan badan legislatif yang terutama bertugas membuat dan mengubah undang-undang. Anggota balai ini ada 73 orang yang mewakili 73 mukim dan pimpinan dipegang oleh Qadli Malikul Adil atau Qadi raja yang adil.
3. *Balai Gading* yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari dan dipimpin oleh wasir Mu'azzam.
4. *Balai Furdhah* yang mengatur dan mengurus soal ekonomi dan perniagaan dan dipimpin oleh Menteri Seri Paduka.
5. *Balai Laksamana* dengan pimpinan seorang wasir yang bergelar orang kaya Laksamana Amirul Harb. Tugasnya yang terutama adalah menjaga keamanan dan mempertahankan Kesultanan.

128 A.Hasjmy, *Op.Cit.*, hal. 70 – 74

6. *Balai Majlis Mahkamah* yang mengurus soal kehakiman dan dipimpin oleh Seri Raja Panglima Wasir Mizan.
7. *Balai Baitul Mal* yang dipimpin oleh seorang wasir yang bergelar orang kaya Seri Maharaja Bendahara Raja Wasir Derham yang mengurus segala soal keuangan dan soal anggaran biaya negara.

Di samping tujuh buah lembaga kengaraan tinggi ini masih ada sejumlah menteri yang bertugas menangani masalah-masalah yang lebih khusus. Mereka itu ialah:

1. Seri Maharaja Mangkubumi yang mengurus segala hulubalang dan pamong praja serta lain-lain yang berhubungan dengan soal pemerintahan.
2. Wazir Badhul Muluk yaitu menteri yang mengurus segala hal yang berhubungan dengan soal diplomatik seperti mengatur para utusan dari luar atau mengatur pengiriman utusan ke luar.
3. Wazir Kun Deraja yang bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam keraton dan merangkap menjadi syahbandar yaitu penguasa kota Bandar Aceh Darussalam.
4. Wazir Rama Setia yang mengurus pajak pasar di seluruh kesultanan.
5. Seri Maharaja Gurah yang mengatur segala hal tentang kehutanan.

Menurut sebuah berita lain, di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Susunan Pemerintah Pusat terdiri atas 24 lembaga atau jabatan, yaitu:¹²⁹

1. Karekun Katibul Muluk atau Sekretaris Raja.
2. Rais Wazirat Addsulah atau Perdana Menteri.
3. Wasirat Addaulah atau menteri negara.
4. Wasirat Al Akham atau menteri agung.
5. Wazirat Al Harbiyyah atau menteri peperangan.
6. Wazirat Al Haqqamiyah atau menteri kehakiman.

7. Wazirat Al Daraham atau menteri keuangan.
8. Wazirat Al mizan atau menteri keadilan.
9. Wazirat Al maarif atau menteri pendidikan.
10. Wazirat Al kharijiyah atau menteri luar negeri.
11. Wazirat addakhilyyah atau menteri dalam negeri.
12. Wazirat at al augaf atau menteri urusan waqaf.
13. Wazirat azzizaah atau menteri pertanian.
14. Wazirat al maliyyah atau menteri urusan harta.
15. Wazirat al muwaskalat atau menteri perhubungan.
16. Wazirat al Asyighal atau menteri kerja.
17. Syakh al Islam mufti empat syakh keabab.
18. Qadhi Malikul adil atau Kadhi raja yang adil.
19. Wazir Tahakkum Muharzijlailan atau Ketua Pengurus Korps Kesenian.
20. Qadhi mualdhan atau Kadhi/Jaksa Agung.
21. Imam Bandar Darul Makmur Darussalam.
22. Keucik Muluk (keucik raja)
23. Imam Muluk Itau Imam Raja.
24. Panglima Khanduri Muluk atau Ketua penyelenggara kenduri raja.

Para pejabat dari ke 24 lembaga tersebut di atas diangkat oleh Sultan.

Akan tetapi tidak seluruh pejabat yang jumlah 24 orang itu mempunyai pengaruh yang sama besarnya terhadap Sultan. Hanya empat yang benar-benar sangat dekat pada raja dan mempunyai pengaruh yang besar. Mereka itu ialah Perdana Menteri yang lazimnya bergelar Orangkaya Maharaja Seri Maharaja. Mereka disegani baik oleh Sultan, para menteri (wasir), para pejabat lain serta para bangsawan. Kemudian Kadhi Malikul Adil yaitu yang mengurus soal pengadilan dan syarat agama Islam. Selanjutnya yang ketiga adalah Wasir al Harbiyyah atau menteri peperangan dan yang lebih terkenal dengan sebutan Laksamana atau Orangkaya Laksamana. Tugasnya memimpin seluruh Angkatan Perang Aceh dan mempertahankan negara serta mengatur penyerbuan ke luar. Yang terakhir yang sangat dekat dengan Sultan ialah *Kerukun Katibal Muluk* atau semacam sekretaris Sultan. Ia bertugas mengurus dan menyelesaikan segala macam urusan surat menyurat seperti surat-surat dengan negeri asing, surat-surat dagang atau pun surat pengangkatan untuk uleebalang.

Di bidang perekonomian keadaan pada abad 18 dan 19 agak berbeda

dari masa-masa sebelumnya. Kemunduran politik dan melemahnya kekuasaan pusat mempengaruhi juga keadaan perekonomian seperti sudah disinggung di muka. Sultan sudah kehilangan monopoli perdagangan di negeri-negeri takluk yang jauh letaknya. Penghasilan pusat merosot dan terutama hanya tergantung dari pemiagaan yang terbatas dan pajak serta upeti yang jumlahnya pun semakin menyusut. Namun seperti dijelaskan oleh seorang sarjana¹³⁰ aktifitas perekonomian di Aceh pada umumnya berkembang. Daerah-daerah baru dibuka baik untuk persawahan maupun untuk perkebunan lada, sehingga ekspor lada pun meningkat. Hal ini terutama berkaitan dengan berkembangnya semangat wiraswasta dari para uleebalang.¹³¹ Dalam hal keuangan negara kemungkinannya belum mengenal sistim anggaran belanja kesatuan (unified budgetting) seperti yang lazim dikenal di negara-negara modern masa kini.¹³² Hal ini bisa dipahami bila diingat akan struktur dan sistim kemasyarakatan di Aceh pada masa itu.

Dari gambaran tersebut di atas tampaklah bahwa birokrasi Aceh pada abad 17 tidaklah sederhana. Pembagian tugas tampak terperinci dan dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan pun kuat yaitu hukum Islam dan hukum adat. Keadaan ini mungkin agak berubah pada abad 18 dan 19 dengan mulai mundurnya dan merosotnya kekuasaan pemerintah pusat. Namun sistim pemerintahan dan jalannya pemerintahan pada umumnya tidak banyak perubahan. Sebagai contoh misalnya, ketika perang melawan orang Belanda meletus, para uleebalang dan semua pejabat pemerintah serta rakyat bersatu bersama Sultan yang pada kenyataannya sudah tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Sehingga dengan demikian rakyat Aceh mampu bertahan membela kemerdekaannya selama lebih dari 30 tahun.

4. Masyarakat

Masyarakat Aceh dalam abad 18 dan 19 masih merupakan suatu masyarakat yang bertingkat dan tersusun dalam golongan-golongan. Mungkin agak sukar untuk menyebutnya sebagai masyarakat berkelas seperti dalam pengertian pada masa sekarang. Namun yang jelas ada golongan bangsawan, golongan kaum alim-ulama, golongan rakyat umum dan juga kelompok-kelompok

130 Dr. Kance Castles, "Ekonomi dan Keuangan di Kerajaan Aceh Darussalam", prasaran dalam "Seminar Sejarah Masuk dan berkembangnya Islam di Aceh", 1978.

131 *Ibid.*, hal. 9 – 14

132 *Ibid.*, hal. 15

lompok lain seperti orang pendatang atau orang asing. Memang suatu kenyataan bahwa kaum bangsawan dan kaum alim-ulama pada umumnya menduduki tingkatan atas. Akan tetapi dari kalangan rakyat umum pun tidak kurang yang mendapat kehormatan dan berada di tingkat yang tinggi, misalnya saja orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji, kaum saudagar dan kaum cerdik pandai.¹³³

Sebagai suatu negara yang berlandaskan pada hukum Islam, kedudukan ulama atau orang yang ahli dalam soal-soal agama menjadi sangat penting. Seperti yang telah diuraikan di muka seorang Imeum Mukim yang pada mulanya bertugas sebagai pemimpin umat bersembahyang Jum'at lama kelamaan pun fungsinya berubah dan menjadi penguasa daerah dan harkatnya serta kekuasaannya pun semakin tinggi. Dalam hal ini pendidikan keagamaan mempunyai peranan yang penting.

Pada mulanya anak-anak akan diajar bersembahyang dan pengetahuan dasar keagamaan oleh orang tuanya sendiri atau di rumah seorang *alim* yang ada di kampungnya.¹³⁴ Yang disebut orang alim adalah orang yang dianggap sudah memahami dasar-dasar agama Islam dan mengetahui beberapa cabang ilmu dalam Islam. Biasanya pelajaran diadakan pada malam hari, tapi juga ada yang diadakan pada pagi hari. Selain itu pelajaran itu diadakan di meunasah yang ada di tiap gampong dan salah satu fungsinya

adalah tempat pendidikan agama. Setelah seorang anak meningkat dewasa maka pendidikannya dilanjutkan biasanya di masjid-masjid dan disebut *Rangkang*. Bagi mereka yang berminat lebih lanjut mendalami agama dan pengetahuan Islam dapat meneruskan pendidikannya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi, yaitu *Dayah Teungku Chiek*. Di sinilah calon alim-ulama diajar soal-soal agama yang lebih dalam, seperti Tauhid dan Fikh. Namun agaknya lembaga pendidikan yang mengajarkan hal-hal atau pengetahuan yang praktis seperti pertanian dan pertukangan tidak ada. Pengetahuan semacam itu biasanya didapat melalui pendidikan yang informil dan melalui latihan serta pengalaman.¹³⁵ Yang menarik perhatian dalam masyarakat Aceh

133 Zakaria Ahmad, *Op.Cit.*, hal. 95

134 *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, hal. 130 -- 131

135 Misalnya bisa dibandingkan dengan pemahat-pemahat atau pengrajin anyaman di kalangan rakyat Bali pada masa sekarang.

ini ialah terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk juga menikmati pendidikan. Sebagai contoh salah seorang pejuang wanita Aceh yang bernama Teungku Fakinah pernah mengajar di Dayah Lam Pucok di mana dia sendiri pernah menjadi muridnya.¹³⁶

Selain kaum alim-ulama dan cerdik pandai, kaum bangsawan, baik yang termasuk keluarga Sultan maupun uleebalang mempunyai kedudukan dan harkat yang tinggi. Lebih-lebih bila mereka berhasil dalam perniagaannya sebab perdagangan merupakan salah satu sendi kehidupan kesultanan Aceh. Maka tidaklah mengherankan bahwa semangat wiraswasta pun berkembang di kalangan para uleebalang dan para bangsawan lainnya. Sejarah Aceh pun mencatat bahwa Sultan-Sultan yang berkuasa pada umumnya perhatian besar pada soal perdagangan dan perluasan kekuasaan yang dilakukannya pada hekatatnya berlandaskan kepentingan ekonomi.

Selain perdagangan dan bercocok tanam rakyat Aceh mempunyai kehidupan yang beraneka ragam. Dari laporan seorang Perancis yang bernama Augustin de Beaulieu tampak jelas bahwa rakyat banyak yang mempunyai keahlian pertukangan atau pengrajin, seperti tukang mas, tukang periuk, tukang besi, tukang kapal, pengrajin tenun dan lain-lainnya. Bahkan dicarikan lebih lanjut bahwa kapal-kapal besar yang disebut *galleon* milik orang Aceh mempunyai kekuatan yang jauh melebihi kekuatan kapal *galleon* milik orang Portugis. Dikatakannya bahwa papan-papan pada sisi kapal sampai enam jempol jari tebalnya.¹³⁷ Walaupun mungkin laporan orang asing ini agak dibesar-besarkan, namun yang penting adalah fakta yang menunjukkan bahwa orang Aceh pada masa itu merupakan bangsa yang aktif dan dinamis. Inilah salah satu faktor bahwa mereka itu sekian lama mampu menghadapi segala tekanan dari orang asing seperti Portugis, Inggris dan Belanda yang selalu berusaha untuk menanamkan pengaruhnya di negara Aceh.

Dalam kehidupan sehari-hari tampaknya rakyat Aceh menganut azas gotong-royong seperti yang umum terdapat di tempat-tempat lain di Indonesia. Misalnya dalam pemerintahan gampong, keucik terlebih dahulu bermufakat dengan orang-orang tua di gampongnya sebelum mengambil sesuatu keputusan yang dianggap penting. Bahkan sering kali bila dianggap perlu seluruh penduduk laki-laki dari gampong itu dipanggil untuk ikut bermusyawarah. Sehingga keputusan yang diambil biasanya adalah hasil

136 *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, hal. 132

137 *Ibid.*, hal. 94

permufakatan.

Rumah-rumah rakyat biasanya didirikan di atas tiang seperti yang masih dapat dijumpai pada masa sekarang. Bangunannya pada umumnya dibuat dari bambu dan kayu. Bangunan di atas tiang ini memang cukup praktis sebab ruangan di bawah atau yang dinamakan kolong rumah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti kandang ternak, tempat menjumpai kayu bakar atau menjumpai alat-alat barang-barang lain seperti alat pertanian misalnya.

Rakyat Aceh bukanlah bangsa yang bebas pajak. Tidak sedikit penghasilan negara didapat dari pungutan pajak atau dari cukai yang ditarik oleh pejabat-pejabat kerajaan urusan pajak. Ada bermacam-macam pajak yang dibebankan kepada rakyat. Bagi mereka yang mempunyai tanah ladang dikenakan pajak tanah (*wase tanah*) sedang untuk barang-barang yang diperjual-belikan di pasar-pasar dipungut pajak pasar (*adat peukan*). Di daerah-daerah di mana terdapat muara sungai, di situ terdapat rumah cukai. Pejabat-pejabat cukai mengawasi ke luar masuknya perahu-perahu di muara. Perahu-perahu yang akan memasuki muara itu diharuskan membayar cukai muara (*wase kuala*).¹³⁸ Selain itu barang-barang dagangan yang akan diekspor waktu melalui muara tersebut juga dipungut pajak dengan tarif menurut macamnya barang dagangan. Dengan demikian terdapatlah berbagai macam pajak, seperti pajak lada (*wase lada*), *wase pinang* dan juga ada pajak hasil hutan (*wase uteuen*). Di dalam jual beli lada kecuali di tarik pajak lada, juga dipungut *wang hareukat*.¹³⁹

Suatu hal yang menarik dari peninggalan lama yang ada dalam masyarakat Aceh adalah penggolongan rakyat dalam kelompok *soeke* (suku) atau *kawon* (kaum).¹⁴⁰ Penggolongan atas kawon ini didasarkan atas keturunan dari nenek moyang pihak laki-laki dan adat istiadatnya. Pada masa itu ada empat kawon yaitu:

1. Kawon Ineum Peut (kaum imam empat) ialah mereka yang berasal dari orang Hindu yang telah memeluk agama Islam.
2. Kawon Lherentoih (suku tiga ratus) yaitu mereka yang berasal

138 C. van Vollenhoven, *Op.Cit.*, hal. 164

139 *Loc.Cit.*

140 *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, hal. 89

- dari orang-orang Mantir dan Batak.
3. Kawon Tok Batu yaitu mereka yang terdiri dari orang-orang asing seperti orang Arab, orang Parsi dan orang Turki.
 4. Kawon Ja Sandang yaitu orang Hindu yang bekerja untuk majikan masing-masing.

Keempat kawon ini mempunyai pimpinan yang dipilihnya sendiri-sendiri dan disebut Panglima Kawon. Walaupun kedudukannya turun kalau Panglima Kawon yang yang baru sudah terpilih harus disahkan oleh uleebalang yang berkuasa di mana Panglima Kawon itu bertempat tinggal. Panglima Kawon berkewajiban membela kepentingan anggota-anggota kawonnya dan masing-masing anggota kawon berbeda menurut negeri asal mereka. Oleh sebab itu oleh Sultan hal-hal yang bertalian dengan *reusam* (kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di suatu tempat) diserahkan kepada Panglima Kawon dan para uleebalang di masing-masing tempat.¹⁴¹

141 *Ibid.*, hal. 90

BAB II

PERJOANGAN MELAWAN KOLONIALISME

Proses hubungan antara kekuasaan negara dan kekuasaan Belanda dalam abad 18 dan 19 menunjukkan dua gejala yang bertolak belakang, di satu pihak terlihat makin merosotnya kekuasaan negara-negara tradisional. Pengaruh hubungan dengan kekuasaan Barat tersebut menyangkut pelbagai segi kehidupan seperti politik, sosial-ekonomi dan budaya.

Dalam bidang politik pengaruh Belanda makin menjadi kuat karena intervensi yang secara intensif dalam persoalan-persoalan intern, negara-negara seperti misalnya dalam soal pergantian tahta, pengangkatan pejabat-pejabat birokrasi maupun partisipasinya dalam menentukan kebijaksanaan politik negara. Dengan demikian dalam bidang politik penguasa-penguasa tradisional makin bergantung pada kekuasaan asing, sehingga kebebasan dalam menentukan soal-soal pemerintahan menipis. Di samping itu aneksasi wilayah yang dilakukan oleh penguasa asing sejak akhir abad 17 berakibat makin kurangnya penghasilan penguasa-penguasa tradisional.

Dalam bidang sosial-ekonomi kontak dengan Barat berakibat makin lemahnya kedudukan kepala-kepala daerah dalam negara-negara tradisional. Kekuasaan mereka berangsur-angsur berkurang dan lebih jauh di tempatkan di bawah pengawasan pejabat-pejabat asing, sedang tenaga kerja mereka dilibatkan dalam sistem eksploitasi ekonomi kolonial. Sudah pasti keadaan seperti ini sedikit banyak menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan para penguasa dalam negara-negara tersebut. Khususnya di Jawa faktor-faktor produksi pertanian, baik yang menyangkut tanah maupun tenaga kerja, diatur menurut sistem kolonial. Para petani dibebani tugas mengolah sebagian dari tanahnya untuk ditanami dengan tanaman-tanaman ekspor dan diharuskan menyumbangkan tenaga kerjanya secara paksa pada penguasa kolonial.

Di daerah-daerah lain di mana perdagangan laut merupakan sumber penghidupan pokok dari penduduk, seperti misalnya Maluku, penguasaan daerah pantai dan tindakan monopolitis dalam perdagangan yang dilakukan oleh Belanda, ditambah dengan penguasaan daerah produksi tanaman ekspor, merupakan hambatan besar bagi penduduk setempat untuk

memperoleh penghasilan. Tidak mengherankan apabila tindakan penguasa-penguasa asing tersebut menimbulkan rasa antipati di kalangan penduduk bumi putra, yang dapat menuju ke arah timbulnya perlawanan-perlawanan. Desakan-desakan pihak Belanda pada pihak negara-negara tradisional dalam hal pembuatan perjanjian yang mengabaikan nilai-nilai tradisi yang berlaku di daerah-daerah setempat, di samping tuntutan agar mengakui souverinitas asing di daerah tersebut, dipandang oleh pihak bumi putra sebagai pelanggaran kedaulatan mereka. Apabila kekuasaan negara atas daerah-daerah tersebut itu cukup kuat, kekecewaan tersebut dapat menjurus ke arah penentangan bersenjata. Di dalam keadaan kurang kuat penguasa bumi putra terpaksa tunduk pada kekuasaan asing sehingga wilayah kekuasaan mereka di tempatkan di bawah kekuasaan kolonial. Nampak jelas bahwa usaha Belanda untuk memperluas wilayah kekuasaan politis juga mempunyai tujuan keuntungan ekonomis. Oleh Belanda perluasan wilayah tersebut diharapkan dapat memperlancar pemungutan hasil produksi dan pengerahan tenaga kerja murah, di samping dapat memperlancar usahanya di bidang perdagangan.

Dalam bidang budaya terutama dalam abad 19 nampak makin meluasnya pengaruh kehidupan Barat dalam lingkungan kehidupan tradisional. Di kalangan sementara penguasa timbul kekhawatiran, bahwa pengaruh kehidupan Barat dapat merusak nilai-nilai kehidupan tradisional. Tantangan yang kuat terutama datang dari pemimpin-pemimpin agama yang memandang kehidupan Barat bertentangan dengan norma-norma dalam ajaran agama Islam. Orientasi keagamaan seperti ini terdapat juga di kalangan yang patuh pada agama. Di dalam suasana kritis pandangan keagamaan ini dijadikan dasar ajakan untuk melakukan perlawanan.

Di samping faktor-faktor baru sebagai akibat pengaruh Barat di pelbagai segi kehidupan tersebut, gejala kronis yang sering muncul dalam kalangan para penguasa turut menambah kompleksnya keadaan. Yang dimaksud di sini ialah gejala pertentangan intern antar-bangsawan seperti terlihat dalam negara-negara di Jawa (Jawa Tengah, Banten) dan Kalimantan (Banjar), maupun pertentangan antar-golongan dalam masyarakat seperti di Sumatra Barat. Pertentangan antar-bangsawan umumnya bermotif perebutan kekuasaan, sedang pertentangan antar-golongan dalam masyarakat yang terjadi di Sumatra Barat, lebih banyak berdasarkan motif perebutan pengaruh atas dasar keyakinan dan kepercayaan. Bahwa adanya gejala pertentangan intern dalam negara ini mempermudah intervensi-intervensi itu berjalan sejajar dengan tujuan ekspansi wilayah yang direncanakan oleh Belanda dalam rangka

kolonialismenya. Sudah pasti intervensi asing dengan pemihakan pada salah satu pihak yang sedang bertentangan dapat menimbulkan kekecewaan dan reaksi pada pihak yang lain, yang bahkan dapat memancing ke arah perlawanan. Sebagai akibatnya perlawanan dari salah satu pihak yang bertentangan tidak lagi di arahkan pada lawan intern, tetapi juga pada kekuasaan asing.

Selama situasi kritis terlihat gejala pengelompokan pihak pro dan kontra kekuasaan asing, baik di kalangan penguasa, bangsawan, maupun di antara sementara golongan dalam masyarakat. Di daerah kerajaan ajakan perlawanan dari para bangsawan atau pun ulama yang berpengaruh untuk melawan kekuasaan asing dengan cepat mendapat sambutan baik dari kelompok rakyat, yang karena tekanan-tekanan hidup yang mereka alami sudah bersikap anti-pati terhadap kekuasaan asing. Dalam hubungan ini ikatan tradisional dalam bentuk ketaatan pada atasan merupakan faktor penting dalam turut perlunya rakyat dengan pihak penguasa tersebut. Di samping itu pengalaman pahit yang pernah dirasakan oleh rakyat di daerah-daerah selama kontak dengan kekuasaan asing dapat memperkuat keinginan untuk berjuang melawan kekuasaan asing. Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi di daerah-daerah selama kontak dengan kekuasaan Barat cukup subur untuk timbulnya perjuangan tersebut. Oleh karena dalam tiap-tiap daerah intervensi maupun intensitas kontak dari kekuasaan Belanda tidak bersamaan waktu terjadinya, maka timbulnya perjuangan terhadap kekuasaan asing pun tidak sama waktunya. Perjuangan-perjuangan itu bisa berupa perlawanan besar, atau pemberontakan maupun hanya merupakan kericuhan-kericuhan.

Mengingat banyaknya jumlah perlawanan besar yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia selama abad 18 dan 19 dan oleh sebab itu tidak mungkin untuk diuraikan seluruhnya dalam buku ini maka di sini akan diuraikan beberapa saja, yang diharapkan dapat mewakili secara keseluruhan bentuk reaksi berupa perlawanan besar dari pihak bumiputra terhadap kekuasaan Belanda. Perlawanan-perlawanan yang dibentangkan di sini tidak mengabaikan perlawanan-perlawanan lain yang pernah berkobar di daerah tertentu, seperti: perlawanan yang cukup gigit di Banten, perlawanan di Sumatra Selatan, Di Kalimantan Barat, di Sulawesi Utara dan di daerah-daerah di Indonesia merupakan bentuk reaksi terhadap kekuasaan kolonial Belanda, dan mempunyai saham berharga dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan nasional.

A. MALUKU TENGAH

1. Pendahuluan.

Paling kurang ada tiga buah dokumen yang ditulis orang-orang Ambon

pada masa perlawanan Pattimura. Mengapa mereka melawan kekuasaan Kolonial dalam tahun 1817 dibebaskan dengan jelas dalam dokumen-dokumen yang ditulis dengan huruf latin dan bahasa Melayu itu. Selain itu Gubernur Belanda yang dianggap bersalah dalam peristiwa ini, baik oleh orang-orang Ambon maupun oleh pejabat-pejabat di Batavia, juga meninggalkan laporan mengenai sebab-musababnya terjadinya perlawanan tersebut. Demikian pun Komisaris Engelhard yang mendampingi Gubernur, serta Admiral Buyskes yang didatangkan dari Batavia.

Sebab itu kita dapat menyusun suatu uraian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan peristiwa perlawanan Pattimura di Maluku Tengah. Setelah merebut pusat pemerintahan Hindia Belanda di Saparua, pengikut Pattimura Thomas Mattulesia mengeluarkan suatu pernyataan yang ditujukan pada pihak musuhnya.

Di dalam pernyataan tertanggal 29 Mei 1817 itu pengikut Pattimura menegaskan, bahwa orang-orang Ambon menuntut perbaikan-perbaikan di Maluku Tengah. Bila perbaikan-perbaikan yang disebut satu per satu di dalam pernyataan itu dapat dipenuhi, maka perlawanan akan dihentikan. Tetapi bila tuntutan-tuntutan itu tidak dapat dipenuhi dengan sendirinya penduduk Maluku Tengah tidak akan mengakui hubungannya dengan pemerintah Hindia Belanda lagi.¹

Sejak V.O.C. menguasai Maluku dalam abad ke-17, timbul permukiman-permukiman baru dengan nama "negeri" di daerah pantai kepulauan Maluku Tengah. Berangsur-angsur muncul suatu struktur sosial di negeri-negeri yang merupakan gabungan antara unsur-unsur dari sistem budaya lama dengan unsur-unsur baru yang dimasukkan oleh V.O.C.² Masyarakat negeri di pantai kepulauan Ambon-Lease mendapat hak atas tanah (*dati*) untuk perkebunan-perkebunan cengkeh, di samping tanah-tanah pusaka milik keluarga masing-masing.

Hasil cengkeh dari setiap *dati* (dijual pada V.O.C. dengan harga tertentu, sedangkan hasil dari tanah pusaka berupa bahan makanan dipakai oleh keluarga (famili) yang mengerjakannya. Selain itu V.O.C. juga mengembangkan suatu sistem pemerintah desa (negeri) serta sistem pendidikan

-
1. P.H. van der Kemp, "*Nederlands-Indische Bestuur in het Midden van 1817*". (Martinus Nijhoff) 1915, hal. 29 – 32.
 2. Mengenai hal ini lihat tulisan-tulisan dalam *Bunga Rampai Sejarah Maluku I* (Jakarta: Lembaga Sejarah Maluku) 1917.

desa. Bila para penguasa desa mempunyai ikatan kekerabatan dengan desa (negeri) masing-masing, maka para guru desa selalu dipindah-pindahkan dari suatu desa ke desa lainnya.

Sistim perkebunan cengkeh, serta sistim pemerintahan desa dan sistim pendidikan desa merupakan unsur-unsur yang mengikat kehidupan penduduk Ambon-Lease dengan serasi.

Namun di samping itu terasa pula kepincangan-kepincangan yang ditimbulkan sistem-sistem itu. Ekspedisi Hongi yang diorganisir V.O.C. setiap tahun, umpamanya lebih banyak merupakan tragedi dalam sejarah Maluku. Ekspedisi yang terdiri dari *kora-kora* (perahu perang) milik masing-masing negeri di kepulauan Ambon-Lease, dimaksudkan untuk mengawasi pulau-pulau Seram, Buru dan Manipa, dan lain-lain, yang dilarang menghasilkan cengkeh. Setiap pohon cengkeh di pulau-pulau tersebut ditebang oleh serdadu-serdadu V.O.C. yang diangkut armada *Kora-kora* tersebut. Selama berlangsungnya ekspedisi itu banyak pemuda-pemuda negeri yang menjadi pendayung *kora-kora* meninggal karena kekurangan makanan, atau dibunuh musuh. Selain itu waktu yang digunakan sering melebihi waktu yang disepakati, yaitu tiga bulan dan kebetulan jatuh pada masa panen cengkeh (akhir tahun) tatkala tenaga mereka justru dibutuhkan di dati masing-masing.

Kepincangan lain dari sistem yang dibangun V.O.C. di Maluku Tengah adalah korupsi.³ Terutama sejak bagian kedua abad ke-18, penyakit ini mulai menjalar di kalangan pejabat-pejabat Belanda. Mental pedagang yang merupakan ciri bekas pejabat-pejabat Belanda pada abad ke-17, mulai berganti dengan mental pegawai pemerintah dalam abad ke 18 sehingga untung-rugi perusahaan sebagai dorongan utama, berganti dengan usaha memperkaya diri masing-masing. Para Residen di daerah-daerah menjual supply bahan-bahan keperluan yang disalurkan V.O.C., ke daerah-daerah dengan harga yang menguntungkan.⁴

Hukuman denda (wang) yang dituntut pengadilan negeri di Ambon pada penduduk yang melakukan pelanggaran hukum dibayarkan oleh

3. Korupsi sebagai sebab utama pemberontakan diuraikan oleh Laksamana A.A. Buijskes dalam "Rapport Kedung Allang"nya tertanggal 10 Oktober 1818 *Arsip Nasional RI*, Nomer Ambon 186)
4. Tentang adanya perdagangan oleh para Residen disebut oleh Buijskes dalam laporan tersebut dalam catatan nomor 3.

Residen yang bersangkutan, yang kemudian memotong jumlah ini ditambah suatu jumlah tertentu untuk kepentingannya sendiri, dari hasil penjualan cengkeh orang-orang yang bersangkutan.

Pelanggaran-pelanggaran atas peraturan-peraturan lain yang dilakukan pejabat-pejabat tersebut meliputi hampir seluruh segi kehidupan pedesaan. Tetapi di dalam pernyataan pengikut-pengikut Pattimura tersebut, hanya disebut hal-hal yang dibuat oleh para pejabat yang mulai memerintah pada bulan Maret - April 1817. Pejabat-pejabat ini mengambil over pemerintahan Maluku Tengah dari tangan pejabat-pejabat Inggris yang memerintah sejak tahun 1796. Rencana-rencana yang mereka buat menggelisahkan rakyat. Penyederhanaan sistem pendidikan dengan menghapuskan sekolah-sekolah desa dan memusatkannya di satu atau dua negeri di setiap pulau, dilihat oleh orang-orang Ambon sebagai usaha menghapuskan seluruh sistem itu. Sekalipun interpretasi ini tidak benar dan ternyata penyerderhanaan itu ditentang oleh sejumlah pejabat-pejabat di daerah,⁵ namun kurangnya pengertian dari pejabat-pejabat yang belum mengenal daerah itu membuat desas-desus tersebut menjadi sumber keresahan.

Leverantie bahan bangunan juga merupakan sumber penyalahgunaan. Kewajiban ini merupakan suatu ketentuan yang telah ada sejak pertengahan abad ke-17, dan disempurnakan dalam masa-masa berikutnya. V.O.C. mewajibkan negeri-negeri tertentu di Ambon dan Lease untuk menyediakan bahan-bahan bangunan dan bahan-bahan untuk perbaikan kapal-kapalnya. Bahan-bahan itu ditebang di Seram dan diangkut ke Ambon oleh negeri-negeri tersebut. Dalam masa pendudukan Inggris yang berlangsung sepuluh tahun itu paksaan ini dihapus dan seluruh "Leverantie" bahan bangunan dibayar oleh pihak Inggris. Pejabat-pejabat Belanda yang menggantikan pada pertengahan tahun 1817 itu, menghidupkan sistem lama sekalipun dengan jumlah bayaran yang tidak memuaskan penduduk.⁶

Kemudian ada beberapa tindakan lain yang oleh penduduk dianggap tidak adil. Pemerintah Gubernur van Middelkoop pada penduduk Ambon-

- 5 Menurut C. van den Berg van Saparoea (lihat catatan nomor 20) Residen van den Berg ternyata termasuk orang-orang yang tidak menyetujui rencana itu.
- 6 Perhitungan mengenai harga-harga bahan bangunan itu antara lain dibuat oleh Mr.H.A. Idema, "De Oorzaken van den Opstand van Saparoea in 1817" BKI 79 1923.

Lease untuk membuat garam dan ikan asin bagi keperluan kapal-kapal Belanda yang sedang berlabuh di Ambon dianggap perbuatan sewenang-wenang. Membuat garam dan ikan asin tidak pernah menjadi kewajiban sebelumnya. Hanya karena kebetulan pada saat itu hubungan dengan Batavia sangat sulit sehingga penyediaan bahan makanan bagi keperluan tentara dan pegawai Belanda juga terlambat, membuat van Middelkoop mengeluarkan perintah ini. Perintah ini dianggap memberatkan karena kerja rodi lain tidak dikurangi. Bayaran yang kecil jumlahnya untuk hasil ikan asin dan garam terutama ditolak oleh penduduk Saparua.⁷

Sumber keresahan lainnya yang disebut oleh pengikut-pengikut Pattimura adalah sirkulasi wang kertas. Sejak masa V.O.C. penduduk selalu menerima uang logam untuk hasil cengkeh mereka.

Uang kertas mulai diintrodusir Daendels di Jawa dan kemudian baru pada tahun 1817 di Ambon. Pernyataan pengikut-pengikut Pattimura menjelaskan penyelewengan dalam hal ini. Pejabat-pejabat daerah membayar hasil cengkeh dengan uang kertas, tetapi penduduk yang membeli bahan-bahan kebutuhan seperti tekstil di toko-toko pemerintah, diwajibkan membayar dengan wang logam.⁸

Soal wang kertas terutama ditekankan dalam Pernyataan penduduk Hatawano (Saparua Utara) yang mengadakan perundingan dengan pihak Belanda pada bulan Juli 1817. Antara lain disebut bahwa wang kertas tidak bisa dipergunakan untuk memberi sumbangan di gereja (tabung diakoni yang dibuat khusus untuk wang logam). Menurut pernyataan Hatawano mereka yang menolak menerima wang kertas akan dirantai dan diangkut ke Batavia.⁹ Selain menguraikan adanya hambatan-hambatan yang dikenakan atas kegiatan para guru desa yang juga mempunyai kewajiban mengasuh upacara-upacara agama Kristen, penduduk Hatawano juga menuntut dikirimi dua orang pendeta. Pelayanan upacara-upacara keagamaan oleh pendeta-pendeta Belanda sudah terhenti jauh sebelum pendudukan Ing-

7 *Ibid.*

8 Menurut Ideama kelemahan sistem moneter pada saat itu, adalah kurangnya empat-tempat penukaran wang. Hanya di kota-kota Ambon, Ternate dan Banda da kantor penukaran wang.

9 Van der Kemp, "Het Herstel van het Nederlands gezeg in de Molukken in 1817" *BKI* 65 - 66, 1911, hal. 670

gris.¹⁰ Pihak Inggris yang mengerti sikap penduduk dalam soal ini, menyediakan seorang pendeta (Inggris) sebagai penggantinya. Hal ini tidak dilakukan para pejabat mengambil alih kekuasaan pada bulan Maret 1817.

Suatu sumber keresahan lainnya adalah paksaan atas pemuda-pemuda negeri untuk menjadi *soldadu* di Jawa. Sejak awal abad ke-17 sudah ada orang Ambon yang menjadi anggota tentara V.O.C.,¹¹ tetapi berkurang sejak pertengahan abad ke-18. Ketika Daendels tiba di Batavia (1808) dengan rencana-rencana pertahanannya ia memerlukan pemuda-pemuda untuk "milisi"-nya. Sejumlah pemuda Ambon dan pulau Saparua diangkut dengan cara paksaan. Tindakan sewenang-wenang inilah yang tidak disetujui. Selain itu pengalaman yang pahit semasa Daendels menyebabkan orang menganggap pekerjaan soldadu sebagai suatu hukuman buangan.¹² Mungkin dalam pandangan penduduk praktek ini disamakan dengan kewajiban Hongi.

Pattimura menyebut persoalan paksaan menjadi soldadu di Batavia sebagai sumber keresahan yang penting di samping tindakan-tindakan penyederhanaan sistem pendidikan.¹³

Laporan dari Johanis Risakotta, seorang guru dari negeri Porto,¹⁴ malah menyebut persoalan ini sebagai dorongan utama yang menimbulkan perlawanan di Saparua.

2. Jalannya Perang.

Menurut laporan Risakotta yang bertanggal 13 November 1817 itu¹⁵

-
- 10 Lihat umpamanya. "Some account of the island of Amboina and Banda at the time they were taken by us with suggestions towards their better management in case of our keeping permanent possessions of them" diterbitkan oleh Mr. J.E. Heeres, *BKI.* 60 (1908), hal 314-365
 - 11 Umpamanya biografi Jonker oleh van der Chijs.
 - 12 Menurut Buijskes, dalam laporannya, kekeliruan yang dibuat oleh Daendels maupun van Middelkoop adalah tidak diberikannya jaminan hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. Ini merupakan salah satu sebab mengapa orang pada waktu itu segan menjadi soldadu di luar Ambon.
 - 13 P.H. van der Kemp, *Op.Cit.*, 1915 hal. 29
 - 14 Naskah laporan Risakotta (di dalam van der Kemp dinamakan "Rapport Porto") diperoleh dari Dr. J.Z. Manusama dalam bentuk fotokopi. Selama perlawanan tersebut, Risakotta, guru di Porto, bersikap netral. Ia membuat laporan itu atas permintaan Residen Ambon de Neijs.
 - 15 Ditulis dalam bahasa Melayu dan huruf Latin.

"pohon perang" atau awal perlawanan itu dimulai dengan sejumlah pertemuan rahasia yang diorganisir oleh beberapa pemuda dari negeri Haria, yaitu Johanis Matulesia, Nicolas Patinasarany, Jeremias Tamaela, Marawael Hattuw, Bastian Latupeirissa, dan Hermanus Latupeirissa. Atas anjuran para pemuda itu pada tanggal 3 Mei 1817 sekitar 100 orang pemuda negeri Hara mengadakan suatu perundingan ("berbuat satu bicara") di hutan yang terletak di antara negeri Tiow dan negeri Paperu. Perundingan diawali dengan doa oleh Hermanus Latupeirissa dan memutuskan untuk menghancurkan benteng ("kawtah") di Saparua (*duurstede*). Diputuskan pula ketika itu untuk mengajak negeri-negeri lainnya dalam rencana itu. Selain itu para pemuda itu sepakat untuk menghancurkan keluarga dari mereka yang membocorkan rencana itu kepada musuh. Beberapa hari sesudah itu mereka berunding lagi di tempat yang sama dengan maksud memilih seorang pemimpin. Dalam perundingan inilah Thomas Pattimura Matulesia, kakak dari Johanis Matulesia, secara spontan menyanggupi tugas itu. Selain itu diputuskan juga untuk membunuh Raja Sirisory dan Pati Haria yang memihak pada Belanda. Pertemuan itu ditutup dengan doa oleh Pattimura yang memohon bimbingan Tuhan dalam melakukan tugas yang berat itu.

Perundingan selanjutnya diadakan di sebuah tempat lain di antara negeri Saparua dan Sirisory. Perundingan yang dihadiri oleh wakil-wakil pelbagai negeri itu membahas tekad semula untuk merebut pusat pemerintah Belanda di Saparua. Sesudah itu para pemuda yang kira-kira berjumlah 100 orang itu mengadakan upacara sumpah setia, suatu tindakan adat yang mengikat pengikut-pengikutnya pada rencana tersebut, dengan meminta para leluhur menjadi saksi dan pelindung.

Mungkin sekali masih ada perundingan-perundingan lain yang tidak disebut dalam laporan Risakotta, namun peristiwa yang akhirnya menimbulkan perlawanan fisik terjadi pada malam itu juga setelah perundingan tersebut. Kira-kira jam 21.00 sejumlah pemuda menuju ke pantai negeri Porto dan mengangkut bahan-bahan bangunan (*trankera*) yang telah dimuat dalam *arombai* (perahu pengangkut) Porto yang sedianya akan diberangkatkan pada pagi hari ke Ambon.

Residen van den Berg yang mendapat berita tentang kejadian itu, keesokan harinya berkuda ke negeri Porto. Namun setiba di Haria ia dikepung para pemuda negeri itu. Pada saat itulah guru Risakotta muncul dan mencoba mengatasi suasana. Karena Pati Haria sudah tidak berwibawa lagi, maka ialah yang menghadap para pemuda negeri di *Baileo* (balai desa) Haria. Di sana ia

mendapat ketegasan, bahwa keputusan untuk melawan pihak Belanda tidak datang dari penduduk Haria saja, tetapi keputusan dari seluruh pulau.¹⁶ Tetapi mereka setuju membebaskan Residen setelah Risakotta menegaskan, bahwa bila keputusan memberontak diambil oleh semua negeri maka seharusnya seluruh pulau-pulau yang menjatuhkan hukuman atas Residen. Anjuran ini rupanya disetujui Pattimura pula yang bersama anak buahnya menghantar van den Berg meninggalkan Haria kembali ke benteng Duurstede.

Tetapi rupanya pasukan-pasukan yang tersebar di tempat-tempat lain telah mengambil tindakan-tindakan tersendiri. Sejumlah tentara Belanda yang dipimpin oleh Scriba¹⁷ yang berusaha membebaskan Residen mendapat perlawanan beberapa kali sehingga niat mereka gagal. Usaha pasukan Belanda itu ternyata didasarkan permintaan Residen yang berhasil menulis dua buah surat selagi di Haria, satu kepada komandan benteng Duurstede, dan satu lagi ke Ambon. Hanya surat pertama yang sampai ke alamatnya.¹⁸

Keresahan yang tidak terduga-duga di beberapa tempat yang dilalui R. van den Berg tersebut dapat ditenangkan oleh Pattimura sendiri. Sang residen akhirnya tiba dengan selamat di bentengnya dan mempersiapkan pertahanan di sekitarnya dengan bantuan pihak-pihak yang masih setia padanya.

Pada malam hari itu juga (15 Mei) pemuda-pemuda dari seluruh negeri di pulau Saparua mengambil tempat di sekitar Duurstede. Keesokan harinya pagi-pagi benar Thomas Matulesia tiba pula. Persiapan-persiapan penyerbuan berupa tangga dari bambu disempurnakan, dan kira-kira pukul 15.00 sore.¹⁹ Pattimura memerintahkan penyerbuan.

-
16. Pada waktu itu penduduk belum lazim menggunakan istilah Saparua untuk seluruh pulau yang bersangkutan. Istilah Honimoa lebih kerap digunakan daripada istilah Saparua.
 17. Setiap Benteng Belanda ada seorang Scriba (Sekretaris) yang mendampingi Presiden.
 18. Surat tersebut diketemukan oleh pasukan *Overste Pool* ketika mereka merebut *Duurstede* pada bulan Agustus 1817. Isinya (terjemahan): "Sersan, segera datang dengan 12 orang yang bersenjata untuk membebaskan saya. Segalanya telah kacau-balau". Van der Kemp, *Op.Cit.*, 1911, hal. 703.
 19. Menurut laporan Risakotta.

Sebelumnya kira-kira pukul 12.00 Residen masih ingin berunding, tetapi ajakannya ditolak. Seluruh penduduk benteng yang terdiri dari keluarga van den Berg dan para prajuritnya hancur binasa ketika itu. Hanya seorang putranya yang berusia lima tahun berhasil diselamatkan oleh Pattimura.²⁰ Keesokan harinya Pattimura memerintahkan penduduk menguburkan mayat-mayat pihak musuh.

Siapakah sebenarnya Pattimura? Nama baptisannya adalah Thomas sedangkan Pattimura adalah nama yang diberi padanya segera setelah ia lahir. Pada masa pendudukan Inggris ia menjadi anggota milisi dengan pangkat sersan, latihan-latihan militer yang diperolehnya bersama kawan-kawannya di dalam Pasukan 500 (karena terdiri dari 500 orang) memungkinkannya memimpin pasukan di Saparua. Tatkala Inggris meninggalkan Maluku, Pasukan 500 dibubarkan dan anggota-anggotanya dipulangkan ke negeri masing-masing.

Tindakan ini sangat keliru, pertama-tama, karena menimbulkan kemarahan dari prajurit-prajurit tersebut yang kini harus kembali ke desa dan bergantung pada keluarga masing-masing. Kebanyakan telah diberi "vrijbrief" atau surat bebas pekerjaan rodi. Tetapi sejajar dengan status "burger" itu mereka sebenarnya juga tidak berhak atas hasil cengkeh dari dati keluarganya.

Selama perlawanan yang berlangsung sampai bulan Nopember, Pattimura selalu didampingi suatu pasukan yang terdiri atas ribuan penduduk desa. Inti dari pasukan ini adalah sejumlah "burger" yang pernah dipimpinnya dalam "pasukan 500".

Setelah benteng Duurstede direbut pada tanggal 16 Mei²¹ Pattimura mulai mempersiapkan serangan-serangan atas benteng-benteng lainnya. Pada saat ini di pulau Haruku ada sebuah benteng yang cukup berat yaitu Zee-landia, dan di Nusalaut ada benteng Beverwijk. Selain itu di daerah Hitu ada pula sebuah benteng di Hila dan di Hoamoal ada pula benteng yang penting. Menurut laporan Risakotta pada tanggal 18 Mei Pattimura telah berada di

20. Pada usia tua ia menulis sebuah memorie mengenai peristiwa tersebut dan sejak itu ia menggunakan istilah van Saparua di belakang nama van den Berg. Keturunannya C. van den Berg. van Saparua menerbitkan memoir tersebut, "*De Tragedie op het Eiland Saparua in het jaar 1817 tijdens den opstand in den Melukken*", *BKI*, 104, hal. 1948
BKI, 104, hal. 1948

21. Menurut penulis-penulis lain, 17 Mei 1817.

Hulaliu (pusat pertahanan di pulau Haruku) dan mengatur siasat pertempuran di sana dengan para Kapitan dan Latupati. Tetapi keesokan harinya ia menerima kabar di Haria, bahwa sebuah pasukan Belanda telah mendarat di Haruku dan merencanakan serbuan ke Saparua. Sebab itu seluruh rencana semula diubah. Pada pagi hari itu juga ia memanggil pasukan-pasukannya yang berkedudukan di Duurstede untuk berunding di Haria. Negeri itu dijadikan markas besarnya. Ketika keesokan harinya para pengintai melaporkan bahwa armada Belanda telah masuk ke teluk Saparua, maka Pattimura telah siap pula dengan siasatnya.

Menurut laporan Risakotta, strategi yang disusun Pattimura adalah sebagai berikut: Pertama, para pemuda dari negeri Haria diperintahkan untuk mengambil tempat di belakang semak-semak sepanjang pantai Barat teluk Saparua antara Urupati dan Paperu. Pasukan khusus Pattimura yang terdiri dari orang-orang "burger" akan langsung menuju ke Saparua dan bersiap-siap di sekitar benteng Duurstede. Kedua pasukan ini bertugas untuk mencegah pendaratan musuh.

Selain itu ada pula pasukan-pasukan dari Seram yang tiba pada hari itu juga. Pasukan-pasukan yang berasal dari negeri-negeri Rumakay, Tihulale dan Kulon itu di tempatkan sebagai cadangan untuk menghantam musuh bila mereka berhasil menerobos pasukan-pasukan yang berjaga di pantai.

Ekspedisi Belanda yang tiba pada tanggal 20 Mei itu dipimpin oleh Mayor Beetjes dengan menggunakan kora-kora yang berhasil diperoleh di Haruku. Pasukan itu mendarat di sebuah tempat sekitar muara sungai Waisisil di sebelah Barat Duurstede. Menurut seorang perwira Belanda²² pendaratan itu sendiri berlangsung dengan baik. Tetapi setiba di daratan terjadi kekacauan. Pasukan yang dibagi dalam tiga bagian itu masing-masing menghadapi tembakan-tembakan yang gencar dari pasukan-pasukan Pattimura yang berlingkungan di balik pohon kelapa dan semak-semak belukar. Salah satu pasukan itu berhasil menerobos pertahanan Pattimura dan mulai bergerak menuju Duurstede. Tetapi hal ini rupanya tidak diketahui Mayor Beetjes. Karena dua pasukan lain mulai hancur oleh tembakan-tembakan pasukan Pattimura, maka Beetjes memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengundurkan diri. Pada saat itulah pasukan Pattimura ke luar pula dari per-

22 Q.M.R. Verheull, *"Herrineringen van eene reis naar oost-Indien 1835*. Keterangan-keterangan diperoleh dari kadet't Hooft yang ikut dalam ekspedisi itu.

lindungan mereka dan berhasil menghancurkan sebagian besar dari pasukan Beetjes. Malah Beetjes sendiri gugur saat itu.²³ Seluruh pertempuran itu berlangsung beberapa jam saja dan berakhir kira-kira pukul 12.00 siang. Keesokan harinya pasukan-pasukan musuh yang gugur itu dikuburkan pula.

Setelah kemenangan yang kedua kalinya itu Pattimura beralih kembali pada rencana semula, yaitu menyerang benteng Zeelandia di pulau Haruku. Hancurnya pasukan Beetjes memang berhasil membangun semangat di Haruku. Selain itu Pattimura menempatkan beberapa orang panglimanya untuk membantu pasukan-pasukan Haruku seperti Kapitan Lucas Selano, Kapitan Aron Lisapali dari Ihamadu, dan Patisaba alias Melchior Kesaulnya.²⁴

Selain itu pasukan-pasukan yang datang dari pelbagai negeri di Seram di tempatkan pula di Haruku. Mula-mula sejumlah 50 orang Kamariang tiba di Haria dan langsung dikirim ke Hulaliu (markas di Haruku). Sesudah itu tiba pula pasukan-pasukan dari negeri Iha, Latu, Hualoy dan Amahay. Sejumlah pasukan lain dari Elpaputih tidak lama tiba pula. Orang-orang Seram ini dinamakan Alifuru oleh orang-orang Ambon, dan perbedaan yang pokok adalah agama yang mereka anuti, bukan agama Kristen atau pun agama Islam.

Serangan-serangan atas benteng Zeelandia dimulai pada tanggal 30 Mei sesudah diadakannya persiapan-persiapan sejak 25 Mei.²⁵ Serangan yang dimulai pada siang hari itu dilakukan dari tiga jurusan dengan kekuatan kira-kira 700 orang. Selama dua jam pasukan-pasukan Haruku menyerbu tiga kali. Namun berbeda dengan di Duurstede, kini Belanda telah lebih hati-hati. Tembakan-tembakan meriam dari kapal Zwaluw akhirnya menggagalkan seluruh serangan itu. Sesudah itu Belanda mendatangkan pasukan bantuan yang memperkuat penjagaan sekitar benteng itu. Selain itu beberapa negeri di sekitarnya diserang dan penduduknya diteror.

Di tengah-tengah pertempuran di Haruku terjadi suatu tragedi. Bekas Pati Aboru yang rupanya kurang setuju dengan perlawanan itu, mengambil inisiatif untuk menngadakan perundingan perdamaian dengan pihak Belan-

23 J.B.J. van Doorn, *Thomas Matulesia, het Hooft der Opstandelingen op het eiland Honimoo, na de overname van het bestuur der Molukken door den Landvoogd Jacobus Albertus van Middelkoop in 1817*, 1857.

Keterangan-keterangannya diperoleh dari wawancara dengan penduduk setempat yang mengalami peristiwa itu.

24 Van der Kemp, *op.cit.*, 1911 hal. 644.

25 *Ibid.*

da di Zeelandia. Usaha-usaha ini dilaporkan kepada Pattimura yang jelas tidak bisa menyetujui tindakan itu. Namun bekas Pati itu tetap melakukan niatnya. Pada taraf pertama pihak Belanda mengirimnya ke negeri Oma dengan sepucuk surat dari Belanda. Surat itu kemudian diteruskan kepada Pattimura di Haria. Pattimura tetap berpendapat bahwa tindakan bekas Pati itu tidak tepat sehingga akhirnya penduduk membunuh Pati itu. Belanda lalu membalas dengan menghancurkan negeri Boi sehingga rakyatnya terpaksa harus mengembara di hutan-hutan.

Pada awal bulan Juni Pattimura menerima utusan-utusan dari negeri Lima (di Hitu) bahwa pasukan-pasukan Hitu telah siap pula untuk menyerang benteng-benteng Belanda. Yang masih ditunggu adalah bantuan senjata dari "*Tanah Besar*" (Seram)²⁶ Jazirah Hitu di pulau Ambon sebagian besar di tempati orang-orang Ambon yang beragama Islam. Pemimpin mereka di sini adalah Ulupaha,²⁷ seorang Kapitan dari Negeri Seit, dan puteranya Pahlawan. Pemimpin yang sudah berusia kira-kira 80 tahun itu tidak sanggup berjalan lagi. Tetapi semangatnya selalu menjadi inspirasi bagi pengikut-pengikutnya. Di dalam setiap pertempuran ia ditandu oleh pengikut-pengikutnya agar bisa langsung memberi perintah. Karena pengepungan benteng di Hila oleh pasukan Ulupaha, maka praktis pasukan Belanda tidak dapat bergerak di sana. Mereka baru dibebaskan sebulan sesudahnya setelah datang bantuan dari Ambon.

Ulupaha dan Pahlawan serta pasukan mereka lalu menyeberang ke Hoamool, jazirah di sebelah Barat pulau Seram yang penduduknya beragama Islam. Perlawanan di sini ternyata berhasil. Pada tanggal 18 Juli²⁸ seorang dari negeri Pelauw (negeri Islam di Haruku) melapor pada Pattimura di Haria, bahwa pasukan-pasukan "*Tana Hitu*" berhasil merebut benteng di Luhu (Hoamoal) dan menghancurkan pasukan Belanda di sana. Perlawanan di sini meluas ke negeri-negeri Seram lainnya yang terletak di Teluk Piru. Jadi praktis seluruh negeri-negeri di pantai Selatan pulau Seram turut dalam perlawanan ini secara langsung atau tidak langsung (seperti di Seram Timur).

Selama bulan Juni sampai dengan Agustus Pattimura mengadakan persiapan-persiapan di Saparua. Rupanya ia yakin bahwa pulau itu akan mendapat serangan lagi. Pertama-tama yang dilakukannya adalah mengumpulkan

26 Laporan Risakotta.

27 Pada masa pendudukan Inggris ayahnya, yang bernama Ulupaha pula, memberontak dan dihukum mati di Ambon pada tahun 1796. Lihat catatan nomor 10.

28 Laporan Risakotta.

senjata dan mesiu. Menurut laporan Risakotta dalam hal ini bantuan yang diperolehnya terutama berasal dari penduduk di Seram Timur. Penduduk negeri-negeri Kilmury, Selor dan Werinama terutama berhasil memikirkan senjata dan mesiu di luar Maluku dengan cengkeh yang diambil Pattimura dari persediaan di benteng Duurstede. Malah penduduk Ondor berhasil membawa sepucuk surat dari Pattimura kepada salah seorang raja di Bali.

Persiapan-persiapan lainnya adalah pembangunan "binting" di sekeliling negeri.²⁹ Benteng-benteng ini dibuat dari batu-batu pantai yang masif atau batu karang. Tekhniknya sederhana: batu-batu itu ditumpuk-tumpuk setinggi kira-kira satu setengah meter dengan lebar satu meter. Ada yang hanya berupa garis lurus di muka negeri menghadap ke pantai. Ada juga yang sampai mengelilingi seluruh negeri seperti di Porto dan Haria serta Boi dan Paperu. Benteng-benteng yang lebih kompleks terdapat di Sirisory dan Ulat. Di sini terdapat beberapa lapis benteng yang terletak di antara kedua negeri itu. Pada jalan masuk negeri Sirisory, dari arah Saparua, ada pula sejenis benteng lain yang dibuat sebelah menyebelah jalan masuk negeri, dengan tembok-tembok tebal yang melintang di antaranya tetapi tidak menutup sama sekali. Musuh yang berusaha melewati celah-celah di antara benteng dan tembok-tembok itu dengan mudah dapat ditembak dari balik benteng.³⁰ Selain itu di sepanjang jalan antara satu negeri dan negeri lainnya dibuat semacam ranjau dari bambu yang diliputi semak belukar.

Untuk keperluan organisasi, pasukan Pattimura mengangkat seorang kapitan di setiap negeri yang bertugas memimpin pemuda-pemuda negeri yang bersangkutan. Selain itu bekas anggauta "Pasukan 500" juga dipakainya sebagai pasukan istimewa. Sebagian dari pasukan-pasukan ini mempunyai senjata api sekalipun persediaan mesiu tidak cukup banyak. Selain itu sekalipun persediaan mesiu tidak cukup banyak. Selain itu senjata yang ampuh pula adalah parang panjang dan salawaku (perisai) yang dimiliki hampir setiap pemuda desa. Pasukan-pasukan dari Seram pada umumnya menggunakan panah dan busur, di antaranya ada yang berbisa. Selain itu mereka juga menggunakan *torana* atau tumbak yang dibuat dari bambu atau kayu. Taktik pertempuran pasukan-pasukan ini disesuaikan dengan senjata mereka. Orang-orang Seram gemar menyergap musuh dengan tiba-tiba, atau memanahnya dari jarak yang agak jauh. Serbuan serentak

29 Laporan Risakotta menggunakan istilah "*binting*" untuk benteng-benteng penduduk, dan istilah "*kawtah*" untuk benteng Belanda.

30 Van der Kemp, *Op.Cit.*, 1911, hal. 624. Lihat peta Buijskes.

secara kelompok juga dilakukan dengan menggunakan torana. Pemuda-pemuda negeri Saparua. Haruku dan Nusalaut gemar perang tanding secara kelompok dengan menggunakan parang dan salawaku. Seluruh gerakan dengan busur, torana, atau parang, selalu didahului dengan gerak-gerak tari untuk membangunkan semangat (cakalele) dengan disertai teriakan-teriakan yang nyaring. Ini menyebabkan gerakan mereka sering diketahui musuh sebelum serangan yang sesungguhnya dilancarkan. Hanya pasukan "borgor" yang telah mendapat latihan-latihan menggunakan senjata api bisa menandingi taktik perang musuh. Tetapi jumlah mereka tidak banyak.

Pada pertengahan bulan Juli tiba armada Belanda yang ketiga. Armada yang menuju ke daerah Hatawano (Saparua Utara) itu terdiri dari kapal perang *Maria Rijgersbergen* yang baru tiba dari Ternate,³¹ Fregat *Iris* dan dua kapal pengangkut pasukan yang disewa dari pihak Inggris.³²

Rupanya tugas dari ekspedisi ini adalah menangkap para pemberontak dengan pelbagai cara dan merebut benteng Duurstede.³³ Setiba di Hatawano armada itu menembaki kelima negeri di sana. Tembakan dari dua jurusan itu menyebabkan penduduk lari meninggalkan rumah-rumah mereka. Tetapi benteng-benteng sekitar negeri berhasil memberi perlindungan terhadap peluru-peluru meriam kedua kapal perang tersebut. Dengan demikian ternyata tembakan-tembakan itu tidak efektif. Sebab itu Overste Pool, yang memimpin armada itu, mencari jalan lain, yaitu siasat berunding. Sebuah surat dikirim ke pantai untuk mengumumkan gencatan senjata selama 24 jam. Selain itu penduduk diminta mengirim utusannya ke kapal perang untuk berunding dengan Pool. Namun penduduk Hatawano tetap bersifat hati-hati dan melaporkan keinginan Belanda ini kepada Pattimura.

Dari fakta-fakta yang sudah diterbitkan dapat kita mengambil kesimpulan, bahwa Pattimura pun tidak menganggap usaha perundingan itu secara serius. Ia meluluskan orang-orang Hatawano mengirim sebuah pernyataan mengenai keberatan-keberatan mereka atas sistim pemerintah Belanda,³⁴ tetapi ia sendiri bersikap menunggu. Selain itu ia tidak membenarkan penduduk ke kapal perang, tetapi sebaliknya menuntut agar pool sendiri

31 Van der Kemp, *op.cit.*, 1911, hal. 659 – 670

32 Kedua kapal itu datang ke Ambon untuk mengangkut pegawai-pegawai Inggris. Keduanya dipaksa untuk turut dalam ekspedisi itu.

33 Van der Kemp, *op.cit.*, 1911, hal. 659 – 681

34 Lihat catatan nomer 9.

turun untuk berunding. Dengan demikian kedua belah pihak saling memancing lawannya. Pool mula-mula mengirim beberapa orang prajurit biasa dengan seorang juru bicara. Rupanya juru bicara yang berkebangsaan Denmark, dan yang telah bertahun-tahun bekerja pada V.O.C. di Ambon dan mengerti bahasa-bahasa Ambon itu, berhasil diyakinkan oleh Pattimura. Atas permintaan Pattimura ia menulis sebuah surat kepada Pool agar dikirim seorang perwira yang mempunyai wewenang untuk berunding.

Ini pun diluluskan oleh Pool. Perwira muda itu digiring dari Hatawano di pantai utara sampai ke Saparua untuk bertemu dengan Pattimura. Di sepanjang jalan ia sempat menyaksikan pasukan Pattimura yang disiapkan. Setelah menunjukkan keadaan pasukannya, Pattimura membawa perwira itu untuk bertemu dengan ibunya di Haria. Perjalanan ini mengesankan perwira muda tersebut. Ia menyaksikan ketaatan Pattimura pada agamanya dan kecintaannya pada ibunya. Namun Pattimura tidak memberi konsesi apa-apa kepada perwira muda itu. Pattimura menuntut agar pembesar-pembesar di Batavia sendiri datang untuk berunding dengannya. Pool memang meneruskan tuntutan itu ke Ambon, tetapi Gubernur van Middelkoop tidak melakukan apa-apa. Sebab itu Pool sendiri terpaksa harus turun ke darat. Pada saat yang telah ditentukan ia bersama sejumlah pasukannya turun ke Hatawano dengan maksud bertemu dengan Pattimura. Namun sebelum Pattimura tiba di tempat perundingan, Pool telah meninggalkan tempat itu dengan alasan keamanannya tidak terjamin. Dengan demikian perundingan yang berlangsung beberapa hari itu terputus dan pertempuran-pertempuran berkobar lagi.

Karena tidak berhasil menangkap Pattimura dengan cara damai, Overste Pool mengarahkan armadanya untuk menyerang benteng Duurstede. Rupanya Pattimura menyadari bahwa pasukan-pasukan armada itu terlampau berat baginya. Benteng itu dikosongkan dan pasukan-pasukan Pool dengan leluasa memasukinya lagi. Tetapi ini tidak berarti perlawanan sudah terhenti. Hanya benteng itu yang diserahkan kepada Belanda. Seluruh wilayah di sekitarnya, apalagi negeri-negeri, tetap dikuasai pasukan-pasukan Pattimura.

Sebagian dari pasukan ini mengambil tempat di sekitar benteng. Setiap soldadu yang meninggalkan benteng pasti ditembak. Sumur air yang memberi minuman kepada para prajurit dan awak kapal merupakan umpan yang baik. Sumur yang letaknya di luar tembok benteng itu menjadi saksi gugurnya prajurit-prajurit Belanda yang mencoba mengambil air. Sekalipun rumah Re-

siden yang terletak di pekarangan benteng dan yang digunakan oleh para prajurit Pattimura sebagai tempat berlindung, dapat dihancurkan musuh, namun tidak lama kemudian berdirilah sebuah "bintang" baru dari batu karang. Di balik tembok-temboknyalah pasukan Pattimura leluasa menembak ke arah benteng. Apabila ada patroli musuh yang kuat segera pula benteng itu ditinggalkan.

3. Akhir Perang.

Siasat gerilya ini berlangsung sampai bulan Nopember. Pada bulan Oktober tiba armada Belanda yang ke empat di perairan Maluku Tengah. Armada ini dipimpin oleh Admiral Buijskes yang memimpin armada Hindia Belanda dan menjabat Komisaris I di Hindia Belanda. Dengan pasukan yang besar serta senjata dan perbekalan yang cukup pula, Buijskes menyusun suatu rencana menyeluruh untuk menguasai Maluku Tengah.

Mula-mula ia menyerang Hitu. Sesudah itu ia menyerang Haruku pada awal November untuk dijadikan basis menyerang Saparua. Serbuan ke Haruku dipimpin oleh Mayor Meyer, seorang perwira yang kejam. Setelah menembaki negeri-negeri dengan kapal-kapal perangnya, ia mengerahkan pasukan-pasukan istimewa untuk menangkap orang-orang Haruku. Pria dan wanita serta anak-anak, dikurungnya di dalam mesjid dan gereja. Pada suatu ketika ia memerintahkan 400 orang pria ke luar mesjid dan gereja dan dibariskan di sebuah lapangan. Atas perintahnya sebuah pasukan melepaskan tembakan kepada ke-400 orang yang sedang berdiri itu. Tetapi, juga atas perintahnya, hanya 23 orang yang dianggap biang keladi, sungguh-sungguh ditembak. Mereka yang tidak segera mati dan berusaha melarikan diri dengan cara berlari atau merayap di tanah, segera disusul oleh peluru sampai mati pula. Tangisan dan teriakan serentak terdengar dari mesjid dan gereja. Anak-anak dan wanita-wanita yang masih berada di sana mengira suami ayah, atau saudara mereka telah gugur semua.

Sesudah menguasai Haruku armada tersebut menyeberang ke Saparua. Daerah Saparua Selatan dikepung dari lima jurusan oleh kapal-kapal perang yang serentak melepaskan tembakan meriam ke arah negeri-negeri. Sesudah itu pasukan-pasukan istimewa di bawah pimpinan Vermeulen — Kruger di daratkan di sekitar Haria dan Porto, sementara pasukan-pasukan dari benteng Duurstede menyerbu pula ke arah itu. Seluruh negeri-negeri yang dilalui pasukan Vermeulen — Kruger itu dibakar. Pasukan Alifuru Ternate yang kira-kira berjumlah 2000 orang yang dikumpulkan oleh Buijskes di Ternate, berhasil menimbulkan kerusakan yang hebat pula. Pasukan-pasukan Pattimura

bertahan mati-matian tetapi terpaksa harus mengundurkan diri sampai ke perbentengan terakhir di Sirisory-Ulat. Di perbentengan yang sangat kompleks ini terjadi pertempuran yang paling sengit. Di sini pula Mayor Meyer yang kejam itu akhirnya tertembak pula. Ia diangkut ke Ambon dan meninggal di rumah sakit pada awal 1818. Perbentengan terakhir di pulau Saparua ini meminta pengorbanan jiwa yang tidak sedikit dari kedua belah pihak.

Nusalaut mengalami nasib yang sama pula. Pahlawan Nusalaut Paulus Tiahahu dan putrinya Christina Martha Tiahahu, pada saat itu sedang memperkuat pasukan-pasukan di Sirisory. Tetapi mereka pun ditangkap di sana dan dibawa ke Nusalaut. Dengan disaksikan penduduk serta seluruh pasukan Paulus Tiahahu yang telah sangat tua itu (ia ditandu selama pertempuran-pertempuran) ditembak sampai mati. Putrinya yang bersedia menggantikan ayahnya mula-mula diangkut ke Ambon, tetapi di perjalanan ia meninggal. Christina Martha yang dikenal pandai menggunakan senjata itu, sampai saat-saat terakhir tidak bersedia menerima belas kasihan dari Overste Verheull yang ditugaskan mengangkutnya ke Ambon.³⁵

Pengkhianatan memungkinkan pihak musuh menangkap Pattimura dan kawan-kawannya. Tiga orang di antara panglima-panglimanya, mendapat hukuman mati dan digantung pula di benteng Belanda di Ambon. Mereka itu adalah Anthoni Rehbok, Philip Latumahina, dan Melekior Kesaulnya.³⁶ Terakhir naik tiang gantungan adalah Pattimura sendiri.

B. SUMATRA BARAT

1. Pendahuluan.

Perang melawan Kolonialisme di daerah Minangkabau bermula dari pertentangan antara dua pihak dalam masyarakat dan sering dinamakan gerakan Padri yang mulai pada awal abad ke-19. Tujuannya adalah untuk memurnikan ajaran agama Islam, membasmi adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah Nabi.

Arti istilah Padri tidak begitu jelas. Pengikut-pengikutnya, memakai

35) Dalam memoire-nya Verheull memuja wanita itu sebagai berjiwa besar dan pemberani. Ia tetap tidak bersedia menerima fasilitas-fasilitas dari Verheull sekalipun badaniyah dan rohaniyah ia telah sakit parah.

36) Menurut penulis-penulis lain, panglima yang ketiga adalah Said Pemerintah.

pakaian jubah putih, sedangkan kaum Adat memakai pakaian hitam.³⁷

Ketika orang-orang Minangkabau mulai memeluk agama Islam pada pertengahan abad ke-16, terdapat dua cara hidup yang berdampingan secara damai: adat lama dan Syara' Islam sama-sama dihormati. Keduanya mendapat tempat dalam masyarakat Minangkabau, sampai-sampai timbul pepatah yang mengatakan: "Adat basandi Syara, Syara basandi Adat". Antara adat dan syara bekerja sama dan melengkapi satu sama lain. Tetapi pada masa selanjutnya kerja sama ini ternyata tidak abadi, keadaan menjadi berubah.

Negara Minangkabau mempunyai seorang raja yang berkedudukan di Pagaruyung. Raja dibantu oleh empat orang pembantu yang disebut *Bata Ampek Balai*. Mereka adalah Indomo di Saruaso, Titah di Sungai Tarab, M Mangkudum di Sumanik dan Kadi di Padang Ganting.³⁸ Raja tetap dihormati sebagai lambang negara Minangkabau, akan tetapi tidak mempunyai kekuasaan. Penduduk Minangkabau, terdiri dari dua belas suku yang berbeda-beda namanya dan mereka diam secara menyebar di seluruh negara. Tiap suku dipimpin oleh seorang penghulu, sedangkan raja dan para pembantunya tidak termasuk dalam salah satu suku pun, tetapi berada di luar suku. Pada hakekatnya kekuasaan terletak di tangan para penghulu yang tergabung dalam *Dewan Penghulu* atau Dewan Negeri.

Raja, bangsawan dan para penghulu inilah yang menjalankan peranan penting dalam pemerintahan adat. Perkembangan yang kemudian nampak di Minangkabau adalah timbulnya kebiasaan-kebiasaan buruk, sedang para pembesar tak mampu menghalangi, bahkan turut menjalankan kebiasaan-kebiasaan buruk, yaitu menyabung ayam, madat, berjudi dan minum-minuman keras. Kebiasaan ini makin meluas dan mempengaruhi kelompok pemudanya. Andaikata akan diadakan acara menyabung ayam, mereka datang berduyun-duyun dari berbagai tempat.

Menghadapi keadaan ini kaum ulama atau Padri mulai mengadakan reaksi, sehingga gerakannya lalu dikenal dengan gerakan Padri. Kaum Padri ingin memperbaiki keadaan masyarakat dengan cara mengembalikan pada ajaran Islam yang murni. Sejak itu timbul bibit-bibit pertentangan antara Kaum Padri dan Kaum Adat.

Pada akhir abad ke 18, seorang ulama dari kampung Kota Tua (daerah Cangking, Empat Angkat) di Daratan Agam, yaitu Tuanku Kota Tua, mulai

37) Sartono Kartodirdjo (Editor), *Sejarah Perlawanan-perlawanan Terhadap Kolonialisme*, Jakarta, Pusat Sejarah ABRI, 1973, hal 89.

38) Muhammad Radjab, *Perang Padri di Sumatra Barat (1803-1838)*, Djakarta, PN Balai Pustaka, 1964, hal. 8.

mengajarkan pembaharuan-pembaharuan.³⁹ Beliau mengajarkan bahwa masyarakat sudah terlalu jauh menyimpang dari ajaran Islam yang murni, kemudian ditunjukkannya bagaimana seharusnya hidup sesuai dengan Al Qur'an dan Sunah Rasul.

Di antara murid Tuanku Kota Tua, adalah Tuanku nan Renceh dari kampung Bansa di Kamang. Ulama ini terkenal sangat taat dan pintar serta terkenal sebagai guru agama di seluruh Luhak Agam.

Sementara itu, pada tahun 1803 telah kembali dari Mekah tiga orang haji, yakni Haji Miskin dari Pandai Sikat, Haji Sumanik dari VIII Kota, dan Haji Piabang dari Tanah Datar. Ketiga ulama ini menyaksikan secara langsung bagaimana kaum Wahabbi di Mekah meluruskan agama dan membasmi bid'ah, sehingga mereka ingin meluruskan pula agama di negerinya, Minangkabau.⁴⁰

Dengan tujuan ini mereka mulai mengajar di kampung-kampung. Pada suatu ketika dengan bantuan seorang penghulu, Kunci gelar Datuk Batuah, Haji Miskin melarang penduduk Pandai Sikat menyabung ayam. Larangan ini tidak diperhatikan oleh penduduk, Haji Miskin menjadi kesal dan pada suatu malam dibakarnya balai tempat menyabung ayam. Kaum Adat marah, dan Haji Miskin dikejar-kejar dan berhasil menyingkir ke Kota Lawas, di sini mendapat perlindungan dari Tuanku Mensiangan. Tuanku Mensiangan segera dapat dipengaruhi oleh Haji Miskin dan bertekad akan membantunya. Kaum Adat semakin marah, beberapa hari kemudian di dekat Balai Panjang, pasar Kota Lawas, terjadi perkelahian antara kaum adat dengan beberapa orang yang menaruh simpati pada Haji Miskin. Akibatnya Haji Miskin menuju Kamang dan bertemu dengan Tuanku nan Renceh. Maka paham baru ini segera meluas di Luhak Agam, juga di Empat Angkat, IV Kota, Candung dan Kota Tua.

Tuanku nan Renceh mengajak Tuanku-Tuanku di Luhak Agam untuk membentuk persekutuan melawan kaum Adat. Delapan orang ulama itu adalah: Tuanku nan Renceh, Tuanku Lubuk Aur, Tuanku Berapi, Tuanku Ladang Lawas, Tuanku Padang Luar, Tuanku Galung, Tuanku Biaro dan Tuanku Kapau. Mereka mendapat julukan "Harimau nan Salapan", karena tindakan-tindakannya yang keras. Sebelum melaksanakan tujuan, mereka bermusyawarah dengan guru yang mereka hormati, yaitu Tuanku Kota Tua. Tuanku Kota Tua menyetujui gerakan ini, tetapi menyarakannya agar dilakukan se-

39) Sartono Kartodirdjo, *Opcit.* hal. 90

40) Uraian secara mendalam mengenai konflik antara Adat dan Islam di Minangkabau, periksa Taufik Abdullah, "Adat and Islam; An Examination of Conflict in Minangkabau", *Indonesia*, II, Oktober 1966 (Modern Indonesia Project, Cornell University) dan seterusnya.

cara damai. Sebab menurut beliau pembaharuan yang keras akan menimbulkan perlawanan yang keras pula. Sikapnya yang lunak ini menyebabkan Tuanku Kota Tua tidak jadi terpilih sebagai pimpinan gerakan. Yang kemudian terpilih menjadi pimpinan gerakan akhirnya Tuanku Mensiangan, juga seorang ulama terkenal dan disegani di daerah VI Kota.

Tuanku nan Renceh bertekad melakukan kekerasan. Setiap orang diharuskan melakukan Syara' setepatnya. Adat lama harus dirombak sehingga menimbulkan kecemasan para penghulu.

Pada pihak lain, kaum Adat tidak tinggal diam. Suatu pesta menyabung ayam diadakan dengan segera di kampung Batapuh, dekat sungai Puar dengan maksud untuk menghina kaum Padri. Keadaan menjadi tegang, sehingga pertempuran di Batipuh meletus. Kaum Padri terus menyebarkan pahamnya. Luhak Lima Puluh Kota menerima paham Padri, tetapi Tilatang, Matur dan Candung menentangnya ketika Tuanku nan Renceh meluaskan pengaruh, maka pertempuran demi pertempuran terjadi. Tuanku Kota Tua yang menghendaki pembaharuan dengan cara lunak berusaha mencegah meluasnya pertempuran, tetapi gagal.

Selanjutnya, berkat kegiatan kaum Padri, Luhak Agama dan IV Kota menerima pembaharuan. Demikian pula di Lembah Alahan Panjang yang luas, terdiri dari kampung Padang Lawas, Jambak, Kota, Lubuk Ambacang, Alai, Bonjol, Pasir, Mandari, Padang Sikakusuk, Marapak, Caniago, Tanjung Bungo dan Padang Bulus. Di antara kampung-kampung ini, Bonjol kelak memegang peranan penting.

Sementara itu pimpinan adat tertinggi di lembah Alahan Panjang adalah Datuk Bando yang setelah mempelajari paham pembaharuan bersama para penghulu lainnya menjadi tertarik dan menerimanya. Dengan demikian ajaran Padri meluas di daerah Lembah Alahan Panjang. Walaupun demikian ada juga kelompok penghulu yang tidak menyetujuinya, mereka dipimpin oleh Datuk Sati.

Diantara kedudukan kaum Padri yang kuat adalah Bonjol. Di sini didirikan benteng yang cukup besar, dimana di dalamnya terdapat sebuah mesjid, 40 rumah dan 3 gubuk kecil.⁴¹⁾

Ketika Datuk Bando meninggal karena terkena racun ia digantikan oleh Muhammad Syahab atau Pelo (Pendito) Syarif yang kemudian dikenal dengan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol yang lahir pada tahun 1774, adalah anak dari Tuanku Rajanuddin dari kampung Padang Bubus, Tanjung Bungo, daerah Lembah Alahan Panjang.

41) Muhammad Radjab, *Op. Cit.* hal. 36 - 37.

Di daerah lain seperti di Tanah Datar, kaum Padri dipimpin oleh Tuan-ku Pasaman, bergelar Tuanku Lintau. Di sini pengaruh adat sangat kuat. Di sini pula Raja Minangkabau, Tuanku Raja Muning di Pagaruyung berkedudukan. Pertempuran antara kaum Padri dan kaum adat segera meletus di Tanah Datar. Dalam pertempuran ini kaum adat terdesak, sehingga pengaruh kaum Padri makin meluas di daerah ini.⁴²

Perang saudara ini meluas terus dan kemudian mengalami perkembangan baru setelah kekuasaan asing mulai campur tangan. Pada waktu itu di pantai Sumatra Barat yang berkuasa adalah Inggris. Inggris membuka kantor di Air Bangis, Padang dan pulau Cinkuk.⁴³ Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles mengunjungi Padang pada tahun 1818. Kaum Adat mengharapkan bantuan dari Inggris. Dua orang Tuanku dari Saruaso yang mewakili Raja Minangkabau menghadap Raffles. Mereka adalah Tuanku Tangsir Alam dan Sultan Kerajaan Alam. Raffles melihat berbagai kemungkinan, menimbang untuk rugi. Pada pihak lain, Raffles juga menghubungi kaum Padri, untuk menawarkan jasa-jasa baik, tetapi ternyata tidak ada persesuaian pendapat. Tujuan Raffles sebenarnya untuk memperoleh daerah pedalaman yang subur. Oleh karena itu hanya dengan negara Minangkabau, Raffles dapat mengadakan perjanjian setia-kawan.

Namun Inggris harus segera menyerahkan daerahnya kepada Belanda sebagai pelaksanaan Perjanjian London (1824). Kekuasaan Inggris di Sumatra Barat di serahkan kepada Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengangkat James Dupuy sebagai Residen. Kemudian kaum adat kini beralih minta bantuan kepada Belanda.

Pada tanggal 10 Februari 1821, Residen Du Puy beserta Tuanku Saruaso dan 14 Penghulu yang mewakili negara Minangkabau mengadakan perjanjian.⁴⁴ Dengan dasar perjanjian ini maka beberapa daerah di Minangkabau di duduki Belanda. Langkah Belanda tidak semata-mata ditujukan untuk melawan kaum Padri, akan tetapi lebih banyak ditujukan untuk menanamkan kekuasaannya. Pada 18 Februari 1821 Belanda menduduki Simawang dengan membawa dua meriam, dan seratus orang tentara. Sejak itu dimulailah perang Padri melawan Belanda. Peranan kaum Adat sebagai musuh utama kaum Padri digantikan oleh Belanda. Kaum Padri menghadapi Belanda yang mempunyai sistem persenjataan modern, serta personel yang terlatih.

42. Periksa E.B. Kielstra, "Sumatra's westkust van 1819 - 1825", *BKI*, 26, 1887 hal. 11.

43. Sartono Kartodirdjo, *Op Cit.* hal 93.

44. Laporan Politik Tahun 1837, hal. 75.

2. Jalannya Perang

Peperangan ini dapat dibagi dalam tiga masa. Masa pertama berlangsung antara 1821 — 1825, ditandai dengan meluasnya perlawanan rakyat ke seluruh daerah Minangkabau. Masa kedua adalah antara tahun 1825 — 1830, ditandai dengan meredanya pertempuran karena Belanda berhasil mengadakan perjanjian dengan gerakan kaum Padri yang mulai melemah, Selain itu pihak Belanda sedang memusatkan perhatiannya pada perang Diponegoro di Jawa. Masa ketiga antara tahun 1830-1838, ditandai dengan perlawanan Padri yang meningkat dan penyerbuan Belanda secara besar-besaran kemudian diakhiri dengan tertangkapnya pemimpin-pemimpin Padri.

Kaum Padri mulai bergerak menyerang pos-pos Belanda dan melakukan pencegahan terhadap pasukan patroli mereka. Pos Belanda di Semarang telah menjadi sasaran penyerangan Kaum Padri dalam bulan September 1821. Sulit Air Sipinang berkali-kali mendapat gangguan dari kaum Padri. Tuanku Pasaman dengan pasukannya melakukan operasi di sekitar hutan. Usaha pimpinan pasukan Belanda untuk berdamai dengan Tuanku Pasaman dengan perantaraan seorang pendeta Kristen tidak berhasil. Bahkan Tuanku Pasaman pada waktu itu telah mengerahkan sebanyak 20 @ 25.000 orang pasukan Padri di sebelah Timur Gurun . Pasukan ini dilengkapi dengan senjata-senjata tradisional, bendera-bendera pasukan dan payung-payung besar sebagai tanda pengenalan pasukan.

Dalam pertempuran yang terjadi antara pasukan Tuanku Pasaman dan pasukan Belanda yang terdiri dari 200 orang serdadu Eropa yang diperlengkapi dengan meriam 6 pon dan meriam kodok (*howitser*), ditambah dengan 8 @ 10.000 orang pasukan bantuan terdiri dari orang bumiputra, telah meminta banyak korban di kedua belah pihak. Tuanku Pasaman menderita kerugian kurang lebih 350 orang gugur, di antaranya anak Tuanku Pasaman sendiri. Demikian pula pihak Belanda tidak sedikit kehilangan serdadunya yang tewas dan mendapat luka-luka. Dengan sisa pasukannya Tuanku Pasaman kemudian mengundurkan diri ke Lintau, setelah berhasil menerobos rintangan-rintangan dari pasukan musuh yang mencoba memutuskan jalan yang menuju ke Lintau. Setelah berhasil menguasai seluruh lembah Tanah Datar, Belanda mendirikan benteng di Batusangkar (kelak diberi nama Fort Van Der Capellen)

Markas Tuanku Pasaman di Lintau dijaga kuat oleh pasukan Padri. Pasukan Belanda sebanyak 120 orang serdadu dibawah pimpinan Raaff dan beberapa Kapten berusaha menyerang markas Tuanku Pasaman, tetapi maksud tersebut ditunda setelah mengetahui bahwa pasukan Tuanku Pasaman di

Markas tersebut cukup kuat. Setelah mendapat bantuan dari daerah lain sebanyak 150 orang serdadu, Raaff melanjutkan usahanya. Penunjuk jalan yang mengantarkan Raaff menuju ke markas Tuanku Pasaman ternyata orang yang pro Padri dan berhasil memasukkan pasukan Raaff ke dalam jebakan di daerah pertahanan kaum Padri yang kuat. Karena kekalahan yang di derita, Raaff mengundurkan diri ke Pagaruyung.

Karena Tuanku Pasaman cukup berat untuk ditundukkan, maka Belanda mencoba lagi untuk mendekatinya. Surat ajakan untuk berdamai yang dikirimkan oleh Raaff kepada Tuanku Pasaman tidak mendapat jawaban dari Tuanku tersebut. Pasukan Raaff yang bergerak di sekitar Tanjong Alam pada tanggal 10 Juni 1822 telah diserang oleh pasukan Padri. Di daerah lain pasukan Padri juga aktif mengadakan penyerangan-penyerangan. Di sekitar Baso pasukan Tuanku nan Renceh tanggal 14 Agustus 1822 telah menyerang pasukan Belanda. Pasukan Belanda terdesak bahkan Kapten Goffinet yang memimpin menderita luka berat. Pasukan kaum Padri yang lain dalam bulan September 1822 telah pula mengadakan operasi di daerah Guguk Sigandang dan Tajong Alam dan membakar kampung-kampung penduduk yang memihak kaum Adat. Pasukan kaum Padri ini berjumlah sekitar 20.000 orang.

Dari beberapa pertempuran yang terjadi terlihat bahwa pasukan kaum Padri cukup kuat dan terpencah di daerah-daerah. Dalam pada itu hubungan kaum adat dengan Belanda dalam melawan kaum Padri juga makin erat. Raja Muning yang telah lanjut usianya bersekutu dengan Belanda, meskipun ia sudah tidak mampu tampil sebagai pemimpin dalam pasukan. Dalam hubungan pertentangan kaum Padri dan kaum adat kedudukan Tuanku Kota Tua sebenarnya berada di tengah-tengah kedua pihak tersebut. Ia menginginkan jalan damai dalam menyebarkan paham kaum Padri dan tidak menyetujui tindakan-tindakan kaum Padri dengan kekerasan. Justru karena sikapnya yang demikian ini maka Belanda tidak memusuhinya. Bahkan pernah dengan menggunakan pengaruh Tuanku Kota Tua, Belanda dapat melunakkan pendirian pengikut Padri di Kapau. Demikian pula dengan perantaraan Tuanku Kota Tua, kaum Padri bersedia meninggalkan daerah Alahan Panjang dan Rau, sehingga di daerah itu Belanda kemudian dapat memperkuat diri.

Di Bonio pertahanan kaum Padri juga cukup kuat. Untuk menghadapi kaum Padri ini, pimpinan pasukan Belanda Letnan P.H. Marinus memindahkan meriam-meriam dari pertahanannya di Baruh Bukit ke pertahanan di dekat Bonio. Demikian pula pasukan Belanda yang lain di bawah Kapten Brusse dengan bantuan 1000 orang penduduk setempat telah dipergunakan untuk menghadapi kaum Padri di Bonio. Waktu pasukan Van Geen bergerak sampai

di dekat bukit di muka Bonio, pasukan musuh. Dalam pertempuran ini Letnan Marinus meninggal. Setelah bertempur pasukan Padri segera mengundurkan diri ke dalam hutan-hutan di sekitarnya.

Usaha selanjutnya dari pasukan Belanda untuk menaiki bukit dengan maksud untuk mendekati pertahanan kaum Padri di Bonio tersebut telah disambut oleh kaum Padri dengan lemparan tombak, batu maupun batang-batang pohon dari atas. Dalam medan pertempuran yang lain di Kapau pasukan Padri membentuk garis pertahanan yang cukup panjang. Pasukan ini pada tanggal 18 September 1833 telah mencoba mengepung pasukan Belanda yang berkekuatan 100 orang sehingga pasukan musuh tersebut harus menyingkir ke Kota Tua. Sebagian pasukan Padri mengejanya, tetapi dalam pertempuran yang terjadi ternyata pasukan Padri kalah kuat sehingga mengundurkan diri. Usaha kaum Padri untuk melemahkan kedudukan musuh diteruskan dengan menutup jalan yang menghubungkan pos Belanda di Kota Tua dengan Tanjong Alam.

Di daerah Agam pada tanggal 24 September 1823 pasukan Padri telah menyerang pasukan Laemlin yang berkekuatan 170 orang. Dalam pertempuran ini pihak Belanda menderita kerugian 19 orang serdadu luka-luka. Namun persenjataan pasukan Belanda yang cukup kuat telah berhasil mendesak pasukan Padri, bahkan akhirnya dapat merebut pertahanan Padri di daerah itu yang dijaga oleh 360 orang.

Dengan kepergian Letnan Kolonel Raaff ke Padang pada tanggal 16 Desember 1823 untuk menggantikan kedudukan Du Puy sebagai Residen dan Komandan Militer Belanda di Padang, terjadilah perkembangan baru. Raaff merencanakan untuk mengadakan perundingan dengan kaum Padri. Usahnya untuk mendekati kaum Padri di Bonjol berhasil dan pada tanggal 22 Januari 1824 dapat diadakan perundingan perdamaian dengan mereka. Setelah itu kaum Padri di Daerah VI Kota juga mengadakan perdamaian dengan Belanda. Adanya perundingan ini sebenarnya hanya menguntungkan pihak Belanda untuk menunda waktu guna memperkuat diri.

Pengiriman pasukan-pasukan oleh Raaff pada tanggal 29 Februari 1824, terdiri dari 150 orang serdadu Eropa, 150 orang Madura dan 1000 orang bumiputra, setempat dengan perlengkapan meriam 3 pon dan *howitser*, ke daerah Pandai Sikat dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan apabila usahanya untuk mengajak berdamai tidak mendapat sambutan dari kaum Padri. Tuanku Damasiang, seorang pemimpin Padri di Kota Lawas, menolak untuk berdamai dengan Belanda, sehingga kemudian mendapat serangan dari pasukan lawan Kota Lawas di bakar dan Tuanku Damasiang terpaksa menyerah karena kepungan pasukan Belanda tersebut.

Pendudukan daerah VI Kota oleh pasukan Belanda menimbulkan kemarahan kaum Padri di Bonjol. Meninggalnya Letnan Kolonel Raaff karena sakit pada tanggal 19 April 1824 merupakan kesempatan baik bagi mereka untuk mengobarkan perang lagi. Naskah perjanjian perdamaian dikirimkan kembali kepada pihak Belanda dan mereka mulai mengadakan gerakan pasukan ke sebelah tenggara Tanah Datar. Mereka kemudian melakukan penyerangan terhadap pos Belanda di Suroaso. Pasukan Hindia Belanda dengan kekuatan 120 orang serdadu pada tanggal 17 Juli 1824 dikirimkan ke daerah tersebut dan berhasil membakar kampung tempat markas pasukan Padri, tetapi ketika pasukan Belanda tersebut akan kembali ke Suroaso di suatu lembah yang sempit telah diserang dengan tiba-tiba oleh pasukan kaum Padri yang cukup kuat. Dengan susah payah dan dengan kerugian 30 orang serdadu tewas pasukan Belanda berhasil kembali ke Suroaso.

Dalam tahun 1825 berhubung dengan adanya perlawanan Diponegoro di Jawa, Pemerintah Hindia Belanda dihadapkan pada kesulitan baru. Sementara perlawanan kaum Padri belum dapat dikalahkan, kekuatan militernya sebagian harus dikerahkan untuk menghadapi perang baru itu. Di Tanjong Alam pasukan Padri aktif mengadakan operasi dan mengadakan gangguan terhadap pengikut-pengikut kaum adat yang memihak Belanda. Dalam bulan April 1825 mereka telah melakukan perlawanan terhadap pasukan Kapten Bauer yang mencoba mengusir mereka dari Tanjong Alam. Demikian pula sejumlah 7000 kaum Padri telah terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Belanda di Agam, dekat Bukittinggi.

Kolonel Stuers, yang diangkat menjadi penguasa sipil dan militer di Sumatra Barat sejak tanggal 2 Nopember 1824, pada tanggal 29 Oktober 1825 telah berhasil mengadakan kontrak perdamaian baru dengan kaum Padri yang diwakili oleh Tuanku Keramat, yang isinya antara lain menyebutkan: Belanda akan mengakui kekuasaan Tuanku-Tuanku di Lintau, Kota, Telawas dan Agam; kedua belah pihak akan melindungi orang-orang yang kembali dari Pengungsian. Perjanjian yang diadakan di Ujung Karang itu baru ditandatangani di Padang pada tanggal 15 Nopember 1825.

Sudah tentu bahwa perdamaian antara Belanda dengan kaum Padri ini mengecewakan para pengikut kaum Adat, yang sebelumnya telah mendapat kesanggupan dari Belanda untuk mendapat bantuan dalam melawan kaum Padri. Dalam hubungan ini Belanda mempunyai perhitungan lain. Gencatan senjata dengan kaum Padri baginya sangat menguntungkan, karena dengan demikian sebagian dari pasukannya di daerah ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pasukannya di Jawa dalam usahanya menindas perlawanan Diponegoro.

Waktu dalam bulan September 1826 serdadu-serdadu Belanda di Minangkabau sebanyak 5000 orang beserta 17 opsir berangkat ke Jawa, kekuatan militer Belanda di Minangkabau tinggal 677 orang. Dengan kekuatan ini Belanda harus menjaga 17 pos yang letaknya tersebar di daerah-daerah. Dengan demikian terlihat bahwa kekuatan Belanda tidak mencukupi. Kelemahan ini telah digunakan oleh sementara rakyat yang memihak kaum Padri untuk menentangnya. Penduduk kampung Mulik Padang menentang waktu komandan Belanda di daerah itu memaksa mereka untuk membuat jalan. Dua detasemen pasukan Belanda yang oleh De Stuers dikirim ke kampung Mulik Padang untuk memaksa rakyat lagi, ternyata mendapat perlawanan bersenjata dari mereka, sehingga bercerai-berai.

Kaum Padri mengambil kesempatan yang baik itu untuk memulai perlawanan lagi. Mereka mengadakan serangan terhadap daerah-daerah pengikut kaum adat seperti Suroaso dan Tanah Datar, sehingga dengan kekuatan yang ada Belanda harus menghadapinya. Sementara itu kepala-kepala adat dari daerah XIII Kota dapat mempengaruhi penduduk XX Kota untuk menentang Belanda dan tidak mau membayar cukai dan pajak pasar yang dibebankan atas mereka. Ternyata bahwa perjanjian perdamaian tertanggal 15 Nopember 1825 tidak ada artinya lagi.

Kecurigaan terhadap Belanda terutama terdapat pada kaum Padri di Bonjol yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dan kawan-kawan seperjuangannya Tuanku nan Gapuk dan Tuanku Hitam. Pengalamannya dalam perjanjian dengan Belanda di Masang yang ditanda tangani di Padang pada tanggal 26 Januari 1825 yang akhirnya tidak ditepati sendiri oleh Belanda, adalah merupakan sebab tidak adanya kepercayaan lagi pada Belanda.

Dalam hubungan dengan perlawanan kaum Padri perlu diketahui bahwa di antara pemimpin-pemimpin mereka tidak selalu terdapat kesamaan pendapat. Sikap golongan Padri yang tidak menginginkan jalan kekerasan dalam menghadapi kaum adat ditentang oleh golongan Padri yang keras pendiriannya. Sudah pasti bahwa perbedaan pendirian ini menyebabkan pecahnya kekuatan kaum Padri sendiri. Meskipun demikian dalam menghadapi kekuasaan kolonial Belanda, nampak bahwa mereka sama-sama menunjukkan sikap penentangan. Hal ini terlihat pada sikap Tuanku nan Gerang dan Tuanku Ibrahim yang meskipun lunak terhadap kaum Adat, tetapi tidak mudah pula diajak kerja sama dengan pimpinan militer Belanda di Padang, D.L. Richemont.

Di daerah VII Kota di Pariaman pengikut Padri aktif mengadakan operasi. Dalam pada itu di Naras pengaruh pimpinan Padri Tuanku nan Cerdik besar. Dalam pertempuran yang terjadi pada tanggal 12 Desember 1829 menghadapi pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten De Richemont yang ber-

kekuatan 130 orang serdadu dan 50 orang marine. Tuanku nan Cerdik berhasil mengalahkannya sehingga menyebabkan kerugian musuh 5 serdadu tewas, di antaranya seorang Letnan Laut, dan 30 orang lainnya luka-luka. Pimpinan pasukan lawan terpaksa menunggu lagi pasukan bantuan.

Kelemahan pasukan Belanda di pelbagai daerah pertempuran membawa akibat makin meluasnya perlawanan kaum Padri. Di samping itu terlihat bahwa sementara kaum Adat yang kecewa mulai melakukan perlawanan juga terhadap Belanda. Sebanyak kira-kira 70 orang penghulu adat dengan bantuan penduduk XIII Kota yang bersikap anti Belanda telah menyerbu Padang, tetapi kemudian mengundurkan diri setelah kurang lebih 100 orang serdadu Belanda melawannya. Sementara itu kaum Padri yang bergerak di sebelah utara Pasaman telah berhasil menduduki Air Bangis. Air Bangis dijaga oleh pasukan Padri berkekuatan sebanyak 300 orang, sedangkan dari arah laut penjagaan dibantu oleh perahu-perahu Aceh di bawah Sidi Mara.

Melihat situasi perang tersebut, nampak jelas bahwa kedudukan Belanda di Sumatra Barat cukup sulit. Residen Mac Gillavry demikian pula pemimpin militer De Richemont tidak berhasil mengalahkan sama sekali perlawanan kaum Padri. Kaum Adat tidak seluruhnya memihak padanya, sedang kaum Padri makin berani mengganggu daerah-daerah yang telah dikuasai Belanda. Gubernur Jenderal Van Den Bosch karenanya memandang perlu untuk mengadakan mutasi pimpinan pemerintah Belanda di Sumatra Barat. Pada tanggal 4 Maret 1831 Kolonel G.P.J. Elout diangkat menjadi Residen merangkap pimpinan tertinggi militer di Sumatra Barat. Tugas pertama dari Elout ialah untuk mematahkan perlawanan kaum Padri atau setidaknya menghalang-halangi meluasnya kekuasaan kaum Padri.

Kekuatan militer yang terbatas dari Elout sebenarnya tidak memungkinkan untuk mematahkan perlawanan kaum Padri. Waktu itu Elout hanya mempunyai serdadu sebanyak 707 orang dan 26 opsir. Separoh dari 707 orang serdadu tersebut adalah orang bumiputra. Kekuatan militer ini harus dibagi untuk menjaga sebanyak 18 pos militer. Dengan kekuatan yang ada ini Belanda ingin mematahkan kekuatan kaum Padri. Tuanku nan Cerdik yang waktu itu bermarkas di Naras menjadi sasaran pertama dari Elout. Telah disebutkan bahwa pengaruh pemimpin Padri ini di Naras sangat besar. Serangan Belanda terhadap kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku nan Cerdik dilakukan dengan tiba-tiba pada tanggal 6 Juni 1831, sehingga dalam pertempuran yang terjadi pasukan Tuanku nan Cerdik terpaksa menyingkir ke Bonjol.

Sementara itu pasukan Padri yang berada di sebelah utara Muarapalam pada tanggal 18 Agustus 1831 telah terlibat dalam pertempuran dengan pa-

sukan lawan. Di daerah lain, pertempuran masih terus berlangsung. Pertahanan kaum Padri di Sijantang pada tanggal 14 September 1831 mendapat serangan dari pihak Belanda dengan pasukan orang Bugis yang berjumlah 120 orang. Pertahanan Padri di sini cukup kuat, sehingga Belanda harus menanti-nantikan bantuan pasukan lain untuk menghadapinya lagi. Baru pada tanggal 22 September 1831 pertahanan Padri di Sijantang dapat dipatahkan oleh Belanda.

Tuanku nan Cerdik yang menyingkir setelah gagal dalam mempertahankan Naras, mulai banyak beroperasi di daerah XII Kota. Ia mengadakan kerja sama dengan Tuanku Imam Bonjol dalam penyerangan-penyerangan terhadap pos-pos Belanda. Dalam bulan Maret 1832 Tuanku nan Cerdik berhasil menghimpun kekuatan di XII Kota untuk mempersiapkan penyerangan terhadap pasukan musuh yang berada di V Kota dan VII Kota. Bersama-sama dengan pasukan Tuanku Imam Bonjol yang terdiri dari 4000 orang, pasukan Tuanku nan Cerdik yang berkekuatan 3000 orang mengadakan gerakan ke arah Tiku. Gerakan ini telah menimbulkan kekhawatiran pimpinan militer Belanda. Pasukan gabungan dari Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku nan Cerdik ini berhasil menduduki Mengopo dan membuat markas di situ. Dalam hubungan ini Belanda memberangkatkan pasukannya yang berkedudukan di Pariaman menuju ke arah Tiku dan kemudian menyerang pasukan Padri di Mengopo. Pertempuran seru yang terjadi meminta banyak korban di kedua belah pihak.

Di daerah Agam Tuanku Damasiang yang bermarkas di sebelah selatan Kapau merupakan ancaman terhadap pertahanan Belanda di Fort De Kock. Dengan susah payah pasukan Belanda yang berkekuatan 250 serdadu dapat mematahkan perlawanan pasukan Tuanku Damasiang. Untuk menjaga perlawanan Padri selanjutnya Belanda mendirikan pos penjagaan di Bulit Koriri di Cilatang. Sementara Belanda berhasil menduduki beberapa tempat di daerah Agam, pasukan Padri telah berhasil memperluas daerah pengaruhnya ke daerah-daerah pantai sebelah utara Padang.

Dalam hubungan ini Gubernur Jenderal Van Den Bosch sebagai pemimpin tertinggi kekuasaan koloni Belanda di Indonesia menginginkan agar persoalan di Sumatra Barat secepat mungkin dapat diatasi, dalam arti bahwa perlawanan kaum Padri harus segera dikalahkan sama sekali, sehingga Belanda dapat berkuasa di seluruh Sumatra Barat. Bantuan militer yang dikirim dari Batavia telah tiba di Padang pada pertengahan tahun 1832, berkekuatan 3 kompi dengan perlengkapan beberapa meriam dan mortir. Di samping itu ikut pula legiun Ali Basyah Sentot Prawirodirdjo yang terdiri dari 300 orang bersenjata. Pasukan ini disebar di pelbagai pos dan benteng Belanda dan sebagian dipergunakan untuk mengadakan operasi di daerah pedalaman.

Pertahanan kaum Padri di sebelah utara Tanjong Alam pada tanggal 22 Juli 1833 mendapat serangan dari pasukan Belanda. Dalam pertempuran ini pihak Padri dapat menewaskan antara lain seorang Kapten. Dengan bantuan militer dari Jawa ini, pasukan Belanda bertambah kuat sehingga beberapa daerah yang dikuasai kaum Padri dapat didudukinya, seperti Tapi Selo bekas tempat kedudukan Tuanku Pasaman. Di Kebon Belongkat yang terletak di sebelah timur Muarapalam, demikian pula di Buu, Belanda mendirikan kubu untuk menjaga daerah yang telah dikuasainya. Perlu juga disebut pertempuran besar yang terjadi di Agam. Dalam pertempuran pada tanggal 29 Juli 1833 ini Pasukan Padri yang berjumlah 2000 orang berhadapan dengan pasukan musuh yang membawa kerugian di pihak Belanda 8 tewas dan 40 orang luka-luka, tetapi tidak sedikit pula korban di pihak kaum Padri. Belanda berhasil meminta keterangan dari Tuanku nan Cerdik, yang waktu itu oleh Belanda diangkat sebagai Raja Bicara, tentang kekuatan kaum Padri di Bonjol untuk mengadakan serangan lagi ke daerah pantai. Oleh karenanya Belanda segera mengirimkan pasukan untuk menghalang-halangi kemungkinan gerakan pasukan Padri Bonjol tersebut. Dengan mengambil jalan lewat Tiku, Mengopo, Bevervoorde sampai di Lubu Ampalu dan mendirikan kubu di situ.

Sementara itu pertempuran yang terjadi di sekitar jurang antara Mahtua dan Agam pada tanggal 10 September 1833 membawa kekalahan pada pihak kaum Padri, meskipun mereka dapat menewaskan beberapa serdadu Belanda, diantaranya seorang Letnan Kolonel. Beberapa distrik dan seluruh daerah VIII Kota telah jatuh ke tangan Belanda. Penyerangan pasukan Padri pada pos-pos maupun benteng-benteng Belanda masih terus dilakukan, seperti Penyerangan pada benteng Belanda di Amerongen oleh Tuanku Tambusi pada pertengahan Januari 1833, penyerangan pos Belanda di Gubuk Sigandang oleh Tuanku Demasiang pada akhir Mei 1833, penyerangan benteng Belanda di Pantar pada tanggal 22 November 1833 dan benteng Belanda di Amerongen lagi pada tanggal 21 Oktober 1833.

3. Akhir Perang.

Baru pada akhir tahun 1834 Belanda dapat memusatkan kekuatannya untuk menyerang Bonjol, setelah jalan-jalan yang menghubungkan Bonjol dengan daerah pantai dikuasai oleh Belanda. Pada akhir September 1834 pasukan Belanda telah menyiapkan pasukan besar untuk menyerang Bonjol. Dilihat dari gerakan-gerakan militer yang dilakukan Belanda mulai tahun 1835 nampak jelas, bahwa kekuatan militernya sebagian besar dikerahkan untuk meruntuhkan kekuatan kaum Padri di Bonjol. Untuk tujuan ini daerah-

daerah sekitar Bonjol dicoba untuk dikuasainya. Hal ini nampak misalnya dalam persiapan mereka untuk beroperasi ke daerah Alahan Panjang, dengan mengerahkan pasukan yang cukup besar. Bonjol di dekati dari beberapa jurusan. Pada tanggal 21 April 1835 dua kolonel pasukan Belanda telah menyerang pertahanan kaum Padri di sekitar Semawang Gedang. Pasukan Padri telah melakukan pertempuran ternyata tidak dapat mengatasi kekuatan musuh, sehingga terpaksa menyingkir. Pasukan tersebut yang kemudian bergerak maju sampai di dekat Kumpolan (jarak kurang lebih 1½ jam perjalanan dari Bonjol) telah disambut oleh pasukan kaum Padri yang berada di daerah tersebut. Kekuatan kaum Padri sebesar 12.000 orang di daerah itu akhirnya dapat memukul mundur pasukan musuh, sehingga pemimpin pasukan Belanda merasa perlu mendatangkan bantuan pasukan yang sedang berada di Batipo. Dalam menghadapi pasukan Belanda setelah mendapat bantuan itu pasukan Padri ternyata kalah kuat sehingga terpaksa mundur. Pertahanan Belanda yang berada di Batu Bendit kemudian dikepung oleh pasukan Padri tersebut, tetapi usaha kaum Padri untuk menduduki daerah itu tidak berhasil. Pada tanggal 11 Mei 1835 benteng Padri di sebuah bukit dekat Bonjol juga telah diduduki pasukan Belanda.

Kesulitan yang diderita oleh kaum Padri di Bonjol ialah mulai ditutupnya jalan-jalan penghubung dengan daerah lain oleh pasukan Belanda. Pada tanggal 11 sampai 16 Juni 1835 sayap kanan pasukan Belanda telah berhasil menutup jalan yang menghubungkan benteng Bonjol dengan daerah sebelah barat. Gangguan-gangguan dari pasukan Belanda dilakukan untuk mengacaukan penghuni benteng Bonjol. Pada tanggal 16 Juni 1835 benteng Bonjol telah ditembak meriam Belanda dan seterusnya pada tanggal 21 Juni kubu Belanda maju lagi sehingga lebih mendekati benteng Bonjol. Dalam pertempuran yang terjadi sejak tanggal 11 Juni 1835 Belanda telah kehilangan 23 serdadu tewas dan 139 luka-luka, sedang di antara pasukan bantuan yang diperoleh telah terdapat korban 7 orang tewas dan 85 orang luka-luka menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Pada tanggal 16 Agustus 1835 bukit yang terletak di dekat bukit Terjadi telah jatuh ke tangan Belanda.

Pada tanggal 8 Pebruari 1835 Tuanku Imam Bonjol menyatakan kepada Residen Belanda di Padang kesediaannya untuk mengadakan gencatan senjata. Untuk sementara waktu aktivitas gerakan pasukan Belanda dihentikan setelah adanya perjanjian gencatan senjata itu. Waktu Belanda mendesak Tuanku Imam Bonjol agar menyerah bersama pengikutnya, mendapat jawaban bahwa kaum Padri Bonjol mau menyerah apabila pasukan Belanda ditarik dari daerah Alahan Panjang. Karena Belanda tidak dapat menerima usul itu maka

keadaan menjadi tegang kembali. Pasukan-pasukan pengikut Tuanku Imam Bonjol yang beroperasi di luar benteng pada tanggal 2 Juni 1835 mulai mengadakan perlawanan lagi terhadap pasukan musuh. Serdadu Belanda pada tanggal 25 Nopember 1835 telah berkumpul didepan benteng Bonjol bersama-sama dengan sejumlah 13.000 pasukan bantuan, baik terdiri dari pasukan-pasukan bumiputra dari penduduk setempat maupun dari daerah lain. Dalam pertempuran yang terjadi, benteng Bonjol masih dapat dipertahankan oleh kaum Padri.

Selama tahun 1836 kekuatan kaum Padri masih belum dapat dikalahkan sama sekali oleh militer Belanda. Untuk mematahkan benteng Bonjol, Belanda telah mengerahkan lagi pasukan-pasukannya di sekitar Bonjol, antara lain pasukan orang Afrika. Pasukan ini digabungkan dengan pasukan-pasukan orang Bugis yang sengaja dikerahkan oleh Belanda untuk mematahkan perlawanan kaum Padri di Sumatra Barat.

Pada tanggal 10 Agustus 1837 Tuanku Imam Bonjol menyatakan bersedia lagi untuk mengadakan perundingan perdamaian. Belanda mengharap bahwa perundingan tersebut akan diikuti dengan kesediaan Tuanku Imam Bonjol untuk menyerah. Tetapi Belanda menganggap bahwa kesediaan Tuanku Imam Bonjol tersebut hanya merupakan siasat untuk memperoleh waktu guna menggali lubang yang menghubungkan dalam dan luar benteng; di samping itu juga untuk mengetahui musuh yang berada di sekitar benteng Bonjol. Kegagalan usaha perdamaian menyebabkan timbulnya lagi pertempuran pada tanggal 12 Agustus 1837.

Pasukan Belanda yang bergerak dari arah utara tanggal 1 Juli 1837 telah menduduki Durian Tinggi dan Talu, dan kampung-kampung di Lubuk Sikaping tanggal 3 Juli 1837. Dalam pertempuran bulan Oktober 1837 pengepungan dilakukan oleh pasukan-pasukan Belanda terhadap benteng Bonjol. Tembak-menembak terjadi antara pasukan Belanda di luar benteng dan pasukan Padri di dalam benteng. Meriam-meriam kaum Padri tidak banyak menolong, karena musuh berada dalam jarak dekat. Akhirnya benteng Bonjol yang dipertahankan oleh kaum Padri dengan sekuat tenaga dapat dimasuki oleh pasukan Belanda. Pasukan Padri Bonjol tidak berdaya lagi berhadapan dengan pasukan musuh yang lebih besar jumlahnya di samping senjata yang lebih lengkap, sehingga terpaksa menyerah. Penyerahan Tuanku Imam Bonjol beserta pasukannya terjadi pada tanggal 25 Oktober 1837 dan merupakan pukulan berat bagi perlawanan kaum Padri pada umumnya. Kaum Padri terpaksa meninggalkan Bonjol untuk meneruskan perang di hutan-hutan.

Tuanku Imam Bonjol kemudian dibuang ke Cianjur, Jawa Barat.

Pada tanggal 19 Januari 1839 dibuang ke Ambon, lalu pada tahun 1841 dipindahkan ke Menado, dan meninggal di sana pada tanggal 6 Nopember 1864.

Walaupun Tuanku Imam Bonjol telah menyerah pada Belanda, gerakan Padri tetap meneruskan perjuangan. Tuanku Tambusi mengadakan perlawanan terhadap Belanda di sekitar daerah Rao dan Mandailing. Yang ditugaskan menghadapi Tuanku Tambusi adalah Mayor van Bethoven. Belanda terus bergerak maju, pada bulan Nopember dan Desember 1837, Portibi Kota Pinang, Angkola, Sipirok dan Pedang Lawas diduduki Belanda.⁴⁵

Pada tanggal 18 Januari 1838, Kolonel Michiels menggantikan Francis sebagai kepala pemerintahan sipil di Sumatra Barat. Sementara itu usaha untuk menindas perlawanan Tuanku Tambusi dijalankan terus. Tuanku Tambusi menyingkir ke Dalu-Dalu, sebelah tenggara Portibi, Pada bulan April 1838, Lubuk Antai ditinggalkan kaum Padri dan Dalu-Dalu diserang. Akhirnya Tuanku Tambusi berhasil dikalahkan pada 28 Desember 1838. Di Batipo masih timbul lagi perlawanan Padri terhadap Belanda terjadi pada tahun 1841.

Dengan demikian, secara umum perlawanan kaum Padri dapat dipatahkan pada akhir tahun 1838. Maka seluruh kekuasaan Belanda telah tertanam di Sumatra Barat.

C. JAWA TENGAH DAN TIMUR

1. *Pendahuluan.*

Perang di Jawa Tengah dan Timur berlangsung antara tahun 1825 sampai dengan 1830, disebut juga Perang Diponegoro atau Perang Jawa karena meletus di hampir seluruh daerah Jawa. Perjuangan ini ditujukan pada kekuasaan asing, yaitu penguasa Hindia Belanda yang selalu ikut campur dalam urusan pemerintahan Yogyakarta. Yang menjadi pemimpin peperangan adalah putra Sultan Hamengkubuwono III, dari selir raja Yogyakarta, bernama Pangeran Diponegoro.

Pembahasan tentang jalannya pemerintahan di Yogyakarta sebelum perang Diponegoro meletus tentu akan melibatkan suasana pemerintahan negara Mataram di Jawa Tengah pada masa-masa sebelumnya. Hal ini disebabkan karena munculnya Yogyakarta sebagai suatu kekuasaan baru merupakan hasil perjanjian Ganti (1755) antara raja Mataram dengan pihak

45 Sartono Kartodirdjo, *Op.Cit.*, hal. 118 – 119.

VOC. Untuk itu perlu diketahui bagaimana hubungan negara Mataram dengan VOC, serta perkembangan yang terjadi sebagai akibat hubungan tersebut.

Hubungan yang berlangsung antara kekuasaan negara Mataram di Jawa Tengah dengan kekuasaan VOC sejak abad 17 sampai menjelang perang Diponegoro membawa akibat makin merosotnya kekuasaan bumiputra tersebut. Daerah-daerah pantai wilayah negara berangsur-angsur dianeksasi oleh Belanda, seperti : Krawang, Semarang (1677), Cirebon, Rembang, Jepara, Surabaya, Pasuruan, dan Madura (1743).

Oleh karenanya pusat negara makin dipisahkan dari pantai. Negara Mataram kembali ke dalam kegiatan agraris dan mulai melepaskan tradisi perdagangan-pelayaran. Kekuasaan raja yang kuat seperti pada masa Sultan Agung (1623–1645), sejak masa pemerintahan penggantinya (Amangkurat I, 1645–1677) terus menerus berkurang. Sebaliknya wilayah kekuasaan Kompeni Belanda semakin luas, sedang di bidang politik pengaruhnya pada Mataram juga semakin besar. Masalah-masalah penting dalam negara seperti penggantian takhta, pengangkatan pejabat-pejabat tinggi negara seperti patih dan bupati-bupati, tidak lepas dari pengawasan Belanda. Kegiatan raja dalam istana maupun pejabat-pejabat tinggi dalam birokrasi kerajaan makin mudah dapat diawasi, oleh Belanda, terutama setelah Belanda diizinkan mendirikan benteng di dekat istana. Pada masa pemerintahan Pakubowono II (1726–1749) di Kartasura, pengawasan Belanda atas istana tidak hanya dipermudah dengan adanya benteng tersebut, tetapi juga dengan ditempatkannya serdadu-serdadu Kompeni di dalam kompleks istana. Oleh raja serdadu-serdadu tersebut dipandang sebagai kekuatan yang dapat melindunginya terhadap setiap intrik dalam istana yang akan menentang raja, tetapi sebaliknya dari pihak Belanda penempatan kekuatan militer Kompeni dalam istana dapat digunakan untuk mengawasi kekuasaan raja dan golongan-golongan dalam istana yang bersikap kontra terhadap Belanda.

Makin sempitnya wilayah negara Mataram dan berkurangnya kekuasaan raja membawa akibat makin sempitnya orientasi politik penguasa kerajaan. Orientasi makin diarahkan ke dalam. Kelemahan di bidang politik kemudian diimbangi dengan kegiatan di bidang budaya, terutama dalam sastra. Demikian pula pemakaian lambang-lambang status seperti bahasa, pakaian, gelar, tatacara penghormatan, dilakukan dengan tujuan untuk mempertegas jarak antara yang berkuasa dan rakyat umum.

Jarak ini dipertahankan agar kekuasaan atasan tetap terpelihara. Sistem birokrasi kerajaan dengan klasifikasi fungsi dan status yang terperinci tetap dipertahankan. Terdapatlah karenanya ketidakseimbangan antara jumlah pejabat dengan wilayah yang diurusnya. Makin luasnya ekspansi Belanda ke

daerah pedalaman berakibat mundurnya kekuasaan para bangsawan. Tanah-tanah jabatan yang terlepas karena aneksasi Belanda menyebabkan merosotnya penghasilan para bangsawan pemegang tanah jabatan tersebut. Makin sempitnya wilayah negara mengakibatkan pula berkurangnya penghasilan negara. Raja makin tergantung pada uang pengganti dari pihak Belanda untuk membiayai aparatur pemerintahan negara, di samping penghasilan dari daerah yang masih dikuasainya.

Sumber penghasilan yang diharapkan dapat menambah kas negara antara lain adalah pajak. Pelbagai macam pajak dibebankan pada rakyat seperti : pajak pasar, pajak barang dagangan, pajak kepala, dan lainnya. Penambahan penghasilan negara juga didapat dari pemborongan cukai-cukai pada pemborong-pemborong, terutama orang-orang Cina, seperti cukai-cukai jalan, jembatan dan juga pemborongan sarang burung. Gejala yang timbul dari penarikan cukai akibat pemborongan tersebut adalah penyalahgunaan wewenang. Pemborong-pemborong mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Penuntutan cukai yang tinggi oleh pemborong-pemborong memberi beban yang berat pada rakyat.

Di samping itu kerja wajib untuk raja, **kerigaji**, dan untuk kepala-kepala bumiputra tetap berlangsung. Di daerah yang telah dikuasai Belanda, diadakan pula kerja wajib untuk pembesar-pembesar Belanda seperti membangun gudang, membuat pagar halaman, membersihkan kebun, demikian pula **kerja pancen**, merupakan beban yang tak dapat dielakkan oleh rakyat. Beban tersebut masih ditambah lagi dengan kerja wajib untuk bangunan-bangunan umum seperti memperbaiki jalan, membuat jembatan, memelihara pesangrahan dan sebagainya.

Selain di bidang politik, di bidang ekonomipun pengaruh Belanda cukup besar. Dua aspek tersebut bergandengan erat dalam sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia. Khususnya di Jawa Tengah usaha ekspansi wilayah dari Belanda tidak lepas dari kepentingan ekonomis. Apabila dalam abad 17 perhatian Kompeni Belanda sebagai badan perdagangan lebih dipusatkan pada perdagangan laut disertai usaha untuk mendapatkan monopoli, maka dalam abad 18 dengan berhasilnya secara berangsur-angsur menguasai daerah-daerah sepanjang pantai dan beberapa daerah pedalaman, Belanda mulai menaruh perhatian pada penguasaan sumber-sumber produksi agraris. Di daerah-daerah yang telah dilepaskan dari ikatan kekuasaan Mataram tersebut, Belanda menggantikan kedudukan sebagai penguasa tertinggi.

Karena masih kuatnya struktur politik secara tradisional dan kurangnya personalia dalam aparatur pemerintahan Belanda, maka struktur yang ada dibiarkan tetap berlangsung. Jabatan-jabatan tradisional secara hierarkis pada

pemerintah di daerah-daerah tidak mengalami perubahan. Untuk menjamin agar tindakan penguasa-penguasa daerah, bupati-bupati, tidak bertentangan dengan kepentingan Belanda, maka diangkatlah kontrolir-kontrolir untuk mendampingi kepala-kepala tersebut. Tugas yang penting dari kepala-kepala daerah memperlancar pengaliran produksi agraris ke gudang-gudang Kompeni.

Dalam abad 19 sejak pemerintahan Daendels, Raffles dan selanjutnya, nampak adanya kecenderungan makin merosotnya bupati-bupati daerah. Loyalitas kepala-kepala desa atasnya dimasukkan dalam rangka memperlancar penyerahan hasil bumi dan pajak. Apabila di daerah-daerah yang telah dikuasainya Belanda lebih leluasa bertindak maka tidak demikian halnya di daerah kekuasaan Mataram. Dalam beberapa hal raja masih diakui kekuasaannya. Perlengkapan pemerintahan kerajaan masih tetap bekerja. Raja tetap berfungsi sebagai penguasa tertinggi, meskipun dalam hal-hal tertentu, seperti dalam masalah penggantian tahta, pengangkatan pejabat-pejabat tinggi kerajaan, pengaruh Belanda tidak dapat dihindarkan.

Makin meluasnya pengaruh Belanda dalam urusan tata pemerintahan Mataram, sebenarnya tidak terlepas dari faktor intern dalam negara Mataram sendiri, yaitu adanya gejala pertentangan antar-bangsawan. Kericuhan istana, perebutan tahta, perang antara bangsawan merupakan gejala kronis dalam sejarah negara Mataram sampai abad 18. Nampak sekali bahwa gejala tersebut membawa akibat makin lemahnya kekuasaan Mataram, sebaliknya memperkuat kedudukan Belanda. Terpecahnya wilayah negara setelah Perjanjian Gianti pada tahun 1755 menjadi Surakarta dan Yogyakarta, kemudian pada tahun 1757 dengan perjanjian Salatiga ditambah dengan munculnya kekuasaan Mangkunegara dan akhirnya pada tahun 1813 dengan munculnya kekuasaan Pakualam, lebih mempermudah pihak Belanda untuk mengawasi dan memperngaruhi negara-negara yang terpecah-pecah itu.⁴⁶ Dengan demikian sejak tahun 1755 nama negara Mataram sudah tidak ada lagi.

Pertentangan yang timbul di antara penguasa negara-negara tersebut, seperti pertentangan antara Surakarta dan Yogyakarta dalam peristiwa **Pekeping** pada akhir abad 18, makin memperbesar peranan kekuasaan Belanda dalam turut menyelesaikan persoalan-persoalan antar penguasa bumiputra. Pemihakan Belanda pada salah satu pihak yang sedang bertentangan didasarkan atas perhitungan untung-rugi. Penuntutan hak dan wilayah adalah konsekwensi dari pemihakan itu. Penentangan terhadap kekuasaan Belanda seperti yang dilakukan oleh Raden mas Said dan Pangeran Mangkubumi pada

46 Mengenai hal ini periksa Soekanto, *Sekitar Jogjakarta 1755 – 1825 (Perdjandjian Gianti-Perang Diponegoro)*, Djakarta, 1952.

masa perang Ganti adalah tercampur dengan pertentangan intern golongan bangsawan.

Pada permulaan abad 19 pengaruh Belanda pada kerajaan-kerajaan Surakarta dan Yogyakarta bertambah kuat. Pada masa Daendels ada usaha untuk mencampuri sedemikian jauh tatacara di dalam istana. Khusus di Yogyakarta, Daendels menuntut persamaan derajat dengan Sultan dalam upacara kunjungan resmi, seperti penghapusan keharusan menyajikan sirih oleh Sultan bagi pembesar Belanda dan memperbolehkan pembesar Belanda duduk sejajar dengan raja. Tindakan Daendels ini menimbulkan kekhawatiran sementara golongan bangsawan dalam istana. Golongan ini memandang gejala tersebut sebagai tanda kemerosotan martabat kerajaan. Raffles meneruskan cara yang telah dilakukan oleh Daendels.

Sebelum perang Diponegoro pecah, terjadi kekalutan di istana Yogyakarta, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II atau Sultan Sepuh memerintah dari tahun 1792 sampai 1810. Sultan Sepuh adalah nenek Pangeran Diponegoro yang dinobatkan menjadi raja sebagai pengganti Sultan Hamengku Buwono, I. Pangeran Diponegoro lahir pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I, sehingga ia mengalami sendiri peristiwa yang terjadi di istana sejak pemerintahan Sultan Hamengku Buwono II. Ketika pada tahun 1792 Sultan Hamengku Buwono I wafat, maka permaisurinya Kanjeng Ratu Ageng tetap tinggal di istana sambil mengasuh cicitnya, Pangeran Diponegoro yang waktu itu berusia tiga tahun. Ketegangan mulai timbul ketika Sultan Hamengku Buwono II memecat dan menggeser pegawai istana dan bupati-bupati yang dahulu dipilih oleh Sultan Hamengku Buwono I.⁴⁷ Sultan Hamengku Buwono II menginginkan pemerintahan yang kuat dengan dibantu oleh orang-orang yang dekat dengannya. Maka diangkatlah para menantunya sebagai pembantu, misalnya Raden Adipati Danurejo II sebagai patih, Raden Tumenggung Sumodiningrat sebagai Wedana Lebet dan Raden Ronggo Prawirodirjo III sebagai bupati-wedana Mancanegara Timur. Tindakan Sultan ini mengakibatkan sebagian pegawai yang telah berpengalaman dalam hal pemerintahan mengundurkan diri Kanjeng Ratu Ageng telah memberi peringatan kepada Sultan atas tindakan tersebut, tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik. Golongan yang disisihkan kemudian minta perlindungan kepada putra mahkota yaitu ayah Pangeran Diponegoro. Keadaan istana menjadi tidak tenteram, sehingga Kanjeng Ratu Ageng meninggalkan istana dengan diikuti oleh Pangeran Diponegoro yang waktu itu berusia enam tahun. Ratu Ageng menuju ke arah barat Yogyakarta, yaitu

47 Sartono Kartodirdjo (Editor) *Op.Cit.* hal. 126.

Tegalrejo.

Desa Tegalrejo merupakan daerah persawahan yang sedikit penduduknya. Tetapi setelah Ratu Ageng menetap di situ, maka desa menjadi ramai sebab banyak rakyat dari daerah sekitarnya menetap di desa itu. Umumnya mereka terdiri dari para petani, ulama maupun santri. Kedatangan mereka ini sesuai dengan kepercayaan rakyat pada waktu itu yaitu ingin mendapatkan berkah dari Ratu Ageng.⁴⁸ Mereka percaya bahwa raja atau keluarganya mempunyai kekuatan gaib, sehingga kedatangan Ratu Ageng di desa itu memberi kesempatan pada rakyat untuk mencari berkah. Pengaruh Ratu Ageng ternyata sangat besar terutama dalam hal perkembangan agama Islam. Mesjid-mesjid dan surau-surau segera dibangun. Dengan demikian rakyat Tegalrejo di samping tekun mengerjakan sawahnya, mendapat pula kesempatan penuh untuk menjalankan ibadahnya. Keadaan yang tenteram ini mempengaruhi kejiwaan Pangeran Diponegoro yang sejak kecil sangat tekun mengikuti pendidikan agama dari para ulama dan pendidikan budi pekerti dari neneknya melalui kesusasteraan Jawa Kuno. Menjelang Pangeran Diponegoro dewasa, Ratu Ageng wafat. Padepokan Tegalrejo kemudian diserahkan kepada Pangeran Diponegoro. Walaupun Diponegoro tinggal di luar istana, kadangkala masih terikat oleh tugas-tugas pemerintahan, sebab ia putra dari putra mahkota, Pangeran Adipati Anom.

Sementara itu tersebar benih-benih permusuhan antara pengikut Sultan dan pengikut Adipati Anom. Keretakan ini diketahui penguasa Belanda di Yogyakarta berkat bantuan patih Sultan sendiri, Danurejo II, karena selalu mengadakan hubungan dengan Belanda, Danurejo II akhirnya dibunuh atas perintah Sultan. Pemerintahan tetap berlangsung atas bantuan kedua mantanunya yang lain, Raden Tumenggung Sumodiningrat dan Raden Ronggo Prawirodirjo III. Tetapi pada suatu pertempuran membela kepentingan rakyat melawan kekuasaan Daendels, Raden Ronggo gugur. Akibatnya pemerintah semakin lemah, sehingga Belanda segera menurunkan Sultan Hamengku Buwono II dari tahta dan mengangkat Pangeran Adipati Anom sebagai Sultan Hamengku Buwono III, memerintah dari tahun 1810 sampai 1811.

Dalam pemerintahan Sultan Hamengku Buwono III keadaan pemerintahan Yogyakarta semakin mundur. Beberapa daerah kesultanan diserahkan kepada Belanda dan pajak di daerah pantai yang semula harus dibayar Belanda kepada Sultan dihapus. Selain itu upacara penghormatan kepada Sultan yang dianggap terlampaui berlebihan dihapus.

Sultan Hamengkubuwono II yang diturunkan dari tahta tetap boleh

tinggal di istana. Berarti ada dua kekuatan yang bertentangan yaitu Sultan Hamengku Buwono III dan Sultan Sepuh beserta pengikutnya masing-masing.

Sultan Sepuh sangat merasakan akibat penyerahan tahta pada putranya ternyata sangat menguntungkan pihak Belanda. Hal ini mendorong niatnya untuk mengambil alih pemerintahan dengan maksud mencegah keruntuhan pemerintahan. Kesempatan ini akhirnya datang, yaitu ketika terjadi pergantian kekuasaan di negeri jajahan dari Belanda kepada Inggris pada tahun 1811 akibat kekalahan Perancis dalam perang melawan Inggris di Eropa. Negeri Belanda yang memihak Perancis segera harus menyerahkan Hindia-Belanda (Indonesia) kepada Inggris.

Pemerintahan yang kedua dari Sultan Sepuh hanya berlangsung satu tahun, sebab ia pun tidak luput dari bentrokan dengan Inggris, sehingga dibuang ke pulau Pinang pada tahun 1812. Sebagai penggantinya, diangkat Sultan Hamengku Buwono III untuk kedua kalinya tetapi baru dua tahun memerintah kemudian wafat. Atas usul Inggris, diangkat Pangeran Jarot, putra mahkota sebagai Sultan Hamengku Buwono IV, memerintah dari tahun 1814 sampai 1822. Pangeran Diponegoro sendiri tidak berhak atas tahta, sebab ia putra dari selir. Walaupun demikian ia tidak dapat melepaskan diri dari tugas pemerintahan sebab kedudukannya sebagai kakak tertua dari raja.

Pada tahun 1816 kekuasaan Inggris di Indonesia beralih lagi ke tangan Belanda. Peristiwa ini sesungguhnya tidak berpengaruh langsung pada Pangeran Diponegoro, tetapi pengaruh kekuasaan Belanda yang semakin besar dalam tata pemerintahan Yogyakarta membuatnya jadi sangat prihatin.

Sementara itu, gejala baru yang timbul sebagai akibat hubungan dengan kekuasaan asing timbul, ialah makin meluasnya peredaran minuman keras baik di kalangan bangsawan maupun rakyat umum.⁴⁹ Gejala ini oleh golongan agama dalam istana dianggap membahayakan kehidupan agama Islam. Golongan bangsawan yang taat menjalankan syariat agama, diantaranya termasuk Pangeran Diponegoro, menyaksikan gejala tersebut dengan kekawatiran. Gelar kekhalifahan Sultan menjadi merosot dalam pandangan agama. Diponegoro mengecam kehidupan istana waktu itu dengan mengatakan, bahwa para bangsawan telah mengabaikan ajaran agama dan tidak menghormati lagi para ulama. Raja Sultan Agung dibanggakannya sebagai raja yang baik, karena taat menjalankan agama dan gemar bertapa. Sultan Hamengku Buwono IV yang memerintah waktu itu di pandang tak mempunyai sifat-sifat

49 J.I. Van Sevenhoven, "De oorzaken van den oorlog op Java, van 1825 tot 1830," *TNI*, 2, 1838, hal. 108; periksa juga P.H. Van der Kemp, "Diponegoro, eene geschiedkundige Hamlettype", *BKI*, 46, 1896, hal. 306

seperti Sultan Agung.⁵⁰ Dalam menghadapi kekuasaan Belanda sikap Sultan dipandang lemah dan berada di bawah pengaruhnya.

Anggapan seperti ini merupakan latar belakang timbulnya golongan kontra di dalam istana. Golongan ini meliputi sementara bangsawan, ulama-ulama dan pejabat-pejabat birokrasi negara. Sehubungan dengan hal ini, Diponegoro di pandang sebagai orang yang mewakili golongan kontra.

Ketika pada tahun 1822 Sultan Hamengku Buwono IV wafat secara mendadak, maka atas persetujuan penguasa Belanda, yang ditunjuk sebagai penggantinya adalah putranya, Pangeran Menol yang baru berusia tiga tahun,⁵¹ dengan gelar Sultan Hamengku Buwono V. Sultan ini memerintah dari tahun 1822 sampai 1826. Karena belum dewasa maka dibentuk suatu dewan perwalian yang bertugas mendampingi Sultan dalam menjalankan pemerintahan. Anggota dewan terdiri dari nenek Sultan (permaisuri Sultan Hamengku Buwono III), Ibu dari Sultan (permaisuri Sultan Hamengku Buwono IV), Pangeran Mangkubumi (putra Sultan Hamengku Buwono II) dan Pangeran Diponegoro.⁵² Kedudukan Diponegoro dalam dewan perwalian ini pada prakteknya tidak berarti sama sekali, ia tidak pernah diajak bicara urusan pemerintahan. Hal ini menunjukkan adanya usaha penyingkiran atas dirinya. Selanjutnya Diponegoro mengeluh bahwa kedudukannya dalam perwalian tak lebih hanya sebagai seorang *emban* saja dalam arti biasa.⁵³ Akhirnya Diponegoro mengundurkan diri dari dewan perwalian dan tak mau turut campur dalam urusan istana. Urusan pemerintahan kemudian banyak dipegang oleh Patih Danurejo IV yang selalu bekerja sama dengan Belanda. Atas dukungan Belanda Patih Danurejo mempunyai pengaruh besar atas diri Sultan. Pengaruh Patih pada Sultan nampak pada rencana pemungutan pajak baru dengan alasan mengisi kekosongan kas kerajaan. Pengangkatan personalia para para pemungut tersebut tetap dilakukan, walaupun ditentang oleh Pangeran Diponegoro.

Kekecewaan golongan anti Belanda di dalam istana menjadi semakin besar. Benih-benih penentangan makin berkembang. Sikap acuh tak acuh Diponegoro terhadap urusan istana menunjukkan kekecewaan terhadap sikap raja dan pejabat-pejabat tinggi pengikutnya. Sebaliknya kecurigaan Belanda terhadap Diponegoro makin bertambah. Pengawasan terhadap orang-orang yang dicurigai makin teliti dilakukan oleh pembesar-pembesar Belanda. Dalam

50 Sultan Agung dikatakan taat menjalankan agama dan senang mengunjungi tempat-tempat keramat, periksa J.I. Van Sevenhoven, *Op.Cit.*, hal. 119 – 120

51 Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 104 – 109.

52 Sartono Kartodirdjo (Editor), *Op.Cit.* hal. 130

53 E.B. Kielstra, *Indische Archipel*, Haarlem, 1917, hal. 11

pada itu golongan pro Belanda baik terdiri dari bangsawan maupun pejabat birokrasi istana mendapat perlindungan dari pihak Belanda.

Di luar kehidupan istana, terdapat juga kekecewaan di kalangan sebagian besar rakyat, khususnya para petani. Kekecewaan terhadap pemerintah kerajaan selain dikarenakan tekanan-tekanan pajak dan kerja wajib, juga karena tindakan raja yang mengizinkan penyewaan tanah pada perkebunan-perkebunan swasta asing. Penyewaan tanah berarti penyewaan penduduknya juga. Para bangsawan yang menyewakan **tanah lungguh** mereka kepada kaum penguasa asing makin menggantungkan penghasilan untuk hidupnya pada uang sewa yang sebagian besar digunakan tidak secara produktif. Tak mengherankan apabila pelarangan penyewaan tanah pada penguasa swasta asing yang dikeluarkan oleh Van der Capellen menjelang meletusnya perlawanan Diponegoro sangat menggoncangkan para bangsawan yang tersangkut dalam penyewaan tanah.

Dalam pada itu penyewaan tanah ngarai pada perkebunan-perkebunan swasta membawa akibat makin terdesaknya tanah persawahan. Gejala tersebut cukup menjelaskan mengapa pada permulaan perlawanan Diponegoro perkebunan-perkebunan swasta juga merupakan sasaran penghancuran dari laskar petani dan mengapa banyak petani yang menggabungkan diri pada Diponegoro. Sebelum perlawanan dimulai, kekecewaan para petani belum menjurus ke arah penentangan. Derajat penentangan lapisan masyarakat bawah ini masih bersifat pasif. Mereka hanya mengkhayalkan datangnya masa yang lebih baik, masa adil dan makmur tanpa ada penekanan pajak dan kerja wajib. Seorang Ratu Adil diharapkan muncul sebagai pemimpin ke arah perbaikan itu.⁵⁴ Mereka tidak melihat kemunduran kekuasaan tradisional seperti yang dikhawatirkan oleh sementara bangsawan dan pejabat-pejabat birokrasi kerajaan dari golongan kontra, juga tidak sadar akan adanya kemerosotan mental keagamaan seperti dibayangkan oleh golongan Ulama. Faktor ekonomi lebih mendasari pandangan messianistik mereka.

Kekecewaan terhadap pemerintah kerajaan, yang dalam bidang politik banyak dipengaruhi oleh Belanda, adalah menjadi sebab utama mengapa Diponegoro lebih banyak tinggal di Tegalrejo dari pada di istana. Di tempat ini ia lebih memusatkan perhatian pada soal-soal agama, pengetahuan tentang adat, sejarah maupun hal-hal yang mengenai kerokhanian. Kecintaan dan ke-

54 J.I. Van Sevenhoven, *Op.Cit.*, hal. 107. Mereka menemukan tokoh Ratu Adil atau Eru Cakra pada diri Pangeran Diponegoro.

setiaan rakyat petani Tegalrejo pada Diponegoro⁵⁵ nampak jelas terutama pada waktu terjadi kericuhan mengenai pembuatan jalan melalui tanah desa Tegalrejo tanpa seizin Diponegoro. Jalan yang akan dibangun oleh Belanda tersebut akan melintas tanah makam leluhur Diponegoro, karena itu mendapat tantangan keras dari Pangeran Diponegoro. Insiden pemasangan tonggak jalan yang terjadi pada tanggal 20 Juli 1825 tidak dapat didamikan.⁵⁶ Belanda berkeras untuk melaksanakan maksudnya, sedang Diponegoro juga tetap mempertahankan haknya sebagai pemilik tanah Tegalrejo. Suasana menjadi semakin tegang.

Dengan perantara Pangeran Mangkubumi, Residen A.H. Smisaert meminta agar Diponegoro bersedia datang ke rumah Residen, namun permintaan itu ditolak. Usaha untuk kedua kalinya dilakukan oleh Belanda dengan disertai peringatan pada Pangeran Mangkubumi, bahwa apabila pangeran ini tidak berhasil melunakkan pendirian Diponegoro, maka Belanda tidak berani menanggung keselamatan dirinya. Dalam keadaan yang sulit ini Mangkubumi akhirnya menentukan sikap untuk memihak Diponegoro. Surat Residen yang dibawa oleh Mangkubumi sebenarnya akan dijawab oleh Diponegoro, namun pasukan Belanda telah mendahului menembakkan meriamnya ketika surat balasan Diponegoro sedang ditulis oleh Mangkubumi.

Sejak Belanda dengan perantara Patih Danurejo IV menyuruh pasang tonggak-tonggak jalan, sebenarnya para petani penduduk Tegalrejo yang menyaksikan kejadian itu telah mengambil sikap untuk berdiri di belakang Diponegoro apabila sewaktu-waktu terjadi perang. Ketika mereka mengajukan pertanyaan tanda apakah yang akan digunakan apabila perang diulai, jawaban yang diperoleh dari Diponegoro ada; apabila telah terdengar bunyi meriam. Bunyi meriam Belanda yang terdengar pada tanggal 20 Juli 1825 kurang lebih pukul 5 sore hari mengejutkan rakyat Tegalrejo. Rakyat petani Tegalrejo

55 Diponegoro pernah mengatakan: "Untuk meniru apa yang dilakukan oleh para ulama, kami kerap kali pergi ke Pasar Gede, Imogiri (Jimatan), Guwa Langse, dan Selarong. Apabila ke Pasar Gede dan Imogiri, kami biasa berjalan kaki. Tetapi apabila ke Guwo Langse dan Selarong, kami naik kuda dengan banyak pengiring. Di kedua tempat terakhir ini kami sering menolong petani menuai atau menanam padi. Memang semestinya para pembesar menyenangkan hati rakyat kecil", Periksa wawancara dengan de Stuers, dalam J.I. Van Sevenhoven, *Op.cit.*, hal. 120.

56 Diponegoro mengatakan: "Halaman kami di Tegalrejo berbentuk tanah persegi panjang". Dengan menggambar dengan jari di atas meja, ia melanjutkan: "di situ terdapat kuburan nenek-moyang kami. Orang akan membuat jalan menerobos halaman itu dan memasang tonggak-tonggak. Maka kami menyuruh rakyat kami untuk mencabutnya." Periksa J.I. Van Sevenhoven, *Op.Cit.*, hal. 115.

dalam waktu singkat membanjiri sekitar **dalem** Tegalrejo dengan membawa peralatan senjata yang ada pada mereka seperti tombak, lembing, umban pelembar batu. Mereka tidak menduga bahwa penyerangan pihak Hindia Belanda akan terjadi dalam waktu secepat itu. Perlawanan secara teratur sudah tentu tidak mungkin dapat dilakukan waktu yang mendadak itu.

Sementara itu Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi masih tetap duduk di pendopo. Beliau memerintahkan salah seorang pasukan bersiap menyambut musuh, padahal keadaan pasukan Diponegoro tidak lengkap. Brojodirjo, salah seorang pasukan Diponegoro, melaporkan bahwa pasukannya telah terdesak mundur, akan tetapi Pangeran Diponegoro tak memberi tanggapan, sehingga Pangeran Mangkubumilah yang mendesak Pangeran Diponegoro untuk pergi dari tempat itu. Pada mulanya Pangeran Diponegoro tidak berniat menyingkir sebab beliau berpendapat apabila telah dikehendaki oleh-NYA akan mati, beliau lebih senagn mati di atas tanah pusaka neneknya. Pangeran Mangkubumi tak menghiraukan alasan itu dan dipaksanya Pangeran Diponegoro segera meloloskan diri melalui pintu samping. Diponegoro dengan menaiki kuda, Genthayu namanya, diikuti Pangeran Mangkubumi serta adiknya Pangeran Ronggo berhasil meloloskan diri.

Di lain fihak, pasukan Belanda terus menyerbu padepokan tersebut. Rumah, mesjid peninggalan Kanjeng Ratu Ageng serta semua harta milik Diponegoro terbakar.

Sementara itu rombongan pasukan Diponegoro akhirnya sampai di Selarong sebelah barat Yogyakarta, dan di sinilah markas pasukan berkedudukan. Keluarga Pangeran Diponegoro, terutama putri-putri diungsikan ke desa Dekso. Tak lama kemudian, Pangeran Adinegoro, yaitu adik Pangeran Diponegoro yang ada di Yogyakarta menyusul ke Selarong dengan membawa 200 prajurit sebagai bantuan. Pangeran Adinegoro diangkat sebagai patih dengan gelar Pangeran Suryenglogo saat itu juga dan ditugaskan mengadakan perlawanan terhadap Belanda di daerah-daerah sekitar Yogyakarta.⁵⁷ Pangeran Ontowiryo dengan didampingi oleh Tumenggung Danukusumo diberi tugas melakukan perlawanan di daerah Bagelan. Pangeran Ontowiryo adalah putra Pangeran Diponegoro yang kemudian juga memakai gelar Pangeran Diponegoro. Pangeran Adiwiryo didampingi oleh Tumenggung Joyomustopo ditugaskan memimpin perlawanan di daerah Lowanu. Pangeran Adisuryo dan putranya, Pangeran Sumonegoro ditugaskan mengadakan perlawanan di

57 Tentang pimpinan-pimpinan pasukan diponegoro dan kancah peperangan, periksa Sartono Kartodirjo (Editor), *Op.Cit.*, 135 – 167 dan G.B. Hooger, *De Krijgsgeschiedenis van Nederlandsch Indie van 1811 tot 1894*, I hal. 58

daerah Kulon Progo. Tumenggung Cokronegoro ditugaskan memimpin perlawanan di daerah Gamblong. Sedang di daerah sebelah utara Yogyakarta, paman dari Pangeran Diponegoro, yaitu Pangeran Joyokusumo (terkenal dengan nama Pangeran Bei) ditugaskan untuk memimpin perlawanan. Pangeran Bei dibantu oleh Tumenggung Surodilogo. Pimpinan perlawanan di daerah Yogyakarta bagian timur diserahkan kepada Suryonegoro dan Suronegoro, Sumodiningrat dan Joyowinoto. Perlawanan di daerah Gunung Kidul dipimpin oleh Pangeran Singosari dan Warsokusumo. Perlawanan di daerah Pajang diserahkan kepada Mertoloyo, Wiryokusumo, Sindurejo dan Dipodirjo. Perlawanan di daerah Sukowati dipimpin oleh Kartodirjo, Pangeran Serang memimpin perlawanan di daerah sekitar Semarang. Perlawanan di daerah Madiun, Magetan, Kediri dan sekitarnya dipimpin oleh Mangun Negoro. Setelah semua pasukan siap, masing-masing kelompok menuju ke tempat tugasnya.

2. *Jalannya Perang.*

Berita insiden bersenjata di Tegalrejo segera sampai di pusat kekuasaan Belanda di Batavia. Pada tanggal 29 Juli 1825 Gubernur Jenderal Van der Capellen mengirim Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock ke Surakarta. Di Surakarta, Sunan Paku Buwono ternyata tidak memihak Diponegoro. Melalui Sunan, Belanda mendapatkan keterangan tentang keadaan Yogyakarta.

Dalam hubungan ini perlu disebut masuknya seorang ulama terkenal dari desa Mojo, daerah Surakarta, ke dalam pasukan Diponegoro. Dasar keagamaan segera ditanamkan di kalangan para pengikut. Semboyan Perang Sabil disiarkan, baik di kalangan mereka yang telah berkumpul di Selarong, maupun mereka yang berada di daerah-daerah. Propaganda perang melawan kapir juga dilakukan dan mendapat sambutan dari rakyat di daerah Kedu.⁵⁸

Dengan demikian peperangan mulai meletus. Dari jalannya perang, nampak jelas bahwa pada masa permulaan perang, pasukan Diponegoro berhasil bergerak maju merebut beberapa daerah, seperti misalnya Pacitan pada tanggal 6 Agustus 1825 dan Purwodadi pada tanggal 28 Agustus 1825. Dalam awal pertempuran, kekuatan militer Belanda tidak begitu besar.

58 P.J.F. Louw, *De Java Oorlog van 1825 tot 1830*, I, Batavia, 1894, lampiran XLVII. Periksa juga surat Diponegoro yang dibawa Pangeran Surodilogo dan Pangeran Suriadiningrat dalam propaganda perang suci (J.Hagemen, Jez, *Geschiedenis van den oorlog op Java van 1825 tot 1830*, Batavia, 1856, 93), Perang Suci juga dilakukan di distrik-distrik Wirosari, Grobogan, juga di Porwodadi; periksa G.B. Hooyer, *Op.Cit.*, hal. 71

Daerah pertempuran makin lama makin meluas. Di daerah Kedu terjadi pertempuran sengit di desa Dinoyo. Disini pasukan Diponegoro menghadapi lawan yang besar sekali jumlahnya. Mereka terdiri dari 2000 orang, yaitu gabungan antara pasukan Belanda dan pasukan Tumenggung Danuningrat, bupati Kedu yang memihak pada Belanda. Seconegoro dan Kertongoro segera minta bantuan ke Selarong. Dari Selarong dikirim bantuan prajurit Bulkiya. Bulkiya adalah nama salah satu kesatuan prajurit Diponegoro yang terkenal berani. Pasukan Bulkiya ini di bawah pimpinan Haji Usman Alibasah dan Haji Abdulkadir. Seconegoro memimpin barisan sayap kanan, sedang Kertongoro memimpin barisan sayap kiri. Adapun pasukan Bulkiya bertindak sebagai dada pasukan. Akhirnya pasukan Belanda dapat dipukul mundur dan bupati Kedu, Tumenggung Danuningrat tewas dalam pertempuran ini. Pasukan Bulkiya berhasil merampas beberapa pucuk senapan dan meriam serta pelurunya.

Sementara itu di Selarong, Pangeran Diponegoro menerima surat dari Jenderal de Kock di Surakarta tertanggal 7 Agustus 1825, disusul dengan surat yang kedua tertanggal 14 Agustus 1825 yang isinya menanyakan tentang tujuan perlawanan. Di samping itu de Kock berjanji akan memberi jaminan keamanan pada Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi serta pengikutnya apabila beliau bersedia menghentikan perangnya dan bersedia mengadakan perundingan perdamaian. Pangeran Mangkubumi segera menjawab bahwa maksud Diponegoro hanya ingin meng-Islamkan tanah Jawa. Pangeran Diponegoro bersedia berunding asal de Kock menentukan hari dan tempatnya. Maka dimulailah persiapan perundingan di pihak Diponegoro. Oleh para ulama Diponegoro dinobatkan sebagai Sultan dengan gelar Sultan Ngabdulhamid Erucokro Kabiril Mukminin Chalifatullah Jawa. Jawaban dari de Kock tentang hari dan tempat perundingan ternyata tidak juga datang, sementara itu pula Diponegoro tetap mengobarkan api perlawanan.

Dalam pertempuran di daerah Semarang tanggal 11 September 1825 Pangeran Serang berhadapan dengan Belanda. Untuk menumpas perlawanan rakyat ini, Jendral de Kock mengerahkan semua kekuatan pasukan Belanda. Opsir-opsir yang bertugas di Jawa maupun di luar Jawa ditarik untuk menghadapi Diponegoro. Jendral van Geen yang bertugas di Bone tiba di Semarang pada awal bulan September 1825. Jendral ini kemudian ditugaskan menumpas perlawanan Pangeran Serang di Semarang. Semarang akhirnya jatuh, akan tetapi Pangeran Serang berhasil meloloskan diri ke daerah Sukowati dan terus mengadakan perlawanan bersama Tumenggung Kartodirjo. Rembang, Blora, Rajegwadi (Bojonegoro) dan Sukowati dengan perlawanan yang keras akhirnya dapat dikuasai Belanda. Kartodirjo tertangkap, sedang

Pangeran Serang berhasil menyingkir ke Madiun untuk bergabung dengan pasukan Diponegoro yang ada di sana. Dalam pertempuran tanggal 9 Desember 1825, Madiun jatuh ke tangan Belanda, sehingga Pangeran Serang bersama-sama dengan Pangeran Sukur, mundur ke Yogyakarta untuk bergabung dengan pasukan Diponegoro.

Perlawanan di berbagai daerah tersebut merupakan penghalang kekuatan untuk menyerbu markas besar Diponegoro di Serang. Belanda harus menumpas perlawanan di banyak daerah ini satu persatu. Letnan Kolonel Cleerens bertugas di Tegal dan Pekalongan, sedang perlawanan di Banyumas diserahkan pada Letnan Kolonel Diell.

Secara tiba-tiba Belanda melakukan serangan umum ke Selarong pada 2 Oktober dan 4 Oktober 1825, akan tetapi Selarong didapati kosong, ternyata pasukan Diponegoro telah memindahkan markas besarnya ke Dekso, sebelah barat laut Yogyakarta. Untuk sementara, para putri keluarga Diponegoro yang semula mengungsi ke Dekso dipindahkan ke Suwela, daerah sebelah utara Dekso.

Di markas baru ini, Diponegoro mengangkat lagi pemimpin-pemimpin pasukan untuk memperkuat barisan.⁵⁹ Prajurit Panilih dipimpin oleh Raden Dullah Prawirodirjo (terkenal dengan Sentot Alibasah Prawirodirjo), prajurit Surojo dipimpin oleh Abusungeb. Prajurit Bulkiya dipimpin oleh Haji Muh. Usman Alibasah dan Haji Abdulkadir. Tumenggung Mertoloyo memimpin prajurit Mundungan. Prajurit Mantrirejo dipimpin oleh Tumenggung Puthut Lawa, dengan tugas mengawal Pangeran Diponegoro dan memberi bantuan kepada kesatuan-kesatuan yang membutuhkannya. Prajurit Suryagama atau prajurit Kaji dibawah pimpinan Dullah Kaji Bakdaruddin. Prajurit Suronoto dipimpin oleh Sarip Samparwadi. Kiai Maja memimpin satu pasukan. Pangeran Bei memimpin prajurit Jogosuro. Pangeran Mangkubumi memimpin prajurit Jagakarya, dengan tugas mengawal para putri. Tumenggung Kertopengalasan harus mempertahankan daerah Kulon Progo, dengan bantuan Haji Ngingso dan Haji Ibrahim. Tumenggung Joyonegoro mempertahankan daerah Yogya selatan. Imogiri harus dipertahankan oleh Syeh Kaji Muda dengan bantuan Raden Reksokusumo. Pertahanan Yogya sebelah timur diserahkan pada Tumenggung Surenegoro. Probolinggo harus dipertahankan oleh Raden Joyopenoto. Daerah Bagelen menjadi tugas Pangeran Ontowiryo dengan didampingi oleh 9 orang basah dan 10 orang Tumenggung. *Basah*, *Tumenggung* dan Dullah adalah nama pangkat dalam keprajuritan.

Peperangan terus berjalan. Gunung Kidul di bawah pimpinan Pangeran

59 Periksa Sartono Kartodirdjo (Editor), *Op.Cit.*, hal. 141 – 142

Singosari jatuh, Pangeran Singosari mundur dan bergabung dengan Syeh Dullah Kaji Muda di Imogiri. Prajurit Bulkiya segera datang membantu, maka dalam pertempuran sengit yang dipimpin oleh Haji Usman Alibasah, pasukan Belanda dapat dipukul mundur. Benteng Belanda di Prambanan diserang oleh Tumenggung Suronegoro dan berhasil memukul mundur pasukan Hindia Belanda.

Di daerah Plered pertahanan pasukan Diponegoro cukup kuat. Pimpinan pasukan antara lain dipegang oleh Kertopengalasan. Pertahanan ini pada tanggal 16 April 1826 mendapat serangan dari pasukan Hindia Belanda di bawah seorang Jenderal, namun tetap dapat bertahan. Serangan Belanda untuk kedua kalinya atas Plered di bawah pimpinan seorang kolonel, pada tanggal 9 Juni 1826, yang dibantu oleh pasukan dari Mangkunegoro, juga tidak berhasil mematahkan pertahanan Kertopengalasan. Di daerah pertempuran lain pasukan Alibasah Sentot Prawirodirdjo, salah seorang pemimpin ulung Pasukan Diponegoro pada tanggal 28 Juli 1826 telah berhasil melakukan penyerangan terhadap pasukan musuh di Kasuran. Pasukan di bawah Diponegoro sendiri pada tanggal 9 Agustus 1826 telah pula berhasil memukul sebuah pasukan Belanda.

Sementara itu pertempuran sengit yang terjadi pada tanggal 30 Juli 1826 di dekat Lengkong membawa akibat tewasnya seorang Letnan Belanda dan dua orang wali dari Sultan Hamengku Buwono V, ialah Pangeran Murdaningrat dan Pangeran Panular. Menurut surat Pangeran Mangkubumi kepada Sultan Hamengku Buwono II, yang sejak tanggal 17 Agustus 1826 diangkat kembali menjadi raja, disebutkan bahwa kedua pangeran tersebut gugur bukan karena kesalahan pihak Diponegoro, tetapi karena mereka ikut serta dalam pasukan Belanda memerangi pasukan Diponegoro. Sementara itu dalam pertempuran yang terjadi di daerah Delanggu pada tanggal 28 Agustus 1826, pasukan Diponegoro berhasil mendesak pasukan musuh dan menduduki daerah tersebut.

Kesulitan-kesulitan yang dialami selama periode perang 1825-1826 telah mendorong pimpinan militer Belanda untuk menggunakan siasat baru, ialah *Benteng Stelsel*, atau Sistem Benteng.⁶⁰ Sistem ini mulai dilaksanakan oleh Jendral De Kock dalam periode perang sejak tahun 1827. Tujuan dari *Benteng Stelsel* adalah untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro dengan jalan mendirikan pusat-pusat pertahanan berupa benteng-benteng di

60. G.P. Hoover, *Op.Cit.*, I, 82. Mengenai letak benteng-benteng dan pos-pos pertahanan Belanda, periksa *Ibid.*, hal 99 - 106.

daerah-daerah yang telah dikuasai oleh Belanda. Pelaksanaan *Benteng Stelsel* juga dimaksud untuk mengadakan tekanan pada Diponegoro agar bersedia segera menghentikan perlawanan. Suatu hal yang sangat dirasakan oleh pihak Belanda ialah pembiayaan yang cukup besar untuk mengadakan perang itu. Untuk mempercepat selesainya perang, Belanda juga berusaha untuk mendekati pemimpin-pemimpin pasukan Diponegoro. Dalam perundingan yang diadakan dengan pihak Diponegoro pada tanggal 9 Agustus 1827 Belanda mencoba untuk melunakkan pendiriannya. Pendekatan dilanjutkan dengan diadakannya perundingan pada tanggal 23 Agustus 1827 di Cirian, daerah Klaten. Dalam perundingan ini pihak Diponegoro diwakili oleh Kyai Maja dan Pangeran Ngabei Abdulrahman, namun usaha perdamaian tidak juga berhasil.

Karena kegagalan dalam perundingan itu pasukan-pasukan Diponegoro makin giat melakukan perlawanan. Suatu hal yang menyebabkan makin lemahnya pasukan-pasukan Diponegoro adalah meningkatnya jumlah pemimpin pasukan yang tertangkap oleh Belanda. Pangeran Suryomataram dan Ario Prangwadono telah tertangkap pada tanggal 19 Januari 1827, sedang Pangeran Serang dan Pangeran Notoprojo tertangkap pada tanggal 21 Juni 1827. Penyerahan kedua pangeran ini diikuti oleh anggota pasukannya sebanyak 850 orang.

Usaha Belanda untuk mengadakan perundingan pada tanggal 10 Oktober 1827 dengan pihak Diponegoro juga tidak membawa hasil. Wakil pihak Diponegoro dalam perundingan itu, Tumenggung Mangunprawiro, menolak anjuran dari wakil Belanda untuk menyerah. Kegagalan dalam perundingan ini membawa akibat berkobarnya pertempuran lagi. Markas Diponegoro yang berada di Banyumeneng pada tanggal 25 Oktober 1827 mendapat serangan dari pasukan Belanda. Sebaliknya pasukan pihak Diponegoro yang berada di daerah-daerah lain melakukan serangan terhadap pos-pos Belanda. Dengan pimpinan Raden Tumenggung Ario Sosrodilogo pada tanggal 28 November 1827, rakyat Rembang mengadakan perlawanan terhadap Belanda di Rajegwesi. Sebuah pasukan rakyat yang memihak Diponegoro pada tanggal 5 Desember 1827 berhasil menduduki Padangan dan selanjutnya bergerak ke kota Ngawi.

Perlawanan rakyat di daerah Tuban pada tanggal 16 Desember 1827 cukup berat bagi Belanda, sehingga untuk menghadapinya Belanda terpaksa mendatangkan bantuan pasukan dari daerah lain. Baru pada tanggal 7 Maret 1828 perlawanan rakyat Rembang dapat dipatahkan.

Sampai dengan taraf demikian Belanda masih belum dapat mematahkan kekuatan militer Diponegoro. Kota Magelang yang terletak di tengah-tengah daerah perang, oleh de Kock dijadikan pusat kekuatan militernya. Kekuatan

yang terdiri dari pasukan-pasukan Sultan, Pakualam dan Mangkunegoro oleh Belanda digunakan untuk menghalang-halangi gerakan pasukan inti Diponegoro ke arah timur, sedang pasukan Belanda yang bermarkas di Magelang digunakan untuk menutup jalan yang menghubungkan daerah operasi Diponegoro di Yogyakarta dengan daerah-daerah di sebelah utara dan barat. Adapun bupati-bupati daerah yang memihak Belanda cukup menyukarkan hubungan pasukan-pasukan Diponegoro dari daerah satu ke daerah yang lain. Perlawanan di daerah-daerah menjadi terpisah satu sama lain, sehingga sulit untuk diadakan koordinasi.

3. Akhir Perang.

Bertambahnya kekuatan pasukan Belanda dengan datangnya bantuan pasukan dari daerah-daerah lain merupakan salah satu sebab makin terdesaknya pasukan Diponegoro di pelbagai medan pertempuran. Sementara itu Belanda juga makin giat berusaha untuk mendekati pemimpin-pemimpin pasukan dengan maksud agar mereka mau memihak Belanda. Seorang putra Mangkubumi bernama Pangeran Notodiningrat bersama-sama dengan istri, ibunya dan sebanyak kurang lebih 20 orang pengikut telah menyerah pada tanggal 18 April 1828; Pangeran Aria Papak menyerah dalam bulan Mei 1828, sedang Sosrodilogo yang merupakan tokoh berperanan dalam mengobarkan perlawanan di daerah Rembang juga menyerah tanggal 3 Oktober 1828.

Pasukan Ali Basah Sentot Prawirodirdjo yang berhadapan dengan pasukan Belanda terpaksa mundur sampai tepi sungai Progo. Pasukannya pada akhir September 1828 kemudian bergerak ke arah barat. Pada pihak lain tekanan dari pasukan Belanda yang makin berat merupakan salah satu sebab Kyai Mojo menulis surat kepada Belanda pada tanggal 2 Oktober 1828, yang memuat kesediaannya untuk mengadakan perundingan. Adanya kesediaan tersebut memang diharapkan oleh Belanda, karena Kyai Mojo dipandang sebagai salah satu tulang punggung kekuatan perang Diponegoro. Perundingan taraf pertama yang diadakan pada tanggal 31 Oktober 1828 ternyata gagal, sehingga dianggap perlu adanya perundingan taraf kedua.

Menurut wawancara antara de Stuers dengan Diponegoro pada akhir perang yaitu ketika Diponegoro sedang dalam perjalanan ke tempat pembuangan, dikatakan bahwa sebelum perundingan di Mlangi ini sebenarnya pernah juga diadakan perundingan di Sambiroto.⁶¹ Dalam perundingan ini Diponegoro juga mewakilkan Kyai Mojo, tetapi perundingan tersebut tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Perundingan Mlangi menurut Diponegoro

61. J.I. Van Sevenhoven, *Op. Cit.*, 122.

adalah atas kemauan Kyai Mojo sendiri. Dikatakan bahwa waktu itu Kyai Mojo membawa serta 500 a 600 pasukan *Bulkiya*, sedang dalam perundingan ia didampingi oleh ulama-ulama dari Pajang.

Menghadapi situasi demikian Sentot Prawirodirdjo masih terus aktif melakukan perlawanan di medan pertempuran sebelah barat daerah Yogyakarta. Pada tanggal 20 Desember 1828 ia mengadakan penyerangan atas benteng Belanda di daerah Nanggulan dan memperoleh kemenangan. Dalam pertempuran tersebut, Kapten van Ingen dan Pangeran Prangwadono tewas. Dalam pandangan Belanda, Sentot tetap merupakan musuh yang berbahaya, oleh karenanya Belanda berusaha mencari jalan untuk mendekatinya sehingga ia mau menyerah. Mula-mula usaha dilakukan oleh Jenderal de Kock dengan mengirimkan surat pada tanggal 11 Pebruari 1829 kepada Sentot yang isinya menganjurkan supaya menghentikan perlawanan, tetapi Sentot menolaknya.

Pada tanggal 28 Juni 1829 Residen van Nes juga mengirim surat kepada Mangkubumi berisi saran agar Pangeran tersebut bersedia menghentikan perang, tetapi saran inipun ditolak. Kebimbangan mulai timbul pada diri Mangkubumi setelah pada tanggal 23 Juli 1829 salah seorang istrinya beserta 3 orang putranya bernama Wiryokusumo, Wiryotatmojo dan Suradi menyerah pada Belanda. Pada tanggal 25 September 1829 Belanda telah menyuruh putra-putra Mangkubumi yang lain, ialah Atmodiwiro dan Reksoprojo, untuk mencari ayahnya dan membujuknya supaya menyerah. Usaha Belanda baru berhasil setelah Notodiningrat, putra Mangkubumi yang lain lagi, pada tanggal 27 September 1829 dapat menemukan ayahnya di desa Monopeti dan dengan bujukan berhasil mengantarkannya untuk menyerah pada Residen van Nes.

Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 1829 van Nes juga mengirim surat kepada Sentot Prawirodirdjo berisi ajakan untuk berdamai. Belanda menyanggupi untuk menjamin keselamatan diri Sentot dan akan memberi perlakuan maupun kedudukan yang baik. Dalam hubungan ini Komisaris Jenderal du Bus telah memberi instruksi kepada Jenderal De Kock agar memaksa Diponegoro untuk menghentikan perlawanan dan supaya mengancam akan membunuh anaknya, Diponegoro Anom, apabila Diponegoro menolaknya.

Untuk mendekati Sentot lagi, Belanda menggunakan Pangeran Ario Prawirodiningrat, Bupati Madiun yang masih kerabat dengan Sentot sendiri. Prawirodiningrat diminta oleh Belanda untuk melunakkan pendirian Sentot agar mau menghentikan perlawanan. Akhirnya pendekatan Belanda pada Sentot untuk berdamai berhasil dalam perundingan di Imogiri tanggal 17 Oktober 1829, yaitu setelah Belanda bersedia menerima beberapa syarat yang diajukan oleh Sentot. Syarat-syarat itu antara lain berisi: agar Sentot diperbolehkan tetap memeluk agamanya, agama Islam; agar pasukannya tidak dibubarkan

dan ia tetap menjadi pemimpinnya, agar ia dan seluruh anggota pasukannya tetap memakai serban. Sebagai kelanjutan dari persetujuan itu Sentot dan pasukan pada tanggal 24 Oktober 1829 memasuki ibukota kerajaan Yogyakarta untuk menyerahkan diri.

Bagi Diponegoro penyerahan Sentot merupakan pukulan berat. Sedangkan sebulan sebelumnya, Pangeran Joyokusumo yang banyak membantu dalam bidang taktik, telah gugur dalam suatu pertempuran. Merosotnya kekuatan perang Diponegoro makin nampak setelah makin banyak orang-orang yang berperanan menyerah pada Belanda. Peranan Ario Suriokusumo menyerah pada tanggal 1 Nopember 1829, Kertopengalasan menyerah pada pertengahan bulan Nopember 1829, disusul kemudian oleh Joyosudirgo pada pertengahan bulan Desember 1829. Pangeran Diponegoro (Putra Diponegoro) pada tanggal 8 Januari 1830 dan Patih dari Diponegoro sendiri pada tanggal 18 Januari 1830.

Usaha Belanda untuk mempercepat selesainya perang antara lain juga dilakukan dengan cara pengumuman pemberian hadiah sebanyak 20.000 ringgit kepada siapa pun yang dapat menangkap Diponegoro. Pengumuman yang telah dikeluarkan sejak tanggal 21 September 1829 hingga akhir tahun itu masih belum juga berhasil. Pendekatan akhirnya tercapai dengan diadakannya pertemuan antara Kolonel Cleerens dengan Diponegoro di desa Romo Kamal pada tanggal 16 Pebruari 1830. Dalam perundingan pada hari berikutnya di Kecawang Belanda menyarankan pada Diponegoro untuk melanjutkan perundingan di Magelang dengan jaminan ia akan mendapat perlakuan jujur, dalam arti apabila perundingan gagal, ia diperbolehkan kembali ke medan perang. Dengan kepercayaan akan janji Cleerens, Diponegoro dengan pasukannya pada tanggal 21 Pebruari 1830 telah tiba di bukit Menoreh dan seterusnya pada tanggal 8 Maret memasuki kota Magelang. Berhubung pada waktu itu bertepatan dengan bulan Ramadhan, maka Diponegoro meminta agar perundingan ditunda.

Sementara itu Jenderal De Kock yang baru tiba di Semarang setelah beberapa waktu lamanya berada di Batavia, mendengar berita bahwa usaha Cleerens untuk mendekati Diponegoro berhasil. Pada tanggal 25 Maret 1830 Jenderal De Kock dengan secara rahasia memberi instruksi untuk menangkap Diponegoro apabila perundingan gagal. Penundaan perundingan selama kira-kira 20 hari dalam bulan Ramadhan memberi kesempatan pada Belanda untuk merencanakan penangkapannya. Perundingan yang diadakan pada tanggal 28 Maret 1830 ternyata berakhir dengan kegagalan. Di rumah Residen Kedu yang menjadi tempat perundingan itulah Diponegoro ditangkap. Dengan penangkapan Diponegoro berarti bahwa pemimpin tertinggi perlawanan tidak

ada lagi. Kegiatan perlawanan di daerah-daerah yang sejak awal tahun 1830 telah menurun menjadi semakin lemah dan akhirnya tidak berarti lagi.

Bagi Belanda penangkapan Diponegoro berarti pembebasan dari beban pembiayaan perang yang semakin besar. Berdasarkan keputusan pemerintah Belanda di Batavia pada tanggal 30 April 1830, Diponegoro akan disingkirkan ke Menado. Diponegoro kemudian diangkut dengan kereta ke Semarang dengan penjagaan serdadu-serdadu Belanda.⁶² Setelah diangkut dengan kapal ke Batavia selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1830 ia diangkut dengan korvet *Pollux* ke Menado. Dalam perjalanan sampai di Jakarta dalam rangka pengasingan ke Menado, Diponegoro dikawal oleh Kapten Roeps dan Letnan de Stuers. Karena di Menado penjagaan atas Diponegoro dirasa kurang kuat maka pada tahun 1834 Belanda memindahkannya ke tempat pembuangan di Makasar. Di sinilah Diponegoro tinggal sampai meninggalnya pada tanggal 8 Januari 1855 dalam usia lebih kurang 70 tahun.⁶³

Alibasah Sentot Prawirodirdjo yang telah menyerah dikirim ke Sumatra Barat untuk memerangi kaum Padri. Pengiriman Sentot dengan pasukannya ke Sumatra Barat adalah termasuk dalam rangka penggunaan tenaga bumi-putra oleh Belanda untuk memerangi sesama orang Indonesia di daerah lain. Tetapi kemudian timbul kecurigaan dari pihak Belanda terhadap Sentot yang dituduh mengadakan persekutuan rahasia dengan kaum Padri, sehingga Hindia Belanda menariknya kembali ke Jawa. Sentot segera ditangkap dan diasingkan ke Cianjur. Tak lama setelah itu Sentot dipindahkan lagi ke Bengkulu sampai dengan saat meninggalnya pada tanggal 17 April 1855. Kyai Mojo yang diasingkan ke Minahasa meninggal pada tanggal 20 Desember 1849.

Belanda yang merasa telah membantu pemerintah Kesultanan dan Kesunanan mengajukan tuntutan penguasaan daerah Mancanegara yang masih di-

62. Dikatakan, bahwa waktu sampai di Ungaran, rombongan berhenti sebentar. Pada saat itu Diponegoro meminta izin untuk bersembahyang. Ia pergi ke dinding benteng dan melakukan sholat, dengan pengawasan dari serdadu pegawai Belanda; periksa J.I. Van Sevenhoven, *Op.Cit.*, hal. 11
63. Untuk biaya hidup Diponegoro dalam pengasingan di Menado, pemerintah Hindia Belanda menyediakan f.600,— tiap bulan. Periksa *Algemeen Overzicht van de Staatkundige Gesteldheid van Nederlandsch-Indie over 1852*. (Arsip di Schaarsbergen, Nederland), 279. Pada tahun 1833 Diponegoro dipindah ke benteng Rotterdam di Makasar. Kira-kira pada tahun 1837, biaya hidup Diponegoro dikurangi menjadi f. 350,— Pada tahun 1850 biaya tersebut dinaikkan menjadi f. 500,— dikatakan bahwa yang ikut Diponegoro dalam pengasingan adalah: dari lingkungan keluarga adalah dua orang laki-laki, dua orang wanita dan empat orang anak; dari abdi pengikut adalah tiga orang laki-laki, delapan orang wanita dan delapan orang anak. Periksa *Ibid.*, hal 281.

miliki oleh kedua kerajaan itu. Sunan Pakubuwono VI yang menyingkir dari istana ke pantai Selatan karena suatu sengketa, ditangkap dan diasingkan ke Ambon.

Dari seluruh uraian di atas dapat diketahui, bahwa perlawanan Diponegoro cukup besar pengaruhnya di daerah-daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bagaimanapun hasil yang dicapai dalam perlawanan tersebut, perlawanan Diponegoro dan pengikutnya merupakan bentuk reaksi terhadap kekuasaan Hindia Belanda dan sekutunya. Bagi Belanda perlawanan Diponegoro cukup banyak memakan biaya. Untuk itu Belanda harus mengeluarkan biaya sebanyak lebih dari 20 juta *rupiah* Belanda (gulden), di samping kehilangan serdadu Eropa sebanyak 800 orang dan serdadu bumiputra sebanyak 7000 orang, belum terhitung perkembangan-perkembangan yang dirusak oleh pasukan Diponegoro selama perang.

D. SULAWESI SELATAN

1. Pendahuluan.

Pada tahun 1607 Belanda telah berhasil mendirikan sebuah kantor dagang di Makasar. Dengan demikian kontak-kontaknya dengan para penguasa tradisional dapat dilakukan secara lebih intensif. Akan tetapi terbukanya kemungkinan intensifikasi kontak-kontak semacam itu membuka pula peluang yang lebih besar bagi Belanda untuk menjalankan tujuan utamanya agar menguasai secara penuh arus perdagangan di Sulawesi Selatan. Bersamaan dengan usaha intensifikasi kontak-kontak itu, maka dijalankan pulalah usaha-usaha untuk "memperkecil" penguasaan arus perdagangan yang selama ini berada di tangan para penguasa setempat. Adanya sikap yang demikian dari pihak Belanda tentu saja menimbulkan reaksi dari pihak penguasa setempat.

Reaksi yang terkuat muncul ketika kerajaan Gowa berada di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Raja Gowa (*Sombayya ri Gowa*) ini menentang keras usaha-usaha Belanda untuk menjadi "penguasa" di Sulawesi Selatan. Bagi Sultan Hasanuddin tidak ada seorang pun, termasuk juga Belanda, yang berhak untuk menjadi penguasa tunggal (monopoli) di bidang perdagangan. Karena itu ia menolak melakukan pembatasan terhadap bangsa-bangsa lainnya, seperti Portugis, Spanyol, untuk ikut berdagang di wilayah negara kerajaannya.

Sikap ini dengan sendirinya tidak menguntungkan pihak Belanda. Ketegangan hubungan yang pada akhirnya melahirkan pertempuran tidak dapat dihindari, yaitu pada tahun 1666. Kenyataan ini merupakan bukti yang menunjukkan bahwa di dalam usahanya untuk menguasai wilayah dan arus perdagangan Su-

lawesi Selatan, Belanda harus menghadapi reaksi aktif dari pihak penguasa setempat.

Di dalam usahanya untuk menguasai wilayah dan arus perdagangan Sulawesi (Selatan) itu, terdapat keadaan dalam negeri yang cukup menguntungkan pihak Belanda; hal itu lebih "memperlicin" usaha penguasaannya. Yang dimaksudkan ialah adanya pertentangan antara negara Bone dengan negara Gowa di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Pertentangan ini berawal dari usaha-usaha kerajaan Gowa untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaannya di wilayah kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi (Selatan), termasuk usahanya untuk menguasai Bone.

Sehubungan dengan itu, salah seorang penguasa Bone yang berusaha untuk melepaskan diri dari Gowa adalah Arung Palaka.

Usaha Arung Palaka, yang dibantu sepenuhnya oleh para pemimpin kerajaan Bone lainnya, untuk melepaskan diri dari kekuasaan Gowa telah lama dilakukan. Usaha itu tidak jarang dilakukan dengan jalan kekerasan, yang mendorong timbulnya pertempuran di antara kedua negara ini: salah satu di antara pertempuran yang terbesar itu ialah yang terjadi pada tahun 1660. Dalam pertempuran ini salah seorang pemimpin utama lasykar Bone, yaitu Tobala, tewas. Namun Arung Palaka yang juga ikut memimpin lasykar Bone berhasil meloloskan diri, walaupun nyaris tewas di dalam pertempuran itu. Arung Palaka berhasil menyembunyikan diri untuk kemudian kembali berusaha menyusun kekuatannya. Walaupun dia pernah berhasil mengumpulkan kekuatan sebanyak 4000 orang, dan melakukan penyerangan, namun dia gagal untuk mengalahkan pasukan-pasukan kerajaan Gowa.

Menghadapi kenyataan ini Arung Palaka nampaknya menyadari bahaya yang akan dihadapinya jika dia tetap berada di Bone. Karena itu dia berusaha untuk meninggalkan daerahnya agar tidak menjadi korban dari kekuasaan Gowa. Dia berhasil memperoleh perlindungan dari Sultan Buton, dan setelah berada di Buton selama kurang lebih 3 bulan, akhirnya dia berhasil "menyingkir" ke Batavia.⁶⁴ Dengan itu maka lahirlah kerjasama antara Arung Palaka dan Belanda untuk menghadapi Sultan Hasanuddin. Didalam pertentangan-pertentangan antara kekuatan-kekuatan ini, mereka juga telah berusaha dan berhasil mendapat bantuan dari kerajaan-kerajaan lainnya. Dalam hubungan itu Kerajaan Gowa/Sultan Hasanuddin dibantu sepenuhnya oleh Kerajaan Wajo, dan Kerajaan Bone/Arung Palaka dibantu sepenuhnya oleh Kerajaan Soppeng.

64. Abdurrazak Daeng Patunru, *Sedjarah Wadjo*, Jajasan Kebudajaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, 1967, hal. 42.

Kerjasama antara kedua kekuatan ini pada akhirnya mengakhiri kekuasaan Gowa atas Bone, dan Sultan Hasanuddin harus menerima kenyataan bahwa Belanda akan memegang monopoli perdagangan di Sulawesi (Selatan). Demikian pula Arung Palaka berhasil membebaskan negara kerajaannya (Bone) dari kekuasaan kerajaan Gowa. Beliau kemudian diangkat sebagai raja Bone. Kerjasama antara Arung Palaka dengan Belanda tentu saja memberikan keuntungan bagi Belanda, yaitu usaha pendudukannya di Sulawesi (Selatan) akan makin berhasil. Kekuasaan Belanda mendapat pengakuan dari kerajaan-kerajaan lainnya, seperti Lamuru, Mario, Soppeng, dan Wajo.

Proses perluasan pengakuan kekuasaan Belanda itu tidak sepi dari perlawanan-perlawanan yang kuat. Hal ini makin nampak setelah mengangkatnya "sekutu" Belanda, Arung Palaka. Kemangkatan beliau digunakan oleh beberapa kerajaan di Sulawesi (Selatan) untuk melepaskan diri dari kekuasaan Belanda. Kerajaan Wajo melakukannya pada tahun 1710, dan dengan bantuan dari bajak-bajak laut pasukan-pasukan kerajaan Wajo muncul di perairan Makassar, dan mendarat untuk kemudian bergerak sampai ke Maros. Penyerangan yang dilakukan ini gagal, dan pasukan kerajaan Wajo mengundurkan diri ke arah jurusan lain.

Kemudian ketika Lamaddukkelleng menjadi Arung *Matoa Wajo* perlawanan itu dilanjutkan, dan dia berhasil untuk kembali membangun kekuatannya bersama dengan kerajaan Gowa dengan tujuan untuk pada satu ketika yang baik kembali berusaha untuk mengusir Belanda dari Sulawesi (Selatan). Usaha itu berhasil karena ketika itu Pabbicara Butta Gowa, yaitu La Mappa-sepe KaraEng Bontolangkasa juga sangat tidak senang dengan kekuasaan Belanda di bumi "tanah airnya". Pada bulan Mei 1739 kedua tokoh anti Belanda itu mewujudkan serangannya kepada Belanda dalam bentuk menyerang beberapa daerah kekuasaan Belanda di Makassar, seperti kampung Maccini' dan Maricayya. Akan tetapi serangan-serangan yang dilakukan oleh Wajo dan Gowa itu tidak berhasil. Bahkan ketika penyerangan sedang dilakukan, orang-orang Bone yang bergabung dengan Lamaddukkelleng berbalik menentangnya. Kelompok orang Bone ini rupanya berhasil dipengaruhi oleh bekas raja Bone (wanita), Batararitoja, yang lari ke Makassar, dan mendapat perlindungan dari Belanda. Akibat kekalahannya itu, Lamaddukkelleng kembali ke Wajo.

Arung Mato Wajo Lamaddukkelleng adalah seorang raja Wajo yang hampir seluruh masa pemerintahannya dipenuhi oleh usaha-usaha untuk mengusir Belanda dari bumi Sulawesi (Selatan), di samping itu juga berusaha untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Karena itu raja ini pernah melakukan serangan ke beberapa kerajaan lainnya, seperti ke daerah Mandar.

Akan tetapi usahanya dapat dikatakan tidak berhasil. Sampai pada saat dia mengundurkan diri pada tahun 1754 beliau tetap pada usaha tersebut. Akan tetapi pengunduran dirinya cukup tragis, yaitu karena beliau kecewa atas makin kurangnya dukungan yang diperolehnya dari rakyat atas usaha-usaha perlawanannya terhadap Belanda, dan usaha perluasan kekuasaan kerajaan Wajo itu.

Meskipun negara kerajaan Gowa telah berada di bawah kekuasaan Belanda, namun usaha untuk melakukan perlawanan masih tetap berlanjut. Adanya kenyataan ini mendorong pimpinan kompeni Belanda di Batavia untuk mengirimkan sebuah ekspedisi militer ke Makassar dengan tujuan untuk menghancurkan kekuatan kerajaan Gowa, dan sekutu-sekutunya. Terbatasnya kekuatan kompeni Belanda tidak memungkinkannya untuk tetap menguasai dan mengawasi secara langsung daerah-daerah yang nya diserahkan kembali kepada seorang raja/penguasa setempat tetapi dengan status "pinjaman". Kenyataan inilah yang tetap membuka peluang bagi raja-raja setempat tersebut untuk tetap berusaha memperkuat kembali kedudukannya. Di antara raja-raja yang menerima daerah yang berstatus pinjaman itu adalah raja Bone. Kedudukan raja Bone di antara raja-raja di Sulawesi (Selatan), adalah cukup penting, dan mempunyai pengaruh yang cukup besar. Dia cukup mempunyai pengaruh untuk mengajak raja-raja lainnya untuk melakukan penentangan terhadap Belanda. Hal yang demikian pernah dibuktikan dengan usaha pemboikotannya terhadap perdagangan budak yang dilakukan oleh kompeni Belanda. Tindakan pemboikotan ini dibantu oleh beberapa raja dari kerajaan lainnya di Sulawesi (Selatan). Bahkan mengancam untuk menghancurkan benteng kompeni Belanda, "Rotterdam".

Pada tahun 1811 terjadi perubahan penguasa kolonial di Indonesia. Wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi (Selatan), tidak lagi diperintah oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi oleh pemerintah kolonial Inggris. Akan tetapi perubahan itu tidaklah membawa arti yang penting bagi negara-negara kerajaan di Sulawesi (Selatan). Pola penjajahan Inggris tetap sama dengan Belanda. Pertentangan-pertentangan yang sering terjadi antara negara yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh pemerintah kompeni Belanda, juga tetap digunakan oleh kompeni Inggris di dalam usahanya untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaannya. Sebaliknya tidak semua negara di Sulawesi (Selatan) dapat menerima Inggris sebagai penguasa baru di wilayahnya. Kerajaan Bone adalah salah satu di antaranya. *Arumpone* menolak penyerahan wilayah kekuasaan Belanda kepada Inggris karena beranggapan bahwa wilayah kerajaan bukanlah daerah kekuasaan

mutlak dari kompeni Belanda. Dia beranggapan negaranya adalah kerajaan "merdeka". Sikap raja Bone ini disetujui sepenuhnya oleh kerajaan Tanete, dan Suppa. Sikap keras ketiga negara itu terhadap kompeni Inggris ditunjukkan dengan menolak undangan untuk menghadiri upacara penandatanganan penyerahan kekuasaan dari kompeni Belanda kepada kompeni Inggris. Dengan demikian hubungan antara negara kerajaan Bone, Tanete, dan Suppa dengan kompeni Inggris dalam keadaan yang cukup tegang. Karena sikap ketiga negara itu tetap tidak berubah, maka kompeni Belanda melangkah dengan tindakan kekerasan dalam bentuk pertempuran di antara mereka. Gowa, dan Sidenreng, oleh karena keterikatan pada perjanjiannya tetap memihak kepada Inggris. Akan tetapi Bone, Tanete, dan Suppa berhasil memperoleh dukungan dari negaralainnya, seperti Sawitto, Alitta, dan Rappeng. Keadaan yang demikian berlangsung sampai datangnya kembali Belanda ke Sulawesi (Selatan) pada tahun 1816.

Kembalinya Belanda ke Sulawesi Selatan tidaklah merubah sikap penentangan negara-negara Bone, Tanete, dan Suppa terhadap kekuasaan asing. Lain halnya dengan kerajaan Gowa yang ketika itu lebih bersikap lunak menghadapi kekuasaan Belanda. Di lain pihak kerajaan Soppeng, dan Wajo menyatakan dirinya sebagai negara-negara yang merdeka. Kenyataan menunjukkan bahwa kekuasaan Belanda di Sulawesi Selatan tidak cukup mampu untuk menekan sama sekali kekuasaan raja-raja kerajaan di Sulawesi Selatan. Tampak dengan jelas bahwa situasi Sulawesi (Selatan) cukup sulit untuk dikuasai oleh penguasa kolonial Belanda. Ketika Gubernur Jenderal Van der Capellen tiba di Makassar pada bulan Agustus 1824, ia menyaksikan bahwa kekuatan Belanda di situ hanya terdiri dari 30 orang opsir dan 371 orang serdadu. Kekuatan ini masih harus dibagi-bagi penempatannya di beberapa pos yang tersebar di daerah-daerah yang saling berjauhan. Agar kekuatannya dapat bertambah, maka penguasa kolonial melakukan pendekatan kepada beberapa raja yang dapat atau bersedia memihak kepadanya.

Di dalam perkembangannya kemudian penguasa kolonial Belanda berkehendak untuk melakukan perubahan terhadap isi perjanjiannya Bongayya. Kehendak yang demikian ini tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari raja-raja di Sulawesi (Selatan). Yang menerima undangan untuk menghadiri pertemuan yang akan diadakan oleh Belanda ialah raja-raja Gowa, dan Sidendereng, sedang raja-raja Bone, Tanete, dan Suppa tidak bersedia hadir. Bahkan ketiga negara ini berusaha menghalangi usaha penanaman kekuasaan Belanda di seluruh wilayah Sulawesi (Se-

latan).

2. Jalannya Perang.

Adanya sikap yang demikian dari ketiga raja tersebut di atas, mendorong penguasa kolonial Belanda untuk mengirimkan ekspedisi militernya ke daerah-daerah tersebut. Pada tahun 1824 Belanda mengirimkan ekspedisi militernya ke wilayah Suppa, dan Tanete. Belanda berusaha untuk menaklukkan negara-negara ini dengan kekerasan. Kehendak yang demikian disambut oleh Tanete di bawah pimpinan rajanya, La Patau. Pada tanggal 16 Juli 1824 pasukan Belanda, di bawah pimpinan De Stuers, telah mendarat di dekat Ance, sebuah tempat di sebelah utara muara sungai Pancana. Rakyat Tanete di bawah pimpinan raja La Patau mencoba mempertahankan wilayah kerajaannya dari serangan tersebut, namun mereka gagal karena kekuatan yang tidak seimbang, dan alat persenjataan Belanda yang lebih baik. Di dalam pertempuran itu tiga orang serdadu Belanda berhasil ditewaskan, salah seorang di antaranya bernama Burger dengan pangkat Letnan. Ketika raja La Patau mengetahui ketidak seimbangan kekuatannya dengan pasukan Belanda, maka beliau mengundurkan diri ke daerah pedalaman yang lebih aman. Tahta kerajaan diserahkan kepada seorang saudara perempuannya yang bernama Da Eng Tanningsanga. Raja ini diakui kekuasaannya oleh Belanda dia bersedia menandatangani perjanjian perubahan perjanjian Bongayya seperti yang dikehendaki oleh Belanda.⁶⁵ Dengan demikian negara Tanete dikuasai oleh Belanda. Untuk menjaga perlawanan yang mungkin timbul lagi, Belanda mendirikan pos-pos di tempat-tempat yang strategis, seperti di pantai sebelah selatan sungai Pancana, dan benteng-benteng di Mandalle, Segeri.

Bekas raja La Patau kemudian mendapat pengampunan, bahkan kemudian diangkat kembali sebagai *Arung Matoa*. Akan tetapi raja ini tidak dapat dikendalikan oleh Belanda; ini ternyata kemudian bahwa beliau kembali melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda. Kemudian timbul lagi bentrokan antara La Patau dengan Belanda. Penentangan La Patau berlangsung, terus sampai pada saat dia harus meninggalkan daerahnya karena tidak mampu menghadapi kekuatan Belanda yang dibantu oleh beberapa orang raja lainnya. Dia kemudian digantikan oleh Larumpung Megga Dulung Lamura yang diangkat oleh Belanda.⁶⁶

65 Abd. Razak Daeng Patunru, "Sedjarah Kerajaan Tanete", di dalam *Bingkisan, jaja-san Kebudayaan Sulawesi Selatan & Tenggara*, Oktober 1967, hal. 3

66 *Ibid.*, hal. 4

Di daerah Suppa para pasukan kerajaan yang dipimpin oleh rajanya bersiap untuk menghadapi kedatangan pasukan Belanda. Pada 4 Agustus 1824 pasukan-pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Laut Buys mendarat di Pare-Pare, yaitu kota pelabuhan yang terletak beberapa kilometer (sebelah selatan) dari Suppa. Kedatangan mereka disambut oleh pasukan Suppa dengan perlawanan yang kuat. Dengan itu terjadilah pertempuran dengan pasukan-pasukan Belanda. Dalam pertempuran ini, pasukan Belanda memperoleh bantuan dari pasukan negara Sidenreng.

Walaupun demikian ternyata pasukan Belanda yang dibantu oleh pasukan Sidenreng itu tidak berhasil menaklukkan pasukan-pasukan kerajaan Suppa. Karena pasukan mereka yang berjumlah kurang lebih 4000 orang itu ternyata telah siap menghadapi serangan Belanda itu. Bahkan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Reeder terpaksa menderita kekalahan, dan meninggalkan 2 orang opsir, dan 11 orang serdadu biasa ditambah dengan 31 orang yang luka-luka.

Dari jalannya pertempuran yang digambarkan di atas nampak bahwa pasukan Suppa cukup kuat, dan tangguh untuk mempertahankan diri dari serangan dari pasukan gabungan Belanda-Sidenreng. Kekalahan yang diderita oleh pasukan Belanda itu menyandarkan pimpinan Militer yang berkedudukan di Makasar bahwa Suppa cukup kuat untuk dapat ditaklukkan oleh pasukan ekspedisi yang dikirimkannya itu. Kesadaran itu mendorong pimpinan militer Belanda tersebut untuk berusaha membangun kembali kekuatan pasukan gabungannya dengan kerajaan Sidenreng, yang dimaksudkannya untuk dikirimkan kembali ke Suppa.

Penyerangan kembali ke Suppa dilakukan pada bulan Agustus 1824. Dalam penyerangan itu kelihatan dengan jelas kelemahan kekuatan pasukan Belanda. Dengan kekuatan yang hanya terdiri dari 270 orang, De Stuers sebagai pimpinan pasukan Belanda itu harus berusaha sekuat-kuatnya untuk mempertahankan kubu pertahanannya. Ternyata usaha mempertahankan diri dari serangan yang dilakukan oleh pasukan Suppa berhasil dilakukan oleh pasukan Belanda.

Pasukan Suppa yang melakukan penyerangan itu dapat dipukul oleh mereka. Walaupun demikian, Belanda harus menerima kenyataan pahit, yaitu bahwa di dalam pertempuran beberapa orang perwiranya telah tewas, seperti Letnan Bauff, Van Pelt, dan Banhoff. Pasukan Suppa terus melakukan perlawanan, dan dengan bersembunyi di dalam lobang-lobang, dan parit-parit, pasukan Suppa melakukan berbagai gangguan terhadap pasukan Belanda yang sedang

berjaga-jaga di pos-pos atau pun terhadap mereka yang sedang berpartroli.

Jika dilihat dari segi geografis Suppa hanyalah merupakan sebuah negara kecil. Namun demikian perlawanan yang dilakukannya terhadap penguasa kolonial Belanda cukup tangguh dan menyulitkan posisi Belanda di Sulawesi (Selatan). Oleh karena itu pimpinan militer Belanda mengirimkan sebuah pasukan bantuan untuk memperkuat pasukan ekspedisi yang telah dikirimkan itu. Pada tanggal 23 Agustus 1824 sebuah kapal perang yang membawa 110 orang serdadu infanteri yang membawa serta 10 pucuk meriam tiba di pelabuhan Pare-Pare. Suppa kemudian dikepung oleh Gabungan pasukan Belanda dan Sidenreng yang berkekuatan kurang lebih 2000 orang, sedang Belanda hanya terdiri dari 70 orang saja. Tetapi usaha kali ini pun berhasil digagalkan. Pasukan Sidenreng yang membantu Belanda mengundurkan diri, karena salah seorang anak dari pimpinannya menderita luka-luka berat.

Kegagalan ini pun belum juga mampu untuk mendorong Belanda mengurung maksudnya untuk menghancurkan Suppa. Ternyata Belanda masih berusaha untuk mengulangi kembali penyerangannya yang sudah sekian kali gagal itu.

Dengan kembali dibantu oleh pasukan Sidenreng, Belanda kembali menyerang Suppa. Walaupun menggunakan jumlah pasukan yang lebih besar, namun serangan kali ini pun gagal untuk menaklukkan Suppa. Salah satu penyebabnya adalah gairah perang di dalam diri pasukan-pasukan Sidenreng sangat menurun, sehingga mengharuskan pasukan Belanda untuk bersandar pada kekuatannya sendiri. Sebagai akibatnya Belanda harus mundur, dan kehilangan 22 orang serdadunya yang tewas, seorang di antaranya berpangkat Letnan, dan 71 orang serdadu lainnya luka-luka. Usaha yang sekian kali gagal itu memaksa De Stuers kembali ke Makassar pada tanggal 6 Oktober 1824. Untuk mengawasi daerah kerajaan Suppa ditinggalkannya sebanyak 100 orang serdadu.

Negara Bone juga tetap melanjutkan usaha perlawanannya terhadap kekuasaan Belanda. Diserangnya pos-pos Belanda di Pangkajene, demikian pula dihancurkannya pos Belanda yang terletak di La'bbakang. Didudukinya negara Tanete, dan mengangkat kembali raja yang telah dipecat oleh Belanda. Ketika itu pasukan-pasukan Bone yang berjumlah 3000 telah mendesak satu detasemen kecil pasukan Belanda yang berada di Pancana. Pasukan Belanda ini tentu saja akan dihancurkan oleh pasukan Bone sekiranya tidak dibantu oleh sebuah tembakan dari kapal perang Belanda yang sengaja dikirimkan ke pantai Bone.

Dalam bulan Oktober pasukan Bone menyaksikan gerakan yang dilakukan oleh pasukan-pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Le Clerq, komandan pasukan Belanda di Maros; kekuatannya 7 orang opsir, 10 orang serdadu berkuda, dan yang membawa serta 173 buah meriam. Pasukan ini bergerak. Pasukan ini berkedudukan di Bulu Seppong yang terletak kira-kira 24 kilometer dari Makassar. Gerakan pasukan Belanda ini dihadap oleh pasukan-pasukan Bone, dan terjadilah pertempuran di antarakeduanya. Dalam pertempuran-pertempuran ini pasukan Bone memperoleh kemenangan. Belanda meninggalkan beberapa orang tewas, sebaliknya pasukan Bone berhasil merampas 2 pucuk meriam pasukan Belanda.

Dengan kemenangannya itu, maka pasukan Bone menguasai jalan penting yang menghubungkan Makassar dan Maros yang terletak di sebelah utara Makassar.

Keadaan pasukan Bone memang sangat kuat dan mampu melakukan penyerangan-penyerangan yang sangat membahayakan. Kegiatannya untuk menghadapi Belanda tidak dihentikannya, bahkan dipergiatnya. Para penguasa yang diangkat oleh Belanda diusirnya dari daerah kekuasaannya, seperti yang dilakukannya terhadap diri penguasa di Segeri.

Pasukan-pasukan ekspedisi dikirimkannya ke daerah-daerah lainnya, dan mendekati pos-pos pasukan Belanda di sebelah selatan Bonthain, dan Bulukumba. Daerah pengaruh kekuasaan kerajaan Bone makin meluas, dan hampir meliputi seluruh Semenanjung Sulawesi Selatan. Dengan demikian keadaan Belanda makin sulit dan terjepit. Situasi yang membahayakan ini mendorong Gubernur Jenderal untuk mengerahkan kekuatan militer yang masih ada padanya. Diperkuatnya pos-pos yang masih berada di dalam kekuasaannya. Direncanakannya penyerangan terhadap pasukan Bone, bila musim hujan tiba kelak. Diawasinya jalan yang menghubungkan daerah-daerah Leong-Leong dan Semangi dengan Makassar, yakni dengan mendirikan 3 buah benteng yang diperkuat dengan pasukan-pasukan bantuan yang telah didatangkan. Demikian pula benteng Belanda di Maros yang dipimpin oleh Mayor Van Coeshoors diperkuat dengan 253 orang serdadu.

3. Akhir Perang.

Dari kenyataan yang diuraikan di atas, nampak bahwa Bone ternyata merupakan lawan yang cukup kuat bagi Belanda. Karena itu tidak mustahil jika Belanda akan melakukan pengiriman ekspedisi-ekspedisi militer besar-besaran untuk mengalahkan perlawanan yang dilakukan oleh Bonelah an Bone tersebut. Di lain fihak kerajaan Bone berusaha sekuatnya untuk meng-

hadapi perluasan kekuasaan Belanda di Sulawesi (Selatan); karena itu akan berarti membahayakan kemerdekaan kerajaan-kerajaan bumiputra di Sulawesi (Selatan). Bone sebagai penghalang utama di dalam usaha perluasan kekuasaan Belanda di Sulawesi (Selatan), disadari sepenuhnya oleh pemerintah pusat kekuasaan Belanda di Batavia. Akhirnya Belanda mengirimkan pasukan ekspedisi yang berkekuatan besar yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Van Geen. Tugas utamanya ialah memperbesar kekuatan pasukan Belanda, dan menarik simpati dari sebanyak mungkin penguasa-penguasa setempat, untuk menghadapi perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan Bone,

Pada tanggal 20 Januari 1825 Van Geen telah berada di Makassar dan menyiapkan rencana pemberangkatan pasukan-pasukan ekspedisinya. Rencana penyerangannya diatur sebagai berikut: sebagian pasukan didaratkan di berbagai tempat, dan akan dilakukan tembakan-tembakan meriam terhadap daerah-daerah kedudukan pasukan Bone. Sebagian lagi ditugaskan untuk melindungi pos-pos Belanda. Baru setelah itu usaha selanjutnya akan diarahkan menguasai daerah-daerah pedalaman dengan tujuan agar daerah pantai Bone dapat diduduki oleh pasukan Belanda.

Sementara masih menunggu pasukan yang didatangkan dari Maluku dan Madura, Van Geen telah mengumpulkan 46 orang opsir, dan 853 serdadu biasa di Makassar. Dalam persiapan ekspedisi ini ternyata Van Geen mengalami kesulitan karena, di samping perlengkapan yang sangat terbatas, juga karena faktor kesehatan dari sejumlah pasukannya sangat buruk. Kesulitan lainnya adalah adanya perbedaan pendapat antara Van Geen dengan pejabat Belanda lainnya, yaitu dengan Van Schelle dan Tobas, yang masing-masing menjadi komisaris-komisaris Belanda di Makassar.

Perbedaan pendapat di antara ketiga pejabat pemerintah Belanda tersebut berpangkal pada pelaksanaan pengiriman ekspedisi. Di satu pihak kedua komisaris Belanda di Makassar itu menghendaki agar pengiriman ekspedisi ke Tanete, dan Suppa lebih didahulukan; di lain pihak Van Geen pengiriman itu justru ke Bone terlebih dahulu, karena di antara ketiga kerajaan yang menentang Belanda itu, kerajaan yang terbesar dan terkuat. Mendahulukan penaklukan kerajaan Bone akan lebih mempermudah penaklukan dari kerajaan-kerajaan Suppa dan Tanete.

Meskipun kedua komisaris Belanda tersebut di atas menyarankan untuk mendahulukan penyerangan kepada kedua negara kecil Suppa, dan Tanete, tetapi di dalam prakteknya Van Geen lebih mementingkan agar pengiriman ekspedisi ke Bone lebih didahulukan. Untuk maksud itu Van

Geen dengan segera mengirimkan Mayor Vander Wijck ke Maros untuk melihat keadaan pertahanan Belanda di situ. Dalam pada itu pasukan-pasukan Bone telah bersiap untuk menghadapi penyerangan yang akan dilakukan oleh pasukan Belanda itu. Jalan yang menghubungkan Leong-Leong dengan Semangi diawasinya dengan ketat dengan membangun benteng-benteng pertahanan di daerah itu, yang dijaga oleh kurang lebih 600 orang. Dari arah sebelah utara pasukan Bone telah siap, apabila diperlukan untuk melakukan penyerangan.

Akhirnya pasukan Van Geen yang bergerak ke daerah selatan berhadapan dengan pasukan Bone yang berkedudukan di Bonthain. Dalam pertempuran ini pasukan Belanda berhasil mendesak pasukan Bone. Demikian pula pertahanan Bone di Bulukumba terpaksa ditinggalkan, dan berhasil diduduki oleh pasukan Belanda. Pertempuran terjadi pula ketika pasukan Bone yang berkedudukan di benteng-benteng Kajang dan Sinjai mendapat serangan dari Belanda. Kesemua benteng kerajaan Bone itu pada akhirnya jatuh ke tangan Belanda, walaupun telah diusahakan untuk dipertahankan oleh pasukan Bone. Untuk menjaga benteng-benteng yang telah diduduki itu, Belanda menggunakan tenaga-tenaga bantuan yang diperoleh dari Gowa dan Maluku.

Salah satu faktor yang memperlemah kekuatan Bone ialah diserahkannya kedudukan raja Tanete kepada seorang raja wanita yang berpihak kepada Belanda. Dengan demikian Tanete dapat dijadikan sekutu Belanda. Dengan Sidenreng, dan Tanete sebagai sekutunya, Belanda mengharapkan akan dapat mengimbangi kekuatan dari negara-negara lainnya yang menentangnya, seperti Suppa, Segeri, La'bbakang, dan Pangkajene.

Negara Segeri juga tetap melakukan perlawanan terhadap pendudukan Belanda. Salah seorang pemimpin perlawanan yang terkenal, dan sangat disegani ialah La Sameggu Daeng Kalabbu. Akan tetapi pada akhirnya perlawanan ini pun berhasil dipatahkan oleh kompeni Belanda.

Demikianlah gambaran perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Sulawesi (Selatan), sepanjang abad ke-19. Dari gambaran tersebut nampaklah kepada kita bahwa sepanjang usaha penanaman kekuasaannya di wilayah Sulawesi (Selatan), Belanda telah menghadapi sekian banyak perlawanan, baik yang dilakukan secara besar-besaran, maupun kecil-kecilan.

Usaha perlawanan ini tetap berlangsung sampai pada akhir ke-19, dan awal abad 20. Misalnya seperti apa yang dilakukan oleh La Sinrang

dari kerajaan Sawitto, dan Pong Tiku di Tana Toraja.

E. BANJAR

1. Pendahuluan

Perlawanan yang terjadi di Kalimantan Selatan, di wilayah negara Banjar berlangsung hampir setengah abad lamanya. Jika dilihat coraknya, para perlawanan dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu perlawanan yang ofensif yang berlangsung dalam waktu relatif pendek (1859 - 1863)⁶⁷, dan perlawanan yang defensif yang mengisi seluruh perjuangan selanjutnya (1863 - 1905).

Perlawanan ini meletus pada tahun 1859 karena rakyat dan beberapa bangsawan di Banjar merasa tidak senang dengan adanya pengangkatan Pangeran Tamjidillah, seorang tokoh yang tidak disenangi karena terutama sifat-sifatnya, menjadi Sultan Banjar. Tetapi, kalau ditinjau lebih jauh, di kalangan rakyat terutama, sudah lama terpendam rasa tidak senang terhadap penguasa karena persoalan pajak dan kerja wajib yang memberatkan mereka. Pajak yang semakin berat ini berhubungan dengan semakin kecilnya daerah kekuasaan kesultanan.

Penyempitan daerah Banjar dari waktu ke waktu berdasarkan suatu perjanjian dengan Belanda, berpangkal pada adanya hasil tertentu di daerah kesultanan yang dapat diperdagangkan. Hasil tersebut seperti: lada, rotan, damar, emas, dan intan. Hasil-hasil ini yang mengundang orang asing (Belanda, Inggris) datang ke tempat ini.

Guna mendapatkan hasil-hasil negara Banjar sebagaimana tersebut di atas, pada awal abad ke-17 datang pedagang Belanda. Dengan susah payah pedagang Belanda mendapatkan ijin untuk berdagang di sana. Akan tetapi kemudian mereka diusir, karena ternyata merugikan pedagang dari Banjar sendiri. Setelah kepergian pedagang Belanda, datang pula pedagang asing lain yaitu Inggris. Bangsa asing ini pun akhirnya mendapat nasib serupa dengan pedagang Belanda, yaitu bahwa mereka kemudian diusir dari wilayah negara

67 Orang Belanda menganggap bahwa perang itu hanya berlangsung antara tahun 1859 - 1863. (W.A. van Rees, *De Banjarmasinische Krijg van 1859 - 1863*, I, Arnhem, D.A. Theime, 1865). Tetapi Soeri Soeroto dalam tulisannya yang berjudul "Beratib Beameaal, suatu Pergerakan Keagamaan, di dalam Perang Banjar", *Bulletin Yaperna*, No.11, Th. III, 1976, berpendapat bahwa perang itu terus berlangsung sampai tahun 1905, yaitu setelah perlawanan dari rakyat Banjar sama sekali terpendam.

Banjar karena mereka juga ternyata merugikan pedagang orang asli.

Pada taraf ini, orang-orang asing dengan mudahnya diusir/dikalahkan oleh rakyat/penguasa Banjar karena dalam taraf ini kedudukan mereka belum kuat. Orang asing disana belum merupakan suatu kekuatan yang berarti, suatu kekuatan yang dapat menggoncangkan kewibawaan/ketenteraman di wilayah Banjar. Akan tetapi kemudian, kekuatan asing ini merupakan kekuatan yang menentukan kelangsungan hidup matinya Banjar.

Setelah pedagang Inggris meninggalkan negara Banjar pada dasawarsa ketiga abad ke-18, Banjar didatangi lagi pedagang Belanda. Sultan Tahlilillah dapat didekati oleh Belanda dan pada tahun 1734 dapat diadakan suatu perjanjian di mana dalam perjanjian tersebut pedagang-pedagang Belanda diberikan fasilitas perdagangan.

Dengan adanya perjanjian tahun 1734 itu maka mulailah lagi muncul kekuatan asing yaitu Belanda di negara Banjar. Pada masa awal, hidup-matinya kekuatan asing ini sangat tergantung pada sikap dan tindakan Sultan. Guna membela kepentingan pribadi akhirnya kekuatan asing ini makin kuat dan besar tumbuhnya, sebaliknya pihak Banjar makin mengecil yang akhirnya hilang lenyap.

Setelah setengah abad Belanda diberikan ijin dan fasilitas perdagangan di sana, muncul kesempatan baik bagi Belanda untuk/berkembang, yaitu adanya pertentangan di kalangan para bangsawan mengenai kedudukan Sultan, yaitu antara Pangeran Nata dan Pangeran Amir.⁶⁸ Untuk dapat mempertahankan kedudukannya, Pangeran Nata meminta bantuan kepada Belanda.

Kesempatan baik ini tidak disia-siakan Belanda, dan dipenuhi permintaan tersebut. Dengan bantuan dari Belanda, akhirnya Pangeran Amir dapat ditangkap, kemudian dibuang ke Ceylon. Akan tetapi Pangeran Nata, sebagaimana disebutkan dalam perjanjian baru yang diadakan tanggal 13 Agustus 1787 sebagai balas jasa, harus menyerahkan sebagian wilayah kesultanan kepada Belanda seperti daerah-daerah: Tanah Bumbu, Pegatan, Kutai, Bulongan, dan Kotawaringin. Sedangkan wilayah negara lainnya

68 Pangeran Nata adalah paman ipar Pangeran Amir yang tetap menjadi Sultan setelah kakak Pangeran Amir yaitu Pangeran Abdullah terbunuh atas perintah Pangeran Natta. Semula Pangeran Nata menjadi Wali dari Pangeran Abdullah karena Pangeran Abdullah masih kecil. Pangeran Nata bergelar Sultan Tamjidillah III dan oleh rakyat diberi gelar Panembahan Batu. Pangeran Amir merasa lebih berhak atas tahta itu dan mengadakan serangan terhadap Pangeran Nata.

tetap dikuasai Sultan tetapi sebagai pinjaman.⁶⁹

Dengan adanya perjanjian tahun 1787, daerah kekuasaan Sultan menjadi berkurang. Belanda mulai saat itu ternyata tidak hanya sekedar berusaha untuk memperoleh fasilitas dalam perdagangan, tetapi telah menjurus ke arah penguasaan sesuatu daerah.

Berkenaan diperintahnya bekas daerah-daerah Belanda oleh Inggris (1811 – 1816), maka daerah-daerah Belanda di Kesultanan Banjarmasin ini pun dikuasai oleh Inggris. Akan tetapi setelah Inggris meninggalkan Banjarmasin tahun 1816, Sultan Sulaiman (memerintah tahun 1808-1825) mengadakan perjanjian baru dengan Belanda pada tanggal 1 Januari 1817, yang isinya menyebutkan penyerahan daerah-daerah kesultanan kepada Belanda. Daerah-daerah itu ialah : Dayak, Sintang, Bakumpai, Tanah Laut, Mendawai, Kotawaringin, Lawai, Jelai, Pegatan, Pulau Laut, Pasir, Kutai, dan Berau.⁷⁰

Selain pertentangan antar bangsawan di pusat pemerintahan, kericuhan yang terjadi di daerah-daerah juga dijadikan alasan oleh Belanda untuk mengadakan intervensi. Seperti kericuhan yang terjadi di Mrabahan dan Tanah Dusun pada tahun 1825 yang sedikit mengkhawatirkan Belanda. Untuk mengatasi kesulitan, maka diadakan perjanjian tambahan baru dengan Sultan dan daerah tersebut kemudian menjadi milik Belanda.

Perjanjian baru lagi yang dilakukan antara Sultan Adam Alwasih Billah (memerintah tahun 1825-1857) dengan Belanda pada tanggal 4 Mei 1826 memberi kesempatan kepada Belanda untuk memperoleh daerah yang lebih luas lagi. Seluruh daerah kesultanan, kecuali daerah Hulu Sungai, Martapura, dan kota Banjarmasin, masuk dalam kekuasaan Belanda. Selain itu dalam perjanjian tersebut disebutkan adanya pemberian kekuasaan kepada Belanda untuk menentukan personalia dalam pengangkatan pejabat kesultanan.

Guna menguatkan kedudukan Belanda di negara Banjarmasin agar tidak kalah dengan Inggris, Belanda mengangkat seorang Gubernur. Pada tahun 1845 Gubernur Weddik mengadakan perjanjian dengan Sultan untuk memperbaharui perjanjian tahun 1826. Dalam perjanjian ini ditetapkan batas-batas kesultanan yang baru dan Belanda juga mendapat ijin untuk mengerjakan tambang batu arang di distrik Riam.

69 Kementerian, Penerangan Republik Indonesia, *Propinsi Kalimantan*, Djakarta, hal. 336

70 Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Ibid.*, hal. 367.

Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa penyempitan daerah kesultanan mempunyai pengaruh terhadap keadaan sosial-ekonomi penguasa baik penguasa di tingkat tinggi maupun rendah. Hal ini disebabkan karena pendapatan para penguasa ini adalah hasil penarikan pajak dan kerja wajib terhadap rakyat di wilayahnya. Dengan menyempitnya daerah kesultanan maka pajak yang dapat dikumpulkan menjadi kecil. Sejak sekitar tahun 1824 sudah disinyalir bahwa penghidupan mereka (penguasa) terasa lebih berat dan sukar. Tambahan pula adanya kontak dengan unsur-unsur kebudayaan barat, meningkatkan kebutuhan mereka. Untuk mengatasi kesulitan ini jalan yang ditempuh oleh penguasa ialah dengan menaikkan pajak yang dipungutnya.

Perlu dikemukakan, bahwa seperti halnya di dalam masyarakat tradisional umumnya, masyarakat Banjar dapat dianggap mempunyai dua kelas. Sebagian terbesar adalah golongan bawah, yang diperintah, sedangkan sebagian lainnya yang hanya sedikit adalah golongan atas yaitu golongan yang memerintah. Termasuk dalam golongan yang belakangan disebutkan adalah keluarga mereka. Di puncak struktur sosial ini terdapat kelas yang memerintah secara turun-temurun, terdiri dari Sultan dan sanak-keluarganya. Di bawahnya adalah golongan agama, kemudian pejabat-pejabat birokratis, dan yang paling bawah adalah kelas rakyat biasa. Golongan rakyat biasa ini terdiri dari pedagang dan orang-orang yang produktif.

Dalam golongan rakyat biasa, sebagian besar terdiri dari orang-orang yang produktif, yaitu suatu golongan di mana mereka menghasilkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Barang-barang itu seperti hasil-hasil pertanian, ikan, kerajinan tangan. Sedangkan golongan di atasnya, sebagaimana telah disinggung di atas hidupnya terutama dari penarikan dari berbagai macam pajak yang dipungut dari rakyat. Pajak-pajak itu umumnya dipungut langsung oleh petugas-petugas pajak dengan perantara-an dan bantuan kepala desa masing-masing. Dengan persetujuan kepala desa, petugas pajak dapat menentukan kebijaksanaan sendiri baik mengenai jumlah maupun cara penarikannya. Dengan kekuasaan yang legal yang diterimanya mereka akan mampu memasukkan jumlah pajak yang besar. Mereka berkeliling dengan pengawalan yang kuat. Selama dalam tugas mereka menjadi tanggungan penuh desa yang didatangi dan tidak akan pergi sebelum pajak yang dipungutnya terbayar. Untuk menghindari kesulitan, berupa harus menjamin lebih lama atau pun membayar denda, maka ada kecenderungan kuat untuk segera membayar jumlah pajak yang diminta oleh petugas pajak itu. Daerah yang kaya dikenakan pajak kepala yang tinggi.

Selain pajak, rakyat juga dikenakan kerja-wajib. Kewajiban itu ada untuk kepentingan golongan yang berkuasa. Dengan demikian maka tidak mengherankan kalau persoalan pajak ataupun kerja-wajib menjadi pangkal timbulnya kegelisahan sosial.

Di lain pihak, campur tangannya Belanda dalam urusan intern kesultanan yaitu dalam pengangkatan jabatan-jabatan penting, termasuk jabatan Sultan, membuat kegelisahan sosial ini semakin besar. Dalam hal ini bukan saja rakyat yang merasa tak senang, tetapi juga beberapa orang dari kalangan penguasa dari yang tingkat rendah sampai tinggi, yaitu Sultan.

Rasa tidak senang dalam hal campurtangan Belanda dalam urusan intern dimulai tahun 1851 yaitu ketika Mangkubumi meninggal dunia. Timbul perbedaan pendapat dalam penggantian jabatan ini. Sultan Adam menginginkan Prabu Anum (putranya yang ke-4), sedangkan Belanda tidak menyetujuinya dan yang diangkat adalah Pangeran Tamjidillah. (putra dari kakak Prabu Anum). Tidak setujunya Sultan Adam terhadap pengangkatan Pangeran Tamjidillah selain karena Pangeran Tamjidillah keturunan wanita bukan bangsawan, juga karena ia sangat menghina terhadap agama Islam.

Lepas dari masalah perbedaan pendapat di atas, timbul masalah baru yaitu sehubungan dengan meninggalnya Sultan Muda Abdurrahman pada tahun 1852⁷¹⁾ Sultan Adam menginginkan pengangkatan Pangeran Hidayat sebagai pengganti Sultan Muda. Pengangkatan ini di dasarkan atas perjanjian antara Sultan Adam dengan Pangeran Abdurrahman ketika dilangsungkan perkawinannya dengan Ratu Siti. Dan yang dicalonkan oleh Sultan Adam untuk menduduki Mangkubumi adalah Prabu Anum.

Keinginan Sultan Adam ini tidak disetujui oleh Belanda. Belanda menilai bahwa Pangeran Hidayat tidak cakap, tidak pernah bergaul, dengan Belanda, dan tidak pernah menolong Belanda dalam perdagangan. Belanda memaksa Sultan Adam mencabut usulnya dan menggantinya dengan Pangeran Tamjidillah. Demikian juga agar usulnya mengangkat Prabu Anum sebagai Mangkubumi, dicabut.

Dalam bulan Mei 1853, Sultan Adam mengirim utusan ke Jakarta untuk meminta agar Pangeran Tamjidillah dipecat sebagai Mangkubumi dan ditetapkan Pangeran Hidayat sebagai Raja Muda dan Prabu Anum sebagai Mangkubumi. Usaha ini akhirnya tidak dikabulkan oleh Belanda.

Guna mencapai cita-citanya, Sultan Adam menempuh jalan lain. Ia mengusulkan kepada Belanda agar Prabu Anum diangkat menjadi Raja Muda.

71 Menurut dugaan, atas perbuatan Prabu Anum.

Usul inipun ditolak. Karena penolakan itu, pada tahun 1855 secara diam-diam ia melantik Prabu Anum sebagai Raja Muda (Putra Mahkota). Dalam tahun itu juga Sultan Adam membuat Surat Wasiat, dimana surat tersebut boleh dibuka setelah ia meninggal. Isi surat wasiat itu ialah mengangkat Pangeran Hidayat sebagai penggantinya jika ia meninggal. Kepada anaknya sendiri, yaitu Prabu Anum, dan kepada cucunya, Pangeran Tamjidillah akan diancam mati jika menghalang-halangi maksudnya. Sehubungan dengan pengangkatan Prabu Anum dan pembuatan surat wasiat, maka Sultan Adam memecat Pangeran Tamjidillah sebagai Raja Muda ataupun Mangkubumi.

Akan tetapi kemudian pada bulan Mei 1856 datang surat pengesahan pengangkatan Pangeran Tamjidillah sebagai Raja Muda dan pemerintah Belanda memaksa Sultan Adam agar mengakui pengangkatan tersebut dan selanjutnya akan diangkat Mangkubumi yang baru. Prabu Anum dilarang meninggalkan Banjarmasin dan gerak geriknya diawasi.

Pada bulan Mei 1856 juga Sultan Adam mengajukan usul agar Pangeran Hidayat diangkat menjadi Mangkubumi sebagai mana juga dibutuhkan oleh Belanda. Usulnya diterima, dan pada bulan Agustus 1856 Pangeran Hidayat dilantik. Diajukannya Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi adalah siasat dari Sultan Adam guna mendinginkan hati rakyat yang menilai bahwa Prabu Anum dijadikan tawanan.

Sesudah pelantikan Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi, tanggal 1 Nopember 1857 Sultan Adam meninggal dunia. Dua hari kemudian, Pangeran Tamjidillah dilantik menjadi Sultan pengganti Sultan Adam.

Pengangkatan Pangeran Tamjidillah menjadi Sultan menimbulkan kekecewaan baik di kalangan sementara bangsawan maupun di kalangan rakyat. Kekecewaan itu disebabkan karena Pangeran Tamjidillah adalah anak Sultan Muda (Pangeran Abdurrahman) dengan Nyai Aminah (turunan Tionghoa). Ia amat dibenci baik oleh golongan kraton maupun rakyat. Kesukaannya mabuk, menyebabkan ia dimusuhi oleh golongan agama. Sedangkan Pangeran Hidayat adalah seorang yang sebenarnya berhak atas tahta, karena: Sebelum ia lahir telah dijanjikan oleh Sultan Sulaiman dan Sultan Adam untuk naik tahta sesuai dengan perjanjian antara Sultan berdua dengan Mangkubumi Nata sebelum ibunya kawin dengan Sultan Muda. Menurut tradisi, hanya Sultan yang ibunya seorang Ratu yang boleh menaiki tahta. Selain itu, Pangeran Hidayat mempunyai sifat yang baik, yaitu rendah hati, ramah-tamah, dan karenanya disenangi oleh rakyat. Dan, terakhir, adanya surat wasiat dari Sultan Adam bahwa dialah yang akan menggantikannya.

Kekecewaan di kalangan rakyat di Batang Balangan memperoleh saluran setelah Penghulu Abdulgani dengan terang-terangan mengecam peng-

angkatan Pangeran Tamjidillah. Suatu pengangkatan seseorang yang tidak berhak menjadi raja dipandang dari adat dan sebagai tanda kemerosotan kerajaan. Mereka lebih menaruh simpati kepada Pangeran Hidayat. Sebaliknya Belanda memandang pengangkatan Pangeran Tamjidillah lebih menguntungkan.

Kedudukan Pangeran Hidayat sejak diangkat jadi Mangkubumi pada tahun 1856, menjadi sulit. Waktu Pangeran Tamjidillah menggantikan Sultan Adam menjadi Sultan pada tahun 1857, Pangeran Hidayat merasa tersisihkan. Pendiriannya yang selalu bertentangan dengan Pangeran Tamjidillah juga menyulitkan kedudukannya sebagai Mangkubumi. Pangeran Prabu Anum yang waktu itu dicurigai oleh Belanda dapat ditangkap Belanda dengan menggunakan pengaruh Pangeran Hdayat sebagai Mangkubumi. Namun pembuangan Prabu Anum ke Jawa menimbulkan kekecewaan pada diri Pangeran Hidayat, karena menurut kesanggupan Residen Belanda bahwa Pangeran Prabu Anum hanya akan ditahan di Banjarmasin.

Kericuhan ini dijadikan Belanda untuk mencampuri urusan dalam Kerajaan Banjarmasin. Datanglah Kolonel Andresen, utusan pemerintah Belanda di Batavia (Jakarta), di Banjarmasin untuk mengetahui dari dekat sebab-sebab kericuhan. Andresen kemudian berkesimpulan bahwa Pangeran Tamjidillah yang tidak disenangi oleh rakyat adalah sumber kericuhan itu. Sultan Tamjidillah kemudian diturunkan dari tahta dan kekuasaan Kerajaan Banjarmasin diambil-alih oleh Belanda. Penentangan rakyat terhadap Sultan Tamjidillah kemudian beralih kepada pemerintah Belanda. Dalam situasi demikian Pangeran Hidayat akhirnya condong kepada rakyat.

2. Jalannya Perang

Perlawanan rakyat terhadap Belanda berkobar di daerah-daerah dipimpin oleh Pangeran Antasari yang berhasil menghimpun pasukan sebanyak 3.000 orang dan menyerbu pos-pos Belanda. Pos-pos Belanda di Martapura dan Pengaron di serang oleh Antasari pada tanggal 28 April 1859. Di samping itu, kawan-kawan seperjuangan Pangeran Antasari juga telah mengadakan penyerangan terhadap pasukan-pasukan Belanda yang dijumpainya. Pada saat Pangeran Antasari mengepung benteng Belanda di Pengaron, Kyai Demang Leman dengan pasukannya telah bergerak di sekitar Riam Kiwa dan mengancam benteng Belanda setempat. Bersama-sama dengan Haji Nasrun pada tanggal 30 Juni 1859 ia menyerbu pos Belanda yang berada di istana Martapura. Dalam bulan Agustus 1859 bersama Haji Buyasin dan Kyai Langlang, Kyai Demang Leman berhasil merebut benteng Belanda di Tabanio.

Pada tanggal 27 September 1859 pertempuran terjadi juga di benteng gunung Lawak yang dipertahankan oleh Kyai Demang Leman dengan kawan-kawan terhadap serangan Belanda. Dalam pertempuran ini kekuatan pasukan Demang Leman ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kekuatan musuh, sehingga ia terpaksa mengundurkan diri. Karena rakyat berkali-kali melakukan penyerangan gerilya, maka Belanda setelah beberapa waktu lamanya menduduki benteng tersebut, kemudian merusak dan meninggalkannya. Waktu meninggalkan benteng, pasukan Belanda mendapat serangan juga dari pasukan Kyai Demang Leman yang masih aktif melakukan perang gerilya di daerah sekitarnya.

Sementara itu Tumenggung Surapati yang telah menyanggupi Belanda untuk membantu menangkap Pangeran Antasari, setelah mengadakan perundingan di atas kapal *Onrust* pada bulan Desember 1859, ia dengan anak buahnya berbalik menyerang tentara Belanda yang berada di atas kapal tersebut, kemudian merebut senjata mereka dan menenggalamkannya. Benteng pertahanan Tumenggung Surapati di Lambang mendapat serangan dari Belanda dalam bulan Pebruari 1860. Serbuan yang kuat dari pasukan Belanda menyebabkan Tumenggung Surapati meninggalkan benteng tersebut.

Tumenggung Jalil yang mengadakan perlawanan di daerah Amuntai dan Negara mendapat serangan dari pasukan Belanda dengan bantuan Adipati Danureja, yang sejak semula setia kepada Belanda. Atas jasanya dalam turut mengalahkan Tumenggung Jalil, Danureja dijadikan Kepala Daerah Benua Lima. Nampaklah bahwa dalam perang ini Belanda menggunakan pejabat kerajaan yang pro padanya untuk menindas perlawanan.

Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa Pangeran Hidayat condong kepada rakyat. Karena sikapnya ini maka ia kemudian diturunkan dari kedudukannya sebagai Mangkubumi oleh Belanda. Dengan desakan Belanda melalui suratnya tertanggal 7 Maret 1860 yang berisi permintaan supaya ia menyerah dalam waktu 12 hari, mendapat jawaban tegas dari Pangeran bahwa ia tidak akan menyerah dan dengan demikian ia dianggap benar-benar memberontak terhadap Belanda.

Dengan kosongnya jabatan Sultan dan Mangkubumi dalam Kerajaan Banjarmasin, maka kerajaan dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 11 Juni 1860. Wilayahnya dimasukkan ke dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Karena tindakan pemerintah Hindia Belanda itu maka disamping perlawanan-perlawanan yang sedang berlangsung, di daerah-daerah timbul perlawanan-perlawanan baru, seperti di daerah Hulu Sungai, Tanah Laut, Barito, dan Kapuas Kahayan. Tempat-tempat seperti: Tembarang, Muning, Amawang, Gadung, dan Barabai dijadikan pusat-pusat perlawanan untuk

daerah Hulu Sungai, sedangkan di daerah Tanah Laut pusat perlawanan terdapat antara lain di Riam Kiwa, Riam Kanan, dan Tabanio.

Sudah barang tentu bahwa dengan meluasnya perlawanan rakyat ini pemerintah Hindia Belanda di Banjar menghadapi kesulitan. Perlawanan rakyat yang tersebar tersebut menyukarkan Belanda dalam menghadapinya. Meluasnya pengaruh perlawanan di kalangan rakyat diusahakan untuk dibatasi. Kepala-kepala daerah dan para ulama diberi peringatan agar mereka menunjukkan sikap setia kepada pemerintah Belanda dan sebaliknya agar mereka mengecam kaum pejuang. Peringatan tersebut dikemukakan dengan disertai suatu ancaman hukuman yang berat bagi siapa saja yang tidak mengindahkan.

Kepala-kepala daerah dan para ulama menjadi cemas karena adanya pengumuman tersebut. Namun kebanyakan di antara mereka tidak mau mengindahkan ancaman tersebut. Mereka melarikan diri dan bergabung dengan para pejuang. Sementara itu Pangeran Hidayat melakukan perlawanan dari daerah satu ke daerah lainnya bersama-sama orang-orang yang setia kepadanya. Pada tanggal 16 Juni 1860 Pangeran Hidayat bertempur untuk selama seminggu di Ambawang kemudian terpaksa mundur karena persenjataan Belanda ternyata lebih kuat. Pasukan Hidayat akhirnya sampai di Wang Bangkal. Tidak lama di sini pasukan diserang pasukan Belanda pada tanggal 2 Juli. Pasukan Belanda yang datang ke Wang Bangkal ini berasal dari posnya di Martapura. Dalam pertempuran inipun pasukan Pangeran Hidayat terdesak dan terpaksa mundur lagi. Selama dalam pengunduran ini pasukannya selalu mengadakan gangguan-gangguan terhadap pasukan-pasukan Belanda berupa penyerpagan secara gerilya. Mereka bertahan di tempat itu dan baru pada tanggal 10 Juli pasukan Hidayat pindah ke tempat lain setelah mendapat pukulan berat dari pasukan Belanda.

Sementara itu pasukan Pangeran Antasari di daerah lain masih giat melakukan serangan terhadap pos-pos Belanda. Pada permulaan bulan Agustus 1860 pasukan Antasari berada di Ringkau Katan dan pada tanggal 9 Agustus terjadi kontak senjata dengan pasukan Belanda. Pasukan Belanda berkekuatan 225 orang tentera bersenjatakan senapan berbayonet dan diperkuat oleh 125 orang hukuman yang dipersenjatai serta 10 orang penembak meriam. Dalam pertempuran itu pasukan Antasari dapat membunuh dan melukai beberapa orang tentera Belanda dan kemudian Pangeran Antsari bersama pasukannya mengundurkan diri dari Ringkau Katan. Kekalahan Antasari ini terutama karena datangnya bala bantuan Belanda yang bergerak dari amuntai melalui Awang menuju Ringkau Katan. Di Tameang Layang kemudian didirikan pos penjagaan Belanda yang dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan merembesnya kembali pasukan Antasari ke Ringkau Katan.

Gerakan cepat dari pasukan Pangeran Hidayat dari satu daerah ke daerah lain cukup menyulitkan Belanda untuk menghadapinya. Waktu pasukan Hidayat berada di Gunung Mandela dapat diketahui Belanda sehingga di datangkan pasukan sebanyak 140 orang dari pantai Ambawang bersenjatakan senapan berbayonet. Akan tetapi pasukan Belanda yang bermaksud akan menangkap Pangeran Hidayat tidak menjumpainya karena pasukan Hidayat sudah meninggalkan Gunung Mandela menuju Haroman. Terus pasukan Hidayat dikejar dengan dikirimkan 2 kelompok pasukan lain pada tanggal 20 Juli. Akan tetapi pasukan Hidayat tidak juga dijumpainya. Kecepatan gerak dari pasukan Hidayat membuat Belanda kesal. Pangeran Hidayat diancam bahwa ia akan tetap dianggap sebagai pemberontak dan akan ditindas jika ia tidak mau menyerahkan secepatnya.

Menyerahnya Kyai Demang Leman atas kemauannya sendiri pada Belanda pada tanggal 2 Oktober 1861 sedikit banyak memperlemah para pejuang. Penangkapan atas diri Pangeran Hidayat, yang kemudian diasingkan ke Jawa pada tanggal 3 Pebruari 1862 menimbulkan kekesalan pada diri Kyai Demang Leman dan juga dikalangan rakyat yang masih melakukan perlawanan. Tuntutan untuk pembatalan pengasingan ke Jawa oleh Kyai Demang Leman dan rakyat tidak mendapat perhatian dari pihak Belanda. Kyai Demang Lemah kesal dan melarikan diri dari lingkungan Belanda dan kemudian mengadakan perlawanan lagi.

Sementara itu Pangeran Antasari makin giat melakukan perlawanan, lebih-lebih setelah mendengar kabar tentang pengasingan Pangeran Hidayat, saudara sepupunya, ke Jawa. Rakyat menaruh kepercayaan kepada Pangeran Antasari untuk meneruskan perlawanan. Kemahirannya dalam pertempuran cukup memberi kepercayaan kepada para pengikut atas kepemimpinannya, seperti misalnya waktu ia mempertahankan benteng Tundakan pada tanggal 24 September 1861 bersama-sama kawan-kawan seperjuangannya, ialah Pangeran Miradipa dan Tumenggung Mancanegara. Demikian pula waktu ia bersama-sama Gusti Umar dan Tumenggung Surapati bertempur mempertahankan benteng di gunung Tongka pada tanggal 8 Nopember 1861. Karena kepercayaan ini maka pada tanggal 14 Maret 1862 rakyat mengangkat Antasari pemimpin tertinggi agama dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Sudah barang tentu gelar tersebut sangat besar pengaruhnya bagi kepemimpinan pangeran Antasari. Ia masih terus memimpin perlawanan terhadap Belanda sampai pada saat meninggalnya pada tanggal 11 Oktober 1862 di Hulu Teweh, tempat pertahannya yang cukup kuat.

Setelah meninggalnya Pangean Antasari perlawanan rakyat masih terus berlangsung dipimpin oleh teman-teman seperjuangan dan putra-putranya.

Kyai Demang Leman terus mengadakan perlawanan secara gerilya di sekitar Martapura. Aminullah memusatkan operasinya di perbatasan Pasir, sedangkan Pangeran Prabu Anum bergerilya di daerah Amandit. Demikian pula sekitar Khayahan Atas tetap tidak aman bagi Belanda karena gangguan dari para gerilyawan.

Kekuatan para pejuang diketahui oleh Belanda, yaitu terletak pada para pemimpin-pemimpin mereka. Oleh karenanya, pemimpin-pemimpin mereka selalu dicari untuk ditangkap ataupun dibunuh. Hal ini dapat dilihat misalnya usaha untuk menangkap Kyai Demang Leman. Atas bantuan kepala pelarian orang-orang Jawa, Kyai Demang Leman dan kawan-kawannya seperjuangan seperti Tumenggung Aria Pati di tempat persembunyiannya di gunung Pangkal dapat ditemui Pangeran Syarif Hamid yang dijadikan alat Belanda. Pangeran Syarif Hamid mau melakukan pekerjaan ini karena kepadanya dijanjikan akan dijadikan raja di Batu Licin jika sekiranya Kyai Demang Leman dapat ditangkapnya. Kyai Demang Leman akhirnya dapat ditangkap dan pada tanggal 17 Februari 1864 dibawa ke Martapura untuk menjalani hukuman gantung. Dengan tertangkap dan meninggalnya Kyai Demang Leman maka pihak pejuang kehilangan seorang pemimpin yang berani.

3. Akhir Perang

Putra-putra Pangeran Antasari, antara lain Pangeran Muhammad Seman (Gusti Matseman) tetap melanjutkan perjuangan ayahnya. Demikian pula beberapa pejuang lain tetap melanjutkan perlawanan. Haji Buyasin yang banyak berjasa dalam kerjasama dengan Pangeran Antasari dan Kyai Demang Leman akhirnya mengalami nasib yang malang juga. Pada tanggal 26 Januari 1866 waktu ia berusaha menyelamatkan diri dari Tanah Laut ke Tanah Dusun ditembak oleh Pembakal Buang yang menjadi alat pemerintah Hindia Belanda.

Sebagai penerus perlawanan dapat disebutkan antara lain Gusti Matsaid, Pangeran Mas Natawijaya, Tumenggung Surapati, Tumenggung Naro, dan Penghulu Rasyid. Mereka ini telah mengobarkan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda di perbatasan antara Amuntai, Kulua, dan Rantau. Meskipun perlawanan rakyat yang timbul di berbagai daerah itu tidak sekuat perlawanan-perlawanan pada masa Pangeran Antasari, namun perlawanan mereka cukup menghambat kemajuan Belanda dalam memperluas wilayahnya. Pemerintah Hindia Belanda mengira bahwa dengan menyerahnya putra-putra Pangeran Antasari daerah Dusun Atas dapat ditenangkan. Akan tetapi kenyataannya daerah sekitar Dusun Atas tetap melakukan perlawanan.

Pada tanggal 25 September 1864 Tumenggung Surapati dengan pengikutnya menyerang benteng Belanda di Muara Teweh, sehingga dua orang di antara penjaganya terbunuh. Karena kejadian ini maka pada bulan Maret 1865 di Muara Teweh didirikan pos pertahanan yang berkekuatan 4 orang Opsir, 75 serdadu dilengkapi dengan meriam 2 pon dan 2 mortir. Tumenggung Surapati mencoba menyerang benteng di Muara Teweh itu pada akhir tahun 1865, tetapi karena kekuatan pertahanan Belanda di situ cukup besar, maka usahanya tidak berhasil. Ia kemudian bergerak bersama pasukannya menuju Sungai Kawatan. Sementara itu tanggal 1 Nopember 1865 suatu pasukan Belanda bergerak sampai di Kuala Naru, untuk memutuskan jalan-jalan yang menuju ke tempat-tempat pihak pejuang di Kawatan. Sedangkan pasukan Belanda yang lain pada hari berikutnya berhasil mendekati Kawatan.

Pasukan Surapati yang berada di benteng Kawatan menembaki dengan meriam perahu-perahu Belanda yang mencoba mendekati benteng tersebut. Dalam pertempuran yang terjadi pasukan Surapati menderita kekalahan sehingga mengundurkan diri.

Dalam membicarakan perlawanan di daerah lain perlu disebut tokoh Demang Wangkang yang juga mempunyai pengaruh. Ia di Marabahan sepakat dengan Tumenggung Surapati untuk menyerang ibukota Banjarmasin. Pada tanggal 25 Nopember 1870 ia bersama pengikut sebanyak 500 orang meninggalkan Marabahan menuju Banjarmasin. Pertempuran terjadi di dalam kota, tetapi karena kekuatan Belanda cukup besar, maka Demang Wangkang menarik kembali pasukannya ke luar kota.

Demang Wangkang dan anak-buahnya tidak kembali ke tempat pertahanan semula di Marabahan, tetapi ke sungai Durrakhman. Tidak berapa lama di situ, pada akhir Desember 1870 datang pasukan Belanda yang kuat, terdiri dari 150 orang serdadu dan 8 orang Opsir. Pasukan Belanda ini sudah mendapat tambahan pasukan bantuan yang di datangkan dari Surabaya dan pasukan orang Dayak di bawah pimpinan Suto Ono. Sebelum tiba di Durrakhman, pasukan Belanda ini telah datang ke tempat pertahanan Demang Wangkang semula yaitu di Marabahan, tetapi ternyata kosong. Benteng Demang Wangkang di Durrakhman di dekati pasukan pemerintah Hindia Belanda. Terjadilah pertempuran dan dalam pertempuran ini Demang Wangkang menemui ajalnya.

Gusti Matseman pada bagian akhir bulan Agustus 1883 beroperasi di daerah Dusun Hulu. Ia dengan pasukannya kemudian bergerak ke Telok Mayang dan berkali-kali mengadakan serangan terhadap pos Belanda di Muara Teweh. Sementara itu Pangeran Perbatasari, menantu Gusti Matseman, mengadakan perlawanan terhadap Belanda di Pahu, daerah Kutai. Kekalahan

yang di deritanya menyebabkan Tumenggung Gamar di Lok Tunggul tidak berhasil, sehingga ia dengan pasukannya terpaksa mengundurkan diri ke Tanah Bumbu. Di tempat ini pertempuran terjadi lagi. Tumenggung Gamar gugur dalam salah satu pertempuran tahun 1886. Gusti Matseman masih terus mengadakan perlawanan di daerah Kahayan Hulu.

Gusti Matseman berusaha untuk mendirikan benteng di daerah hilir sungai Teweh. Usaha ini membuat Belanda kemudian memperkuat posnya di Kahayan dengan menambah pasukan baru, dan mendirikan lagi pos darurat di Tuyun. Dalam bulan September 1886 pasukan Gusti Matseman berusaha memutuskan hubungan antara kedua pos Belanda tersebut. Sementara itu benteng pejuang di Teweh makin diperkuat dengan datangnya pasukan bantuan dan bahan makanan yang diangkut melalui hutan. Namun di lain pihak pos Matseman ini terancam bahaya. Di sebelah utara dan selatan benteng muncul kubu-kubu baru Belanda yang berusaha menghalang-halangi masuknya bahan makanan ke dalam benteng.

Keadaan disekitar benteng Matseman makin kritis. Pada suatu ketika benteng diserang pasukan Belanda. Dalam pertempuran itu pasukan Gusti Matseman terdesak sehingga terpaksa meloloskan diri dan benteng jatuh ke tangan Belanda yang kemudian dibakar. Gusti Matseman masih terus melakukan perlawanan walaupun teman-teman seperjuangannya yaitu Gusti Acil, Gusti Arsat, dan Antung Durrakhman menyerah pada pemerintah Hindia Belanda. Perlawanan baru berhenti setelah ia gugur pada tahun 1905.

Dari seluruh uraian tersebut nampak jelas bahwa perlawanan yang terjadi di daerah Banjarmasin berlangsung cukup lama. Dengan menyerahnya ataupun meninggalnya pemimpin-pemimpinnya maka perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda menjadi lumpuh dan akhirnya padam sama sekali.

F. B A L I

1. Pendahuluan

Sebagaimana disebutkan di bab satu di Bali terdapat sejumlah negara yaitu: Buleleng, Karangasem, Klungkung, Gianjar, Badung, Jembrana, Tabanan, Mengwi, dan Bangli, Negara-negara ini masing-masing mempunyai kekuasaan sendiri dan merupakan negara merdeka.

Hubungan antara raja-raja di Bali dengan Belanda sebenarnya telah ada sejak abad ke-17. Tetapi hubungan ini bukanlah hubungan politik. Hubungan antara raja-raja Bali pada tahun 1827 dan seterusnya sampai 1831 dengan pemerintah Hindia Belanda hanyalah dalam bidang sewa-menyewa orang Bali untuk dijadikan bala tentara pemerintah Hindia Belanda. Hubungan politik

antara raja-raja Bali dengan pemerintah Hindia Belanda baru terjadi pada tahun 1941 tatkala raja Karangasem meminta bantuan dari pemerintah Hindia Belanda guna memulihkan kekuasaannya di Lombok. Hal ini memberi kesempatan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengikat negara itu dengan suatu perjanjian yang akan membuka pintu, untuk mengadakan hubungan politik dengan negara-negara di seluruh Bali. Pada tahun 1841 juga diadakan perjanjian dengan raja-raja Klungkung, Badung, Buleleng.

Jika dilihat isi perjanjian, nampak bahwa pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk meluaskan daerah kekuasaannya. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan antara lain, bahwa raja-raja Bali mengakui bahwa negara-negara Bali berada di bawah kekuasaan negara Belanda; raja-raja Bali tidak akan menyerahkan kerajaannya kepada bangsa Eropa lainnya; raja memberi ijin pengibaran bendera Belanda di daerahnya.

Suatu masalah yang menyulitkan hubungan antara Belanda dengan negara-negara di Bali adalah berlakunya hukum *tawan karang*, yaitu hak dari raja Bali untuk merampas perahu yang terdampar di pantai pada wilayah kekuasaannya. Hukum *tawan karang* ini telah menimpa kapal-kapal Belanda seperti yang dialami pada tahun 1841 di pantai wilayah Badung. Meskipun dalam tahun 1843 raja-raja Buleleng, Karangasem, dan beberapa raja lainnya telah menandatangani perjanjian penghapusan *tawan-karang*, tetapi ternyata bahwa mereka tidak pernah melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Pada tahun 1844 di pantai Prancak dan Sangsit terjadi pula perampasan terhadap kapal-kapal Belanda yang terdampar. Percekocan kemudian timbul antara negara-negara tersebut dengan Belanda. Raja-raja Bali dituntut agar mau menghapuskan hak tersebut.

Dalam tahun 1845 raja Buleleng menolak pengesahan perjanjian penghapusan hukum *tawan karang* yang diajukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dalam pada itu tuntutan Belanda agar raja Buleleng melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat pada tahun 1841 dan 1843, yaitu mengganti kerugian atas kapal-kapal Belanda yang dirampas dan menerima negara menjadi bagian dari Hindia Belanda, telah menimbulkan kegelisahan pada diri raja. Patih Buleleng, Gusti Ktut Jelantik, dengan tegas mengatakan bahwa tuntutan tersebut tidak mungkin diterima. Gusti Jelantik yang terkenal sangat menentang Belanda, mengetahui akibat yang akan terjadi dengan penolakan tuntutan pemerintah Hindia Belanda tersebut. Ia menghimpun pasukan negara menggiatkan latihan berperang, menambah perlengkapan dan persenjataan-nya guna menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sikap menentang dari negara Buleleng ini mendorong pemerintah

Hindia Belanda untuk mengeluarkan ultimatum pada tanggal 24 Juni 1846 yang berakhir dalam waktu 3 x 24 jam.⁷²⁾ Isi ultimatum antara lain menyebutkan keharusan raja Buleleng untuk mengakui kekuasaan Belanda, menghapuskan hak *tawan karang*, dan memberi perlin dungan terhadap perdagangan pemerintah Hindia Belanda. Batas waktu ultimatum sampai tanggal 27 Juni 1846 tidak dapat dipenuhi oleh raja Buleleng. Untuk memikirkan masalah itu raja membutuhkan waktu 10 hari. Gusti Jelantik yang diutus oleh raja untuk merundingkan hal itu dengan Dewa Agung dari Klungkung, telah menyatakan pendiriannya untuk tetap menentang tuntutan Belanda tersebut. Gusti Jelantik pernah menantang utusan Belanda yang kebetulan menghadap Dewa Agung. Kecuali Kerajaan Buleleng, Kerajaan Karangasem juga telah menyatakan sikap menentang pemerintah Hindia Belanda.

Situasi menjadi tegang. Dalam keadaan demikian Gusti Jelantik mempersiapkan prajurit kerajaan Buleleng dan memperkuat kubu-kubu pertahanan untuk menjaga kemungkinan apabila sewaktu-waktu Belanda mengadakan penyerangan. Sementara itu pada tanggal 27 Juni telah tiba di pantai Buleleng pasukan ekspedisi Belanda yang berkekuatan 1700 orang pasukan darat, terdiri dari 400 orang serdadu Eropa, 700 orang serdadu pribumi, 100 orang serdadu Afrika dan 500 pasukan bantuan dari Madura.⁷³⁾ Di samping pasukan darat juga diikuti sertakan pasukan laut yang menggunakan kapal-kapal pengangkut sewaan. Setelah diketahui bahwa raja Buleleng tidak memberikan jawaban atas ultimatum, pasukan Belanda mulai mengadakan pendaratan. Prajurit-prajurit Bali sementara itu telah bersiap-siap untuk menyambut serangan pasukan yang mendarat. Tembak-menembak mulai berlangsung. Tembakan-tembakan meriam dari kapal Belanda telah menyebabkan pasukan Bali mundur dari daerah pantai. Pertempuran meluas sampai di kampung-kampung dan sawah-sawah.

Pertahanan prajurit Bali yang berada di kampung-kampung dekat pantai satu demi satu akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Demikian pula benteng prajurit Bali di Buleleng setelah dipertahankan dengan gigih pada tanggal 28 Juni 1846 terpaksa ditinggalkan dan diduduki oleh pasukan Belanda. Dengan kekalahan prajurit Bali tersebut, terbuka kesempatan bagi pasukan Belanda untuk melanjutkan penyerangan terhadap Singaraja, ibukota Kerajaan Buleleng. Prajurit-prajurit Bali yang ada di Singaraja berusaha dengan keras untuk menghadapi serangan Belanda dan dengan gigih mencoba mempertahankan istana raja. Pertempuran di sekitar istana terjadi dengan sengitnya. Usaha pa-

72 A.W.P. Weitzel, *De Derde Militaire Expeditie naar het Eiland Balie in 1849*, Goerinchem, 1859, hal. 10, 76, 8-9

73 A.W.P. Weitzel, *Op.Cit.*, hal. 12

sukan Bali tidak berhasil karena kekuatan musuh terutama di bidang persenjataan jauh lebih baik. Istana raja akhirnya pada tanggal 29 Juni 1846 dapat diduduki oleh Belanda.⁷⁴⁾

Raja Buleleng dan Gusti Jelantik beserta pasukannya terpaksa mundur ke Jagaraga dan berdamai dengan Belanda. Dalam perjanjian perdamaian yang diadakan, Belanda mengajukan syarat, bawa di dalam waktu 3 bulan raja Buleleng harus sudah menghapuskan benteng-bentengnya yang pernah dipakai untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. Disamping itu ia tidak diperbolehkan mendirikan benteng baru. Raja Buleleng diharuskan pula mengganti $\frac{3}{4}$ jumlah biaya perang yang telah dikeluarkan oleh Belanda. Di dalam perjanjian yang diadakan pada tanggal 6 Juli 1846 itu juga disebutkan,⁷⁵⁾ bahwa Belanda diperbolehkan menempatkan serdadu-serdadu di Buleleng di dalam suatu benteng yang akan segera dibuatnya. Raja Karangasem mengikuti jejak Kerajaan Buleleng dan mengadakan perdamaian dengan Belanda. Ia diharuskan membayar $\frac{1}{4}$ bagian dari biaya perang yang telah dikeluarkan oleh Belanda.

Meskipun telah diadakan perjanjian, ini tidak berarti bahwa kedua kerajaan tersebut sepenuhnya tunduk. Adanya perjanjian itu oleh raja-raja Bali ternyata hanya dipakai sebagai siasat untuk mengulur waktu guna memperkuat diri. Pembayaran pengganti biaya perang seperti yang termuat dalam perjanjian, tidak pernah dilaksanakan oleh raja-raja Bali tersebut. Waktu pasukan ekspedisi Belanda ditarik ke Jawa, persiapan militer kerajaan-kerajaan Bali makin digiatkan. Raja Klungkung yang sangat berpengaruh pada kerajaan-kerajaan lainnya, juga menunjukkan sikap menentang pada Belanda. Belanda sendiri pernah menuduh raja tersebut sebagai orang yang menyukarkan usaha Belanda dan telah memberi perlindungan pada anggota pasukan Belanda yang melarikan diri.

Dari fakta-fakta tersebut terlihat jelas bahwa ketiga raja tersebut tetap menunjukkan sikap menentang terhadap Belanda. Penyerangan terhadap pasukan kecil Belanda yang ditinggalkan di Bali dan perampasan senjata mereka sering kali terjadi. Dalam hubungan ini Gusti Jelantik makin giat memperkuat pasukannya. Pertahanan di pantai Buleleng makin diperkokoh, sedangkan jalan yang menghubungkan pantai dengan ibukota dijaga prajurit-prajurit Bali yang bermarkas di kubu-kubu pertahanan. Meskipun menurut perjanjian 1846 ketiga kerajaan Bali tersebut harus mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Bali, tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa raja-raja

74 A.W.P. Weitzal, *Op.Cit.*, hal. 13

75 A.W.P. Weitzal, *Op.Cit.*, hal. 14

tersebut tetap merasa berdaulat. Hak tawan karang masih berlaku, dan dilaksanakan waktu tahun 1847 kapal-kapal asing terdampar dipantai Kusumba di wilayah Klungkung. Kerajaan-kerajaan Bali lainnya seperti Mengwi dan Badung waktu itu juga mempunyai sikap menentang Hindia Belanda.

Situasi di Bali ini menimbulkan kegelisahan pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Raja-raja Buleleng, Karangasem, dan Klungkung menerima ultimatum dari pemerintah Hindia Belanda yang isinya : agar raja-raja tersebut segera menyerahkan serdadu-serdadu Belanda dan tahanan yang melarikan diri; agar dalam waktu 14 hari telah mengirimkan utusan terdiri dari orang-orang terkemuka untuk meminta maaf. Di samping itu raja Buleleng dan Klungkung masih harus mengganti kerugian atas kapal-kapal Belanda yang terkena *tawan karang*. Dalam pada itu raja Buleleng dan Karangasem diharuskan segera membayar biaya perang seperti tercantum dalam perjanjian tahun 1846. Khusus pada raja Buleleng, pemerintah Hindia Belanda masih menuntut penghapusan benteng-benteng yang digunakan untuk melawan Belanda dalam perang sebelum dan sesudah tahun 1846 dan penyerahan Gusti Jelantik yang oleh pemerintah Hindia Belanda dianggap sebagai otak perlawanan. Mendengar kata-kata Komisaris Belanda yang diucapkan pada raja Buleleng dalam suatu pertemuan bahwa Buleleng sebenarnya telah berada di bawah kekuasaan Gubernur Jendral, Gusti Jelantik mengatakan bahwa selama ia masih hidup hal ini tidak mungkin.⁷⁶⁾

Raja-raja Bali tidak memperdulikan ultimatum tersebut, sebaliknya mereka makin giat memperkuat Angkatan Perangnya. Pada tanggal 6 Juni 1948 di Sangsit mendarat sebagian pasukan Belanda. Besok hari dan lusanya tanggal 7 dan 8 Juni mendarat sebagian pasukan yang lain. Pendaratan yang belakangan mendapat perlawanan pasukan Bali yang mengadakan penjagaan di pantai. Pasukan Bali terdesak karena pasukan Belanda lebih besar jika dibandingkan dengan pasukan yang dikirimkan tahun 1846. Timur Sangsit dan Bungkulan dapat diduduki Belanda. Selanjutnya Jagaraja, yang terletak disebelah selatan Bungkulan dan merupakan benteng terkuat Kerajaan Buleleng, menjadi sasaran serangan. Kecuali bangunan benteng yang kokoh, empat benteng berangkai di Jagaraja yang membentuk satu garis pertahanan itu terletak didaerah yang sulit dicapai oleh musuh.⁷⁷⁾

76) A.W.P. Weitzel, *Op.Cit.*, 19.

77) Kekuatan dari benteng Jagaraja dapat dibuktikan, bahwa ekspedisi Belanda, terutama dalam tahun 1848, dan 1849, lebih banyak digunakan untuk merebut benteng tersebut. Periksa "De Expeditie naar Bali in 1868", *MT*, 1873, 125.

Di dalam pertempuran yang terjadi selama 3 jam di empat benteng Jagaraja tersebut, pasukan Bali telah dapat menewaskan 5 Opsir, dan 74 serdadu Belanda. Di samping itu 7 Opsir dan 98 serdadu menderita luka-luka. Jenderal van der Wijck yang memimpin pasukan darat tidak berhasil mendesak pasukan Bali agar meninggalkan garis pertahanannya. Karenanya ia menarik mundur pasukannya, kembali ke pantai.

Meskipun dalam pertempuran dengan Belanda tersebut satu benteng prajurit Bali jatuh ke tangan Belanda, namun tidak besar pengaruhnya terhadap kekuatan pasukan Bali, karena pasukan Belanda yang menduduki benteng itu sangat lemah. Pasukan Bali yang ada di sekitarnya memblokir pasukan Belanda tersebut. Kesulitan pengangkutan alat-alat perang yang disebabkan karena menipisnya tenaga kasar, demikian pula karena kurangnya air tawar untuk minum, cukup mempersulit pasukan Belanda.

Untuk sementara waktu, medan pertempuran sepi. Pasukan Bali sebagian berada dalam kubunya masing-masing, sedangkan sebagian mengadakan pengawasan pantai dan jalan-jalan yang akan dilalui oleh pasukan Belanda menuju Jagaraga. Sementara itu pasukan Belanda di pantai dekat Sangsit, tidak bergerak sebelum menerima instruksi lebih lanjut dari atasannya di Batavia. Permintaan van der Wijck ke Batavia lewat surat agar diberikan tambahan tentera sebanyak 2 batalyon infantri dan 1.000 orang tenaga kasar tidak dipenuhi, berhubung di Jawa masih memerlukan cadangan tentera yang cukup kuat. Tidak dipenuhinya tambahan militer ini mengakibatkan ditarikannya kembali pasukan Belanda ini ke Jawa pada tanggal 20 Juni 1848. Dapat ditambahkan di sini bahwa seluruh kekuatan Belanda yang dikirim ke Bali itu 2.265 orang serdadu yang terdiri dari 870 orang Eropa, 119 orang Afrika, dan 1.385 orang pribumi.⁷⁸⁾

Kegagalan ekspedisi militer Belanda ke Bali pada tahun 1848 menambah kepercayaan raja-raja Bali akan kekuatan mereka. Dalam hubungan ini pengaruh Gusti Jelantik sangat besar terhadap negara-negara tersebut. Raja-raja Buleleng, Karangasem, Klungkung dan Mengwi sepakat untuk bekerjasama dalam mengusir Belanda jika mereka kembali. Dalam pada itu raja-raja Badung, Gianyar, Bangli, dan Tabanan belum terang-terangan menunjukkan sikap perlawanan, walaupun mereka sukar didekati Belanda. Sementara itu persiapan-persiapan militer kerajaan-kerajaan Bali ditingkatkan. Benteng-benteng pertahanan baru, dibangun, seperti di Kesumba, Klungkung, Karangasem. Garis pertahanan di Singaraja diperkuat. Gusti Jelantik menyempurnakan benteng-benteng di Jagaraga serta menambah persenjataan. Duapuluh

78) A.W.P. Weitzel, *Op. Cit.*, hal. 22.

orang bekas serdadu Belanda yang masuk pasukan Bali diberi tugas mengurus dan memelihara senjata api, melatih prajurit Bali dalam menggunakan senjata api.

Seperti yang telah dikhawatirkan oleh raja-raja Bali bahwa Belanda akan datang lagi di Bali, menjadi suatu kenyataan. Pada akhir bulan Maret dan awal bulan April 1849 pasukan Belanda dibawah pimpinan Jendral Michiels mendarat di Bali. Perlu dikemukakan di sini bahwa kekuatan militer Belanda pada pendaratan ini lebih besar jika dibandingkan dengan pendaratan-pendaratan sebelumnya. Pasukan terdiri dari pasukan darat, dan laut. Pasukan darat terdiri dari pasukan infantri yang beranggotakan 4.177 orang, 1 peleton kavaleri terdiri dari 25 orang, pasukan artileri dengan membawa 24 pucuk meriam, dan pasukan zeni beranggotakan 151 orang. Di samping itu terdapat pasukan Dinas Kesehatan yang beranggotakan 122 orang, intendans sebanyak 9 orang, tenaga kasar pengangkut sebanyak 2.000 orang. Masih ada tenaga kasar cadangan sebanyak 1.000 orang. Jumlah seluruhnya adalah 273 opsir, 4.737 Opsir rendah dan bawahan serta 2.000 orang tenaga kasar pengangkut. Di samping itu terdapat Angkatan Laut yang terdiri dari 29 kapal perang berukuran besar dan kecil yang dilengkapi dengan 286 pucuk meriam. Masih terdapat juga 3.014 orang pelaut yang terdiri dari orang Eropa dan pribumi.

Teknis pendaratan bergelombang dan yang menjadi sasaran adalah benteng Jagaraga. Pada tanggal 31 Maret 1849 sebagian dari pasukan Belanda berkekuatan 700 orang, terdiri dari Angkatan Darat dan Laut, mendarat di pantai Buleleng. Dengan perlindungan tembakan-tembakan meriam dari kapal, pasukan bergerak menuju Singaraja. Pasukan-pasukan Bali tidak berhasil menghalang-halangi Bergeraknya pasukan musuh itu. Kemudian pasukan Belanda yang lain menyusul mendarat mengikuti pasukan yang terdahulu.

Raja-raja Bali mengetahui bahwa pasukan Belanda telah tiba di Singaraja. Raja Buleleng mengirim utusan untuk menemui pasukan Belanda di Singaraja, bahwa ia bersedia untuk mengadakan perdamaian. Kemudian raja Buleleng dan Karangasem juga mengirimkan utusan pada tanggal 2 April 1849 bahwa mereka ingin bertemu dengan pimpinan tertinggi militer Belanda di Sangsit dan akan menyerahkan surat yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal. Karena utusan ini dicurigai oleh Belanda, maka pesan raja-raja tersebut tidak dapat disampaikan.

Pagi harinya, 3 April 1849 raja Karangasem mengutus seorang bangsawan untuk menemui pimpinan pasukan Belanda, bahwa ia bersama Patih Buleleng, Gusti Jelantik, akan menemui Jenderal Michiels di Singaraja. Disampaikan juga permintaan ijin agar kedua raja yang akan bertemu dengan

Michiels diperbolehkan membawa pengikut sebanyak kira-kira 1.500 orang. Permintaan ini dapat dikabulkan. Akan tetapi karena jembatan di jalan yang menuju Singaraja rusak akibat banjir, membuat hari pertemuan tertunda sampai tanggal 7 April.

Pada tanggal 7 April tengah hari rombongan pasukan Karangasem dan Buleleng sebanyak 3.000 orang bersenjatakan tombak, dan senapan, tiba di sebuah kampung di Singaraja. Tetapi raja Karangasem dan Patih Buleleng belum datang dan baru tiba pada jam 3 sore dengan dikawal oleh prajurit-prajurit. Pengiring seluruhnya berjumlah kira-kira 10 sampai 12 ribu orang bersenjatakan tombak bertangkai merah sepanjang 12 a 14 kaki dan senapan kira-kira sebanyak 1.500 buah. Di antara senjata api itu ada yang hasil rampasan dari tentera Belanda. Di tengah-tengah barisan nampak panji-panji berwarna kuning dengan lukisan hitam.

Dalam pertemuan, Jendral Michiels mengajukan pokok-pokok perjanjian yang antara lain menyebut bahwa raja Karangasem dan Buleleng harus mengakui kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda; mereka harus mengosongkan dan menyerahkan benteng Jagaraga kepada Belanda; benteng Jagaraga harus diruntuhkan dalam waktu singkat; menyerahkan serdadu-serdadu Belanda yang dirampas selama ekspedisi yang terdahulu; memenuhi bunyi kontrak yang sudah lalu dan mengirimkan utusan ke Jakarta untuk menyatakan menyerah. Raja Karangasem dan Gusti Jelantik menerima usul-usul tersebut dan atas permintaan wakil-wakil Bali, Jenderal Michiels menyetujui untuk mengadakan pertemuan dengan raja Buleleng di Sangsit. Di samping itu Belanda menyetujui untuk memindahkan markasnya dari Singaraja ke Sangsit.

Pada tanggal 11 April pertemuan diadakan lagi di Sangsit. Raja Buleleng dan Karangasem didahului oleh Patih mereka masing-masing dan dikawal oleh prajurit-prajurit Bali dalam jumlah besar dengan tombak terhunus. Dalam pertemuan itu pihak Belanda menuntut agar pada tanggal 15 April benteng Jagaraga sudah mulai diruntuhkan, dengan ancaman jika sampai tanggal tersebut tidak dilakukan maka perjanjian perdamaian batal. Nampak bahwa kedua raja tersebut tidak mau tunduk pada tuntutan tersebut dan sebaliknya Belanda curiga bahwa kesanggupan raja-raja tersebut untuk berunding merupakan siasat mengulur waktu guna mempersiapkan diri.

Sampai tanggal 15 April raja-raja tidak juga mulai membongkar benteng. Suasana menjadi tegang dan pertempuran meletus lagi. Pasukan Belanda sebesar 2.400 orang bersenjatakan senapan berbagai model, meriam, mortir dan meriam kodok (*howtzer*), mulai bergerak menuju Jagaraga. Prajurit Bali yang mengadakan pertahanan di Jagaraga berjumlah sekitar 15.000 orang bersenjatakan senapan, sedangkan sisanya bersenjatakan tombak pan-

jang.

Prajurit-prajurit Bali melepaskan tembakan-tembakan dari pertahanan mereka. Dengan tembakan-tembakannya itu mereka dapat menahan serangan tentera Belanda yang datang dari berbagai arah. Serdadu Belanda kepayahan, karena di samping sulitnya daerah untuk mencapai benteng, juga karena mereka kekurangan air minum. Pasukan Belanda ditarik mundur. Dalam pertempuran ini tentera Bali dapat menewaskan 2 opsir Belanda, 17 Opsir rendah dan serdadu dan yang mengalami luka-luka sebanyak 8 Opsir dan 89 Opsir rendah dan serdadu.

Keesokan harinya, tanggal 16 April benteng Jagaraga diserang Belanda secara mendadak. Pasukan Belanda ini didatangkan dari Sangsit dengan melalui jalan yang sangat sulit karena lewat lereng bukit, jurang, dan sungai. Prajurit-prajurit Bali terkejut. Dalam pertempuran yang sengit pasukan Bali tidak dapat menghalau pasukan musuh bahkan mereka terdesak dan terpaksa meninggalkan benteng-benteng nya pada hari itu juga. Benteng-benteng tersebut jatuh ke tangan musuh. Dalam pertempuran ini di pihak Bali banyak jatuh korban, terutama prajurit-prajurit Gusti Jelantik di benteng ke-3 yang dikatakan hampir punah. Belanda menderita kerugian 33 orang tewas dan 148 luka-luka. Sisa pasukan raja Buleleng banyak yang melarikan diri ke Karangasem sedangkan raja Buleleng dan Gusti Jelantik menyingkir ke daerah batas kerajaan Buleleng dengan Karangasem. Dengan menyingkirnya raja Buleleng, maka kepala-kepala daerah bawahan terpaksa menyerah kepada Belanda, seperti Gusti Nyoman Lebak, kepala daerah Sangsit yang menyerah pada tanggal 18 April, kemudian disusul oleh para *pembekel* di daerah tersebut pada tanggal 20 April.

Jatuhnya negara Buleleng kedalam tangan Belanda membawa pengaruh pada negara-negara lain. Beberapa negara menjadi bersikap lunak dan bersedia berdamai dengan Belanda, tetapi di samping itu ada juga negara yang tetap menunjukkan sikap menentang, seperti Karangasem dan Klungkung. Klungkung siap menghadapi Belanda dengan 15 a 16 ribu prajurit. Raja Badung dan Bangli memihak pada Belanda. Raja Badung bersedia membantu Belanda untuk menyerang Klungkung. Demikian pula raja Bangli yang telah bertemu dengan Jenderal Michiels pada tanggal 16 April di Sangsit, menyanggupi akan menghalang-halangi raja Karangasem dan Klungkung lari ke gunung. Raja Jembrana juga telah mengadakan persetujuan dengan Belanda.

Raja Karangasem bersama-sama raja Buleleng dan Gusti Jelantik mengadakan persiapan-persiapan apabila sewaktu-waktu diserang pasukan Belanda. Sementara itu pihak Belanda mengatur persiapannya guna menyerang negara Karangasem. Pada tanggal 9 Mei 1849 Jenderal Michiels dan pasukannya

mendarat di teluk Labuhan Amuk, sebuah pantai disebelah tenggara Karangasem yang berdekatan dengan batas kerajaan Klungkung. Pengambilan tempat tersebut sebagai tempat pendaratan menunjukkan bahwa kedua negara tersebut merupakan sasaran penyerangan Belanda. Di tempat lain, di dekat Tulakuta, di perbatasan Karangasem, mendarat juga 1.000 pasukan Gusti Nyoman Lebak dari Buleleng yang membantu Belanda. Pasukan ini siap untuk memukul pasukan Karangasem. Kemudian malam hari menjelang tanggal 20 Mei pasukan dari raja Mataram, Lombok, di bawah Gusti Gede Rai dan dua orang lainnya mendarat di Ujung, pantai sebelah selatan kota Karangasem. Raja Mataram yang bermusuhan dengan raja Karangasem bersedia membantu Belanda asal dia diperbolehkan memiliki daerah Culik di Karangasem. Sementara itu Patih Karangasem, Gusti Made Jungutan yang ternyata mempunyai hubungan gelap dengan raja Mataram menggabungkan pasukannya dengan pasukan Lombok untuk membantu Belanda. Hal ini terjadi karena Gusti Made Jungutan dipandang dari silsilah nenek-moyangnya merasa berhak berkuasa di Karangasem.

Setelah pasukan bantuan dari Lombok yang berjumlah 4.000 orang mendarat di Ujung pada malam hari menjelang tanggal 20 Mei, maka pada hari berikutnya pasukan depan dengan bantuan pasukan Gede Made Jungutan mendahului menyerang pasukan raja Karangasem. Karena sebagian rakyat di daerah-daerah dekat pantai banyak yang menyatakan menyerah kepada Belanda, maka pengikut raja Karangasem yang terbatas jumlahnya kalah dan raja sendiri meninggal. Raja Buleleng dan Gusti Jelantik dapat meloloskan diri ke bukit. Dengan kekalahan ini maka Kerajaan Karangasem diduduki oleh Belanda.

Setelah Karangasem, Klungkung dijadikan sasaran penyerangan oleh Belanda. Dalam hubungan ini perlu disebut bahwa pasukan Bali di Kesumba yang terletak di pantai Kerajaan Klungkung sudah bersiap-siap untuk menghadapi pasukan Belanda. Kontak senjata pertama-tama terjadi di Sunda Lawas. Prajurit Bali berusaha mempertahankan kubu-kubu pertahanannya yang terletak di sepanjang garis pantai. Ternyata bahwa pasukan Belanda yang menyerang, datang dari dua jurusan yaitu dari belakang dan dari arah pantai, tidak dapat ditahan oleh pasukan Bali. Prajurit Bali yang berjumlah antara 2 a 300 orang terpaksa menyingkir. Demikian pula pasukan Bali di Kesumba, setelah mengadakan perlawanan terpaksa tunduk pada Belanda.

Pada tanggal 10 Juni siang hari, wakil Belanda di Badung mengabarkan bahwa raja-raja Badung dan Tabanan sehari sebelumnya dengan membawa pasukan sebanyak 16.000 orang prajurit telah menyerang Klungkung. Dikatakan selanjutnya bahwa Dewa Agung Gede Putra telah menyerang kepada me-

reka. Bagi Belanda tindakan kedua raja tersebut telah menunjukkan sikap bersekutu dengan Belanda.

Pada tanggal 12 Juni orang-orang yang menjadi utusan masing-masing kerajaan untuk menemui Gubernur Jendral di Jakarta sudah berkumpul di Markas Besar pasukan Belanda. Utusan-utusan itu dari negara Klungkung adalah Ida Nyoman Pedada dan Ida Wayong Bagus; dari negara Badung adalah Ida Made Rai, Ida Nyoman Mas, dan Pembekel Tuban; dari negara Tabanan adalah Made Yaksa; sedangkan dari negara Gianjar adalah Dewa Nyoman Rai dan Gusti Putu Getasan. Dengan tunduknya negara-negara di Bali tersebut berarti perlawanan-perlawanan besar telah berakhir. Dari seluruh uraian di atas nampak tragedi bahwa perlawanan-perlawanan gigih dari pemimpin Bali akhirnya dapat dipatahkan oleh kolonialisme Belanda dengan bantuan sesama pemimpin Bali sendiri.

G. ACEH

1. *Pendahuluan*

Di antara perlawanan-perlawanan besar yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia dalam abad 19 perlawanan di Aceh termasuk yang paling berat dan terlama bagi Belanda. Meskipun kekuatan negara Aceh dalam abad 19 ini sudah sangat berkurang dibandingkan dengan kekuasaannya di abad 17, namun rasa harga diri sebagai negara merdeka masih tetap kuat. Pada awal abad 19 ini yang menjadi sultan adalah Ala'uddin Muhammad Daud Syah (1823–1938) yang berusaha untuk meningkatkan kewibawaan dan kekuasaan pemerintah pusat. Pada waktu itu, tanggal 17 Maret 1824, sebuah persetujuan antara Inggris dan Belanda mengenai pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan semenanjung Malaya di tandatangani. Isinya antara lain disebutkan, bahwa setelah memperoleh kembali jajahan yang selama perang direbut oleh Inggris Belanda tidak dibenarkan mengganggu kemerdekaan negara Aceh. Aceh tetap merdeka dan bebas menjalankan politik dalam dan luar negerinya. Demikian juga perdagangannya tetap maju dan berkembang. Tampaknya jaminan untuk mempertahankan kemerdekaan Aceh hanyalah bersifat politik saja.

Dengan dikuasainya daerah Sibolga dan pedalaman Tapanuli dan tanah Batak pada tahun 1830-an oleh orang Belanda, kedudukan Aceh mulai terancam sebab sekarang lawan berada tepat disebelah garis perbatasan. Pemerintah Hindia Belanda mulai melancarkan usahanya mengancam daerah Aceh yang jauh dari pusat. Keadaan memang membahayakan negara Aceh sebab Uleebalang di luar wilayah Aceh Besar mempunyai kemerdekaan yang sangat besar, lebih-lebih karena pemerintah pusat tidak kuat. Daerah Singkil, Barus

dan Trumon di daerah Barat dan daerah Serdang dan Asahan disebelah Timur mulai dipengaruhi Belanda.⁷⁹ Karena Inggris tidak memberikan reaksinya maka orang Belanda menjadi lebih berani. Pada tanggal 1 Pebruari 1858 Sultan Siak diikat dengan sebuah perjanjian oleh pemerintah Hindia Belanda yang isinya antara lain menyatakan bahwa Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatra Timur. Hal ini juga berarti bahwa negara-negara lain yang berada di bawah pengaruh Siak, seperti Deli, Asahan, Kampar dan Inderagiri dengan sendirinya juga menjadi daerah takluk Hindia Belanda. Pada hal wilayah tersebut secara langsung maupun tidak langsung termasuk daerah takluk atau daerah lindungan Aceh.⁸⁰

Sudah tentu keadaan yang demikian ini tidak dapat diterima oleh Aceh yang sadar akan bahaya yang sedang mengancam. Sultan Aceh mulai waspada dan mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Lebih-lebih kekhawatiran Aceh semakin meningkat ketika pada tahun 1871 Belanda dan Inggris mencapai persetujuan dan menandatangani suatu perjanjian yang disebut Traktat Sumatra. Menurut perjanjian ini orang Belanda diberi kebebasan untuk mengadakan perluasan kekuasaannya di seluruh Sumatra, termasuk ke Aceh yang selama ini tidak boleh diganggu kedaulatannya. Salah satu faktor yang juga menjadi pendorong bagi Hindia Belanda untuk menguasai Aceh adalah kenyataan semakin pentingnya posisi Aceh karena dibukanya terusan Suez tahun 1869. Lalu lintas pelayaran di Selat Malaka semakin ramai semenjak Suez dibuka dan Aceh merupakan pintu gerbang ke selat tersebut.

Untuk menghadapi segala kemungkinan itu maka Aceh mulai berusaha memperkuat diri dan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain untuk mencari bantuan. Pada bulan Januari 1873 Sultan Aceh mengirimkan seorang utusan, Habib Abdurrachman, ke Turki untuk meminta bantuan apabila Belanda berusaha menaklukkan Aceh dengan kekerasan. Kemudian sebuah utusan yang dipimpin oleh Teuku Panglima Muhammad Tibang dikirim kepada Residen Hindia Belanda di Riau untuk menyampaikan pesan Sultan bahwa maksud orang Belanda untuk mengirimkan utusan menghadap Sultan Aceh agar ditanggihkan sampai Sultan mengadakan hubungan dengan Turki. Perutusan Aceh ini dalam perjalanan pulang diantar oleh kapal perang Hindia Belanda "*Murnix*" dan singgah di Singapura. Kesempatan ini digunakan oleh utusan-utusan Aceh untuk menemui konsul Italia dan konsul Amerika Serikat

79 A. Reid, *The Contest for North Sumatra Atjeh, the Netherlands and Britain 1858-1879*, Kuala Lumpur, hal. 21-35

80 Tentang Perjanjian Siak dan hubungannya dengan politik ekspansi Hindia Belanda di Sumatra dapat dilihat dalam A. Reid, *Ibid.*, hal. 25-35

di situ.⁸¹

Melalui konsulnya di Singapura, pemerintah Hindia Belanda mengetahui bahwa konsul-konsul Amerika Serikat dan Italia akan berusaha agar pemerintahannya masing-masing bersedia membantu Aceh. Hal ini sudah tentu sangat mengkhawatirkan Pemerintah Hindia Belanda yang tidak menginginkan adanya campur tangan negara asing lain dalam soal Aceh. Tambahan lagi timbul desas-desus bahwa bantuan militer Amerika Serikat pada Aceh akan datang pada permulaan bulan Maret 1873.⁸² Akibatnya maka menteri jajahan di Negeri Belanda pada tanggal 18 Pebruari 1873 memerintahkan kepada Gubernur Jenderal London di Batavia (Jakarta) agar mengirimkan kapal dengan pasukan yang kuat ke Aceh. Setelah diadakan perundingan diputuskan bahwa Komisaris Pemerintah Hindia Belanda untuk Aceh, F.N. Nieuwenhusyen akan berangkat ke Aceh dengan membawa dua buah kapal perang lengkap dengan pasukannya. Ia berangkat pada tanggal 7 Maret dengan kapal perang *Citadel van Antwerpen* dan kapal *Siak*. Kemudian dari pulau Pinang mendapat bantuan tambahan dua kapal lagi yaitu *Murnix* dan *Corhorn*. Tepat pada tanggal 22 Maret 1873 penduduk Aceh yang berdiam di tepi pantai Bandar Aceh melihat empat buah kapal Belanda membuang sauh. Tidak lama kemudian datang juru bahasa Belanda yang bernama Said Tahir menghadap Sultan Muhammad Syah untuk menyampaikan surat Komisaris F.N. Nieuwenhusyen. Isi surat itu sangat mengejutkan sebab Sultan Aceh diminta untuk mengakui kedaulatan Hindia Belanda atas negaranya. Sultan sudah tentu tidak mau menerima isi surat tersebut dan memberi jawaban yang tidak langsung. Surat kedua dari Nieuwenhusyen juga mendapat perlakuan yang serupa, demikian juga dengan surat-surat yang lainnya. Akhirnya pada tanggal 26 Maret 1873 datanglah permakluman perang dari fihak Belanda dan mulailah suatu perjuangan rakyat yang cinta kemerdekaan untuk mempertahankan tanah airnya.

2. *Jalannya Perang*

Sejak beberapa tahun sebelumnya, Sultan dan para pembantunya memang sudah menaruh kecurigaan kepada niat buruk pemerintah Hindia Belanda. Persiapan untuk mempertahankan negara mulai dilakukan. Selain mencari bala bantuan dari luar negeri — telah dibicarakan di atas — maka pertahanan semakin diperkuat. Sepanjang pantai Aceh Besar dibangun *kuta*

81 Prof. Dr. A. Sartono Kartodirdjo, ed., *Sejarah Perlawanan-perlawanan Terhadap Kolonialisme*, Jakarta, hal. 240

82 A. Reid., Op. Cit., hal. 93-94

yaitu semacam benteng untuk memperkuat pertahanan wilayah. Demikian juga dengan tempat-tempat yang penting di ibu kota seperti Istana Sultan, Gunongan dan Masjid Raya Baiturraachman juga diperkuat. Menurut laporan Said Tahir (Sidi Tahlil) dan Teuku Ne'Neuraksa, yaitu seorang uleebalang yang memihak Belanda, ada sekitar 3000 laskar pejoang Aceh yang bersiaga di sepanjang pantai dan 4000 orang lainnya mempertahankan istana.⁸³ Selain itu walaupun kesultanan Aceh tidak sekuat pada abad-abad sebelumnya tetapi persenjataan yang dikumpulkan cukup besar. Antara bulan Agustus 1872 sampai Maret 1873 Aceh berhasil memasukkan kira-kira 5000 peti mesiu dan 1394 peti senapan (sekitar 5000 pucuk) dari Penang.⁸⁴

Senapan-senapan dan mesiu yang dimasukkan ke Aceh dari bandar Penang di Semenanjung itu adalah usaha yang giat dari pimpinan Aceh yang berada di luar negeri. Mereka memahami dan menyadari adanya bahaya yang mengancam negerinya. Diantaranya, mereka adalah Teuku Paya dari Lam Bada (sagi XXVI Mukim), Teuku Ibrahim kemenakan Teuku Pakeh dalam dari Pidie dan Nyak Abbas kemenakan Teuku Paya. Ketiga orang ini bersama-sama dengan lima orang lainnya yang besar perhatiannya pada perjuangan Aceh pada bulan September 1873 bersepakatan membentuk sebuah dewan untuk meningkatkan bantuan pada Aceh. Dewan ini diketuai oleh Teuku Ibrahim dan selain Teuku Paya dan Nyak Abbas, anggota-anggotanya yang lain ialah Nyak Abu dan Panglima Perang Haji Yusuf, Gullahmeidin dan Umar (orang India Islam yang berasal dari Penang) dan Shaikh Kassim, orang Arab yang lahir di Penang.⁸⁵

Walaupun sudah mendapat laporan tentang persiapan kekuatan pertahanan Aceh, Belanda rupanya menganggap bahwa Aceh dengan mudah akan dapat dikalahkan. Akan tetapi kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Walaupun tampaknya pemerintah pusat kesultanan Aceh lemah dan perekonomiannya merosot, namun semangat joang rakyat Aceh yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah airnya, pada agamanya dan pada kemerdekaannya, telah menyeret orang Belanda ke dalam peperangan yang hebat dan lama.

Pada tanggal 5 April 1873 tampaknya suatu kesatuan penyerbu Belanda yang cukup kuat dan lengkap. Jumlahnya lebih dari tiga ribu orang yang didaratkan dari kapal perangnya. Pasukan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal J.H. R. Kohler seorang panglima pasukan yang tangguh. Ketika melihat

83 *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, hal. 111-112

84 A. Sartono Kartodirdjo, *Op. Cit.*, hal. 241

85 Peranan dan usaha Dewan Delapan ini telah dibicarakan oleh A. Ried., *Op. Cit.*, hal. 129-133

pendaratan pasukan penyerbu itu, segera para pejoang Aceh mempersiapkan diri dan menyambut serbuan Belanda itu dengan tembakan-tembakan yang hebat. Pertempuran dahsyat segera meletus antara pasukan penyerbu dengan lasykar pejoang Aceh di pantai sebelah Barat-daya kota Pantai Cermin. Tanpa diduga kapal-kapal perang Belanda menembaki pertahanan Aceh dengan meriamnya sehingga para pejoang Aceh terpaksa mengundurkan diri dan meninggalkan kuta (benteng pertahanan) yang terletak di pantai itu yang segera jatuh ke tangan pasukan Belanda.

Pasukan Aceh menambah kekuatan untuk mempertahankan Mesjid Raya Baiturrahman karena diduga Belanda akan menggerakkan pasukannya untuk menyerangnya. Mula-mula datang kira-kira satu peleton serdadu Belanda mencoba mendekati mesjid tersebut. Dengan tiba-tiba pasukan Aceh yang kira-kira berjumlah 40 orang, yang memang sudah berjaga-jaga di belakang tembok dan bersenjata kelewang, menyerang kesatuan Belanda itu sehingga penyerbu terpaksa mundur kembali. Pertahanan pejoang Aceh di Mesjid Raya ini memang cukup kuat. Setelah dipukul mundur, Belanda menyerang lagi dengan pasukan yang lebih besar. Agaknya Belanda mengerahkan induk pasukannya. Dengan serentak Mesjid Raya diserbu dan dikepung. Namun tentara Aceh yang mempertahankan Mesjid tersebut tidak tinggal diam dan mengadakan perlawanan dengan gigih. Terjadilah perkelahian seorang lawan seorang dan dalam keadaan seperti itu meriam atau senapan tidak berguna. Karena kuatnya pertahanan lasykar Aceh ini serbuan serdadu Belanda menemui kegagalan.

Tidak lama kemudian, tampaklah api berkobar di atas Mesjid yang terbuat dari ijuk itu. Kemudian juga dinding-dindingnya yang terbuat dari kayu mulai terbakar. Rupanya Jenderal Kohler telah memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan peluru api ke arah mesjid yang megah itu. Lasykar Aceh tidak kuasa menghalangi kobaran api yang mulai membakar mesjid; mereka terpaksa meninggalkannya dan mengundurkan diri. Mesjid berhasil diduduki Belanda pada tanggal 14 April 1873 dan ketika Jenderal Kohler sedang berjalan untuk memeriksa mesjid yang baru direbutnya itu, dengan tak terduga datang tembakan dari seorang prajurit Aceh dan tewaslah panglima perang Belanda itu.

Dengan jatuhnya Mesjid Raya kekuatan pasukan Aceh dipusatkan untuk mempertahankan istana Sultan Mahmud Syah. Di samping itu pasukan Aceh yang lain telah disiapkan untuk menyerbu pasukan-pasukan Belanda. Kekuatan pasukan pejoang Aceh semakin lama semakin besar sebab ketika terdengar berita tentang serangan Belanda, orang-orang Aceh yang selama ini sudah bersikap anti-Belanda segera bangkit semangatnya. Mereka itu antara

lain ialah Panglima Polem Cut Banta, Panglima Sagi XXII Mukim dan Teuku Imam Luengbata, Imam dari Mukim Luengbata yang berada di luar ketiga sagi. Keduanya segera menyiapkan pasukan masing-masing lengkap dengan persenjataannya dan perlengkapannya.

Mesjid Raya sekarang menjadi pusat pertahanan serdadu Belanda. Pada tanggal 16 April tampak pasukan Belanda meninggalkan pertahanannya untuk menyerbu istana Sultan. Pertempuran sengit segera terjadi karena lasykar Aceh dengan mati-matian berusaha mempertahankan istana. Kekuatan Aceh begitu besar sehingga Belanda tidak mampu menembusnya dan terpaksa mengundurkan diri kembali ke Mesjid Raya. Dalam pertempuran di sekitar istana ini 9 perwira dan 116 serdadu Belanda berhasil ditewaskan. Pasukan Aceh yang lain juga berhasil memukul mundur Belanda sehingga terpaksa kembali ke pantai. Usaha Belanda untuk mematahkan perlawanan rakyat Aceh ternyata tidak berhasil. Atas persetujuan pemerintahnya di Batavia, pasukan Belanda meninggalkan pantai Aceh pada tanggal 29 April 1873.⁸⁶ Serbuan Belanda yang pertama menemui kegagalan.

Walaupun sudah mendapat kemenangan, lasykar Aceh tidak mengurangi kewaspadaannya. Pertahanan dan persiapan semakin ditingkatkan karena besar kemungkinan Belanda akan kembali menyerbu. Dugaan ini benar karena agaknya Belanda bermaksud untuk menebus kekalahannya. Selama serbuan kedua belum tiba, kapal-kapal perang Belanda terus-menerus mengadakan blokade untuk mencegah masuknya perbekalan dan bala bantuan untuk Aceh. Karena ketatnya blokade ini maka para pedagang di Penang terutama Inggris mengadakan protes sehingga pemerintah Hindia Belanda melalui konsulnya di Penang dan Singapura terpaksa mengeluarkan izin dagang khusus bagi para pedagang dari Semenanjung Melayu. Walaupun ada larangan keras untuk memasukkan peralatan perang ke Aceh, nyatanya pelanggaran sering terjadi sehingga sebenarnya blokade Belanda tidak berhasil dengan baik.⁸⁷

Menjelang akhir tahun 1873, tanggal 9 Desember, kembali tampak pendaratan pasukan Belanda di pantai Aceh. Jumlah mereka jauh lebih besar daripada serbuan pada bulan April yang lalu dan diperkirakan berjumlah 2000 orang. Pemimpinnya kali ini adalah pensiunan Jenderal yang pernah menjadi Panglima Perang Hindia Belanda, yaitu Letnan Jenderal J. van Swieten. Pemerintah Hindia Belanda terpaksa memanggil jenderal yang sudah tidak

⁸⁶ Menurut catatan para pejoang Aceh yang gugur diperkirakan ada 900 orang. Lihat A. Reid, *Ibid.*, hal. 296

⁸⁷ A. Sartono Kartodirdjo, *Op. Cit.*, hal. 241-242

aktif ini karena disadari betapa berat tugas yang harus dilakukan dalam menghadapi perjoangan lasykar Aceh. Terbukti dalam penyerbuan yang pertama kali yang menewaskan Jenderal Kohler, bahwa perjoangan rakyat Aceh cukup hebat. Tugas pokok yang dibebankan kepada van Swieten adalah untuk menyerang dan merebut istana dan kepadanya juga diberikan wewenang untuk mengadakan perjanjian dengan Sultan. Selain menjadi Panglima ini juga diangkat sebagai Komisaris Pemerintah Hindia Belanda.

Ketka melihat pendaratan serdadu Belanda yang besar jumlahnya di Kuala Lue dekat Gigieng, Aceh Besar, para pejoang Aceh sudah menduga bahwa tujuan mereka adalah untuk menyerbu dan merebut istana. Di Gigieng segera lasykar Aceh menyambut kedatangan pasukan Belanda itu dengan tembakan-tembakan senapan dan pertempuran sengit segera berkobar. Namun karena kapal-kapal perang Belanda itu juga turut memuntahkan peluru meriamnya terpaksa pasukan pejoang Aceh mengundurkan diri karena tidak mungkin menghadapi tembakan-tembakan meriam itu. Pertahanan istana segera diperkuat karena tempat inilah yang merupakan tujuan serbuan Belanda. Rupanya Belanda percaya bahwa bilamana istana dapat dikuasai, pastilah pihak Aceh akan menyerah. Pada hal kenyataan membuktikan bahwa hal yang sebaliknya; jatuhnya istana ke tangan Belanda mendorong lasykar Aceh untuk berjoang lebih hebat.

Balabantuan bagi lasykar Aceh mengalir dari berbagai pihak untuk memperkuat pasukan pertahanan istana. Uleebalang Pidie mengirimkan balabantuan yang berkekuatan kira-kira 1500 orang, sedang dari Mukim XXII di Aceh Besar datang bantuan sebesar 500 orang dan Teuku Cik Peusangan dari Aceh Utara mengirimkan 1000 orang ke Kuala Cangkul (Cengkoy). Dari fakta-fakta ini jelaslah bahwa kesediaan para Uleebalang dan rakyat Aceh untuk membantu Sultan dalam melawan penyerbu Belanda besar sekali. Golongan-golongan yang ada dalam masyarakat bersatu padu tanpa memandang perbedaan kemerdekaan negaranya.

Selain di sekitar istana pertempuran sengit terjadi juga di daerah Mesjid Raya, yang sudah diduduki kembali oleh pasukan Aceh sejak April 1873. Dengan gigih dan hebat lasykar Aceh mempertahankan kedudukannya untuk menghindarkan kemungkinan didudukinya lagi Mesjid Raya seperti pada penyerbuan yang pertama. Panglima Polem dengan pasukannya yang bertahan di Peukam Aceh menyerang pasukan Belanda yang mencoba mendekati Mesjid. Tembakan-tembakan gencar terdengar silih berganti dari kedua belah pihak. Balabantuan pihak Belanda juga terus datang dan akhirnya Mesjid Raya terpaksa ditinggalkan oleh lasykar Aceh karena tekanan serbuan musuh semakin besar. Setelah menduduki Mesjid Raya kembali, Belanda tampaknya

mulai memusatkan kekuatannya untuk menyerbu istana.

Pasukan Aceh yang mengetahui maksud Belanda ini berusaha menghalang-halangi gerakan musuh itu, namun tidak berhasil. Istana dikepung dan pertempuran hebat pun berkobar. Setelah lebih dari dua minggu berhasil bertahan lasykar Aceh terdesak dan pada tanggal 24 Januari 1874 istana Sultan pun jatuh ke tangan serdadu Belanda. Untunglah Sultan beserta keluarga dan beberapa orang pengikutnya sudah lebih dahulu menyingkir ke Leungbata pada tanggal 15 Januari 1873, sehingga usaha van Swieten untuk menangkap Sultan menemui kegagalan. Di tempat yang baru ini Sultan mendirikan markas pertahanannya. Bersama-sama dengan Panglima Polem dan para Panglima yang lain Sultan bertekad untuk meneruskan perjuangan dan melawan musuh sampai terusir dari bumi Aceh. Namun nasib buruk tak dapat dihindari. Sultan diserang wabah kolera dan meninggal pada tanggal 28 Januari 1874.

Setelah mangkatnya Sultan beberapa Panglima Sagi yaitu Panglima Polem dari Sagi XXII Mukim, Cut Banta dari Sagi XXV dan Cut Lamreung dari XXVI Mukim, bersepakat untuk memilih putra Sultan yang bernama Muhammad Daud Syah sebagai gantinya. Karena Sultan baru ini masih kecil, kira-kira berusia 6 tahun, ia akan dibantu oleh sebuah Dewan Mangkubumi yang diketuai oleh Tuanku Hasyim. Pusat kesultanan ditetapkan di INdrapuri yaitu sebuah tempat di sebelah selatan ibukota lama yang sudah diduduki Belanda.

Orang Belanda mengira bahwa dengan didudukinya istana Sultan berarti mereka telah menguasai negara Aceh. Oleh karenanya pada tanggal 31 Januari 1874 van Swieten memproklamkan bahwa Belanda telah menaklukkan kerajaan Aceh dan dinyatakan bahwa wilayah Aceh Besar menjadi milik Pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal ini orang Belanda telah salah menduga. Walaupun wilayah Aceh Besar sudah dinyatakan sebagai daerah kekuasaannya, istana sultan diduduki dan diproklamkan bahwa kerajaan Aceh sudah ditaklukkan, namun dalam kenyataannya rakyat Aceh masih merasa bebas merdeka dan Sultan masih berdaulat. Bahkan semangat perlawanan rakyat semakin meningkat dan terus berlangsung di luar ibukota dan daerah-daerah dengan cara bergerilya. Rakyat di bawah pimpinan para uleebalang, para ulama dan para kepala adat terus menyusun kekuatan dan meningkatkan perlawanan.

Namun walaupun demikian ada juga orang-orang Aceh yang memihak Belanda dan tidak turut berjuang. Salah satu contohnya ialah penduduk daerah Meuraksa yang terletak di pantai yang kurang menunjukkan sikap perlawanan, bahkan kepala daerah itu Teuku Ne'Neurak cenderung untuk

berdamai dengan Belanda. Sikap yang demikian ini mungkin disebabkan oleh kesulitan dan penderitaan yang dihadapi penduduk Meuraksa sebagai akibat blokade yang dilakukan oleh kapal-kapal Belanda. Sikap pro-Belanda dari penduduk Meuraksa ini sudah tentu telah menimbulkan kekesalan di kalangan pejoang Aceh yang lain, sehingga daerah ini sering juga diserang.

Semangat perlawanan pejoang-pejoang Aceh sangat menyulitkan fihak Belanda. Apa yang telah dikuasai Belanda sebenarnya tidak lebih hanya istana Sultan yang lama dan daerah-daerah yang diduduki oleh serdadunya. Sedang daerah-daerah di luarnya masih tetap dikuasai oleh fihak Aceh yang terus berusaha mempertahankan negrinya. Kemudian nampak bahwa orang Belanda mengubah taktiknya. Jenderal Pel yang menggantikan Van Swieten pada bulan April 1874 mulai membangun pos-pos pertahanan di Kutaraja, Krueng Aceh dan Meuraksa sebanyak 38 buah dengan kekuatan pasukan kira-kira 2750 orang yang berfungsi sebagai garis pembendung (afsluitings linie). Pihak pejoang Aceh pun tidak mau kalah dan kuta-kuta terus diperkuat.

Pada waktu itu jumlah Uleebalang yang mengadakan perjanjian perdamaian dengan Belanda dan mengakui kekuasaan Belanda semakin banyak, baik di Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Timur maupun di beberapa tempat lainnya. Meskipun demikian dalam kenyataannya terbukti bahwa mereka tidak sepenuhnya pada Belanda dan ini juga kemudian disadari oleh Pemerintah Hindia Belanda bahwa tidaklah mudah menundukkan Aceh seperti yang diperkirakan. Pada umumnya faktor yang mendasari beberapa Uleebalang itu, untuk menyatakan berdamai dengan orang Belanda ialah faktor ekonomi. Mereka berusaha agar Belanda menghentikan blokadanya sehingga perniagaan dapat berjalan lagi. Keadaan ini juga dimanfaatkan untuk menyelundupkan perbekalan perang terutama senjata dan amunisi dari luar.

Selain itu ada sebab lain yang memungkinkan Belanda memperluas kekuasaannya, yaitu kelemahan yang ada dipihak Aceh sendiri. Sering kali terjadi pertentangan atau bentrokan bersenjata antara para pejoang Aceh yang menentang Belanda melawan mereka yang bersekutu dengan Belanda. Misalnya seperti yang terjadi antara Negri Simpang Ulin dan Tanjung Seumantok di satu pihak dan Keureutu yang memihak Belanda di lain pihak. Belanda berusaha membantu sekutunya dengan mengerahkan pasukannya untuk menduduki Blang Ni, kota bandar yang penting bagi Simpang Ulin dan Tanjung Seumantok. Rakyat Simpang Ulin dan Tanjung Seumantok berusaha menahan pasukan Belanda itu. Namun menemui kegagalan dan Blang Ni terpaksa ditinggalkan. Setelah dapat mendudukinya, maka Belanda mendirikan benteng ditempat tersebut. Walaupun demikian rakyat Simpang Ulin dan Tanjung Seumantok terus melawan tanpa patah semangat dengan jalan

bergerilya.

Sementara itu para pejuang Aceh masih terus mengadakan penyerangan terhadap kedudukan pasukan-pasukan Belanda yang tersebar dipelbagai tempat. Penyerangan ini umumnya dilakukan dengan taktik gerilya karena walaupun persenjataan bagi Aceh dapat terus diselundupkan dari luar, namun jumlahnya tidak memadai bila dibandingkan dengan persenjataan Belanda. Beruntunglah para pejuang Aceh ini karena mereka lebih mengenal medan pertempurannya daripada musuh yang hanya mampu bertahan di benteng-benteng yang dibangunnya. Lebih-lebih karena rakyat pada umumnya membantu para pejuang Aceh itu. Semangat perang menghancurkan *kapke ulanda* (Belanda kafir) telah menjiwai segenap rakyat Aceh yang kuat keyakinan agama Islamnya itu. Daerah-daerah yang sering mendapat serangan lasykar Aceh antara lain ialah Luengbata, Ketapang Dua, Bukit Sibin, Kuala Gigieng, Tibang, Langkruk dan Kuta Alam. Dalam penyerbuan ke Kubu Belanda di Tunga, para pejuang Aceh mendapat kemenangan gemilang karena berhasil menewaskan Jendral Pel.

Penyerangan pasukan pejuang Aceh semakin meningkat dengan datangnya kembali Habib Abdurrachman dari Turki pada tahun 1877.⁸⁸ Dia berhasil mengadakan perundingan dengan Teuku Cik Di Tiro dan imam Leungkata di Pidie guna membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan strategis perang. Penyerangan Habib Abdurrachman terutama bertujuan untuk mengacaukan dan memperlemah pos-pos Belanda yang merupakan garis pembendung (*afsluiting linie*) yang melingkar antara Krueng Raba, Lambaroh, Uleengkarang, dan Klieng. Para pejuang Aceh juga berusaha menghambat kemajuan dan membatasi ruang gerak pasukan Belanda dengan jalan mencegat konvoi pasukan Belanda, membakar gudang senjata di Pendeti, serta pengrusakan jembatan seperti yang menghubungkan Pekan Krueng Cut dan Silang.

Medan pertempuran yang dihadapi Belanda semakin meluas sehingga semakin sulit untuk membagi kekuatan pasukannya ke tempat-tempat yang memerlukan. Teungku Cik Di Tiro menyerang kubu Belanda di Gigieng dan

88 Habib Abdurrachman az Zakir (1832-96) lahir di Hdramaut dan belajar tentang pengetahuan Islam di Mesir dan Calicut (India). Semasa muda ia berkelana di Timur Tengah dan India, juga di Eropa dan mengunjungi Italia, Perancis dan Jerman. Setelah bekerja pada Maharaja Johor, ia datang di Aceh dan mengabdikan pada Sultan Aceh. Dalam perang melawan Belanda Habib Abdurrachman memegang peranan yang tidak kecil, misalnya menjadi utusan Sultan untuk mencari bantuan dan dukungan dari Turki, A. Reid, *Contest for North Sumatra. Atjeh, the Netherlands, and Britain, 1858-1898*, hal. 81 dan hal. 128-129

raja Samalanga, Teuku Ci'Bugis, memimpin perlawanan di medan pertempuran di wilayah Aceh Besar. Pada tanggal 8 Agustus 1877 suatu pasukan Belanda yang besar jumlahnya menyerang Samalanga. Pasukan ini di pimpin oleh Kolonel Van den Heijden. Selain serangan dari darat juga datang serbuan dari arah laut dimana pasukan Belanda yang diangkut oleh kira-kira 11 buah kapal perang dan 6 buah kapal sewaan mendarat di Pengilit Baroh. Sementara itu pada malam hari secara mendadak para gerilyawan Aceh yang memang sudah mempersiapkan diri di Pengilit Tunong menyerang kedudukan Belanda di Pengilit Baroh itu. Serangan mendadak ini sempat menimbulkan kepanikan di kalangan serdadu Belanda dan pertempuran sengit tidak terelakkan. Karena taktik yang tepat itu pejoang Aceh berhasil menewaskan beberapa perwira dan sejumlah serdadu Belanda yang luka-luka berat dan ringan pun tak terhitung jumlahnya. Di pihak Aceh pun telah jatuh banyak korban walaupun jumlahnya yang tepat sukar diketahui.

Memasuki tahun 1878 kegiatan lasykar Aceh lebih luas lagi. Pertempuran terjadi antara pasukan Habib Abdurrachman dengan pasukan Belanda di Blang Ue, Peukan Badan dan Bukit Sirun. Selanjutnya meletus pertempuran di lembah Beradin, Manta Candu dan Gle Taron. Perlawanan Habib Abdurrachman cukup menyulitkan Belanda, namun Van der Heijden juga berhasil menguasai daerah-daerah pertempuran dan menduduki seperti Seunaloh, Ansen Batee, Aneu' Galong dan Montasik markas besar pasukan Habib Abdurrachman. Pada tanggal 13 Oktober 1878 Habib Abdurrachman menyerah kepada Belanda dan hal ini sedikit banyak mempengaruhi kekuatan Aceh. Sukar untuk dicari faktor yang menyebabkan pemimpin pasukan Aceh yang berani ini mau berdamai dengan Belanda. Mungkin karena kekalahannya dalam pertempuran di Longi dan karena jatuhnya pusat pertahanannya di Montasik.

Berita lain yang mempengaruhi lasykar Aceh adalah menyerahkannya Teuku Muda Baid, kepala Mukim VIII Baid. Oleh Belanda dia kemudian diberi tugas untuk memadamkan perlawanan rakyatnya yang masih terus berkobar di Baid. Setelah menyaksikan sendiri betapa semangat rakyat yang tetap tinggi walaupun pemimpinnya telah menyerah, Teuku Muda Baid berbalik memihak lagi pada rakyatnya dan meningkatkan perlawanan terhadap Belanda. Namun dalam suatu pertempuran ia tertangkap dan karena Belanda khawatir bila lepas akan menyukarkan pihaknya lagi, maka Teuku Muda Baid pun diasingkan ke Banda.

Sementara itu Teungku Cik Di Tiro masih tetap melakukan perlawanan. Daerah pertahanannya tersebar di wilayah Pidie dan Belanda tidak pernah merasa aman karena lasykar Aceh berkali-kali menyerangnya, antara lain

benteng Sigli yang diserang pada bulan April dan Mei 1878. Walaupun blokade ekonomi Belanda terhadap bandar Pidie di perketat, pengaruhnya terhadap semangat juang lasykar Aceh tidak besar. Memang dengan adanya blokade Belanda ini beras, barang-barang keperluan hidup lain serta senjata menjadi lebih sulit masuknya. Akan tetapi melalui segala macam cara para pejoang Aceh berusaha menembus blokade Belanda. Karena pengangkutan perbekalan dan alat-alat perang dari Pidie ke Aceh Besar melalui jalan pantai terhalang, maka para pejoang Aceh terpaksa mengangkutnya melalui jalan gunung yang lebih subur. Tetapi berkat bantuan rakyat kesukaran itu menjadi ringan.

Di Aceh Barat perlawanan terhadap Belanda dipimpin oleh Teuku Umar. Ia mula-mula hanya bertahan di kampung halamannya sendiri Darat, akan tetapi kemudian meluas ke Meulaboh. Ia dibantu oleh istrinya yang bernama Cut Nya' Din yang aktif dalam medan pertempuran. Perlawanan Teuku Umar ini banyak menimbulkan kesukaran di pihak Belanda, oleh karena itu Belanda berusaha sekuat tenaga untuk menaklukkannya. Pada bulan Pebruari 1878 Darat mendapat serbuan yang hebat dari pasukan Belanda yang dibantu oleh tembakan-tembakan meriam dari kapal-kapalnya. Pertempuran di pantai segera berkobar. Teuku Umar dan Cut Nya' Din beserta pasukannya berusaha mempertahankan diri dengan gigih, tetapi karena tekanan pasukan Belanda semakin hebat, terpaksa Darat ditinggalkan. Teuku Umar beserta pasukannya kemudian bergerak ke Aceh Besar dan disitu melancarkan serangan-serangan terhadap pos-pos Belanda dan memaksa Belanda meninggalkan beberapa diantara pos-posnya itu, misalnya ada di Krueng.

Memasuki tahun 1880 situasi di Aceh tetap buruk bagi Belanda. Perlawanan rakyat Aceh dapat dikatakan sebagai perjuangan rakyat semesta karena segenap lapisan masyarakat turut aktif menyumbangkan dharma baktinya. Rakyat bahu membahu dan bekerja sama dengan kaum bangsawan dan kaum ulama mempertahankan tanah airnya. Bila pada umumnya kaum bangsawan seperti para uleebalang langsung memimpin perjuangan di medan pertempuran, maka peranan kaum ulama terutama adalah membangkitkan semangat rakyat dengan terus menerus mengkhotbahkan kisah-kisah peperangan seperti *Hikayat Perang Sabil*, *Hikayat Perang Gompuni*, dan *Syair Perang Atjeh*.⁸⁹

Semangat jihat melawan Belanda semakin berkobar sebab pada setiap kesempatan karya sastra yang rupanya sengaja diciptakan untuk menumbuh-

89 A. Sartono Kartodirdjo, *Op. Cit.*, hal. 249; *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, hal. 133-134

kan semangat perjuangan selalu dibacakan oleh para alim ulama ataupun cerdik pandai yang mampu membacanya.

Taktik gerilya juga benar-benar menguntungkan Aceh. Sebab bila Belanda mengadakan tekanan yang kuat di satu tempat, maka para pejoang Aceh akan menghilang dari daerah itu dan muncul di tempat lain untuk menyerang kedudukan Belanda. Demikian juga dengan taktik sebagian besar para uleebalang; bila tekanan Belanda terlalu hebat mereka menyatakan tunduk pada Belanda, tetapi secara diam-diam sering masih terus memberikan bantuannya kepada para pejoang. Lebih-lebih daerah-daerah di pantai walaupun blokade Belanda semakin ketat, penyelundupan senjata dan perbekalan berjalan terus.

Pemerintah Hindia Belanda memahami kesulitan yang dihadapinya sebab fakta-fakta dengan jelas menunjukkan hal tersebut. Sampai awal tahun 1880 biaya yang dikeluarkan sudah mencapai 115 juta golden dan sampai akhir 1884 mencapai 150 juta gulden.⁹⁰ Berbagai cara dipikirkan agar masalah Aceh ini dapat cepat diselesaikan. Karena pejoang-pejoang Aceh masih selalu berhasil memasukkan perbekalannya melalui pantai utara maka pada bulan Agustus 1881 Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk menjalankan blokade yang ketat. Tindakan yang diambil antara lain :

1. Seluruh pantai Utara Aceh dari Ulee Lhene sampai ujung Diemant tertutup baik untuk ekspor-impor maupun untuk penangkapan ikan.
2. Pelabuhan yang terbuka namun dengan pengawasan ketat ialah Ulee Lheue, Sigli, Samalanga dan Lho' Seumawa.
3. Armada Belanda diperkuat dengan dua buah kapal lagi.⁹¹

Bagi pihak Aceh blokade Belanda ini tidak terlalu mengkhawatirkan sebab seperti telah diuraikan dimuka penyelundupan perbekalan perang masih dijalankan. Apalagi mengenai persenjataan berbagai cara dijalankan untuk mendapatkannya. Dalam medan pertempuran berusaha merebutnya dari tangan musuh yang dapat dikalahkan dan kalau ada kesempatan mencurinya. Selain itu sudah sejak lama pejoang Aceh mampu membuat senapan-senapan dan amuni sendiri dan setelah tahun 1880-an pembuatan persenjataan itu semakin ditingkatkan.⁹²

Walaupun sudah 10 tahun Belanda berperang di Aceh kekuasaannya

90 Ibid., hal. 249; *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, hal. 119; A. Reid, *Op. Cit.*, hal. 296

91 A. Sartono Kartodirdjo, *Op. Cit.*, hal. 249-250

92 A. Reid, *Op. Cit.*, hal. 192

ternyata masih lemah sekali. Pada bulan November 1883 sebuah kapal Inggris *Nisero* terdampar di pantai Teumon, Aceh Barat, Raj Teumon, Teuku Imam Muda menawan anak kapal itu dan mensita muatannya. Belanda menuntut agar awak kapal dibebaskan, akan tetapi raja Teumon menolak kalau tidak diberi uang tebusan yang tinggi. Pihak Inggris juga berusaha membebaskan warganya yang ditawan itu. Namun juga menemui kegagalan karena raja Teumon tetap pada tuntutan. Akhirnya persoalan itu dapat diselesaikan setelah tuntutan raja Teumon dipenuhi yaitu uang tebusan 100.000 dollar dan pembukaan kembali pelabuhan Teumon. Dalam peristiwa ini Teuku Umar mendapat keuntungan. Ia berhasil merebut senjata pasukan Belanda yang ditewaskan dalam perahu yang akan membawanya ke Teumon ketika ia diminta bantuannya untuk membebaskan anak buah kapal *Nisero* tersebut.

Pada tahun 1884 Sultan Muhammad Daud Syah dewasa. Dengan dukungan Mangkubumi Tuanku Hasyim dan para ulama seperti Teungku Cik Di Tiro dia mulai memimpin kesultanan Aceh yang sekarang berpusat di Keumala. Ia berseru agar perlawanan diteruskan dan untuk membeayai perlawanan ini pengumpulan harta benda digiatkan. Memang terasa oleh Belanda bahwa serangan-serangan pejoang Aceh terus meningkat. Lebih-lebih karena Belanda melakukan taktik baru yaitu memusatkan perhatiannya pada daerah-daerah yang telah dikuasainya, ialah Kotaraja dan sekitarnya yang dinamakan *Stelsel Konsentrasi*. Bentuk perlawanan baru ini berupa pengawasan wilayah seluas 50 km² sekitar ulee Lheue dan Kotaraja dengan jalan membangun 16 pos penjagaan.

Masing-masing pos itu dikelilingi oleh suatu daratan luas yang kosong tanpa pohon maupun rumah sejauh 1 km dan pos-pos itu dihubungkan dengan jaringan tilpon dengan Kotaraja. Selain dari itu Belanda makin sadar bahwa untuk menghadapi perlawanan-perlawanan rakyat yang terbesar dipelbagai daerah yang akan memayakkannya dan akan lebih banyak memakan biaya, maka kegiatan terhadap wilayah di luar Aceh Besar sedapat mungkin dibatasi. Dengan cara ini Belanda dapat melaksanakan penghematan.

Namun perlawanan di luar Aceh Besar tetap berkobar. Di daerah XXVI Mukim Teuku Asan bersama dengan para pejoang yang lain seperti Nya' Bintang dan Teuku Usen mengadakan serangan terhadap pos-pos pertahanan Belanda. Mereka juga menghadang serta menyerang pasukan patroli yang mengawasi jalan-jalan penghubung antara pos-pos itu. Di Aceh Timur perlawanannya rakyat dipimpin oleh Nya' Makam. Daerah perlawanannya meliputi wilayah Langkat dan Tamiang. Semua perlawanan itu telah menyukarkan Pemerintahan Hindia Belanda. Tambahan lagi pada tanggal 14 Juni

1886 Teuku Umar telah menyerang dan menyita kapal *Hok Canton* yang berlabuh di pantai *Rigaih* Nakhoda kapal tersebut seorang Denmark yang bernama Hansen dicurigai akan menangkapnya untuk selanjutnya menyerahkan kepada Belanda dengan upah sebesar 25.000 dollar. Memang Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan pengumuman bahwa barang siapa yang dapat menangkap Teuku Umar akan diberi hadiah yang besar. Dalam pertempuran yang terjadi nakhoda Hansen tewas dan seluruh awak kapal ditawan oleh Teuku Umar. Pasukan yang dikirim Belanda untuk membebaskan para tawanan itu menemui kegagalan. Akhirnya terpaksa Pemerintah Hindia Belanda menebus awak kapal itu dari Teuku Umar sebesar 25.000 dollar.

Gambaran pertempuran yang menyebar dipelbagai daerah membuktikan bahwa perlawanan rakyat Aceh cukup sulit untuk ditundukkan oleh Belanda dalam waktu yang singkat. Akhirnya Pemerintah Hindia Belanda menyadari bahwa penaklukan Aceh dengan kekuatan senjata saja tidak akan berhasil. Belanda menggiatkan usahanya untuk memikat pemimpin-pemimpin pejoang Aceh. Teuku Umar sendiri pada tahun 1884 menyerah kepada Belanda, tetapi karena kecewa atas perlakuan Belanda pada dirinya, ia kemudian melakukan perlawanan kembali. Belanda berusaha pula untuk mendekati Teungku Cik Di Tiro, Panglima Polem dan tokoh lainnya. Sikap keras Teungku Cik Di Tiro dan keyakinannya yang kuat dalam soal agama tidak dapat dilunakkan oleh Belanda.

Untuk menaklukkan Aceh, Belanda akhirnya menempuh jalan lain, yaitu dengan mencari rahasia kekuatan Aceh terutama yang menyangkut soal hidup sosial-budayanya. Dr. Snouck Hurgronje yang faham tentang agama Islam dan pernah mempunyai pengalaman bergaul dengan orang-orang Aceh yang naik haji di Mekah, oleh Pemerintah Belanda dipandang sebagai orang yang tepat untuk diberi tugas untuk memecahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi Belanda dalam menaklukkan Aceh.

Meskipun pada permulaannya kedatangan Snouck Hurgronje untuk menjalankan tugas di Aceh mendapat rintangan dari Gubernurnya, tetapi akhirnya dengan dukungan dari pemerintah Hindia Belanda di Batavia ia dapat masuk ke Aceh. Dengan nama samaran Abdul Gafur ia bertempat tinggal di tengah-tengah rakyat di Peukan Aceh. Dari hasil penelitian Snouck Hurgronje, terutama berdasarkan keterangan-keterangan dari surat Teungku Cik Di Tiro yang pernah ia terima, dapat diketahui bahwa Sultan Aceh sebenarnya tidak dapat berbuat apa-apa apabila tidak mendapat persetujuan dari kepala-kepala bawahannya. Dengan demikian meskipun telah menundukkan Sultan tidak berarti bahwa kepala-kepala daerah dengan sendirinya akan tunduk. Dijelaskan pula bahwa pengaruh ulama-ulama pada rakyat

sangat kuat. Oleh karenanya akan sulit untuk menundukkan perlawanan rakyat Aceh yang kuat keyakinan agamanya itu.

Dari tulisan Snouck hurgronje. Pemerintah Hindia Belanda juga mendapat petunjuk, bahwa satu-satunya jalan yang baik untuk ditempuh dan akan membawa hasil adalah dengan jalan memecah-belah kekuatan yang ada dalam masyarakat Aceh. Kaum ulama yang memimpin perlawanan harus dihadapi dengan kekuatan senjata. Di samping itu Belanda akan membuka kesempatan bagi bangsawan Aceh dan anak-anaknya untuk masuk dalam korps pamong praja dalam pemerintahan kolonial. Golongan terakhir ini oleh Belanda diharapkan akan terikat pada Belanda dan menjadi terpisah dari golongan ulama. Sementara itu perlawanan rakyat Aceh di daerah-daerah terus berlangsung. Teungku Cik Di Tiro Muhammad Saman telah meninggal pada permulaan tahun 1891 dan perjuangannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Teungku Ma' Amin Di Tiro. Suatu kejadian yang tidak terduga sebelumnya adalah apa yang dilakukan oleh Teungku Umar dalam bulan Agustus 1893. Pada waktu itu ia telah mengajukan pernyataan tunduk kepada Belanda. Dengan menyatakan sumpah setia di hadapan Gubernur yang merangkap sebagai Panglima Belanda di Aceh, Teungku Umar diterima masuk dalam dinas militer Belanda. Gelar Teuku Johan Pahlawan telah diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepadanya. Ia diizinkan membentuk sebuah legiun yang berkekuatan 250 orang dan diberi tugas mengamankan daerah Aceh Besar dan sekitarnya dari gangguan pejoang-pejoang Aceh.

Selama kerja sama dengan Teuku Umar, Belanda memang banyak mendapat keuntungan. Banyak pos-pos pertahanan para pejoang Aceh yang dapat direbut oleh Belanda, baik pos-pos yang termasuk dalam Sagi XXV Mukim, Sagi XXVI Mukim ataupun beberapa pos yang berada di Sagi XXII Mukim. Meskipun demikian kecurigaan tetap ada dikalangan pembesar-pembesar pemerintah Hindia Belanda terhadap Teuku Umar. Di lain pihak dikalangan para pejoang Aceh terdapat tandatanya mengenai sikap Teuku Umar tersebut. Cut Nya'Din, isterinya yang pada waktu mengadakan perlawanan selalu mendampingi suaminya, mulai khawatir dan menganjurkan suaminya agar segera merubah sikap dan mengadakan perlawanan lagi terhadap Belanda. Dalam pada itu Teuku Umar tidak sedikit mendapat tekanan-tekanan perasaan selama bekerjasama dengan Belanda. Sikap curiga dan hinaan dari sementara pembesar Belanda terhadap dirinya maupun keluarganya menyebabkan Teuku Umar pada tanggal 30 Maret 1896 terang-terangan menyatakan keluar dari dinas militer Belanda. Ia menemui lagi teman-teman seperjuangan seperti Panglima Polem, ulama-ulama di Tiro dan uleebalang yang juga telah menghentikan kerjasama dengan Belanda seperti : Teuku

Usen, Teuku Mahmud, Teuku Cut Muhammad dan beberapa lainnya.

Menjelang akhir abad 19 perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda tidak menyurut walaupun sudah berjalan sekitar 20 tahun — Memang tidak sedikit korban yang gugur dan kerugian harta benda juga tidak ternilai. Demikian juga dipihak musuh, jumlah korban yang jatuh mencapai jumlah ribuan. Pada hal musuh mengira bahwa dalam waktu singkat negara Aceh yang strategis letaknya itu, yang pada abad 19 kelihatan merosot kekuasaannya akan dapat dikuasai dalam waktu singkat. Karena dengan segala taktik dan strategi militer Pemerintah Hindia Belanda menemui kegagalan maka nasehat seorang ahli ilmu sosial terpaksa dituruti.

3. *Akhir Perang*

Sejak bulan Mei 1898 Kolonel J.B. van Heutz menjadi Gubernur Sipil dan Militer Aceh menggantikan van Vliet.

Rencana pertamanya adalah menyerang Pidie sebab ternyata para pemimpin perjuangan Aceh Sultan, Teuku Umar dan Panglima Polem — berada di wilayah tersebut. Pasukan Panglima Polem dan Teuku Umar sering mengadakan penyerangan terhadap pos-pos militer Belanda dan pasukan-pasukan patrolinya. Selain itu mereka juga mengadakan serangan ke sasaran-sasaran yang ada di Aceh Besar. Sehingga tidak sedikit kerugian yang diderita musuh. Agaknya musuh mulai menjalankan taktik baru dan tekanan-tekanannya terasa makin kuat. Lebih-lebih karena sekarang ternyata tidak hanya pasukan Belanda saja yang menyerang, tetapi juga dikerahkan pasukan orang Indonesia yang dipimpin oleh opsir-opsir Belanda yang pandai berbahasa Aceh. Pasukan ini disebut Korp Marechausse. Karena desakan serbuan musuh yang tidak dapat ditahan, terpaksa beberapa uleebalang menyerah. Sedang Teuku Umar menyingkir ke Aceh Barat dan Panglima Polem ke Aceh Timur.

Seperti biasanya pejoang Aceh tidak menjadi gentar dan meneruskan gerakan gerilyanya. Tanah Gayo serta Alas dipakai sebagai basis karena mempunyai tempat-tempat perlindungan yang baik. Setelah tiba di wilayah Aceh Barat, Teuku Umar mengkonsolidasi diri dan mempersiapkan suatu penyerangan besar-besaran ke Meulaboh. Rupanya musuh bisa mencium rencana tersebut. Maka pada tanggal 11 Februari 1899 Belanda datang menyerang markas pertahanan Teuku Umar dan gugurlah pemimpin Aceh yang sejak lama dikejar-kejar Belanda itu. Pasukan musuh juga mendesak kedudukan pejoang Aceh di pantai Utara dan Timur. Teuku Tapa, dari Gayo terus melakukan perang gerilya dengan menyerang pos-pos militer Belanda dan menguasai daerah-daerah yang sering dilalui pasukan musuh. Oleh karena itu

beberapa pertempuran terjadi seperti di Idi Cut, Teupin Btee dan Seuneboh.

Sementara itu Panglima Polim dan Sultan masih tetap mengadakan perlawanan dengan cara berpindah-pindah tempat untuk menghindari nasib buruk seperti yang dialami oleh Teuku Umar. Mengingat Van Heutz sedang berusaha untuk menangkap kedua pemimpin perjuangan tersebut. Ketika mereka sedang berada di Kutasawang sejumlah pasukan musuh datang menyerang sehingga pertempuran pun meletus di tempat-tempat lain seperti Pensangan, Geudong dan Keureutue karena pasukan Belanda berusaha hendak menguasai daerah-daerah tersebut.

Sultan dan Panglima Polim kemudian memindahkan pusat pertahanannya ke Batee Ilie. Rupanya pusat kedudukan pejoang Aceh ini dapat diketahui oleh musuh sebab pada awal Pebruari 1901 datang serangan dari pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal van Heutz sendiri. Karena besarnya jumlah pasukan musuh maka Sultan dan pasukannya terdesak dan terpaksa meninggalkan benteng pertahanannya setelah bertempur mati-matian selama tiga hari tiga malam. Sultan dan Panglima Polem dengan sisa-sisa pasukannya terpaksa menyingkir.

Suatu peristiwa yang tidak terduga telah terjadi. Isteri Sultan Pocut Murong tertangkap oleh musuh. Tambahan lagi tekanan-tekanan pihak Belanda terasa semakin berat akhirnya Sultan Alaudin Muhammad Daud Syah terpaksa menyerah pada Belanda dan upacaranya diadakan pada tanggal 20 Januari 1903.

Nasib buruk yang menimpa Sultan Aceh pun dialami oleh Panglima Polem. Isteri, Ibu serta anak-anaknya berhasil ditangkap oleh Belanda. Di samping itu serangan pasukan Belanda juga datang terus menerus. Karena keadaan sudah mendesak, maka Panglima Polem dengan sisa pasukannya yang berjumlah 150 orang terpaksa menyerah kepada Belanda pada tanggal 6 September 1903. Dengan kejadian ini maka perlawanan rakyat Aceh menjadi semakin lemah dan membuka jalan bagi Pemerintah Hindia Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di seluruh wilayah kesultanan Aceh. Hal ini tidaklah berarti bahwa perjuangan rakyat menentang kekuasaan Belanda telah lenyap sama sekali. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam abad 20 perlawanan-perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah kolonial Belanda masih sering terjadi.

H. TANAH BATAK

1. Pendahuluan

Perang di tanah Batak berlangsung kurang lebih 29 tahun, dimulai dari

tahun 1878 sampai dengan tahun 1907. Peperangan ini disebut juga Perang Batak atau Perang Si Singa Mangaraja, di bawah pimpinan Si Singa Mangaraja XII, yaitu "raja" terakhir dari tanah Batak, putera dari Si Singa Mangaraja XI. Perlawanan ditujukan untuk menentang kekuasaan pemerintah Hindia Belanda yang akan menguasai daerah Batak pada abad ke-19.

Tanah Batak yang langsung dipimpin oleh Si Singa Mangaraja XII ini berpusat di daerah Toba dan sekitarnya, di mana sampai dengan pertengahan abad ke 19 dikenal sebagai daerah yang masih bebas dari kekuasaan Belanda. Suku bangsa Batak terdiri dari beberapa sub suku, yaitu Batak Toba, Mandailing/Angkola, yang pada umumnya mendiami daerah Tapanuli, Batak Karo, Batak Simalungun mendiami daerah Kabupaten Simalungun dan yang terakhir Batak Pakpaa/Dairi mendiami Kabupaten Dairi.⁹³

Struktur masyarakat di sini didasarkan pada bentuk kesatuan ikatan-ikatan kampung atau *huta* yang di dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan agama, berdiri sendiri-sendiri. Tiap kesaatuan huta didiami oleh satu ikatan kekerabatan yang disebut *marga*. Yang memerintah dalam satu huta tersebut *Raja Huta*, yaitu pendiri kampung atau turunannya. Selain itu terdapat pula *horja*, yang merupakan gabungan dari beberapa huta. Kepala dari horja dipilih oleh *Raja Doli*. Di atas horja, terdapat bius, yaitu gabungan dari beberapa horja.⁹⁴ Dari beberapa bius terbentuklah kesatuan wilayah yang lebih luas lagi, yaitu kesatuan negeri yang dipimpin oleh Si Singa Mangaraja. Walaupun demikian Si Singa Mangaraja tidak mempunyai kekuasaan mutlak. Pemerintahan di tiap bius tetap berada di tangan Raja Bius sendiri. Di tiap bius Si Singa Mangaraja menempatkan wakilnya yaitu *Raja Naopat* yang terdiri dari empat orang dan langsung dipilih oleh Si Singa Mangaraja dari marga-marga tertentu. Pada kenyataannya Raja Naopat tidak mempunyai fungsi dalam pemerintahan secara langsung, melainkan hanya mengawasi pelaksanaan adat dan hukum yang berlaku, melaporkan segala keadaan masyarakat pada Si Singa Mangaraja, kemudian mempersiapkan peralatan apabila Si Singa Mangaraja akan mengadakan kunjungan dan menyampaikan pesan-pesannya pada masyarakat.⁹⁵ Oleh karena itu Si Singa Mangaraja lebih tepat disebut sebagai pemimpin tradisional dari pada disebut seorang raja.

93 E.K. Siahaan Cs, *Laporan Survei : Monografi Kebudayaan Tapanuli-Utara*, Departemen P dan K, 1979, hal. 1

94 *Ibid.*, hal. 112

95 O.L. Napitupulu, *Perang Batak : Perang Sisingamangaradja*, Djakarta, Jajasan Pahlawan Nasional Sisingamangaradja, 1972, hal. 113-114

Di samping itu masyarakat Batak memandang Si Singa Mangaraja tidak hanya sebagai pemimpin politik saja, tetapi juga sebagai seorang "raja" yang bersifat "Illahi", yang memiliki kekuatan karismatik yang dapat memberikan keselamatan, perlindungan dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Hal ini sesuai dengan kata-kata simbolis yang tertulis pada sebuah materai (cap) peninggalan Si Singa Mangaraja XII yang antara lain berbunyi, "Aku, pembahu keselamatan; Si Singa Mangaraja XII yang bertempat tinggal di Bakkarra."⁹⁶ Dengan adanya kepercayaan akan kepemimpinannya yang demikian itu maka masyarakat Batak yang terdiri dari beberapa marga dapat disatukan dalam satu ikatan negeri.

Pada masa kepemimpinan Si Singa Mangaraja XI, struktur kehidupan masyarakat Batak tidak mengalami perubahan penting, segala pertentangan dan ketegangan dalam lingkungan warga masyarakat Batak dapat diatasi dengan baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya tetap terjamin. Sebagai masyarakat yang masih hidup dalam alam tradisional, maka kehendak untuk mempertahankan tradisi-tradisi yang berlaku pada lingkungan hidupnya besar sekali, sebaliknya kecenderungan untuk menolak pengaruh dari luar yang akan mengganggu tradisi itu besar pula. Keadaan ini tidak dipertahankan karena pemerintah kolonial Belanda selalu berusaha memperluas daerah kekuasaannya. Pada abad ke 17 VOC memang telah melakukan kegiatannya di pantai barat Sumatra, tetapi masih terbatas pada hubungan perdagangan di pelabuhan-pelabuhan tertentu saja, seperti Padang, Barus, Sibolga, dan lain-lainnya. Sedangkan hubungan dengan daerah-daerah pedalaman boleh dikatakan tidak ada. Kemudian sejak puluhan kedua awal abad ke 19, pemerintah Hindia Belanda berkali-kali mengirimkan ekspedisi militernya ke berbagai daerah di Sumatra untuk melakukan penaklukan dan pendudukan, serta membentuk pemerintahan pamong praja di sana. Sekitar tahun 1819 sampai dengan tahun 1870, daerah Padang (Sumatra Barat), Bengkulu, sebagian daerah Lampung, Palembang, Jambi, Rokan, Siak dan Deli, satu persatu diduduki setelah bertempur dengan rakyat setempat. Perang Padri (1821 — 1837) banyak mempengaruhi daerah-daerah yang diduduki keluarga Batak di sebelah utara daerah Minangkabau. Beberapa daerah turut terlibat dalam pertempuran-pertempuran itu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehubungan dengan pertempuran ini, yang menggores hati masyarakat Batak adalah peristiwa terbunuhnya Tuan na Balon (Si Singa Mangaraja X) yaitu ayah dari Si Singa Mangaraja XI. Hal ini menjadikan

96 A. Sartono Kartodirdjo (Editor), *Sejarah Perlawanan-Perlawanan Terhadap Kolonialisme*, Pusat Sejarah ABRI, 1973, hal. 270, dan seterusnya.

peringatan bagi rakyat Batak untuk berhati-hati terhadap masuknya penjajah Belanda ke dalam daerahnya. Setelah Perang Padri berakhir, pasukan Belanda bergerak menduduki daerah-daerah di sebelah utara Sumatra Barat, seperti Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sipirok, Tapanuli dan sekitarnya. Terjadilah pendudukan demi pendudukan disusul dengan pembentukan daerah-daerah keresidenan sebagai wakil penguasa pemerintah setempat. Dalam pembentukan keresidenan Tapanuli, daerah Batak yang ada di sebelah utara tempat itu dimasukkan ke dalam wilayahnya, sekalipun belum dikuasainya. Demikian pula daerah Silindung yang terletak di sebelah utara Sipirok dianggap telah menjadi wilayahnya karena pada tahun 1840 ada beberapa kepala *huta* dari daerah ini yang telah berjanji tunduk kepada Belanda walaupun daerahnya belum dijadikan daerah pamong praja pemerintah kolonial. Setelah daerah Tapanuli dan Sipirok dikuasai Belanda, maka terbukalah jalan menuju ke daerah Silindung dan Toba, sehingga kedaulatan tanah Batak mulai terancam.

Sementara itu pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1840 mengirimkan F. Junghun pada tahun 1843 mengirim Von Kessel untuk menyelidiki keadaan daerah pedalaman Batak. Hasil-hasil penyelidikannya ternyata mendorong usaha untuk penyebaran agama Kristen selanjutnya. Proses Islamisasi yang telah terjadi tidak dapat meluas sampai ke daerah pedalaman sekalipun daerah Batak diapit oleh dua daerah Islam yang kuat, yaitu Aceh dan Minangkabau. Hal ini dikarenakan masyarakat Batak sebagian besar masih menganut kepercayaan tradisional. Hanya di daerah-daerah yang berdekatan dengan daerah Aceh dan Minangkabau proses Islamisasi dapat berhasil dengan baik. Oleh sebab itu daerah Batak dianggap sebagai tempat yang baik untuk penyebaran agama Kristen, di samping juga sebagai daerah yang harus ditundukkan Belanda. Maka terjalinlah kerja sama yang erat antara kedua usaha ini.

Untuk kepentingan penyebaran agama Kristen, Dr. N. van der Tuuk dikirim ke daerah Batak. Pada tahun 1849 ia mulai bertugas di Barus. Dari sini ia berusaha menyusup ke daerah Toba. Kedatangannya disambut oleh masyarakat Toba dengan kebencian, sehingga ia hampir terbunuh oleh rakyat Batak. Dengan menipu sebagai keluarga Si Singa Mangaraja X yang tewas dalam Perang Padri, yang diperkuat oleh Raja Lumbung, seorang kepala salah satu *huta*, maka ia dapat membebaskan diri dari usaha pembunuhan tersebut, bahkan pada tahun 1853 berhasil diterima oleh Si Singa Mangaraja XI di Bakkara. Sejak tahun 1860 misi Kristen mulai banyak memasuki daerah Silindung dan Toba, pos-pos zending juga mulai berdiri di daerah tersebut. Sejalan dengan itu pemerintah Belanda mengerahkan ekspedisi-

ekspedisi militernya ke daerah Barus dan Singkel dan kemudian memasuki daerah pedalaman dan daerah Aceh.

Dalam keadaan demikian itu Si Singa Mangaraja XI meninggal dunia dan diganti oleh salah seorang puteranya Patuan Bosar Ompu Pulo Batu, dengan gelar Si Singa Mangaraja XII. Si Singa Mangaraja XII menganggap bahwa perluasan agama Kristen akan membahayakan tanah Batak dan menggoyahkan kedudukannya. Dengan banyaknya rakyat yang menganut agama baru ini, maka dikhawatirkan hubungan tradisionilnya dengan pimpinan negeri itu akan terputus dan ini berarti akan merobohkan struktur tradisionil dan kesatuan negeri yang telah lama ada. Secara ekonomis dan politis hubungan antara daerah-daerah dengan pusat akan runtuh. Oleh karena itu sekitar tahun 1877 ia mengadakan kampanye keliling daerah untuk mengajak rakyat bersama-sama mengusir zending-zending Kristen dan mencegah kegiatan mereka. Maka terjadilah penyerangan terhadap pos-pos zending, pengrusakan-pengrusakan ataupun pembakaran-pembakaran rumah di beberapa tempat. Sementara itu terdengar desas-desus bahwa Si Singa Mangaraja XII dengan bantuan pejuang-pejuang Aceh merencanakan penyerangan ke zending di Silindung, dan telah mempersenjatai rakyatnya dengan 50 pucuk senjata. Hal ini akhirnya terdengar oleh garnisun militer Belanda di Sibolga, sehingga pada tanggal 8 Januari 1878 tentara di pos Sibolga diperintahkan memasuki daerah Silindung dan mengadakan persiapan untuk menghadapi Si Singa Mangaraja XII serta melindungi penduduk yang beragama Kristen. Masuknya pasukan militer Belanda ke Silindung segera dijawab Si Singa Mangaraja XII dengan pernyataan perang. Maka pada tahun itu juga meletuslah pertempuran di Toba Silindung.

2. Jalannya Perang.

Untuk memperkuat pasukan Belanda di Silindung, pada tanggal 1 Februari 1878 kolone militer Belanda diberangkatkan lagi dari Sibolga ke pedalaman Silindung, di bawah Kapten Scheltens. Pasukan bantuan ini terdiri dari 2 orang opsir, 25 orang prajurit Eropa, dan 35 orang prajurit pribumi, satu mortir dengan perlengkapannya, petugas-petugas kesehatan dan 150 orang kuli sebagai pengangkut perbekalan. Setelah melalui medan yang cukup sulit, pada tanggal 6 Pebruari mereka sampai di pos zending yang pertama di Pea Raja. Kepala-kepala kampung setempat segera dikumpulkan dan bergerak menuju Sipoholon dengan tujuan menduduki Bahal Batu.

Dalam menghadapi serangan Belanda, rakyat Batak memiliki dua macam benteng pertahanan, yaitu benteng alam dan benteng buatan. Benteng alam terletak di dataran tinggi Toba dan Silindung, terdiri dari pegunungan

baik yang berhutan lebat maupun yang gundul, serta banyak mempunyai jurang-jurang yang curam dan terjal, padang-padang lalang, tanah-tanah becek, sungai-sungai yang deras dan dalam. Sedangkan benteng yang mereka buat sendiri berupa perbentengan kampung. Tiap kelompok kampung berbentuk empat persegi dikelilingi oleh pagar tembok yang terbuat dari tanah dan batu. Di luar tembok ditanami bambu berduri dan di sebelah luarnya lagi diberi selokan yang dalam. Pintu masuk hanya beberapa buah dengan ukuran yang sempit, dan dapat dibuka serta ditutup dengan alat pengangkat. Rumah-rumah penduduk berbentuk rumah panggung dan berada di bagian dalam tembok itu. Sedangkan sawah ladang berada di bagian luar tembok.

Pada waktu itu Bahal Batu telah mempunyai sistem perbentengan buatan sendiri. Ketika Si Singa Mangaraja XII mendengar bahwa pasukan Belanda telah sampai di Bahal Batu, ia segera ke Balige untuk mengumpulkan rakyat dan menyusun kekuatan menghadapi musuh. Kira-kira bersama 700 orang pasukannya Si Singa Mangaraja segera menyerang kubu-kubu pertahanan musuh. Pihak Belanda segera membalas serangan ini, dan meletuslah pertempuran sengit di Bahal Batu pada bulan Pebruari 1878. Persenjataan yang kurang seimbang antara pihak Si Singa Mangaraja XII dengan pihak Belanda menyebabkan keadaan pasukan Si Singa Mangaraja XII kurang menguntungkan. Sebagian besar pasukan Si Singa Mangaraja XII hanya menggunakan tombak, sedangkan pihak lawan mempergunakan persenjataan yang lengkap. Si Singa Mangaraja XII segera menarik mundur pasukannya untuk sementara.

Pada tanggal 7 Maret 1878 pihak Belanda mendapat bantuan lagi sebanyak 2 kolone militer di bawah pimpinan umum Letnan Kolonel F.L. Engel. Kolone ini disertai juga oleh residen Sibolga dan pendeta Nommensen. Pertempuran terus merambat ke daerah sekitar Bahal Batu. Dalam suatu pertempuran di Butar, seorang pejuang Batak berhasil menembak jatuh seorang serdadu Belanda, sehingga mati seketika itu. Belanda kemudian mengadakan pembalasan dengan membakar kampung-kampung yang berada di sekitarnya. Tembok setinggi 9 a 10 m yang mengelilingi kampung Butar menimbulkan kesulitan bagi pasukan Belanda untuk masuk. Pintu gapurnya juga tidak terbuka oleh lontaran granat. Akhirnya dengan mempergunakan balok besar, pintu gapura berhasil didobrak dan pasukan Belanda terus menerobos memasuki bagian dalam benteng. Benteng ternyata telah kosong, hanya tinggal beberapa mayat rakyat Batak yang gugur serta sejumlah ternak. Ternak ini segera dirampas dan kepala kampung Butar dijadikan tawanan.

Kampung Lobu Siregar dan Upu ni Srabar menjadi kancah pertempuran pula pada bulan Maret itu. Kampung Upu ni Srabar dibatasi dengan jurang

SEJARAH NASIONAL INT

Perpustakaan Dir
Jenderal Kebu

959.8
MAR
S

IV